PEMERINTAH
KOTA MAKASSAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025

Pemerintah Kota Makassar



Makassar **MULIA**
Unggul, Inklusif,
Aman dan Berkelanjutan

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025

KOTA MAKASSAR
TAHUN 2026

WALI KOTA MAKASSAR

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terdapat perubahan mendasar dalam penyusunan LPPD, LKPJ, RLPPD, serta pelaksanaan EPPD. Perubahan tersebut mencakup format, substansi, dan sistem pelaporan yang kini dilakukan secara elektronik, tujuannya untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi proses evaluasi, serta memperkuat sistem pemantauan terhadap implementasi kebijakan otonomi daerah secara nasional.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2025 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Kota Makassar berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Makassar.

Melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini diharapkan seluruh *Stakeholder* dapat mengetahui perkembangan dan pencapaian hasil

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pelaksanaan Program Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar sehingga masyarakat dapat merasakn dan menikmati hasil-hail pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar.

Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang telah membantu dan membina kami dan atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini sehingga program-program pembangunan yang telah direncanakan dapat terlaksana dan dapat kami susun sebagai mana mestinya dan terima kasih juga kepada Tim Penyusun LPPD Kota Makassar dan semua Perangkat Daerah (PD) yang telah memberikan dukungan, bantuan dan kerja samanya dalam penyusunan laporan ini.

Semoga Kota Makassar menjadi Makassar UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN serta senantiasa mendapat Perlindungan, Kekuatan, Petunjuk, dan Ridho Allah SWT, Aamin.

Makassar, 31 Maret 2026

WALI KOTA MAKSSAR,



MUNAFRI ARIFUDDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI :

Judul .....
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Gambar ix
Daftar Grafik ix

BAB I : PENDAHULUAN 1

.1. Latar Belakang 1

.1.1. Penjelasan Umum 2

A Undang-undang Pembentukan Daerah 3
B Data Geografis Wilayah 3
C Jumlah Penduduk 18
D Jumlah Kecamatan 21
E Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah 26
F Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 34

.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah 44

G Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah 44
H Visi dan Misi Kepala Daerah 69
I Program Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah 73
J Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan 92

.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 131

BAB II : CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 135

.2.1. Capaian Kinerja Makro 135
2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia 137
2.1.2. Persentase Penduduk Miskin 138
2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka 140
2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi 141
2.1.5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 143
2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 144

.2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 145
2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)..... 148
2.2.2. Indikator Kinerja Kunci (Outcome) untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan 166

.2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah 170
2.3.1 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja 171
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dan Tahun Sebelumnya Baseline Tahun 2024 178
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah 401
2.3.4 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 410
2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai 425

BAB III : CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN 444

BAB IV : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 446

.4.1. Urusan Pendidikan 446
4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar 446
4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 446
4.1.3. Realisasi 447
4.1.4. Alokasi Anggaran 448
4.1.5. Dukungan Personil 448
4.1.6. Permasalahan dan Solusi 448
.4.2. Urusan Kesehatan 449
4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar 449
4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 449
4.2.3. Realisasi 450
4.2.4. Alokasi Anggaran 463
4.2.5. Dukungan Personil 465
4.2.6. Permasalahan dan Solusi 465
.4.3. Urusan Pekerjaan Umum 466
4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar 466
4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 467
4.3.3. Realisasi 467
4.3.4. Alokasi Anggaran 470
4.3.5. Dukungan Personil 470
4.3.6. Permasalahan dan Solusi 471
.4.4. Urusan Perumahan Rakyat 471
4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar 471
4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 472
4.4.3. Realisasi 472
4.4.4. Alokasi Anggaran 476
4.4.5. Dukungan Personil 476
4.4.6. Permasalahan dan Solusi 477
.4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 479
Satuan Polisi Pamong Praja 479
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar 479
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 479
4.5.3. Alokasi Anggaran 479
4.5.4. Dukungan Personil 480
4.5.5. Realisasi 480
4.5.6. Permasalahan dan Solusi 482

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 483
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar 483
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 484
4.5.3. Alokasi Anggaran 485
4.5.4. Dukungan Personil 486
4.5.5. Realisasi 487
4.5.6. Permasalahan dan Solusi 488

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 489
4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar 489
4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 489
4.5.3. Alokasi Anggaran 590
4.5.4. Dukungan Personil 590
4.5.5. Realisasi 490
4.5.6. Permasalahan dan Solusi 499

.4.6. Urusan Sosial 500
4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar 500
4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal 500
4.6.3. Alokasi Anggaran 501
4.6.4. Dukungan Personil 501

4.6.5. Realisasi 502
4.6.6. Permasalahan dan Solusi 504
.4.7. Program dan Kegiatan 506
4.7.1 Urusan Pendidikan 506
4.7.2 Urusan Kesehatan 507
4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum 508
4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat 509
4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 510
Satuan Polisi Pamong Praja 510
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 510
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 511
4.7.6 Urusan Sosial 513

BAB V : PENUTUP 514

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2025	4
Tabel I.2	Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk Kota Makassar Tahun 2025	19
Tabel I.3	Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan Pendidikan Tahun 2025	19
Tabel I.4	Jumlah Penduduk Kota Makassar berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025	20
Tabel I.5	Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Makasssar Tahun 2025	20
Tabel I.6	Daftar Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Tahun 2025	21
Tabel I.7	Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar	22
Tabel I.8	Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah	28
Tabel I.9	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar Menurut Jabatan Tahun 2025	32
Tabel I.10	Jumlah Pegawai Kota Makassar Berdasarkan Golongan Kota Makassar Tahun 2025	33
Tabel I.11	Jumlah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu Kota Makassar Tahun 2025	34
Tabel I.12	Realisasi Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan APBD Tahun Anggaran 2025	35
Tabel I.13	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025	36
Tabel I.14	Realisasi Pendapatan Transfer Penerimaan Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025	37
Tabel I.15	Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya Tahun Anggaran 2025	38
Tabel I.16	Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2025	39
Tabel I.17	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025	39
Tabel I.18	Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar *(an-audit)* Tahun Anggaran 2025	42
Tabel I.19	Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025	43
Tabel I.20	Penjelasan Visi RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kota Makassar	69
Tabel I.21	Penjelasan Visi, Misi, RPJMD Tahun 2025 - 2029 Kota Makassar	71
Tabel I.22	Program Prioritas RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030	73
Tabel I.23	Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RKPD Kota Makassar Tahun 2025	92
Tabel I.24	Jenis Pelayanan, Indikator Pencapaian dan Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar Tahun 2025	132
Tabel II.1	Indikator Kinerja Makro Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	137
Tabel II.2	Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	138
Tabel II.3	IPM dan Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	138
Tabel II.4	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	140
Tabel II.5	TPT di Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	141
Tabel II.6	Pertumbuhan Ekonomi 2023, 2024 – 2025	142
Tabel II.7	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Makassar (persen), 2024 – 2025	143
Tabel II.8	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah) Kota Makassar Tahun 2024 – 2025	144
Tabel II.9	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) 2024 – 2025	145
Tabel II.10	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Tahun 2025	148
Tabel II.11	Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Tahun 2025	166
Tabel II.12	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan	171
Tabel II.13	Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan	174
Tabel II.14	Perbandingan Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 dengan 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja	179
Tabel II.15	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	211
Tabel II.16	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	212
Tabel II.17	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor	213
Tabel II.18	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	215
Tabel II.19	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan UMKM	217
Tabel II.20	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2025	218
Tabel II.21	Capaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2025	219
Tabel II.22	Analisis Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	220
Tabel II.23	Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja	223
Tabel II.24	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	225
Tabel II.25	Analisis Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	227
Tabel II.26	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	229
Tabel II.27	Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	231
Tabel II.28	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	223
Tabel II.29	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2025	234
Tabel II.30	Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	234
Tabel II.31	Perbandingan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Terhadap 2024 dan 2023	235
Tabel II.32	Capaian Sasaran Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	238
Tabel II.33	Capaian Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	239

Tabel II.34 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 241
Tabel II.35 Analisis Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 244
Tabel II.36 Analisis Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 247
Tabel II.37 Analisis Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 250
Tabel II.38 Analisis Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan 252
Tabel II.39 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar 254
Tabel II.40 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 255
Tabel II.41 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal 256
Tabel II.42 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 258
Tabel II.43 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan 260
Tabel II.44 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan 261
Tabel II.45 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 265
Tabel II.46 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pembinaan Perpustakaan 267
Tabel II.47 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Manusia Tahun 2025 269
Tabel II.48 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan 270
Tabel II.49 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat 275
Tabel II.50 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman 276
Tabel II.51 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 277
Tabel II.52 Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja 279
Tabel II.53 Capaian Indikator Sasaran Tersediannya Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegarsi 281
Tabel II.54 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggara Jalan 283
Tabel II.55 Perbandingan Capaian Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 287
Tabel II.56 Analis Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 287
Tabel II.57 Analis Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 289
Tabel II.58 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 291
Tabel II.59 Annalisis Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) 293
Tabel II.60 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 294
Tabel II.61 Analisis Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 296
Tabel II.62 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.. 300
Tabel II.63 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase..... 302
Tabel II.64 Analisis Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 303
Tabel II.65 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung 304
Tabel II.66 Analisis Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung 305
Tabel II.67 Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 307
Tabel II.68 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 308
Tabel II.69 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 309
Tabel II.70 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Penguasaan IPTEK 311
Tabel II.71 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualntitas Inovasi di Seluruh Bidang Pembangunan. 312
Tabel II.72 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan 314
Tabel II.73 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 315
Tabel II.74 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya 319
Tabel II.75 Analisis Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan 320
Tabel II.76 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Kesenian Tradisional 322
Tabel II.77 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Kesenian tradisional 323
Tabel II.78 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif 324
Tabel II.79 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual 325
Tabel II.80 Analisis Kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual 326
Tabel II.81 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah 329
Tabel II.82 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 330
Tabel II.83 Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 332
Tabel II.84 Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggara Pengawasan 334
Tabel II.85 Analisis Kinerja Program Penyelenggara Pengawasan 335
Tabel II.86 Analisis Kinerja Program Penyelenggara Pengawasan 338
Tabel II.87 Analisis Kinerja Program Kepegawaiaan Daerah 341
Tabel II.88 Analisis Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 345
Tabel II.89 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat 347
Tabel II.90 Analisis Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 349
Tabel II.91 Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan 350
Tabel II.92 Perbandingan Capaian Kinerja 351
Tabel II.93 Tingkat Kemajuan Capaian dengan Renstra 352
Tabel II.94 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 352
Tabel II.95 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Toleransi dalam Masyarakat 353
Tabel II.96 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program 354
Tabel II.97 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program 357
Tabel II.98 Capaian Indikator Sasaran Menurunnya Ketimpangan Gender 358

Tabel II.99 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program 359
Tabel II.100 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program 361
Tabel II.101 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak 362
Tabel II.102 Perbandingan CApaian Kinerja dan Anggaran Program 363
Tabel II.103 Perbandaingan Capaian Kinerja dan Anggaran Program 365
Tabel II.104 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olah Raga 367
Tabel II.105 Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 368
Tabel II.106 Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 370
Tabel II.107 Capaian Indikator Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan 371
Tabel II.108 Analisis Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 373
Tabel II.109 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas 374
Tabel II.110 Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja 375
Tabel II.111 Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Rehabilitasi Sosial 377
Tabel II.112 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup 379
Tabel II.113 Analis Kinerja Program 381
Tabel II.114 Analis Kinerja Program 383
Tabel II.115 Analis Kinerja Program 385
Tabel II.116 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 387
Tabel II.117 Perbandingan Capaian Kinerja 388
Tabel II.118 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan 389
Tabel II.119 Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim 390
Tabel II.120 Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Penanggulangan Bencana 392
Tabel II.121 Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 394
Tabel II.122 Analis Kinerja Program 397
Tabel II.123 Analis Capaian Kinerja Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 399
Tabel II.124 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah 401
Tabel II.125 Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau realisasi secara nasional Tahun 2025 406
Tabel II.126 Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja 410
Tabel II.127 Perbandingan Capaian Kinerja dan Analis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya 426
Tabel IV.1 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 447
Tabel IV.2 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 447
Tabel IV.3 Keadaan ASN Atau Guru PNS dan Guru Swasta yang mendukung kegiatan Penerapan SPM pada Bidang Urusan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 448
Tabel IV.4 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Makassar..... 449
Tabel IV.5 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Kota Makassar Triwulan IV Tahun 2025. 450
Tabel IV.6 Program dan Kegiatan Pada Bidang Urusan KesehatanKota Makassar Tahun 2025 463
Tabel IV.7 Keadaan ASN Pelaksana SPM pada Bidang Urusan Kesehatan Kota Makassar Tahun 2025 465
Tabel IV.8 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan UmumKota Makassar 467
Tabel IV.9 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan UmumKota Makassar Tahun 2025 467
Tabel IV.10 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan UmumKota Makassar Tahun 2025 470
Tabel IV.11 Keadaan ASN Pelaksana SPM pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025 470
Tabel IV.12 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Makassar 472
Tabel IV.13 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Kota Makassar Tahun 2025 472
Tabel IV.14 Alokasi Anggaran Penyerapan SPM Bidang Urusan Perumahan RakyatKota Makassar Tahun 2025 476
Tabel IV.15 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon pada Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Tahun 2025 476
Tabel IV.16 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketertiban Umum 479
Tabel IV.17 Jumlah Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2025 480
Tabel IV.18 Realisasi SPM Ketentraman dan Ketertiban UmumTriwulan IV Tahun 2025 480
Tabel IV.19 Target Pencapaian SPM Triwulan IV Urusan Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Makassar Tahun 2025 484
Tabel IV.20 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar 485
Tabel IV.21 Komposisi ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 486
Tabel IV.22 Pelayanan Realisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar Tahun 2025 487
Tabel IV.23 Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM BPBDKota Makassar 489
Tabel IV.24 Keadaan ASN BPBDKota Makassar Tahun 2025 490
Tabel IV.25 Realisasi Pencapaian SPM BPBDKota Makassar Tahun 2025 490
Tabel IV.26 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Makassar Tahun 2025 500
Tabel IV.27 Jumlah Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial Kota Makassar Tahun 2025. 501
Tabel IV.28 Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan SosialKota Makassar Tahun 2025 502
Tabel IV.29 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025 506
Tabel IV.30 Program dan Indakator Kinerja pada Dinas KesehatanKota Makassar Tahun 2025 507
Tabel IV.31 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025 508

Tabel IV.32 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat Kota Makassar Tahun 2025 509
Tabel IV.33 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sat.Pol.PP Kota Makassar Tahun 2025 510
Tabel IV.34 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BPBDKota Makassar Tahun 2025..... 510
Tabel IV.35 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas SosialKota Makassar Tahun 2025 511
Tabel IV.36 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025 513

D A F T A R G A M B A R / G R A F I K

Gambar I.1	Peta Administrasi Kota Makassar	5
Gambar I.2	Peta Sebaran Pulau - Pulau Kota Makassar	6
Grafik II.1	Grafik Kinerja Program	220
Grafik II.2	Grafik Kinerja Program	228
Grafik II.3	Grafik Kinerja Program	232
Grafik II.4	Grafik Kinerja Program	245
Grafik II.5	Grafik Kinerja Program	249
Grafik II.6	Grafik Kinerja Program	251
Grafik II.7	Grafik Kinerja Program	253
Grafik II.8	Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan	262
Grafik II.9	Target dan Realisasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyrakat	272
Grafik II.10	Grafik Target vs Realisasi vs Capaian (%)	290
Grafik II.11	Target vs Realisasi Indikator Program	298
Grafik II.12	Persentase Capaian Kinerja Indikator	298
Grafik II.13	Persentase Capaian Kinerja Indikator	299
Grafik II.14	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	303
Grafik II.15	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	306
Grafik II.16	Grafik Kinerja Program Penyelenggara Penataan Ruang	308
Grafik II.17	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	317
Grafik II.18	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	321
Grafik II.19	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	328
Grafik II.20	Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)	336
Grafik II.21	Kinerja Program	342
Grafik II.22	Garafik Target, Realisasi dan Capaian Program	345
Grafik II.23	Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program	348
Grafik II.24	Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program	354
Grafik II.25	Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program	356
Grafik II.26	Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program	359
Grafik II.27	Grafik Kinerja Program	369
Grafik II.28	Grafik Kinerja Program	370
Grafik II.29	Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program	372

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dalam era otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan, sehingga masyarakat memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai krisis maupun tantangan.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang berkelanjutan menuju kualitas kehidupan yang menempatkan menusia sebagai sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, rencana dan perencanaan pembangunan harus dapat memberikan pilihan kepada masyarakat. Pembangunan Daerah juga merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Daerah, dimana perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan menjadi acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dalam perencanaan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, yang selanjutnya menjadi instrument dalam pengukuran kinerja untuk setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui target kinerja yang ditetapkan.

Oleh karena itu, seluruh daerah baik Pemerintah Kota maupun Pemerintah Kabupaten diharapkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta meningkatkan daya saing.

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Dalam upaya mencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dilaksanakan program-program untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan mampu mengantisipasi perubahan yang berkembang sangat cepat. Guna mencapai visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar tahun 2025-2029, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran masing-masing SKPD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses perencanaan strategis organisasi, dimana indikator dan target kinerja tujuan dan sasaran, dirumuskan secara spesifik, measurable, achieveable, relevant dan time-bound (SMART) untuk waktu 5 (lima) tahun. Penyusunan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan upaya untuk mendorong terciptanya kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD). Dalam Penyusunan LPPD Tahun 2025 dilakukan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

1.1. PENJELASAN UMUM.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan Tugas Pembantuan. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan setiap akhir Tahun Anggaran oleh Wali Kota kepada Gubernur Sulawesi Selatan sebagai wakil dari Pemerintah Pusat sebagai wujud pelaksanaan pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur bahwa, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

A. UNDANG – UNDANG PEMBENTUKAN DAERAH

Kotamadya Makassar merupakan salah satu pemerintahan kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Keberadaan Kota Makassar secara hukum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, yang memperkuat landasan hukumnya sejak pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi, sebagaimana yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822.

Kotamadya Makassar yang pada tanggal 1 September 1971 berubah nama menjadi Kotamadya Ujung Pandang, wilayahnya dimekarkan dari 21 km2 menjadi 175,77 km2 dengan memasukkan sebagian wilayah kabupaten lain yaitu Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan, hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan, lingkup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Pada perkembangannya, nama Ujung Pandang dikembalikan lagi menjadi Makassar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang menjadi Kota Makassar.

Tahun 2025 Kota Makassar telah berusia 418 tahun sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 yang menetapkan hari jadi Kota Makassar tanggal 9 Nopember 1607, terus berbenah diri menjadi kota metropolitan di Indonesia dan sekaligus sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan terbesar di Kawasan Timur Indonesia yang berperan tidak hanya sebagai pusat perdagangan dan jasa tetapi juga sebagai pusat kegiatan industri, pusat kegiatan pemerintahan, pusat kegiatan *edu-entertainment,* pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan, simpul jasa angkutan barang dan penumpang baik darat, laut maupun udara.

B. DATA GEOGRAFIS WILAYAH.

1. Luas Wilayah.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi, dengan batas-batas wilayah administratif sebagai berikut :

Sebelah Utara : Selat Makassar dan Kabupaten Maros

Sebelah Timur : Kabupaten Maros

Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar

Sebelah Barat : Selat Makassar

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Di antara kecamatan-kecamatan tersebut, terdapat 9 (Sembilan) kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Ujung Pandang, Wajo, Ujung Tanah, Kepulauan Sangkarrang, Tallo, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Kota Makassar terletak di pesisir barat daya Pulau Sulawesi. Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas dengan 48,22 km2 sedangkan terkecil adalah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan 1,54 km2 dari Kota Makassar. Untuk lebih jelasnya terkait Luas wilayah dan jumlah kelurahan menurut kecamatan di Kota Makassar sebagaimana pada tabel berikut.

Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel I.1
Luas Wilayah dan Persentase terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2025

No.	Kode KEMENDAGRI	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Luas Area (km2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	73.71.11	Biringkanaya	Bulurokeng	11	0 - 8	48,22	27,43
2	73.71.06	Bontoala	Wajo Baru	9	0 - 2	2,1	1,19
3	73.71.03	Makassar	Maradekaya	14	0 - 2	2,52	1,43
4	73.71.02	Mamajang	Maricaya Selatan	13	0 - 5	2,25	1,28
5	73.71.12	Manggala	Manggala	8	0 - 8	24,14	13,73
6	73.71.01	Mariso	Kampung Buyang	9	0 - 2	1,82	1,04
7	73.71.09	Panakkukang	Paropo	11	0 - 5	17,05	9,7
8	73.71.13	Rappocini	Gunung Sari	11	0 - 2	9,23	5,25
9	73.71.07	Tallo	Ujung Pandang Baru	15	0 - 5	5,83	3,32
10	73.71.14	Tamalanrea	Tamalanrea	8	0 - 8	31,84	18,11
11	73.71.10	Tamalate	Maccini Sombala	11	0 - 5	20,21	11,5
12	73.71.04	Ujung Pandang	Baru	10	0 - 2	2,63	1,5

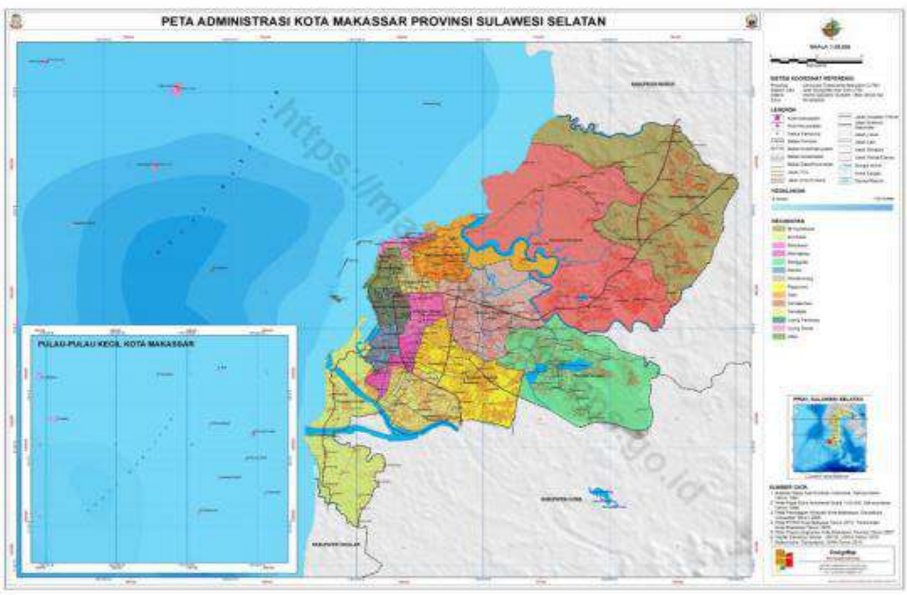
No.	Kode KEMENDAGRI	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Tinggi Wilayah (mdpl)	Luas Area (km2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
13	73.71.08	Ujung Tanah	Pattingaloang Baru	12	0 - 2	4,4	2,51
14	73.71.05	Wajo	Melayu Baru	8	0 - 8	1,99	1,13
15	73.71.15	Kepulauan Sangkarrang	Barrang Lompo / Kodingareng	3	-	1,54	0,88
	73.71	**KOTA MAKASSAR**		**153**	**0 - 8**	**175,77**	**100**

Sumber: Makassar Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Dengan melihat posisi geografis wilayah, Kota Makassar memiliki lokasi yang strategis di Kawasan Indonesia sehingga memungkinkan Kota Makassar dapat berfungsi sebagai pusat pelayanan, baik Kawasan Timur Indonesia maupun skala internasional. Pelayanan tersebut mencakup perdagangan, transportasi darat – laut – udara, pendidikan, pendayagunaan tenaga kerja, pelayanan dan pengembangan kesehatan, penelitian, pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan laut, air payau, tambak, kepariwisataan bahkan potensial untuk pengembangan lembaga keuangan dan perbankan.

Secara administratif Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015 - 2034 pada pasal 5 terdiri atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan dapat dilihat pada gambar berikut ini :

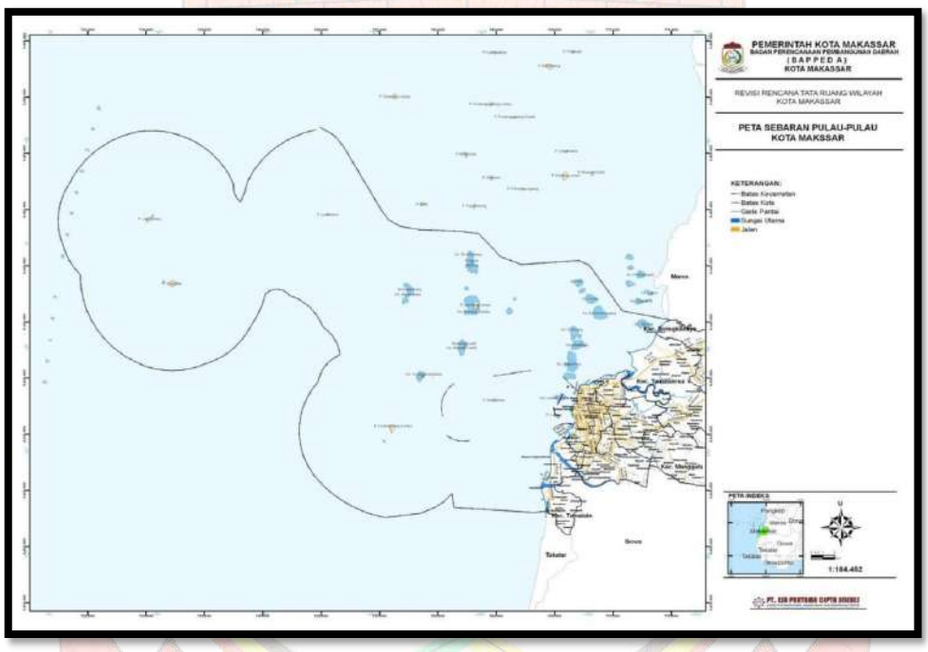
Gambar I.1
Peta Administrasi Kota Makassar



Sumber : Pemerintah Kota Makassar/Kota Makassar Dalam Angka 2025

Selain memiliki wilayah daratan, Kota Makassar juga memiliki wilayah kepulauan yang dapat dilihat sepanjang garis pantai Kota Makassar. Pulau ini merupakan gugusan pulau- pulau karang sebanyak 12 pulau, bagian dari gugusan pulau-pulau sangkarrang, atau disebut juga pulau-pulau pabbiring, atau lebih dikenal dengan nama Kepulauan Spermonde. Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Lanjukang (terjauh), Pulau Langkai, Pulau Lumu-Lumu, Pulau Bonetambung, Pulau Kodingareng Lompo, Pulau Barrang Lompo, Pulau Barrang Caddi, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Samalona, Pulau Lae-Lae, Pulau Lae-Lae Kecil (gusung) dan Pulau Kayangan. Wilayah Kepulauan Kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar I.2
Peta Sebaran Pulau-Pulau Kota Makassar



Sumber : RTRW Kota Makassar 2015-2034

Kota Makassar terletak di Pantai Barat Pulau Sulawesi berada pada titik koordinat 119° 18’ 29,038" - 119°32'35,781" BT dan 5°8’6' 19" LS. Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, berikut ini deskripsi wilayah tiap kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan terluas kedua diantara kecamatan- kecamatan lain yang ada di Kota Makassar, luasnya 37,33 km^2 atau sekitar 21,02% dari luas keseluruhan Kota Makassar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, jumlah kelurahan pada Kecamatan Biringkanaya sebanyak 11 kelurahan, Kelurahan terluas di Kecamatan Biringkanaya adalah Kelurahan Sudiang dengan luas 13,49 km persegi. Sedangkan,

kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Untia dengan luas 2,89 km persegi. Sementara penduduk Kecamatan Biringkanaya sebanyak 217.814 jiwa. dengan kepadatan penduduk sebesar 5.835 jiwa/ha kepadatan penduduk Kecamatan Biringkanaya merupakan terendah kedua setelah Kecamatan Tamalanrea yaitu sebesar 2.780 jiwa/ha. Wilayah Biringkanaya merupakan gerbang utama masuk ke Kota Makassar melalui jalur utara Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Biringkanaya merupakan kota Aerocity dan merupakan satu-satunya akses masuk Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Profesi warga Kecamatan Biringkanaya didominasi oleh Pegawai swasta, Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, Pedagang, dan Petani, sedangkan suku warga Kecamatan Biringkanaya didominasi Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, dan suku lainnya.

Potensi sumber daya alam yang ada di kecamatan ini antara lain di sektor pertanian dan perikanan. Secara umum, Pantai Kecamatan Biringkanaya sebagian besar merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Hanya sebagian kecil pantai ini tergolong cadas. Dilihat dari segi stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, namun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi dari Sungai Mandai. Di samping itu juga tampak adanya gejala abrasi sepanjang sekitar 30m di perkampungan nelayan Kelurahan Untia.

2. Kecamatan Tamalanrea

Kecamatan Tamalanrea adalah Kecamatan terluas pertama, dengan luas 38,83 Km^2 Luas tersebut menempati 21,86% dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Di bagian utara dan timur, Kecamatan Tamalanrea berbatasan dengan Kecamatan Biringkanaya. Bagian barat berbatasan dengan Selat Makassar dan bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang. Kecamatan Tamalanrea merupakan wilayah sub-urban Kota Makassar bersama dengan Kecamatan Biringkanaya. Kedua kecamatan ini berada di wilayah timur Kota Makassar. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Tamalanrea sebanyak 107.957 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 2.780 jiwa/ha. Topografi wilayah kecamatan di mulai dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan ketinggian elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sangat bervariasi mulai permukiman, perkotaan, pertokoan, hingga gedung pendidikan. Salah satu adalah Universitas Hasanuddin sebagai universitas terbesar di Kawasan Indonesia Timur. Ke arah selatan kecamatan ini mengalir Sungai Tallo

sehingga kawasan tambak juga ditemukan di sungai memiliki tambak. Selain di tepi Sungai Tallo, kawasan tambak juga di temukan di sisi utara kecamatan yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai Kecamatan Tamalanrea merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan bervegetasi mangrove serta merupakan pantai yang landai. Namun demikian terdapat pula pantai cadas di sebelah selatan lantebung (Kelurahan Parangloe). Di liat dari segi Stabilitas pantai, maka pantai ini dapat dikatakan relative stabil dan tenang, sekalipun juga tampak adanya gejala abrasi dalam skala kecil sepanjang sekitar 20 meter di lantebung (Kelurahan Bira). Potensi sumber daya alam yang masih dapat di temukan di kecamatan ini adalah tambak. Secara keseluruhan luas lahan tambak di Kecamatan Tamalanrea yaitu 588 ha, dengan produksi perikanan darat (tambak) yaitu 190,10 ton. Kecamatan Tamalanrea merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat Lembaga Perguruan Tinggi Negeri dan swasta dan salah satu diantaranya adalah Universitas Hasanuddin (UNHAS) yang terletak di Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea juga merupakan kawasan pergudangan, pabrik dan industri yang terletak di Kelurahan Bira dan Kelurahan Parangloe.

3. Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala merupakan salah satu kecamatan di Kota Makassar yang tidak berbatasan langsung dengan laut. Kecamatan Manggala dibatasi oleh beberapa wilayah yaitu pada wilayah utara : Kec.Tamalanrea, Selatan : Kabupaten Gowa, Barat : Kec.Panakukang, Timur : Kabupaten Maros. Luas wilayah sebesar 21,44 km^2 atau sekitar 12,07% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, Kecamatan Manggala memiliki delapan kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Manggala adalah Kelurahan Tamangapa dengan luas 7,62 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Borong dan Kelurahan Batua dengan luas 1,92 km persegi. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Manggala sebanyak 164.475 dengan kepadatan penduduk 20.431 jiwa/ha. Topografi wilayah kecamatan ini berelief dataran rendah hingga dataran tinggi, dengan elevasi 0 - 2 di atas permukaan laut .

4. Kecamatan Tamalate

Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, menunjukkan bahwa konsentrasi penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Tamalate yang tersebar pada 11 Kelurahan, dengan

jumlah penduduk sebanyak 190.782 jiwa. Luas wilayah kecamatan ini 26,29 km^2 atau 14,80% sehingga kepadatan penduduk berkisar 7.257 jiwa/ha. Topografi wilayah kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi ketinggian 0 - 5 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Gowa. Pada umumnya pantai di kecamatan ini bertipe pantai berpasir dengan lebar pantai sekitar 10-30 meter serta kelandaiannya 3%. Secara umum pantai ini dapat dikatakan relatif stabil sekalipun cenderung maju ke arah laut akibat sedimentasi pasir halus dari Sungai Jeneberang maupun dari arah selatan. Dengan kondisi pantai tersebut, maka sebagian besar pantai ini digunakan sebagai areal pariwisata pantai.

5. Kecamatan Panakkukang

Kecamatan Panakukang merupakan kecamatan yang terletak ditengah - tengah Kota Makassar dan merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Luas wilayah 14,88 km^2 atau sekitar 8,38% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, wilayah administratif ini di dukung oleh 11 Kelurahan, di Kecamatan Panakkukang Kelurahan terluas adalah Kelurahan Pampang dengan luas 2,63 km2 persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan panaikang dengan luas 0,6 km persegi, Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Panakkukang sebanyak 144.713 jiwa dengan kepadatan penduduk 13.439 jiwa/ha. Topografi wilayahnya memliki elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl). Potensi penggunaan lahan di sektor pertanian sangat kecil hanya sekitar 16 ha dan potensi perikanan darat tidak ada. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diarahkan pada perkantoran dan pemukiman serta aktifitas perdagangan jasa.

6. Kecamatan Rappocini

Penggunaan lahan di kecamatan ini hampir seluruhnya diperuntukkan sebagai kawasan pemukiman. Luas wilayahnya 11,25 km^2 atau sekitar 6,33% dari luas keseluruhan Kota Makassar. Topografi wilayahnya dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 m di atas permukaan laut (mdpl) sehingga peruntukan lahan di kecamatan ini dominan pemukiman yang ditopang dengan kegiatan perdagangan dan jasa sebagai pendukung kegiatan. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Rappocini sebanyak 151.192 jiwa dengan tingkat kepadatan 13.439 jiwa/ha. Kecamatan Rappocini merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan ini merupakan hasil dari pemekaran dari Kecamatan Tamalate yang dibentuk pada tanggal 7 Januari 1998

berdasarkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/1242/PUOD Tanggal 3 Mei 1996 dan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 539/VI/1996 Tahun 1996 Tanggal 27 Juni 1996 yang berbatas wilayah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Manggala, Sebelah Timur dengan Kecamatan Manggala dan Kabupaten Gowa, Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tamalate dan Kabupaten Gowa, Sebelah Barat dengan Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Tamalate. Kecamatan Rappocini di topang oleh 11 wilayah kelurahan yang tersebar.

7. Kecamatan Ujung Tanah

Kecamatan Ujung Tanah dengan luas wilayahnya 1,37 km^2 atau 0,77% dari luas keseluruhan Kota Makassar, Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Ujung Tanah sebanyak 36.960 jiwa serta kepadatan penduduk 26.978 jiwa/ha. Kondisi sosial masyarakat di kecamatan ini terdiri atas dua kelompok, yakni masyarakat perkotaan dan masyarakat nelayan, dari segi wilayah hukum dilengkapi oleh kepolisian kawasan sektor Ujung Tanah dan sektor Pelabuhan Paotere. Dan fasilitas pelayanan Kesehatan terdiri dari 1 Rumah Sakit AL dan 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Pattingalloang dengan Puskesmas Tabaringan.

Salah satu icon sejarah adalah Pelabuhan Paotere yang pernah dimiliki oleh kerajaan Gowa-Tallo pada abad 14 yang pengelolaanya sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan dan TPI serta kapal muatan komoditi ekspor keberbagai wilayah provinsi. Termasuk pabrik penggilingan terigu terbesar ke-4 didunia yang berada di wilayah Kelurahan Ujung Tanah Kecamatan Ujung Tanah yaitu PT. Eastern Pearl Flour Mills. Batas Wilayah Kecamatan Ujung Tanah Sebelah Utara : Selat Makassar, Sebelah Selatan : Kecamatan Bontoala dan Kecamatan Wajo, Sebelah Timur : Kecamatan Tallo, Sebelah Barat : Selat Makassar. Di sisi lain guna menjaga kestabilan pantai di Kecamatan Ujung Tanah, sebagian besar sudah mengalami pengerasan dengan tembok yang berfungsi sebagai pelindung pantai. Hal ini mengingat pantai tersebut mempunyai nilai penting karena perairan pantainya dimanfaatkan untuk pangkalan pendaratan ikan (TPI Paotere), pelabuhan dan docking kapal TNI AL, Pelabuhan Pertamina Instalasi Makassar dan Bogasari. Kecamatan ini berada pada

8. Kecamatan Tallo

Kecamatan Tallo merupakan yang memiliki jumlah Kelurahan terbanyak (15 Kelurahan), diwilayah Kota Makassar. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar

Jumlah penduduk di Kecamatan Tallo sebanyak 148.078 jiwa, dengan kepadatan penduduk 13.930 jiwa/ha. Topografi wilayahnya merupakan dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl). Kecamatan Tallo juga mempunyai Potensi yang besar, ditandai dengan adanya Makam Raja-RajaTallo, dan Makam Datuk Ribandang di Sinassara sebagai tanda awal berdirinya atau menyebar Agama Islam pertama di Makassar sekitar Tahun 1670-an, sebagai Potensi Pariwisata sejarah, serta Daerah Lakkang sebagai Kelurahan Wisata dan Daerah Pusat penelitian lingkungan serta Hutan Mangrove di Makassar, yang telah di Canangkan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar dan telah direspon oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Potensi bencana di Kecamatan Tallo berupa banjir, karena kecamatan ini merupakan Daerah Aliran Sungai Tallo yang berpotensi terjadinya luapan Sungai Tallo ke pemukiman sekitarnya. Potensi pencemaran dan pendangkalan pada muara Sungai Tallo sebagai akibat limbah buangan industri yang tidak terkontrol pada anak-anak Sungai Tallo. Pantai Kecamatan Tallo merupakan pantai yang berbatasan dengan laut dan bagian muara Sungai Tallo. Sebagian besar tipe pantai di lokasi ini merupakan pantai berlumpur dan vegetasi mangrove-nya sangat minim serta merupakan pantai yang landai. Dilihat dari segi stabilitas pantai dapat dikatakan relatif stabil dan tenang, sekalipun cenderung maju ke arah laut memperpanjang Tanjung Tallo akibat sedimentasi di muara Sungai Tallo. Ditinjau dari pemanfaatannya maka pantai ini sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan industri galangan kapal dan pemukiman pantai (pinggir muara Sungai Tallo) dan pantai paling barat Kelurahan Tallo.

9. Kecamatan Mamajang

Luas wilayah Kecamatan Mamajang adalah 5,56 km^2 atau 1,44% luas keseluruhan wilayah Kota Makassar, Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Mamajang sebanyak 58.141 jiwa dengan kepadatan penduduk 22.711 jiwa/ha. Letak Kecamatan Mamajang yang strategis yaitu terletak di bagian selatan Kota Makassar dengan koordinat Geografis berada pada 5° 9′ 8″ Lintang Selatan dan 119° 25′ 1″ Bujur Timur dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara : dengan Kecamatan Makassar, Sebelah Timur : dengan Kecamatan Rappocini, Sebelah Selatan : dengan Kecamatan Tamalate, Sebelah Barat : dengan Kecamatan Mariso. Dengan jumlah kelurahan sebanyak 13 wilayah Kelurahan. dengan topografi wilayah yang merupakan dataran rendah dengan elevasi 0–5 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang memungkinkan pengembangan lahan kecamatan sebagai kawasan

pemukiman. Kecamatan Mamajang merupakan salah satu kecamatan yang memiliki laju infiltrasi tinggi sehingga potensi ancaman banjir sangat kecil.

10. Kecamatan Ujung Pandang

Kecamatan Ujung Pandang merupakan kecamatan yang dijadikan sebagai tempat area publik karena adanya Pantai Losari yang menjadi ikon Kota Makassar. Luas wilayahnya 2,83 km^2 atau 1,59% dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 24.881 jiwa dengan kepadatan penduduk berkisar 8.792 jiwa/ha. Merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kota Makassar dimana wilayahnya sebagai pusat Kota dan Pusat Pemerintahan di Kota Makassar dan mempunyai batas-batas antara lain: Sebelah Barat : Selat Makassar, Sebelah Timur : Kecamatan Makassar, Sebelah Utara : Kecamatan Wajo, Sebelah Selatan : Kecamatan Mariso. Kecamatan Ujung Pandang terdiri dari 10 Kelurahan. Sebanyak 4 Kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang merupakan daerah pesisir pantai termasuk 1 Kelurahan merupakan kepulauan dengan wilayah pulau Lae-lae, Pulau Gusung, Pulau Khayangan, dan Pulau Samalona yang letaknya beberapa mil dari Pantai Losari serta 6 Kelurahan lainnya merupakan daerah bukan pesisir dengan topografi ketinggian di bawah 0 - 5 meter dari permukaan laut (mdpl) . Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke ibukota Kecamatan berkisar 0-2 km , dan Kelurahan Lae-Lae adalah kelurahan yang harus dijangkau dengan sarana transportasi laut. Kegiatan pemerintahan di Kecamatan Ujung Pandang dilaksanakan oleh aparat/Pegawai Negeri/ASN dan non ASN dibawah pimpinan Camat yang terdiri dari beberapa tenaga administrasi, tenaga teknis 24 jam dan tenaga kebersihan. Tingkat klasifikasi kelurahan di Kecamatan Ujung Pandang menunjukkan bahwa dari 10 Kelurahan, yang memiliki kategori kelurahan swasembada. Dengan demikian saat ini tidak terdapat lagi kelurahan yang termasuk swadaya dan swakarya. Lembaga dan organisasi tingkat kelurahan yang terbentuk di Kecamatan dengan jumlah anggotanya diharapkan dapat menunjang kegiatan pemerintah dan pembangunan. Ancaman terhadap bahaya abrasi sangatlah besar sehingga diperlukan bangunan pemecah ombak di depan pantai. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Ujung Pandang umumnya juga sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, khususnya pada Daerah Rekreasi Pantai Losari dan sekitarnya. Hanya sebagian lokasi di sebelah utara pantai kecamatan ini merupakan kompleks perhotelan (Hotel Pantai Gapura Makassar Hotel dan Makassar Golden Hotel) serta dermaga penyeberangan Kayu Bangkoa ke Pulau Lae-lae, Pulau Kayangan dan

pulau-pulau lainnya di wilayah Kota Makassar. Selain itu, Kecamatan Ujung Pandang juga berpotensi terhadap pencemaran air laut dan air tanah karena penggunaan lahan yang lebih diarahkan pada pembangunan hotel. Selain itu juga restoran merupakan usaha paling besar memberikan kontribusi terhadap pencemaran air di kecamatan ini.

11. Kecamatan Makassar

Kecamatan Makassar merupakan kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan terbesar yakni 30.852 jiwa/ha. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Makassar sebanyak 81.758 jiwa dengan luas wilayah 2,65 km^2 atau 1,49% dari keseluruhan luas wilayah Kota Makassar, Kecamatan Makassar memiliki empat belas kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Makassar adalah Kelurahan Maccini dengan luas 0,26 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Maradekaya Selatan dengan luas 0,11 km persegi. Penggunaan lahan di Kecamatan Makassar lebih diperuntukkan bagi kawasan pemukiman, pertokoan dan perkantoran. Kecamatan ini sangat minim dan bahkan tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan (tambak).

12. Kecamatan Bontoala

Luas wilayah Kecamatan Bontoala adalah 1,75 km^2 dari keseluruhan luas Kota Makassar yang terdiri atas 12 kelurahan. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Bontoala 55.113 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 31.493 jiwa/ha. Topografi di kecamatan ini dataran rendah dengan elevasi 0 – 2 meter di atas permukaan laut (mdpl), sebagian daerah di kecamatan ini berpotensi banjir utamanya daerah yang dialiri anak Sungai Tallo. Penggunaan lahan di kecamatan ini lebih diperuntukkan sebagai pemukiman, sehingga kecamatan ini tidak memiliki potensi sumber daya alam baik di sektor pertanian maupun perikanan. Bontoala adalah sebuah kecamatan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di Kecamatan Bontoala terdapat 2 buah bangunan masjid terbesar yaitu masjid Masjid Al-Markaz Al-Islami dan Masjid Raya Makassar.

13. Kecamatan Wajo

Salah satu kecamatan yang terletak di pesisir barat Kota Makassar dan wilayah pantainya merupakan kompleks Pelabuhan Soekarno-Hatta (Pelabuhan Umum dan Peti Kemas), dengan luas wilayah 2,03 km dari luas keseluruhan wilayah Kota Makassar.

Dengan jumlah wilayah Kelurahan Sebanyak 8 (delapan). Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Wajo sebanyak 29.001 jiwa dengan kepadatan 14.286 jiwa/ha. Secara topografi, kecamatan ini termasuk dalam kategori dataran rendah dengan elevasi 0 - 2 meter di atas permukaan laut (mdpl) sehingga berpotensi terjadi abrasi. Oleh karena itu, Pantai Kecamatan Wajo umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang sebagai pelindung pantai. Potensi pengembangan Wisata Kota Tua Makassar serta pengembangan Kawasan Budaya Etnis Tinghoa. Kawasan Kecamatan Wajo juga merupakan pintu gerbang Angkutan Laut antar Pulau dan antar negara yang ada ditandai dengan keberadaan Pelabuhan Penumpang dan Peti Kemas yang ada.

14. Kecamatan Mariso

Kecamatan Mariso merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah yang paling kecil yakni hanya 1,63% dari luas wilayah Kota Makassar atau sekitar 2,89 km^2, Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Mariso sebanyak 59.045 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 20.431. Kecamatan Mariso merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar, dan merupakan daerah bukan pantai dengan topografi ketinggian wilayah 0 – 2 meter dari permukaan laut (mdpl). Menurut jaraknya, letak masing-masing kelurahan ke Ibukota Kecamatan berkisar 1-2 km. Batas-batas Kecamatan Mariso adalah sebagai berikut: Sebelah Utara Kecamatan Ujung, Pandang Kota Makassar, Sebelah Timur Kecamatan Mamajang Kota Makassar, Sebelah Selatan Kecamatan Tamalate Kota Makassar, Sebelah Barat Kecamatan Tamalate Kota Makassar. Kecamatan Mariso memiliki 9 kelurahan. Kelurahan yang paling luas adalah Kelurahan Panambungan yaitu 0,31 km2, sedangkan kelurahan yang memiliki luas terkecil di Kecamatan Mariso adalah Kelurahan Tamarunang dengan luas 0,12 km2. Potensi sumber daya alam di Kecamatan ini yaitu subsektor perikanan laut. Penggunaan lahan di kecamatan ini sebagian besar diperuntukkan pada pemukiman, pertokoan, dan perkantoran. Untuk potensi bencana alam di kecamatan ini berupa abrasi pantai. Oleh karena itu pantai di Kecamatan Mariso pada umumnya sudah mengalami pengerasan dengan tembok pematang pantai, karena sebagian besar pantai di kecamatan ini merupakan daerah pangkalan pendaratan ikan (TPI Rajawali) dan permukiman pantai.

15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang

Kecamatan Sangkarrang merupakan Kecamatan pemekaran Kelurahan dan Kecamatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan. Luas wilayah Kecamatan Kepulauan Sangkarrang tercatat 0,86 km persegi atau sekitar 0,48 persen dari luas Kota Makassar secara keseluruhan. Kecamatan Kep. Sangkarrang memiliki tiga kelurahan. Kelurahan terluas di Kecamatan Kep. Sangkarrang adalah Kelurahan Barang Caddi dengan luas 0,57 km persegi. Sedangkan, kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Kodingareng dengan luas 0,48 km persegi. Berdasarkan data dari Makassar Dalam Angka Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar Jumlah penduduk di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang sebanyak 15.167 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 17.636 jiwa/ha. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki 8 Pulau dengan, yang terdiri dari : Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo Pulau Lumu-lumu, Pulau Langkai, Pulau Bone Tambung, Pulau Kodingareng Keke, Pulau Lanjukang. Potensi yang terdapat pada Kecamatan Sangkarrang ini adalah hasil laut dan kepariwisataan berbasis kemaritiman.

2. Topografi

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut: tanah relatif datar, bergelombang, berbukit. Wilayah Kota Makassar berada pada bentuk permukaan lahan yang relatif datar dan bergelombang. Kota Makassar merupakan daerah dataran dengan ketinggian 0-8 meter diatas permukaan laut (mdpl) dimana terdata 11 kecamatan memiliki ketinggian wilayah 0-5 mpdl. Selebihnya kecamatan dengan ketinggian 0-8 mpdl. Untuk lebih jelasnya terkait ketinggian wilayah di Kota Makassar, sebagaimana pada tabel II.1 dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15º. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2º sebesar 85%, 2-3º sebesar 10% dan 3-15º sebesar 5%. Dengan melihat kondisi topografi di Kota Makassar yang di dominasi oleh wilayah datar, maka dapat dilakukan pembangunan dengan mudah karena di dukung oleh kondisi topografi yang datar, pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut, dan fasilitas penunjang lainnya.

3. Geologi

Kondisi geologi umum Kota Makassar disusun atas 3 satuan batuan:

1. Satuan Aluvial

Satuan batuan alluvial mendominasi seluruh wilayah kota dengan luas 11.693,83 ha yang penyebaran di sekitar daratan sampai ke pantai. Daerah yang mengandung kandungan alluvial cocok untuk pengembangan daerah pertanian. Hal ini karena alluvial banyak mengandung mineral dan miskin basa sehingga alluvial sangat subur.

2. Satuan Basal

Satuan batuan basal terdapat di Kota Makassar hanya terdapat di dua wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Tamalanrea dengan luas 3,201 ha dan di Kecamatan Biringkanaya dengan luas 25,027 ha.

3. Satuan Tufa dan Breksi

Satuan tufa dan breksi terdapat di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Manggala. Sedangkan Stratigrafi berupa endapan alluvium, rawa dan pantai. Dibawahnya ada batuan gunung api Lompobatang (QW), sedangkan batuan tertua adalah batuan sedimen flysch kapur atas yang dipetakan sebagai formasi Marada (Km). Batuan gunung api Lompobatang tersusun atas konglomerat, lava, breksi, endapan lahar dan tufa.

A. Geologi Wilayah

Karakteristik litologi Kota Makassar dibagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a) Daerah Aliran Sungai Jeneberang

Bagian hulu daerah aliran Sungai Jeneberang disusun oleh batuan gunung api yang terdiri dari aglonmerat, breksi, lava, endapan lahar dan tufa. Batuan gunung api tersebut termasuk dalam batuan gunung api Battrape-Cindako dan batuan gunung api Lompobattang. Beberapa diantara batuan gunung api tersebut tidak mengalami kompaksi yang sempurna, sehingga sangat mudah mengalami longosoran dan erosi sehingga perlu di antisipasi Ketika di rencanakan adanya pembangunan di atasnya.

Bagian tengah daerah aliran Sungai Jeneberang, selain batuan gunung api, dijumpai juga batuan sedimen laut dari formasi Camba yang terdiri dari batupasir, batulempung, napal, batu gamping, konglomerat dan breksi gunung api. Bagian hilir Sungai Jeneberang tersusun atas endapan fluvial yang terdiri dari kerikil, pasir, lempung, lumpur dan batu gamping koral. Batuan yang menyusun daerah perairan pantai di sekitar muara Sungai Jeneberang sebagai endapan alluvial pantai terdiri dari pasir, lempung dan lumpur.

b) Daerah Pantai Kota Makassar

Batuan alas yang menyusun pada Pantai Kota Makassar berasal dari formasi

Camba yang berumur miosen tengah sampai miosen akhir, batuan alas ini terdiri dari satuan batupasir, batu lempung, tufa dan breksi.

Bagian atas batuan alas yang berbentuk cekungan diisi oleh endapan pasir kasar dari Sungai Jeneberang dan endapan pasir halus dari Sungai Tallo. Sedangkan di sepanjang daerah pantai, ditemukan pasir berbutir kasar dan halus yang berwarna abu abu hingga kehitaman.

B. Geologi Permukaan

Berdasarkan peta jenis tanah menunjukkan bahwa secara geologi Makassar tersusun oleh jenis tanah inceptisol dan ultisol, Jenis tanah inceptisol dominan

berada di bagian barat dan selatan Kota Makassar. Jenis tanah ini terdiri dari tanah alluvial, andosol, regosol dan gleihumus. Daerah bagian barat dan selatan berpotensi untuk pengembangan pemukiman, bisnis dan pariwisata. Hal ini disebabkan karena jenis tanah inceptisol memiliki tingkat porositas yang rendah dan permeabilitas yang tinggi sehingga kemungkinan terjadinya erosi kecil bila

dilihat dari segi geologinya. Sebagai contoh, Kecamatan Mariso yang potensial sebagai kawasan pariwisata yang ditunjang dengan adanya ”land mark” Kota Makassar di daerah tersebut yaitu Pantai Losari.

Sebaliknya jenis tanah ultisol dominan berada di bagian sebelah utara Kota Makassar. Jenis tanah ini termasuk didalamnya podzolik merah kuning, latosol dan hidromorf kelabu. Daerah utara tidak cocok dijadikan sebagai Kawasan pertanian dan pertambakan karena jenis tanah ini banyak mengandung lapisan tanah liat dan bersifat asam serta miskin unsur hara. Daerah ini lebih diarahkan pada pengembangan pemukiman. Hal ini ditunjang oleh masih luasnya areal yang belum terbangun dan jumlah penduduknya masih sedikit, sehingga tidak terjadi konsentrasi penduduk di pusat kota. Bagian timur Kota Makassar jenis tanahnya merupakan kombinasi kedua jenis tanah. Pengembangan kawasan di daerah ini lebih beragam mulai dari Kawasan pendidikan, kawasan pemukiman hingga kawasan riset. Daerah ini juga merupakan jalur lingkar baru Kota Makassar sehingga dapat mengurangi kemacetan dari pusat kota.

4. Hidrologi

Kota Makassar memiliki garis pantai sepanjang 32 km dengan kondisi hidrologi Kota Makassar dipengaruhi oleh 2 (dua) sungai besar yang bermuara di pantai sebelah barat kota. Sungai *Jene'berang* yang bermuara di sebelah selatan dan Sungai Tallo

yang bermuara di sebelah utara. Sungai Je'neberang misalnya, mengalir melintasi wilayah Kabupaten Gowa dan bermuara di bagian Selatan Kota Makassar merupakan sungai dengan kapasitas sedang (debit air 1-2 m^3/detik). Sedangkan Sungai Tallo dan Pampang yang bermuara di bagian Utara Makassar adalah sungai dengan kapasitas rendah berdebit kira-kira hanya mencapai 0-5 m^3/detik di musim kemarau. Selain itu, dipengaruhi juga oleh sistem hidrologi saluran perkotaan, yakni kanal-kanal yang hulunya di dalam kota dan bermuara di laut.

5. Klimatologi

Kota Makassar termasuk daerah yang beriklim sedang hingga tropis. Iklim di Kota Makassar pada umumnya sama dengan daerah lainnya di Indonesia yang memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sepanjang tahun 2025 bulan April sampai Oktober memiliki suhu rata-rata paling tinggi yang mencapai 28^0C, sedangkan bulan Januari memiliki suhu rata-rata paling terendah sebesar $26,97^0$C. Kelembaban Kota Makassar pada bulan November memiliki kelembaban paling rendah yaitu 45% dan bulan Januari mencapai kelembaban tertinggi yaitu 67%. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terlama pada bulan Desember yaitu sebesar 924 mm^3 yang berlangsung sebanyak 29 hari. Penyinaran matahari tertinggi pada bulan Agustus mencapai 91%, sedangkan yang terendah ialah bulan Desember mencapai 29%. Tingginya intensitas curah hujan menyebabkan timbulnya genangan air di sejumlah wilayah kota ini. Selain itu, kurangnya daerah resapan dan drainase yang tidak berfungsi dengan baik memicu timbulnya bencana banjir.

C. JUMLAH PENDUDUK

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun berfluktuasi disebabkan karena adanya mutasi penduduk (pindah datang dan pindah keluar, meninggal, data baru dan kelahiran). Pada Tahun 2025, Jumlah penduduk terbesar ada pada Kecamatan Biringkanaya yaitu sebesar 217.814 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terkecil terdapat pada Kecamatan Kepulauan Sangkarrang yaitu 15.167 jiwa. Hal ini memberi gambaran bahwa distribusi penduduk yang terjadi di Kota Makassar tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk, dalam artian bahwa luas wilayah yang besar tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang besar demikian pula sebaliknya luas wilayah yang kecil tidak harus mempunyai jumlah penduduk yang kecil.

Tahun 2025 jumlah penduduk Kota Makassar sebesar 1.485.077 jiwa terjadi peningkatan sebanyak 7.216 jiwa jika dibandingkan pada tahun 2024 sebesar

1.477.861 jiwa, hal ini dikarenakan adanya peningkatan jumlah kelahiran, pindah masuk (migrasi) penduduk.

Gambaran lebih lengkap mengenai jumlah rumah tangga, penduduk, luas, dan kepadatan penduduk di Kota Makassar pada tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel I.2
Jumlah Penduduk, Luas dan Kepadatan Penduduk
Kota Makassar Tahun 2025

No	Kecamatan	Tahun 2025		
		Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (ha)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ha)
1	Biringkanaya	217.814	48,22	4,517
2	Bontoala	55.113	2,1	26,244
3	Makassar	81.758	2,52	32,443
4	Mamajang	58.141	2,25	25,840
5	Manggala	164.475	24,14	6,813
6	Mariso	59.045	1,82	32,442
7	Panakukkang	144.713	17,05	8,487
8	Rappocini	151.192	9,23	16,380
9	Tallo	148.078	5,83	25,399
10	Tamalanrea	107.957	31,84	3,390
11	Tamalate	190.782	20,21	9,439
12	Ujung Pandang	24.881	2,63	9,460
13	Ujung Tanah	36.960	4,4	8,400
14	Wajo	29.001	1,99	14,573
15	Kep Sangkarrang	15.167	1,54	9,848
Jumlah		**1.485.077**	**175,77**	**8448.98**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Semester I Tahun 2025

Tabel I.3
Jumlah Penduduk Kota Makassar
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
1.	Tidak / Belum Sekolah	346.807	23,35
2.	Belum Tamat SD / Sederajat	157.419	10,60
3.	TAMAT SD / MI Sederajat	149.498	10,06
4.	SLTP / MTs / Sederajat	158.366	10,66
5.	SLTA / MA / Sederajat	456.660	30,74
6.	Diplomat I / II	4.655	0,31
7.	Akademi / Diploma III / Sarjana Muda	31.319	2,10

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (JIWA)	PERSENTASE (%)
8.	Diplomat IV / Strata I	157.603	10,61
9.	Strata II	19.912	1,34
10.	Strata III	2.838	0,19
JUMLAH		**1.485.077**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Semester I Tahun 2025

Tabel I.4
Jumlah Penduduk Kota Makassar
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025

No	KELOMPOK UMUR	Tahun 2025		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0 - 4	45.100	41.939	87.039
2	5 - 9	67.682	63.016	130.698
3	10 - 14	68.515	64.106	64.106
4	15 - 19	69.407	64.591	133.998
5	20 - 24	65.202	62.256	127.458
6	25 - 29	61.479	60.152	121.631
7	30 - 34	59.172	58.534	117.706
8	35 - 39	55.356	55.075	110.431
9	40 - 44	51.247	53.417	104.664
10	45 -49	46.518	49.750	96.268
11	50 - 54	40.833	44.985	85.818
12	55 - 59	35.356	39.943	75.299
13	60 - 64	25.731	30.334	56.065
14	65+	45.641	59.740	105.381
Jumlah		**737.239**	**747.838**	**1.485.077**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Semester I Tahun 2025

Tabel I.5
Jumlah Penduduk Kota Makassar Menurut Kecamatan,
Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kota Makasssar Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
Biringkanaya	108.354	109.460	217.814	98,99
Bontoala	27.386	27.727	55.113	98,77
Makassar	40.524	41.234	81.758	98,28
Mamajang	28.551	29.590	58.141	96,49
Manggala	81.723	82.752	164.475	98,76

Kecamatan	Jenis Kelamin			Sex Ratio
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
Mariso	29.424	29.621	59.045	99,33
Panakukkang	71.817	72.896	144.713	98,52
Rappocini	73.786	77.406	151.192	95,32
Tallo	74.635	73.443	148.078	101,62
Tamalanrea	53.632	54.325	107.957	98,72
Tamalate	95.041	95.741	190.782	99,27
Ujung Pandang	12.058	12.823	24.881	94,03
Ujung Tanah	18.515	18.445	36.960	100,38
Wajo	14.201	14.800	29.001	95,95
Kep Sangkarrang	7.592	7.575	15.167	100,22
JUMLAH	**737.239**	**747.838**	**1.485.077**	**98,58**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Semester I Tahun 2025

D. JUMLAH KECAMATAN

Secara administratif Kota Makassar terbagi atas 15 Kecamatan dan 153 Kelurahan. Bagian utara kota terdiri atas Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah dan Kecamatan Sangkarrang. Di bagian selatan terdiri atas Kecamatan Tamalate dan Kecamatan Rappocini. Di bagian Timur terbagi atas Kecamatan Manggala dan Kecamatan Panakkukang. Bagian barat adalah Kecamatan Wajo, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Makassar, Kecamatan Mamajang, dan Kecamatan Mariso. Rincian luas masing-masing kecamatan, diperbandingkan dengan persentase luas wilayah Kota Makassar sebagai berikut :

Tabel I.6
Daftar Nama Kecamatan dan Jumlah Kelurahan Tahun 2025

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Area (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
010	Mariso	9	2,89	1,63
020	Mamajang	13	2,56	1,44
030	Tamalate	11	26,29	14,80
031	Rappocini	11	11,25	6,33
040	Makassar	14	2,65	1,49
050	Ujung Pandang	10	2,83	1,59

Kode Wilayah	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Luas Area (km^2)	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
060	Wajo	8	2,03	1,14
070	Bontoala	12	1,75	0,99
080	Ujung Tanah	9	1,37	0,77
090	Tallo	15	10,63	5,99
100	Panakkukang	11	14,88	8,38
101	Manggala	8	21,44	12,07
110	Biringkanaya	11	37,33	21,02
111	Tamalanrea	8	38,83	21,86
112	Kepulauan sangkarrang	3	0,86	0,48
7371	**Kota Makassar**	**153**	**177,59**	**100,00**

Sumber: Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2025

Adapun nama Kecamatan dan Kelurahan yang terdapat di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel I.7
Nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Kelurahan
1	**Makassar**	1	Maricaya	14 Kelurahan
		2	Bara-Baraya	
		3	Maradekaya	
		4	Lariang Bangi	
		5	Maccini	
		6	Maricaya Baru	
		7	Bara-Baraya Timur	
		8	Bara-Baraya Selatan	
		9	Maradekaya Selatan	
		10	Barana	
		11	Maccini Parang	
		12	Maccini Gusung	
		13	Mardekaya Utara	
		14	Bara-Baraya Utara	
2	**Ujung Pandang**	1	Maloku	10 Kelurahan
		2	Mangkura	
		3	Pisang Selatan	
		4	Pisang Utara	
		5	Baru	
		6	Bulo Gading	
		7	Lae-Lae	
		8	Losari	
		9	Sawerigading	

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Kelurahan
		10	Lajangiru	
3	**Rappocini**	1	Tidung	11 Kelurahan
		2	Kassi - Kassi	
		3	Mappala	
		4	Bua Kana	
		5	Bonto Makkio	
		6	Rappocini	
		7	Balla Parang	
		8	Banta-Bantaeng	
		9	Karunrung	
		10	Gunung Sari	
		11	Minasa Upa	
4	**Tamalate**	1	Barombong	11 Kelurahan
		2	Maccini Sombala	
		3	Jongaya	
		4	Mangasa	
		5	Bongaya	
		6	Balang Baru	
		7	Manuruki	
		8	Pa'baeng-Baeng	
		9	Parang Tambung	
		10	Tanjung Mardeka	
		11	Bonto Duri	
5	**Mariso**	1	Bontorannu	9 Kelurahan
		2	Mattoangin	
		3	Kunjung Mae	
		4	Lette	
		5	Panambungan	
		6	Mariso	
		7	Mario	
		8	Kampung Buyang	
		9	Tamarunang	
6	**Mamajang**	1	Sambung Jawa	13 Kelurahan
		2	Parang	
		3	Mamajang Luar	
		4	Mamajang Dalam	
		5	Maricaya Selatan	
		6	Bonto Lebang	

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Kelurahan
		7	Pa'batang	
		8	Bonto Biraeng	
		9	Labuang Baji	
		10	Mandala	
		11	Tamparang Keke	
		12	Baji Mappakasunggu	
		13	Karang Anyar	
7	**Panakukang**	1	Karuwisi	11 Kelurahan
		2	Panaikang	
		3	Tello Baru	
		4	Pampang	
		5	Karampuang	
		6	Tamamaung	
		7	Masale	
		8	Pandang	
		9	Karuwisi Utara	
		10	Sinrijala	
		11	Paropo	
8	**Manggala**	1	Manggala	8 Kelurahan
		2	Bangkala	
		3	Tamangapa	
		4	Antang	
		5	Batua	
		6	Borong	
		7	Bitoa	
		8	Biring Romang	
9	**Biringkanaya**	1	Paccerakkang	11 Kelurahan
		2	Daya	
		3	Pai	
		4	Bulurokeng	
		5	Sudiang	
		6	Sudiang Raya	
		7	Untia	
		8	Bakung	
		9	Berua	
		10	Katimbang	
		11	Laikang	
10	**Tamalanrea**	1	Tamalanrea	8 Kelurahan

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Kelurahan
		2	Kapasa	
		3	Tamalanrea Indah	
		4	Parang Loe	
		5	Bira	
		6	Tamalanrea Jaya	
		7	Buntusu	
		8	Kapasa Raya	
11	**Tallo**	1	Pannampu	15 Kelurahan
		2	Kalukuang	
		3	Kaluku Bodoa	
		4	Rappojawa	
		5	Rappokalling	
		6	Lakkang	
		7	Tallo	
		8	La'latang	
		9	Wala-Walaya	
		10	Tammua	
		11	Buloa	
		12	Suangga	
		13	Uj. Pandang Baru	
		14	Lembo	
		15	Bunga Ejaya Beru	
12	**Bontoala**	1	Malimongan Baru	12 Kelurahan
		2	Wajo Baru	
		3	Gaddong	
		4	Bontoala	
		5	Baraya	
		6	Layang	
		7	Parang Layang	
		8	Bontoala Tua	
		9	Bontoala Parang	
		10	Tompo Balang	
		11	Bunga Ejaya	
		12	Timongan Lompoa	
13	**Ujung Tanah**	1	Tabaringan	9 Kelurahan
		2	Pattingalloang	
		3	Gusung	
		4	Cambaya	
		5	Ujung Tanah	

No	Kecamatan	Kelurahan		Jumlah Kelurahan
		6	Totakka	
		7	Tamalabba	
		8	Camba Berua	
		9	Pattingaloang Barru	
14	**Wajo**	1	Pattunuang	8 Kelurahan
		2	Melayu	
		3	Butung	
		4	Malimongan Tua	
		5	Ende	
		6	Mampu	
		7	Malimongan	
		8	Melayu Baru	
15	**Kepulauan Sangkarrang**	1	Barrang Caddi	3 Kelurahan
		2	Barrang Lompo	
		3	P. Kodingareng	

E. JUMLAH PERANGKAT DAERAH, UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEGAWAI PEMERINTAH.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah.

Susunan dan Tipe Perangkat Daerah Kota Makassar terdapat di dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai berikut :

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD dengan tipe A;

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat dengan tipe A;

d. Dinas Daerah, terdiri atas :

   1. Dinas Pendidikan dengan Tipe A;

   2. Dinas Kesehatan dengan Tipe A;

3. Dinas Pekerjaan Umum dengan Tipe A;
4. Dinas Penataan Ruang dengan Tipe A;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Tipe A;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dengan Tipe A;
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Tipe A;
8. Dinas Sosial dengan Tipe A;
9. Dinas Ketenagakerjaan dengan Tipe A;
10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe A;
11. Dinas Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
12. Dinas Lingkungan Hidup dengan Tipe A;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe A;
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe A;
15. Dinas Perhubungan dengan Tipe A;
16. Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Tipe A;
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe A;
19. Dinas Pemuda dan Olah Raga dengan Tipe A;
20. Dinas Kebudayaan dengan Tipe A;
21. Dinas Perikanan dan Pertanian dengan Tipe A;
22. Dinas Pariwisata dengan Tipe A;
23. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Tipe A;
24. Dinas Perpustakaan dengan Tipe B;
25. Dinas Kearsipan dengan Tipe C;
26. Dinas Pertanahan dengan Tipe C;

e. Badan Daerah, terdiri atas :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Tipe A;
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Tipe A;
3. Badan Pendapatan Daerah dengan Tipe A;

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dengan Tipe A;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
6. Badan Riset dan Inovasi Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

f. Kecamatan, terdiri atas :

1. Kecamatan Biringkanaya dengan Tipe A;
2. Kecamatan Tamalanrea dengan Tipe A;
3. Kecamatan Bontoala dengan Tipe A;
4. Kecamatan Mariso dengan Tipe A;
5. Kecamatan Mamajang dengan Tipe A;
6. Kecamatan Makassar dengan Tipe A;
7. Kecamatan Manggala dengan Tipe A;
8. Kecamatan Rappocini dengan Tipe A;
9. Kecamatan Tamalate dengan Tipe A;
10. Kecamatan Tallo dengan Tipe A;
11. Kecamatan Ujung Pandang dengan Tipe A;
12. Kecamatan Panakukkang dengan Tipe A;
13. Kecamatan Wajo dengan Tipe A;
14. Kecamatan Ujung Tanah dengan Tipe A; dan
15. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang dengan Tipe B.

ADAPUN JUMLAH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 SEBANYAK 463 UNIT KERJA PERANGKAT KERJA SEBAGAI BERIKUT :

Tabel I.8
Jumlah Unit Kerja Perangkat Daerah

No.	Dinas / Badan	Nomenklatur UPT Dinas / Badan		Jumlah	Dasar Hukum
1.	Dinas Pendidikan	1.	UPT Sekolah Dasar	314	Peraturan Walikota Makassar No. 58 Tahun 2019
		1.	UPT Sekolah Menangah Pertama	55	Peraturan Walikota Makassar No. 54 Tahun 2017
		2.	UPT Satuan Pendidikan Nonformal	2	

No.	Dinas / Badan	Nomenklatur UPT Dinas / Badan		Jumlah	Dasar Hukum
			Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)		Peraturan Walikota Makassar No. 55 Tahun 2017
			- SKB Ujung Pandang		
			- SKB Biringkanaya		
2.	Dinas Kesehatan	1.	UPT RSUD Daya	1	Peraturan Walikota Makassar No. 48 Tahun 2024
		2.	UPTD Puskesmas	47	Peraturan Walikota Makassar No. 59 Tahun 2017
			1. Puskesmas Andalas 2. Puskesmas Antang 3. Puskesmas Antang Perumnas 4. Puskesmas Antara 5. Puskesmas Bara-baraya 6. Puskesmas Jongaya 7. Puskesmas Barombong 8. Puskesmas Bira 9. Puskesmas Cendrawasih 10. Puskesmas Dahlia 11. Puskesmas Barrang Lompo 12. Puskesmas Karuwisi 13. Puskesmas Kassi-kassi 14. Puskesmas Kaluku Bodoa 15. Puskesmas Layang 16. Puskesmas Maccini Sawah 17. Puskesmas Mamajang 18. Puskesmas Mardekaya 19. Puskesmas Mangasa 20. Puskesmas Makkasau 21. Puskesmas Minasa Upa 22. Puskesmas Malimongan Baru 23. Puskesmas Panambungan 24. Puskesmas Pattingalloan 25. Puskesmas Pertiwi 26. Puskesmas Pampang 27. Puskesmas Rappokalling 28. Puskesmas Sudiang 29. Puskesmas Sudiang Raya 30. Puskesmas Tamangapa 31. Puskesmas Tabaringan 32. Puskesmas Tarakan 33. Puskesmas Tamalate 34. Puskesmas Tamamaung 35. Puskesmas Tamalanrea 36. Puskesmas Kapasa 37. Puskesmas Pulau Kodingareng 38. Puskesmas Bangkala 39. Puskesmas Bulurokeng 40. Puskesmas Maccini Sombala 41. Puskesmas Paccerakkang 42. Puskesmas Toddopuli 43. Puskesmas Tamalanrea Jaya		

No.	Dinas / Badan	Nomenklatur UPT Dinas / Badan		Jumlah	Dasar Hukum
			44. Puskesmas Ballaparang 45. Puskesmas Daya 46. Puskesmas Jumpandang Baru 47. Puskesmas Batua		
3.	Dinas Pekerjaan Umum	1.	UPT Perbengkelan dan Pengelolaan Alat Berat	1	Peraturan Walikota Makassar No. 60 Tahun 2017
		2.	UPT Pengelolaan Air Limbah	1	Peraturan Walikota Makassar No. 61 Tahun 2017
4.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	UPT Rumah Susun Sederhana Sewa		1	Peraturan Walikota Makassar No. 63 Tahun 2017
5.	Dinas Sosial	UPT Rumah Penampungan dan Trauma Centre		1	Peraturan Walikota Makassar No. 64 Tahun 2017
6.	Dinas Lingkungan Hidup	1.	UPT Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Tamangapa	1	Peraturan Walikota Makassar No. 65 Tahun 2017
		2 .	UPT Pemakaman	1	Peraturan Walikota Makassar No. 66 Tahun 2017
		3.	UPT Bank Sampah	1	Peraturan Walikota Makassar No. 67 Tahun 2017
		4.	UPT Laboratorium Lingkungan	1	Peraturan Walikota Makassar No. 68 Tahun 2017
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	UPT Pengendalian Program Keluarga Berencana (14 kecamatan)		14	Peraturan Walikota Makassar No. 69 Tahun 2017
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	UPT Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1	Peraturan Walikota Makassar No. 70 Tahun 2017
9.	Dinas Perhubungan	1.	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	Peraturan Walikota Makassar No. 71 Tahun 2017
		2.	UPT Penerangan Jalan Umum	1	Peraturan Walikota Makassar No. 6 Tahun 2022
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	UPT War Room		1	Peraturan Walikota Makassar No. 72 Tahun 2017
11.	Dinas Kebudayaan	UPT Museum		1	Peraturan Walikota Makassar No. 73 Tahun 2017
12.	Dinas Perikanan dan Pertanian	1.	UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Peraturan Walikota Makassar
			Paotere		No. 74 Tahun 2017
		2.	UPT Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	Peraturan Walikota Makassar
			Rajawali		No. 75 Tahun 2017
		3.	UPT Balai Benih Ikan	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 76 Tahun 2017

No.	Dinas / Badan	Nomenklatur UPT Dinas / Badan		Jumlah	Dasar Hukum
		4.	UPTD Pusat Kesehatan Hewan	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 77 Tahun 2017
		5.	UPT Pembibitan Tanaman	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 78 Tahun 2017
		6.	UPT Penyuluhan	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 30 Tahun 2019
13.	Dinas Pariwisata	1.	UPT Pengelolaan Event	1	Peraturan Walikota Makassar
			Kepariwisataan		No. 79 Tahun 2017
		2.	UPT Pengelolaan Pantai Losari	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 80 Tahun 2017
14.	Dinas Perdagangan	1.	UPT Penyemakan Kulit	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 81 Tahun 2017
		3.	UPT Metrologi Legal	1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 82 Tahun 2017
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	UPT Pengelolaan Karebosi		1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 83 Tahun 2017
16.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	UPT Perlindungan Perempuan dan Anak		1	Peraturan Walikota Makassar
					No. 45 Tahun 2020
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	UPT Pusat Layanan Usaha Lorong		1	Peraturan Walikota Makassar
	dan Menengah				No. 84 Tahun 2017
18.	Badan Pendapatan Daerah	1.	UPT Pajak Bumi dan Bangunan	1	Peraturan Walikota Makassar
			(PBB)		No. 85 Tahun 2017
		2.	UPT Bea Perolehan Hak Atas	1	Peraturan Walikota Makassar
			Tanah Bangunan (BPHTB)		No. 86 Tahun 2017
		3.	UPT Pelayanan Pajak Daerah dan	1	Peraturan Walikota Makassar
			Retribusi Daerah		No. 99 Tahun 2022
		4.	UPT Pelayanan Pengelolaan Data	1	Peraturan Walikota Makassar
			dan Informasi Pajak Daerah		No. 98 Tahun 2022
			Jumlah	**463**	

Sumber : Bagian Organisasi Setda. Kota Makassar, Tahun 2025

JUMLAH APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 SEBAGAI BERIKUT :

Adapun Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 sebanyak 15.262 orang terdiri dari Pejabat Struktural sebanyak 1.083 orang, Fungsional Tertentu sebanyak 10.586 orang dan Fungsional Umum sebanyak 3.593 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel I.9
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kota Makassar Menurut Jabatan Tahun 2025

No.	Nama Perangkat Daerah (OPD)	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	
1	Dinas Kearsipan	Urusan Pemerintahan	5	12	28	45
2	Dinas Kebudayaan	Urusan Pemerintahan	11	12	61	84
3	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Urusan Pemerintahan	7	14	72	93
4	Dinas Kesehatan	Urusan Pemerintahan	9	1.723	118	1.850
5	Dinas Ketahanan Pangan	Urusan Pemerintahan	8	22	36	66
6	Dinas Ketenagakerjaan	Urusan Pemerintahan	9	26	42	77
7	Dinas Komunikasi Dan Informatika	Urusan Pemerintahan	10	12	57	79
8	Dinas Koperasi Dan UKM	Urusan Pemerintahan	8	8	38	54
9	Dinas Lingkungan Hidup	Urusan Pemerintahan	13	22	162	197
10	Dinas Pariwisata	Urusan Pemerintahan	11	20	60	91
11	Dinas Pekerjaan Umum	Urusan Pemerintahan	10	35	171	216
12	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Urusan Pemerintahan	16	103	81	200
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan P.A	Urusan Pemerintahan	9	8	47	64
14	Dinas Pemuda Dan Olah Raga	Urusan Pemerintahan	10	7	35	52
15	Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Urusan Pemerintahan	4	18	56	78
16	Dinas Penataan Ruang	Urusan Pemerintahan	8	14	52	74
17	Dinas Pendidikan	Urusan Pemerintahan	13	7.618	311	7.942
18	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Urusan Pemerintahan	17	6	44	67
19	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	Urusan Pemerintahan	13	20	46	79
20	Dinas Perhubungan	Urusan Pemerintahan	15	9	108	132
21	Dinas Perikanan Dan Pertanian	Urusan Pemerintahan	15	69	95	179
22	Dinas Perpustakaan	Urusan Pemerintahan	7	14	23	44
23	Dinas Pertanahan	Urusan Pemerintahan	6	4	21	31
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Urusan Pemerintahan	11	9	72	92
25	Dinas Sosial	Urusan Pemerintahan	10	35	47	92
26	BKPSDMD	Urusan Pemerintahan	8	25	108	141
27	BPBD	Urusan Pemerintahan	7	22	61	90
28	BADAN KESBANGPOL	Fungsi Penunjang	9	4	32	45
29	BAPENDA	Urusan Pemerintahan	23	3	213	239
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	Urusan Pemerintahan	2	12	28	42

No.	Nama Perangkat Daerah (OPD)	Urusan Pemerintahan/Fungsi Penunjang	Rincian ASN			Jumlah
			Struktural	Fungsional Tertentu	Fungsional Umum	
31	BPKAD	Urusan Pemerintahan	13	7	72	92
32	BAPPEDA	Urusan Pemerintahan	7	36	47	90
33	Inspektorat Daerah	Fungsi Penunjang	10	57	29	96
34	Satuan Polisi Pamong Praja	Urusan Pemerintahan	13	5	134	152
35	Rumah Sakit Umum Daerah Daya	Fungsi Penunjang	6	447	77	560
36	Sekretariat DPRD	Fungsi Penunjang	6	8	79	93
37	Sekretariat Daerah	Fungsi Penunjang	20	56	241	317
38	Kecamatan Mariso	Fungsi Penunjang	39	3	28	70
39	Kecamatan Mamajang	Fungsi Penunjang	63	1	44	108
40	Kecamatan Makassar	Fungsi Penunjang	69	3	37	109
41	Kecamatan Ujung Pandang	Fungsi Penunjang	42	2	31	75
42	Kecamatan Wajo	Fungsi Penunjang	31	3	27	61
43	Kecamatan Bontoala	Fungsi Penunjang	42	3	35	80
44	Kecamatan Tallo	Fungsi Penunjang	65	2	38	105
45	Kecamatan Ujung Tanah	Fungsi Penunjang	32	1	22	55
46	Kecamatan Panakkukang	Fungsi Penunjang	58	1	54	113
47	Kecamatan Tamalate	Fungsi Penunjang	57	3	66	126
48	Kecamatan Biringkanaya	Fungsi Penunjang	55	3	46	104
49	Kecamatan Manggala	Fungsi Penunjang	40	1	48	89
50	Kecamatan Rappocini	Fungsi Penunjang	54	3	69	126
51	Kecamatan Tamalanrea	Fungsi Penunjang	43	3	33	79
52	Kecamatan Kep. Sangkarrang	Fungsi Penunjang	11	2	11	24
53	Staf Ahli Wali Kota	Fungsi Penunjang	1			
54	Staf Ahli Wali Kota	Fungsi Penunjang	1			
55	Staf Ahli Wali Kota	Fungsi Penunjang	1			
TOTAL			**1.083**	**10.586**	**3.593**	**15.262**

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Tabel I.10
Jumlah Pegawai Kota Makassar Berdasarkan Golongan
Kota Makassar Tahun 2025

Uraian	Pegawai Negeris Sipil (PNS)				Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)							Total
	I	II	III	IV	I	III	IX	V	VII	X	XI	
Jumlah	54	689	5.718	2.791	44	2	4.707	920	297	38	2	15.262

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Tahun 2025

Tabel I.11
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu
Kota Makassar Tahun 2025

NO.	JENIS KELAMIN		JUMLAH
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
1	4.220	2.386	6.606

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, Tahun 2025

F. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui penggalian dan pemanfaatan sumber-sumber pendapatan daerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan belanja daerah serta meningkatkan efektifitas proses pemungutan pajak retribusi serta sumber pendapatan daerah lainnya. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kota Makassar, untuk memaksimalkan peningkatan tersebut upaya antara lain adalah:

a) Pengelolaan PAD yang optimal, efektif dan efisien melalui sistem pemungutan aktif, terpadu dan terkoordinir dengan memanfaatkan teknologi informasi secara real time, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat nilai serta transparan;

b) Meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran PDRB menuju online sistem dan non tunai;

c) Mendorong perbaikan integrasi data base potensi PDRB dengan sinkronisasi pendataan, perizinan dan partisipasi stakeholders serta shareholders dan komponen lainnya agar lebih terstruktur hasil kolektabilitas dan tingkat capaian realisasinya;

d) Peningkatan kepatuhan wajib pajak, wajib retribusi dan kinerja pengelolaan Perusda melalui sosialisasi, pengawasan, penertiban, monitoring dan evaluasi yang lebih preventif dan antisipatif;

e) Pemanfaatan perekaman data wajib pajak, wajib retribusi dan laporan operasional yang mencerminkan laporan keuangan;

f) Optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerja sama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi non pemerintah;

g) Membangun kerja sama dan koordinasi internal dan eksternal Perangkat Daerah Pemerintah Makassar yang efektif dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar untuk sinkronisasi data Wajib Pajak Pusat dan Daerah;

h) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan unit kerja serta usaha-usaha lainnya yang berpotensi untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

i) Mendorong kerja sama dengan penyedia jasa belanja online untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui gopay, tokopedia dll.

j) Mengoptimalkan pelaksanaan tax clearance, melalui kerja sama dengan BPN, Pemerintah Provinsi dan DJPK, untuk layanan administrasi melalui verifikasi bayar pajak dulu baru diberikan pelayanan.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Makassar khusus pada Pendapatan Daerah lebih diupayakan kepada peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 sebesar Rp.4.778.775.566.771,25. atau 98,87% dari Target Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.833.186.895.515,00.

Tabel I.12
Realisasi Pendapatan Daerah dan Dana Perimbangan
APBD Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.	**PENDAPATAN DAERAH**	**4.833.186.895.515,00**	**4.778.775.566.771,25**	**98,87**	**54.411.328.744,00**
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.118.036.886.005,00**	**1.942.374.160.175,25**	**97,71**	**175.662.725.829,75**
1.1.1	Pajak Daerah	1.869.102.441.000,00	1.758.928.244.145,90	94,11	110.174.196.854,10
1.1.2	Retribusi Daerah	175.591.102.447,00	98.939.562.009,76	56,35	76.651.540.437,24
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25.003.175.111,00	27.770.204.998,36	111,07	(2.767.029.887,36)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48.340.167.447,00	56.736.149.021,23	117,37	(8.395.981.574,20)
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN**	**2.461.857.702.000,00**	**2.370.287.929.002,00**	**96,28**	**91.569.772.998,00**
1.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	144.439.744.000,00	72.517.950.201,00	50,21	71.921.793.799,00
1.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.885.862.000,00	4.852.379.000,00	124,87	(966.517.000,00)
1.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1.782.112.374.000,00	1.763.781.431.524,00	98,97	18.330.942.476,00
1.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	531.419.722.000,00	529.136.168.277,00	99,57	2.283.553.723,00
1.2.2	**PENDAPATAN TRANSFER PUSAT-LAINNYA**	**7.950.814.000,00**	**7.950.814.000,00**	**100**	**0,00**
1.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	Dana Penyesuaian	7.950.814.000,00	7.950.814.000,00	100	0,00

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.2.3	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**245.341.493.510,00**	**395.847.656.502,00**	**161,35**	**(150.506.162.992,00)**
1.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	(150.506.162.992,00)
1.2.3.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**62.315.007.092,00**	**0,00**	**34.069.234.597,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	1.800.000.000,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0.00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	62.315.007.092,00	0,00	32.269.234.597,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		**4.833.186.895.515,00**	**4.778.775.566.771,00**	**98,87**	**54.411.328.744,00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 31 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel I.13
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**2.118.036.886.005,00**	**1.942.374.160.175,25**	**97,71**	**175.662.725.829,75**
1.1.1	Pajak Daerah	1.869.102.441.000,00	1.758.928.244.145,90	94,11	110.174.196.854,10
1.1.2	Retribusi Daerah	175.591.102.447,00	98.939.562.009,76	56,35	76.651.540.437,24
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25.003.175.111,00	27.770.204.998,36	111,07	(2.767.029.887,36)
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	48.340.167.447,00	56.736.149.021,20	117,36	(8.395.981.574,2)

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp.1.942.374.160.175,25 atau 97,71% dari Target Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2025 sebesar Rp.2.118.036.886.005,00

Bersamaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Makassar juga Meningkatkan kualitas pelayanan dan perluasan akses pembayaran PDRB menuju online system dan

non tunai. Selain itu, Peningkatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Mendorong kerja sama dengan penyedia jasa e-commerce untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

Pendapatan Transfer Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN yang nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian Dana Perimbangan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta mendukung kewenangan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan otonomi Kepala Daerah, meningkatkan pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk provinsi serta kabupaten/ kota dengan proporsi sesuai dengan kewenangan yang sudah ditentukan pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan fiskal di setiap daerah. Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota adalah sebanyak 10% dari APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan untuk daerah tertentu. Anggaran tersebut biasanya digunakan untuk pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, serta obat dan perbekalan kesehatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar.

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pemasukan APBN yang dialokasikan kepada daerah sesuai dengan persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA).

Tabel I.14
Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.2	**PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN**	**2.461.857.702.000,00**	**2.370.287.929.002,00**	**96,28**	**91.569.772.998,00**
1.2.1.01	Dana Bagi Hasil Pajak	144.439.744.000,00	72.517.950.201,00	50,21	71.921.793.799,00
1.2.1.02	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	3.885.862.000,00	4.852.379.000,00	124,87	(966.517.000,00)
1.2.1.03	Dana Alokasi Umum	1.782.112.374.000,00	1.763.781.431.524,00	98,97	18.330.942.476,00
1.2.1.04	Dana Alokasi Khusus	531.419.722.000,00	529.136.168.277,00	99,57	2.283.553.723,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.2.370.287.929.002,00 atau 96,28% dari Alokasi Anggaran Pendapatan Transfer Dana Perimbangan sebesar Rp.2.461.857.702.000,00. Hal ini disebabkan karena realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan penyerapan Dana Alokasi Umum melebih target anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp.72.517.950.201,00 atau 50,21% dari target anggaran tahun 2025 sebesar Rp.144.439.744.000,00 sedangkan untuk Dana Alokasi Umum sebesar Rp.1.763.781.431.524,00 atau 98,97% dari target anggaran tahun 2025 sebesar Rp.1.782.112.374.000,00 Adapun kendala belum maksimalnya penyerapan Dana Alokasi Khusus adalah waktu penggunaan dana Dana Alokasi Khusus yang terbatas dan waktu pemenuhan persyaratan administratif yang cukup panjang.

Jika dibandingkan dengan Realisasi Dana Perimbangan pada Tahun 2024 sebesar Rp.2.278.389.114.783,00, maka realisasi dana perimbangan tahun 2025 sebesar Rp.2.370.287.929.002,00, mengalami peningkatan sebesar Rp.91.898.814.219,00 atau 4,03%. Hal ini dipengaruhi oleh kembali meningkatnya aktivitas perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Makassar sehingga Pemerintah Pusat merasionalisasi Dana Perimbangan yang dialokasikan kepada tiap daerah otonom berdasarkan kebutuhan daerah masing-masing untuk menciptakan keseimbangan antara keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pendapatan Transfer Pusat Lainnya

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya merupakan dana penyesuaian yang bersumber dari APBN dan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar dimana pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Tabel I.15
Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.2.2	**PENDAPATAN TRANSFER PUSAT-LAINNYA**	**7,950,814,000.00**	**7,950,814,000.00**	**100**	**0,00**
1.2.2.01	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.02	Dana Penyesuaian	7.950.814.000,00	7.950.814.000,00	100	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya untuk tahun 2025 sebesar Rp.7.950.814.000,00.

Transfer Pemerintah Provinsi

Anggaran pendapatan transfer Pemerintah Provinsi merupakan pendapatan bagi hasil pajak dan pendapatan bagi hasil lainnya serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan diterima oleh Pemerintah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.245.341.493.510,00

Tabel I.16
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.2.3	**TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI**	**245.341.493.510,00**	**395.847.656.502,00**	**161,35**	**(150.506.162.992,00)**
1.2.3.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	245.341.493.510,00	395.847.656.502,00	161,35	(150.506.162.992,00)
1.2.3.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Tabel di atas, dapat terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp.395.847.656.502,00 atau 161,35% dari target Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp.245.341.493.510,00

Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi pada Tahun 2024 sebesar Rp.287.337.945.821,00., maka realisasi anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi hingga 31 Desember 2025 sebesar Rp.395.847.656.502,00. mengalami peningkatan sebesar Rp.108.509.710.681,00 atau 37,76%.

Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang meliputi HIbah, Dana Darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Tabel I.17
Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
1.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**0,00**	**62.315.007.092,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	62.315.007.092,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah tahun anggaran 2025 sebesar Rp.62.315.007.092,00 atau 0,0%.

Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Untuk Arah Kebijakan Belanja Daerah, Sesuai Peraturan Perundang-Undangan Kebijakan Belanja Daerah Kota Makassar diarahkan untuk memenuhi kebutuhan Belanja wajib dan serta pemenuhan Standar Pelayana Minimal (SPM), Belanja Prioritas dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah serta belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut:

1. Mengupayakan atau membelanjakan Sumber Daya Daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan;
2. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan dalam upaya memenuhi kewajiban daerah;
4. efesiensi pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah;
5. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi Belanja Daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pada Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Dalam menentukan proyeksi belanja dilakukan berdasarkan metode yang berbeda untuk setiap jenis belanja, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi di rinci atas jenis : 1) Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi yang dimaksud diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja barang

dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. 2).Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman. 3).Belanja Subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. 4).Belanja Hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5).Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja Modal di rinci atas jenis : 1) Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 2).Belanja Modal Peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. 3).Belanja Modal Gedung dan Pemerintahan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 3).Belanja Modal Jalanan, Irigasi dan Jaringan Air digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. 4)

Belanja Aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Transfer terdiri merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangka Daerah yang terdiri dari staf yang membantu menyusun kebijakan dan koordinasi.

Tabel I.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah *(an-audit)*
Kota Makassar Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
2.	**BELANJA DAERAH**	**5.063.385.851.736,13**	**4.309.122.273.081,42**	**85,10**	**754.263.578.655,71**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**4.098.147.505.084,13**	**3.524.338.006.319,62**	**86,00**	**573.809.498.764,51**
2.1.1	Belanja Pegawai	1.919.194.074.795,10	1.684.521.081.781,21	87,77	234.672.993.013,89
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.028.810.553.489,00	1.697.060.661.819,41	83,65	331.749.891.670,59
2.1.3	Belanja Hibah	150.142.876.800,00	142.756.262.719,00	95,08	7.386,614.081,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**955.238.346.652,00**	**783.168.016.761,80**	**81,98**	**172.070.329.890,20**
2.2.1	Belanja Tanah	23.589.675.060,00	18.147.302.701,00	76,93	5.442.372.359,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	314.723.342.524,00	279.744.806.602,00	88,88	34.978.535.922,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	144.318.117.599,00	107.102.094.915,80	74,21	37.216.022.683,20
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	451.190.307.469,00	359.791.556.446,00	79,74	91.398.751.023,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	13.696.452.000,00	10.842.254.097,00	79,16	2.854.197.903,00
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	7.720.452.000,00	7.540.002.000,00	97,66	180.450.000,00
2.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**8.500.000.000,00**	**116.250.000,00**	**1,37**	**8.383.750.000,00**
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	8.500.000.000,00	116.250.000,00	1,37	8.383.750.000,00
2.4	**BELANJA TRANSFER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1	**TRANSFER / BAGI HASIL KE KELURAHAN**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00

2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2	**Belanja Bantuan Keuangan**	**1.500.000.000,00**	**1.500.000.000,00**	**100**	**0,00**
2.4.2.1	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	100	0,00
2.4.2.2	Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		**5.063.385.851.736,13**	**4.309.122.273.081,42**	**85,10**	**754.263.578.654,71**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Pada Tabel di atas Realisasi Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.4.309.122.273.081,42 atau 85,10% dari target anggaran Belanja Daerah sebesar Rp.5.063.385.851.736,13.

Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun realisasi anggaran hingga 31 Desember 2025 sudah mencapai nilai 100%.

Tabel I.19
Pengelolaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
2.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**230.198.956.221,13**	**230.198.956.221,13**	**100.00**	**0.00**
2.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	230.198.956.221,13	230.198.956.221,13	100.00	0.00
2.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIYAAN		**230.198.956.221,13**	**230.198.956.221,13**	**100.00**	**0.00**

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tahun 2025

Adapun realisasi anggaran Penerima Pembiayaan hingga 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp.230.198.956.221,13 atau 100,00% dari target anggaran Penerima Pembiayaan sebesar Rp.230.198.956.221,13 Sedangkan realisasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,- dari target anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,- atau 0%.

1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses sistematis yang dilakukan pemerintah daerah untuk menentukan arah, kebijakan, dan strategi pembangunan dalam jangka waktu tertentu guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Secara umum, ini mencakup.

Dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jadi secara global, perencanaan pembangunan daerah adalah arah besar dan kerangka strategis pembangunan suatu daerah.

G. PERMASALAHAN STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH.

1.1. Permasalahan dari Aspek Geografi dan Demografi

1.1.1. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Ketersediaan energi pangan yang bersumber dari hasil laut, pertanian, dan peternakan tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk dan makhluk hidup lainnya. Artinya, pasokan pangan di wilayah tersebut mengalami defisit akibat tingginya permintaan (demand) dibandingkan dengan ketersediaannya (supply).

Untuk selisih air yang bernilai negatif, hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih suatu wilayah lebih besar dibandingkan ketersediaannya sehingga lingkungan hidup wilayah tersebut tidak mampu lagi mendukung kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Sebaran spasial selisih ketersediaan air bersih di Kota Makassar. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa wilayah seluas 13.353,89 hektare tidak lagi mampu menopang kebutuhan air bersih penduduk di atasnya. Dengan kata lain, ketersediaan air tanah dan air permukaan di wilayah tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat.

1.1.2. Tingginya Alih Fungsi Lahan

Proporsi ruang terbuka hijau kota, dimana meskipun belum memenuhi ketentuan proporsi RTH perkotaan sebesar 30%, terjadi peningkatan proporsi RTH dari tahun 2021 sebesar 9,08% menjadi 12,42%

1.1.3. Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Faktor utama yang menyebabkan penurunan IKLH termasuk pencemaran pada sungai dan waduk yang tidak memenuhi standar baku mutu, serta masih minimnya ruang terbuka hijau.

1.1.4. Rendahnya Akses Rumah Tangga Terhadap Sanitasi Aman

Kota Makassar pencapaian akses sanitasi aman selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan meskipun belum optimal dan masih menghadapi berbagai tantangan yang disajikan pada grafik dibawah. Masih rendahnya capaian sanitasi aman dipengaruhi oleh terbatasnya kemampuan masyarakat memenuhi infrastruktur sanitasi aman secara mandiri karena faktor pengetahuan dan ekonomi yang tercermin dari penyedotan tangki septik rumah tangga yang tidak dilaksanakan secara berkala sehingga limbah tidak dikelola secara optimal dan berpotensi mencemari lingkungan.

1.1.5. Rendahnya Kualitas Infrastruktur Pengelolaan Sampah

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, rata-rata sampah yang terkelola dibandingkan jumlah timbulan sampah sebesar 82,2%, menunjukkan bahwa tidak seluruh timbulan sampah dilakukan pengumpulan dan pengolahan, tetapi diperlakukan secara mandiri seperti dibuang ke badan air atau dibakar.

1.1.6 Belum optimal cakupan layanan pengumpulan sampah

Tantangan dalam layanan penuh pengumpulan sampah pada pengelolaan sampah dari sumber ke tempat pembuangan akhir yang diselenggarakan tanpa upaya pemilahan yang signifikan. Belum masifnya pemilahan sampah di tingkat rumah tangga yang diakibatkan lemahnya dukungan sarana prasarana pemilahan. Selain itu juga akibat menurunnya jumlah Bank Sampah Unit dan TPS3R yang aktif secara signifikan.

1.1.7 Masih Rendahnya Ketahanan Energi

Dari tabel diatas dapat dijelaskan, konsumsi listrik per kapita Kota Makassar terus meningkat sejak tahun 2020. Tercatat pada tahun 2024 realisasi konsumsi listrik di ibukota Provinsi Sulawesi Selatan ini mencapai 1.561,47 KwH, meningkat 7,83% atau 113,49 KwH dari tahun 2020 dan peningkatan jumlah pelanggan atau sambungan listrik dalam 5 tahun terakhir sebesar 12,98%. Jika dibandingkan terhadap rata-rata konsumsi listrik di Indonesia pada tahun 2023, konsumsi listrik di Kota Makassar berada diatas rata-rata nasional yaitu 1.337 KwH per Kapita. Tetapi masih berada jauh dibawah rata-rata negara Asean yaitu 3.896 KwH per Kapita.

1.1.8 Masih Rendahnya Ketahanan Air

Nilai Indeks Kualitas Air yang ditunjukkan pada grafik diatas menggambarkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2020 sampai 2024, kualitas air pada badan air berada pada kategori cemar sedang atau tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan.

1.1.9 Masih Rendahnya rumah tangga memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan.

Setelah melalui pengujian kualitas yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023, hanya 64,58% dari total sambungan rumah tersebut yang benar-benar memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat 84.757 rumah tangga (35,42%) yang airnya belum memenuhi ambang batas standar untuk parameter kritis seperti E-Coli, TDS, pH, Nitrat, dan Nitrit.

1.1.10 Belum Optimalnya Penurunan Emisi GRK

Capaian potensi penurunan emisi GRK menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu kontributor penurunan emisi GRK di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kontribusi sebesar 4,28 % dari total capaian Provinsi Sulawesi Selatan. Meskipun belum masuk dalam kategori daerah dengan potensi penurunan emisi yang tinggi seperti Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Selayar, Kota Makassar memiliki pengaruh signifikan karena perannya sebagai ibukota provinsi dan pusat aktivitas perekonomian diSulawesi Selatan.

1.1.11 Masih Tingginya Kerentanan Bencana dan Ancaman Perubahan Iklim

Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan, Peningkatan Resiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat bencana, dan Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana harus lebih ditingkatkan lagi di tahun tahun berikutnya.

1.1.12 Masih Rendahnya Kapasitas Penanganan Risiko Bencana

Dalam 5 tahun terakhir, Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Makassar mengalami penurunan. Pada tahun 2020 di angka 131,78 atau kategori sedang. Angka ini terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2021 turun menjadi 127,18 masih dalam kategori sedang, tahun 2022 dan tahun 2023 berada pada angka yang sama yaitu 119,49 masuk kategori sementara tahun 2024 nilai IRB Kota Makassar turun menjadi 113,71 dan masuk kategori sedang. Penurunan nilai indeks Risiko Bencana mengindikasikan adanya perbaikan pada kapasitas pemerintah daerah dan kapasitas masyarakat dalam memitigasi dampak bencana.

1.1.13 Masih Tingginya Prevalensi Ketidak cukupan Konsumsi Pangan

Masalah ketidakmampuan memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri ini diperburuk oleh tren fluktuasi prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang terjadi antara tahun 2020 dan 2024. Meskipun nilai IKP cenderung stabil, fluktuasi ini

mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap pangan berkualitas tidak selalu terjamin, terutama bagi kelompok rentan. Stabilitas IKP yang tidak diimbangi dengan stabilitas prevalensi ketidakcukupan konsumsi menunjukkan adanya ketimpangan dalam distribusi dan akses pangan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut Pemerintah Kota Makassar harus mengambil kebijakan yang lebih tegas untuk meningkatkan produktivitas sektor pangan lokal, meskipun dengan segala keterbatasan DDLH yang ada. Ini dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi pertanian, peternakan, dan perikanan yang inovatif dan berkelanjutan. Selain itu harus ada upaya untuk memperkuat rantai pasok pangan dari luar daerah dan menciptakan kemandirian pangan yang lebih baik dengan diversifikasi sumber pasokan. Ketiga, program edukasi dan intervensi harus ditingkatkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2SA) secara konsisten.

1.1.14 Belum Optimalnya Ketahanan Pangan

Mengingat keterbatasan Daya Dukung Lingkungan Hidup (DDLH) di Kota Makassar, kota ini tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduknya dari hasil laut, pertanian, dan peternakan. Meskipun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) menunjukkan angka yang stabil dan relatif tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan, serta Pola Pangan Harapan (PPH) termasuk kategori "Cukup", realita keterbatasan produksi pangan lokal tetap menjadi masalah. Hal ini menunjukkan adanya ketergantungan pada pasokan dari luar daerah untuk mencukupi konsumsi, yang berpotensi menimbulkan kerentanan dalam sistem pangan jika terjadi gangguan pada rantai pasok.

1.1.15 Belum Optimalnya Kualitas Pangan Masyarakat

Secara komparatif, Skor PPH Kota Makassar menunjukkan angka yang lebih rendahdi bandingkan dengan skor PPH secara nasional, namun masih lebih tinggi jika dibandingkandengan capaian skor PPH Provinsi Sulawesi Selatan. Skor PPH Kota Makassar berada di atasrata-rata Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2021. Pada tahun 2024, PPH Kota Makassar (89,73) melampaui PPH Provinsi Sulawesi Selatan (87,7), namun masih berada sedikit di bawah rata-rata nasional (92,9).

1.2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Ekonomi

1.2.1. Belum Optimalnya Kualitas Pertumbuhan Ekonomi

Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, tantangan Kota Makassar adalah harus mampu bertumbuh setara dengan pertumbuhan ekonomi kota besar lainnya seperti

Kota Surabaya, bahkan sejatinya menjadi yang tertinggi agar mampu mewujudkan, mendorong Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi kontributor utama dalam mewujudkan Indonesia dengan pendapatan per kapita masyarakat yang setara dengan negara maju di dunia pada tahun 2045 yang akan datang.

1.2.2. Masih Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Kesejahteraan sosial yang belum optimal juga tercermin dari kesenjangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang cukup tinggi, dimana indeks gini Kota Makassar yang di tahun 2024 mencapai 0,360, lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional berada pada angka 0,373 dan 0,381.

1.2.3. Tingginya Tingkat Inflasi

Setelah mencapai puncaknya di tahun 2022, tren inflasi mulai menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2023 dengan Indonesia turun ke level 2,61%, Sulawesi Selatan 2,81%, dan Makassar 2,89%. Penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana tingkat inflasi Indonesia mencapai 1,57%, Sulawesi Selatan 1,23%, dan Makassar 1,19%.

1.2.4. Belum Optimalnya Penyerapan dan Pengelolaan Investasi.

Perkembangan investasi di Kota Makassar, baik dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), menunjukkan pola yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Meskipun pada beberapa tahun tertentu terdapat lonjakan investasi, secara umum tren ini mencerminkan belum optimalnya iklim investasi di kota ini. Ketidakpastian pertumbuhan, minimnya stabilitas kebijakan, dan keterbatasan dukungan infrastruktur menjadi faktor utama yang menghambat investor untuk menanamkan modal secara berkelanjutan.

1.2.5. Belum Optimalnya Akses Layanan Perbankan Dan Keuangan

Belum optimalnya akses layanan perbankan dan keuangan terindikasi dari proporsi masyarakat yang belum memiliki rekening sekitar 37% – 40% dengan tingkat penetrasi kepemilikan rekening tabungan dikisaran 60%.

1.2.6. Belum Optimalnya Daya Saing Daerah

Kondisi Rasio Ketergantungan Kota Makassar selama selama periode tahun 2020 s.d 2024 mengalami penurunan sebesar 1,44 persen. Dimana pada tahun 2020 Rasio Ketergantungan Kota Makassar tercatat sebesar 43,96 persen menjadi sebesar 42,52 persen pada tahun 2024 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) mempunyai beban tanggungan sebanyak 42-43 orang yang dianggap belum produktif atau sudah tidak produktif lagi.

1.2.7. Masih tingginya angka kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika ekonomi, sosial, dan kebijakan. Pada tahun 2020 pandemi COVID- 19 memberikan dampak besar terhadap perekonomian nasional dan daerah, termasuk Kota Makassar. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan, terutama di sektor informal. Akibatnya, persentase penduduk miskin meningkat di masa pandemi. Bantuan sosial dari Pemerintah, meskipun masif, tidak sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak.

Badan pusat statistik merilis jumlah penduduk miskin di Kota Makassar tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 74,69 ribu orang dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,98 ribu orang dan mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 71,83 ribu jiwa. Namun angka ini mengalami lonjakan pada tahun 2023 sebesar 8,49 ribu orang sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar menjadi 80,32 ribu orang dan pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar 79,53 ribu orang. Selama kurun waktu 2020 hingga tahun 2024 Kemiskinan Kota Makassar selalu berada dibawah rata-rata Angka Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Angka kemiskinan Kota Makassar masih relatif stabil, diperkirakan berada di kisaran 4-5%. Tahun 2023 rilis data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin naik menjadi 5,07 persen. Angka tersebut termasuk yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir, bahkan lebih tinggi dibandingkan saat pandemi Covid-19 yang hanya 4,54 persen tahun 2020 dan 4,82 persen tahun 2022 dan mengalami penurunan di tahun 2024 sebesar 4,97%.

1.2.8. Belum Optimalnya Penanggulangan Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar pada lima tahun terakhir di atas menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari 15,92% pada 2020 menjadi 9,71% pada 2025.

1.2.9. Belum Optimalnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan di Kota Makassar selama periode 2020-2024 menunjukkan pola yang fluktuatif namun mengarah pada peningkatan signifikan di tahun terakhir.

1.2.10. Rendahnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan pola yang relatif stabil dengan sedikit fluktuasi, dan diakhiri dengan lonjakan tajam pada tahun 2024. Fluktuasi disebabkan oleh berbagai faktor

ekonomi, sosial, dan kebijakan pemerintah. Tahun 2024 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 62,04% karena adanya dorongan kuat dalam keterlibatan angkatan kerja, yang dipicu oleh pemulihan penuh sektor ekonomi, peningkatan lapangan kerja, serta keberhasilan intervensi pemerintah dalam mendorong partisipasi kerja melalui pelatihan, pemberdayaan UMKM, dan digitalisasi ekonomi lokal.

1.3. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya

1.3.1. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian Ibu (AKI) merupakan indikator Pembangunan Kesehatan dan indikator pemenuhan hak reproduksi serta kualitas dalam pemanfaatan Kesehatan secara umum. AKI adalah kematian yang disebabkan kehamilan, melahirkan atau nifas bukan karena kecelakaan. AKI dihitung per 100.000 kelahiran. angka kematian ibu di Kota Makassar mengalami kenaikan, dimana tahun 2021 sebesar 51,67 dibandingkan tahun sebelumnya 44,13 per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian di tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 27,17 point dengan angka 78,84. Namun di tahun 2024 mengalami penurunan 2,17 point dengan nilai 76,66 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab meningkatnya angka kematian ibu dikarenakan adanya keterlambatan penanganan terutama pada kasus emergency, hal ini disebabkan karena masih sulitnya proses rujukan pada beberapa fasilitas-fasilitas Kesehatan.

1.3.2. Tingginya Angka Prevalensi Stunting

Perhitungan prevalensi *stunting* menggunakan dua metode pengukuran berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM). Prevalensi *stunting* tahun 2021 berdasarkan data SSGI sebesar 18,8 persen, cukup rendah dibandingkan data prevalensi stunting nasional yang berada di angka 24,4 persen dan prevalensi stunting provinsi Sulawesi Selatan cukup tinggi 27,4 persen. Untuk data tahun 2020 tidak dilakukan pengukuran prevalensi stunting dikarenakan adanya covid 19. Untuk tahun 2022 angka prevalensi stunting Kota Makassar mengalami penurunan 0,4 point dengan nilai 18,4 persen, cukup rendah dibandingkan nasional dan provinsi.

Namun di tahun 2023 prevalensi stunting mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 25,6 bertambah 7,2 point dan untuk tahun 2024 perhitungan prevalensi stunting untuk seluruh kab/kota berdasarkan data SSGI belum dirilis oleh kementerian kesehatan. Prevalensi stunting tahun 2024 untuk kota Makassar sebesar 22,9 persen, provinsi Sulawei Selatan 23,3 persen dan Nasional 19,8 persen mengalami

penurunan dari tahun tahun sebelumnya. pada tahun 2021 dan 2022 terdapat 3.333 balita *stunting* dengan prevalensi 4,06 persen dan tahun 2023 terdapat 2.734 balita stunting dengan prevalensi 3,14 persen. Untuk tahun 2024 angka prevalensi *stunting* 3,37 persen dengan jumlah balita stunting 3.049. Berdasarkan data prevalensi stunting Kota Makassar yang melalui pengukuran E-PPGBM menunjukkan tren penurunan mulai tahun 2020-2024, meskipun pada tahun 2023 ke tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,23 persen, hal ini disebabkan karena adanya peningkatan jumlah sasaran pengukuran balita yang mencapai 99.7 persen yang bersamaan dengan kegiatan intervensi serentak pencegahan *stunting*. Adanya beberapa faktor yang mempengaruhi penanganan *stunting* antara lain akses air bersih, infeksi cacingan pada anak balita, tidak memiliki jamban sehat, kebiasaan merokok pada keluarga balita, riwayat ibu hamil KEK serta adanya infeksi penyakit penyerta dan masih banyak balita dan ibu hamil yang belum memiliki JKN.

1.3.3. Masih Rendahnya Angka Keberhasilan Pengobatan Tuborkulosis

Dalam 13 tahun terakhir, cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis di Kota Makassar cenderung menurun. Pada awal-awal gerakan nasional penanggulangan TBC diterapkan, Kota Makassar mengalami kenaikan penemuan kasus TBC dan pengobatan dari 64,32 persen tahun 2011, kemudian naik ke 72,76 persen tahun 2012, dan hingga menyentuh 79,65 persen tahun 2014. Penurunan mulai terjadi di tahun 2015 hingga 2020, awalnya turun ke angka 72,46 persen, kemudian sampai pada level yang cukup rendah yaitu 25,73 persen. Penurunan tersebut menunjukkan kinerja yang tak begitu baik karena itu artinya orang yang diduga menderita TBC yang diobati terus menurun. Angka cakupannya sempat naik di tahun 2021 menjadi 57,38 persen, tapi dua tahun berturut-turut kembali turun yaitu 51,95 persen tahun 2022 dan 25,91 persen tahun 2023, untuk tahun 2024 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis Kota Makassar berada pada angka 101.88%. Kota Makassar cenderung mengalami kenaikan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2019 di angka 51,93 persen. Kemudian Kota Makassar akhirnya bisa mencapai angka 100 persen tahun 2021 dan 2022, sebelum kemudian turun menjadi 82,10 persen tahun 2023, Meski cenderung mengalami kenaikan, tapi angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar masih relatif lebih rendah dari target nasional untuk 2023. Dalam laporan tahunan penanggulangan TBC, Indonesia menargetkan keberhasilan pengobatan TBC atau *treatment success rate* sebesar 90 persen. Untuk tahun 2024 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis di Kota Makassar mencapai angka 75,20 % turun dari angka Tahun sebelumnnya.

1.3.4. Belum Optimalnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Kota Makassar sudah hampir menjangkau semua penduduk, dilihat dari angka cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Tahun 2020 hingga 2023, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional Kota Makassar naik persisten, hingga akhirnya sampai ke 99,71 persen tahun 2023. Angka itu menunjukkan hampir tak ada lagi penduduk di Kota Makassar yang belum di *cover* oleh JKN. Kemudian untuk Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Makassar pada tahun 2024 telah mencapai 99,70%.

1.3.5. Rendahnya Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2022 dan 2023 masih dibawah 50%, masing-masing 47,33% dan 46,65%. Tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan di angka 56,19. Masih rendahnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Tahun 2022 dan 2023 di Kota Makassar salah satunya disebabkan rendahnya kepesertaan pada pekerja non formal.

Bagi pekerja formal, pemerintah punya aturan yang ketat terhadap pemberi kerja untuk mendaftarkan semua pekerjanya menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan, namun tidak ada kewajiban yang bisa memaksa pekerja non formal untuk mendaftar sebagai peserta. Dengan adanya Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 2275/560.05/2022 tentang pembentukan Forum Kepatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Kota Makassar.

Jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja berdasarkan data dari Kota Makassar dalam angka tahun 2025 sebanyak 629.183 orang yang terdiri dari Tenaga Tata Usaha dan sejenis 67.388 orang, Tenaga Usaha penjualan 179.447 orang, tenaga usaha jasa 47.684 orang, pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan 14.169 orang , tenaga produksi , operator alat-alat angkutan dan pekerja kasar sebanyak 222.577 orang serta lainnya sebanyak 12.024 orang.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi kategori kepesertaan Jamsostek adalah Pekerja Penerima Upah (PU) Pekerja (Bukan Penerima Upah (BPU) dan Jasa Konstruksi (JAKON). Ketiga kategori ini tahun 2022 terdapat potensi sebanyak 507.768 orang namun yang menjadi peserta aktif sebanyak 240.306 orang atau sebesar 47,33 persen. Tahun 2023 yang potensi sebanyak 490.724 orang dan yang aktif sebanyak 228.933 orang sehingga persentasenya sebesar 46,65

persen. Tahun 2024 jumlah potensi sebanyak 506.360 orang dan aktif sebanyak 284.506 orang dengan persentase sebesar 56,19 persen.

Presentasi tersebut mengcover dengan total 284.506 peserta. Sementara itu, Pemerintah Kota Makassar melakukan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu 69.024 pekerja melalui APBD tahun 2024, yang terdiri dari 16.097 Aparatur Sipil Negara (ASN), 5.888 ketua RT/RW, 6.082 kader posyandu dan keluarga berencana, 5.696 pekerja keagamaan, serta 35.261 pekerja rentan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Tantangan pemerintah Kota Makassar ke depan untuk menaikkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ada pada pekerja informal. Pekerja informal umumnya mengalami kesulitan untukmenyisihkan sebagian pendapatan mereka membayar iuran karena sebagian besar pekerja informal berupah rendah sementara biaya hidup yang harus ditanggung relatif tinggi.

1.3.6. Rendahnya Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Inklusivitas pasar tenaga kerja khususnya terhadap penyandang disabilitas di Kota Makassar dapat dilihat dari indikator persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal. Untuk konteks inklusivitas Kota Makassar khususnya terhadap penyandang disabilitas, masih belum inklusif. Hal itu dapat dilihat dari parameter persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar. Data yang dikumpulkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar yang bersumber dari beberapa perusahaan dan kantor pemerintahan mencatat jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal di Kota Makassar pada tahun 2024 sebanyak 180 orang atau hanya 0,048 persen dari total pekerja formal di Kota Makassar.

Data tersebut merupakan informasi awal yang membuat Pemerintah Kota Makassar dalam jangka panjang perlu menaruh perhatian terhadap isu inklusifitas dalam pasar tenaga kerja. Kota Makassar memiliki 2.869 jiwa penyandang disabilitas tahun 2024 berdasarkan data dari Disdukcapil Kota Makassar. Jika dikomparasi dengan jumlah penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, hanya 6,27 persen. Karena indikator ini tergolong baru, sehingga data diuraikan punya banyak keterbatasan, sehingga tidak menggambarkan sepenuhnya tentang penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Terkait isu ini, Pemerintah Kota Makassar ke depan perlu fokus pada penyempurnaan database terkait penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, serta ada hal-hal yang substansial yang bisa membuat pasar tenaga kerja Kota Makassar jauh lebih inklusif.

1.3.7. Belum Optimalnya Pembangunan Keluarga

Untuk capaian Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Makassar tahun 2022 sebesar 56,32 persen dengan kategori cukup baik (berkembang), di tahun 2023 meningkat sebesar 7,14 persen menjadi 63,46 persen dengan kategori cukup baik (berkembang). Pada tahun 2024 mengalami sedikit penurunan sebesar 0,33 persen menjadi 63,13 persen dengan kategori cukup baik (berkembang).

1.3.8. Belum Optimalnya Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Dalam mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang terdiri dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihasilkan dari capaian lima klaster yang terdiri dari Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan), Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) serta Klaster V (Perlindungan Khusus). Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak. Dalam mengukur capaian pembangunan perlindungan anak yang terdiri dari Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Untuk Indeks Perlindungan Anak (IPA) dihasilkan dari capaian lima klaster yang terdiri dari Klaster I (Hak Sipil dan Kebebasan), Klaster II (Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif), Klaster III (Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan), Klaster IV (Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya) serta Klaster V (Perlindungan Khusus). Capaian Indeks Perlindungan Anak yang datanya mengalami penurunan disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya Koordinasi Antar Sektor, dimana terdapat kekurangan dalam pemahaman dan komitmen lintas sektor terhadap pembangunan perlindungan anak secara komprehensif. Hal ini dapat menyebabkan tidak meratanya pelaksanaan program secara efektif.

Sistem Data, Informasi, dan Monitoring yang Belum Optimal, yang ditandai dengan masih terdapat kendala dalam sistem data dan informasi anak. Ketidaktepatan data dan kurangnya monitoring dapat mengurangi efektivitas intervensi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) & Dukungan Hukum. Penelitian menunjukkan bahwa layanan perlindungan anak di UPTD PPA masih belum maksimal, terutama karena minimnya pemahaman yang sinkron antara pihak layanan dengan penegak hukum dan Kekurangan SDM seperti konselor, psikolog, dan penasihat hukum. Permasalahan

dalam Pemenuhan Hak Anak, dalam beberapa segmen anak, terutama yang berhadapan dengan hukum, korban kekerasan, disabilitas, atau terabaikan, belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang memadai. Trend Kasus Kekerasan Berubah, Terutama Kekerasan Seksual. Meskipun total kasus kekerasan perempuan dan anak di Makassar menurun (dari 634 kasus di 2023 menjadi 510 kasus di 2024), terdapat peningkatan proporsi kasus kekerasan seksual yang kini lebih mendominasi dibanding kekerasan fisik. Ini mungkin berdampak pada indeks yang lebih fokus pada kualitas perlindungan daripada hanya jumlah kasus.

1.3.9. Belum Optimalnya Kualitas Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Makassar pada tahun 2019 berada pada angka 94,48 persen dan di tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan 94,47 persen dan 94,44 persen namun lebih tinggi dibandingkan nasional dan provinsi, dan di tahun 2022 IPG Kota Makassar meningkat menjadi 94,52 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan di tahun 2023 terus mengalami peningkatan 94,65 persen mendekati angka ideal sementara di nasional hanya berada di angka 91,85 begitupun di provinsi Sulawesi Selatan 93,13 persen.

1.3.10. Belum Optimalnya Kualitas Pemberdayaan Gender

Untuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Makassar setiap tahunnya selalu berada diatas Provinsi dan Nasional, dimana tahun 2019 IDG Kota Makassar sebesar 78,32 persen dan pada tahun 2020 angka Indeks Pemberdayaan Gender Kota Makassar sebesar 77,61 persen, walaupun nilainya lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya namun nilai IDG Kota Makassar masih tinggi dibandingkan dengan nasional 75,57 persen dan provinsi sulsel 76,32 persen. Di tahun 2021 angka IDG Kota Makassar turun di 1,02 point atau sebesar 76,59 dan di tahun 2022 mengalami peningkatan untuk Indeks Pembangunan Gender (IDG) sebesar 78,15 mengalami peningkatan sebesar 1,56 point dan di tahun 2023 angka IDG Kota Makassar 78,13 persen. Untuk dimensi dimensi atau indikator partisipasi politik diukur melalui keterwakilan perempuan di parlemen, dimensi pengambilan keputusan dari keterlibatan perempuan dalam posisi strategis dan profesional dan dimensi distribusi pendapatan melalui kontribusi pada kesempatan dan pendapatan kerja.

1.3.11. Belum Optimalnya Kesetaraan Gender

Indeks Ketimpangan Gender merupakan Indeks yang bertujuan mengukur kemajuan kesetaraan gender dan membandingkan ketimpangan gender antara laki-laki dan Perempuan dengan berdasarkan beberapa indikator Kesehatan reproduksi, pemberdayaan tenaga kerja. Berdasarkan data indeks ketimpangan gender Kota

Makassar tahun 2019 sebesar 0,344 dan mengalami penurunan sebesar 0,01 point tahun 2020 dengan angka 0,333 selanjutnya pada tahun 2021 menurun tajam dengan nilai indeks ketimpangan gendernya sebesar 0,198 turun sebanyak 0,13 point dan untuktahun 2022 sebesar 0,188 dan pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 0,186.

Perbandingan Indeks Kesetaraan Gender di Kab/Kota menujukkan untuk Kota Makassar nilai IKG yang sebesar 0,188 di tahun 2022 dan 0,186 di tahun 2023 jauh dibawah dari indeks ketimpangan gender provinsi yang sebesar 0,314 dan beberapa kab/kota lainnya di Sulawesi selatan. Semakin rendah nilai maka ketimpangan semakin membaik. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Ketimpangan Gender menunjukkan peningkatan yang konsisten dalam mengurangi ketimpangan gender di Kota Makassar.

1.3.12. Rendahnya Kualitas Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Makassar (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Dimana indikator terkait indeks kepemudaan terdiri dari pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, ketenagakerjaan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, gender dan diskriminasi**.** kepemudaan untuk Kota Makassar jumlah pemuda sebesar 519.272 jiwa dimana terdiri dari pemuda perempuan sebesar 235.202 dan pemuda laki-laki sebesar 241,660 jiwa.

Untuk Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) secara Nasional sejak tahun 2019 mengalami peningkatan meskipun tidak signifikan. Namun IPP pada tahun 2020 sebesar 51,00 mengalami penurunan 1,67 poin dibandingkan capaian IPP tahun sebelumnya 2019 sebesar 52,67 persen. Dari lima domain pembentuk IPP, domain pendidikan paling berkontribusi terhadap capaian IPP dengan nilai indeks tertinggi sebesar 70,00. Disisi lain, lapangan dan kesempatan kerja adalah domain IPP terlemah dengan dengan nilai indeks 40,00.

1.3.13. Indeks Pembangunan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga (Permenpora) Nomor 1 Tahun 2022, telah disusun alat ukur atau parameter yaitu Indeks Pembangunan Olahraga yang biasa disebut *Sport Development Index* (SDI),melalui 9 (sembilan) indikator/dimensi yaitu: partisipasi, kebugaran, ruang terbuka olahraga, SDM olahraga, kesehatan, ekonomi, ketahanan sosial, dan literasi fisik. Dalam perhitungan IPO yang menjadi komposit pembentuknya yaitu a) Literasi Fisik dan Partisipasi yang terdiri dari Frekuensi olahraga dalam seminggu, Durasi Olah raga, intensitas, ketertarikan,

keingintahuan dan kesenaganan berolahraga b) Perkembangan Personal terdiri dari persepsi terhadap tantangan, keputusasaan, kegigihan dan rasa saling percaya, c) Ekonomi terdiri dari komponen pengeluaran (fisik) dan pengeluaran non fisik.

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Kota Makassar belum tersedia, namun berdasarkan nilai Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Makassar yang mencapai 57,67 persen, yang lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 56,33 persen. Meskipun IPP bukan IPO, pencapaian ini menunjukkan adanya upaya pembangunan di berbagai sektor, termasuk bidang keolahragaan, Kota Makassar memiliki potensi besar untuk pengembangan kegiatan olahraga karena statusnya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat kegiatan perdagangan dan jasa, yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan

Olahraga Kota Makassar. Nilai Indeks Pembangunan Olahraga terdapat 3 kategori yaitu rendah dengan skor 0 - 0,499, kategori menengah 0,500 – 0,799 dan kategori tinggi

0,800 – 1. IPO Kota Makassar Tahun 2024 berada pada skor 0,476 dan termasuk rendah. Untuk tahun 2025-2029 IPO Kota Makassar diproyeksikan dengan 3 skenario yaitu skenario 1 baseline (status -quo), skenario 2 (Program moderat, rekomendasi intervensi dijalankan secara konsisten) dan skenario 3 (program ambisius, pendanaan dan koordinasi lintas OPD optimal).

1.3.13. Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda

Warisan budaya tak benda adalah segala bentuk praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, dan keterampilan, serta alat, benda, artefak, dan ruang budaya terkait yang dianggap sebagai bagian dari warisan budaya suatu komunitas. Warisan ini tidak bisa dipegang, namun tetap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dinyatakan bahwa cakupan pemajuan kebudayaan 10 (sepuluh) yaitu tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, Bahasa, permainan rakyat; dan olahraga tradisional. Kesepuluh cakupan ini merupakan karya budaya tak benda. Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi tahun 2024 sebanyak 10 karya budaya seperti : Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang,

Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk, Buaya, A' Cini Wattu, A' Jene Sapara Accera Kalompoang,Jumlah karya budaya yang di inventarisasi di tahun 2024 sebanyak 25 yaitu: Manuskrip (Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Lontara Kutika), Tradisi Lisan (Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk

dan Buaya, Kelong, Cerita Si Lumpuh dan Si Buta, Kondo Buleng, Cerita Monyet dan Kura-Kura, Sinrlik Poosi Tianunung, Sigajang Lalang Lipa). Adat Istiadat (A' Cini Wattu, A' Jene Sapara,

Antama Balla, Menre Bola, Appakaramulla), Ritus (Accera Kalompoang, Akbarasanji, Appasili, Maulud), Teknologi Tradisional, Pembuatan Badik, Bumbu), Tahun 2024 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 35.

1.3.14. Persentase Cagar Budaya Yang Dilindungi dan Dimanfaatkan

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Tahun 2024 Adalah sebagai berikut: Situs Bastion Karabbaka, Komplek Makam Raja Bone, Basttion Mangara bombang, Benda Parang, Benda Tombak, Benda Badik, Benda Keris, Struktur Bungung Lompo, Badik Luwu, Tombak, Badik Gecong, Badik Lompo Battang, Komp Makam Karaeng Katinting, Kareng Tanralili, Bunker Tallo, Badik Luwu, Badik Sakking, Struktur Batu Manggala, Keris Lamba Tujuh, Cegele (Tombak Gengam), Badik Raja, Keris, Tombak, Parang, Badik Luwu, Keris, Badik Luwuk, Keris Sapukalla, Keris Luwu Luk 3, Kerik Lamba 13, Badik Luwu, Badik Bugis, Menara Mercusuar.Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi tahun 2024 sebanyak 10 karya budaya seperti : Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk, Buaya, A' Cini Wattu, A' Jene Sapara Accera Kalompoang,Jumlah karya budaya yang di inventarisasi di tahun 2024 sebanyak 25 yaitu: Manuskrip (Lontara Silsilah, Lontara Jangang-jangang, Lontara Bilang, Lontara Kutika), Tradisi Lisan (Sinrilig I Toloq Daeng Magassing, Anggaru, I Maddi Daeng Ri Makka, Cerita Pelanduk dan Buaya, Kelong, Cerita Si Lumpuh dan Si Buta, Kondo Buleng, Cerita Monyet dan Kura-Kura, Sinrlik Poosi Tianunung, Sigajang Lalang Lipa). Adat Istiadat (A' Cini Wattu, A' Jene Sapara, Antama Balla, Menre Bola, Appakaramulla), Ritus (Accera Kalompoang, Akbarasanji, Appasili, Maulud), Teknologi Tradisional, Pembuatan Badik, Bumbu), Tahun 2024 jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan dinventarisasi sebanyak 35.

1.4. Permasalahan dari Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah

1.4.1. Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tantangan Kota Makassar adalah harus mampu bertumbuh setara dengan pertumbuhan ekonomi kota besar lainnya seperti Kota Surabaya, bahkan sejatinya menjadi yang tertinggi agar mampu mewujudkan, mendorong Provinsi Sulsel sebagai salah satu provinsi kontributor utama dalam mewujudkan Indonesia dengan pendapatan per kapita masyarakat yang setara dengan negara maju di dunia pada tahun 2045 yang akan datang.

1.4.2. Tingginya Ketimpangan Pendapatan

Meski turun, nilai indeks gini Kota Makassar masih lebih tinggi dari Provinsi Sulawesi Selatan dan lebih rendah 0,009 poin dari angka nasional. dari angka gini ratio tersebut, menunjukkan bahwa angka ketimpangan di Kota Makassar cukup tinggi.

1.4.3. PDRB per Kapita

Pencapaian PDRB per Kapita Kota Makassar dalam lima tahun terakhir menunjukkan kinerja peningkatan yang menakjubkan. Meningkat dari hanya Rp.125,32 juta pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp.165,95 juta pada tahun 2024. Kinerja peningkatan PDRB Kota Makassar jauh melampaui kinerja Provinsi Sulsel dan nasional, sehingga gap-nya akan semakin melebar. Kondisi ini harus terus dipertahankan dan perlu ditingkatkan hingga Kota Makassar mampu mendorong peningkatan PDRB Provinsi Sulsel dapat melampaui capaian PDB per Kapita nasional dalam jangka panjang yang akan datang.

1.4.4. Melambatnya Pertumbuhan Jumlah Tamu Wisatawan Baik Domestik Maupun Mancanegara

Perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) di Kota Makassar selama tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan dinamikasignifikan, diawali penurunan tajam pada 2020 akibat pandemi dengan capaian hanya 27,75% dari target. Namun, periode 2021–2023 mencatat lonjakan luar biasa, bahkan melebihi target hingga lebih dari 200%, mencerminkan antusiasme masyarakat berwisata domestik dan keberhasilan strategi pemulihan pariwisata. Meski pada 2024 target meningkat tajam, capaian tetap tinggi di angka 115,86%, menandakan pasar yang mulai stabil. Fluktuasi ini menggambarkan dampak faktor eksternal seperti pandemi dan efektivitas kebijakan pemulihan pariwisata terhadap pergerakan wisatawan nusantara.

1.4.5. Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Ekonomi kreatif

Pada tahun 2023 jumlahnya menurun menjadi 4.816 unit dan kembali turun menjadi 4.220 unit pada 2024, yang mengindikasikan adanya proses normalisasi dan konsolidasi usaha dimana sebagian pelaku tidak berlanjut atau kembali ke sektor informal. Meskipun demikian, jumlah ekraf aktif pada 2024 masih lebih dari lima kali lipat dibandingkan tahun 2021, sehingga secara umum menggambarkan adanya ekspansi basis usaha kreatif di Kota Makassar. Fluktuasi ini juga menandakan bahwa pertumbuhan kuantitas belum sepenuhnya diikuti dengan keberlanjutan dan ketahanan usaha, sehingga ke depan diperlukan strategi pengembangan yang menekankan pada penguatan kapasitas pelaku, akses pembiayaan, perluasan pasar, kurasi produk, serta dukungan terhadap ekosistem ekonomi kreatif agar sektor ini tidak hanya tumbuh secara jumlah tetapi juga memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap perekonomian daerah.

1.4.6. Persentase Koperasi Sehat Kota Makassar

Pada tahun 2024 terjadi penurunan drastis ke angka 15,65% yang menandakan adanya kemunduran dalam kualitas atau jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sehat.

1.4.7. Rendahnya Kinerja dan Produktivitas BUMD

ROA (*Return on Assets)* menunjukkan efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Berdasarkan data dari 2019 hingga 2023, tren ROA perusahaan cenderung menurun, dengan penurunan tajam dari 5.69% pada 2019 menjadi 2.21% pada 2021, yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 terhadap operasional dan profitabilitas. Meskipun ada sedikit pemulihan ke 3.77% pada 2022, ROA kembali turun ke 1.89% pada 2023, yang bisa mengindikasikan tantangan dalam efisiensi aset, meningkatnya beban operasional, atau penurunan profitabilitas. Secara keseluruhan, Perkembangan Net Profit BUMD dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun secara keseluruhan. Pada tahun 2020, laba bersih BUMD tercatat mencapai Rp. 39.192 juta. Pada 2021, laba bersih BUMD anjlok drastis hingga Rp. 17.150 juta, sebagai dampak dari pandemi COVID-19, yang berakibat pada melemahkan aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Meskipun terjadi pemulihan pada 2022 dengan laba meningkat ke Rp. 29.508 juta, tren kembali memurun pada 2023 hingga akhir 2024 yang mencatatkan laba sebesar ke Rp. 11.444 juta. Penurunan ini dapat disebabkan oleh meningkatnya beban operasional, efisiensi yang menurun, atau tekanan ekonomi eksternal seperti inflasi dan kenaikan suku bunga. Untuk membalikkan tren negatif ini, BUMD perlu

meningkatkan strategi efisiensi, diversifikasi pendapatan, serta optimalisasi pengelolaan aset dan biaya operasional guna memastikan Keberla njutan profitabilitas di masa mendatang.

1.4.8. Rendahnya Kontribusi Pilar Lingkungan terhadap Penerapan Ekonomi Hijau

Dalam 5 tahun terakhir, efektivitas transformasi ekonomi hijau di Kota Makassar menunjukkan peningkatan yang positif, sebagaimana tercermin dalam capaian Indeks Ekonomi Hijau yang terus meningkat dari tahun 2022 pada nilai 29,7, tahun 2023 pada angka 55,1 dan menurun ditahun 2024 pada nilai indeks 50,6 atau belum mencerminkan kemajuan dalam berbagai aspek pembangunan berkelanjutan yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi dan sosial.

1.4.9. Menurunnya Produktivitas Perikanan Tangkap

Namun pada tahun 2024, momentum peningkatan diiringi dengan penurunan volume produksi dari 20,77 ribu ton menjadi 20,6 ribu ton atau menurun sebesar 0,81 persen. Penurunan disebabkan oleh perubahan kondisi lingkungan perairan memburuk, meningkatnya biaya operasional yang menyebabkan efisiensi usaha penangkapan menurun, dan yang paling signifikan adalah perubahan suhu akibat iklim yang merubah arus migrasi ikan sehingga populasi ikan berpindah ke wilayah laut yang lebih dalam atau lebih jauh dari wilayah tangkap tradisional, juga tidak menutup kemungkinan adanya perubahan dalam regulasi atau sistem distribusi yang turut mempengaruhi rantai pasok yang pada akhirnya berdampak pada jumlah produksi perikanan tangkap di Kota Makassar.

1.4.10. Masih Rendahnya Produktivitas Perikanan Budidaya

Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Fluktuasi peningkatan dan penurunan ini tercermin pada tahun 2022 ke 2023 terjadi penurunan produksi dari 1,93 ribu ton menjadi 1,53 ribu ton yang disebabkan oleh faktor alam fenomena El Niño dan kekeringan yang menyertainya. Produktivitas perikanan budidaya menunjukkan pola yang dinamis, berbeda dengan sektor perikanan tangkap yang cenderung lebih stabil

1.4.11. Menurunnya Produktivitas Budidaya Perikanan Tambak

Produktivitas budidaya perikanan tambak yang menurun tercermin dalam kurun waktu 11 (sebelas) tahun sejak tahun 2013, dengan produksi sebesar 181,3 ton menjadi 103,5 ton pada tahun 2023.

1.4.12. Tingginya Ketidakstabilan Harga Komoditas Pangan

Tingginya ketidakstabilan harga komoditas pangan tercermin dari Persentase Koefisien Variasi Harga antar Waktu Barang kebutuhan dalam kurun waktu 2022-2023

nilainya selalu berada di kisaran 10,5 –10,6%.

1.4.13. Belum Efektifnya Iklim Investasi Dalam Pembentukan Modal Bruto

Meskipun tingkat pertumbuhan tahunan menurun di tahun 2024 menjadi 3,31%, nilai PMTB tetap meningkat dari 105 Triliun di tahun 2023 menjadi 109 triliun di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun laju pertumbuhan relatif melambat, akumulasi investasi tetap berlangsung, yang mendukung pertumbuhan nilai total PMTB secara positif.

1.4.14. Rendahnya Ekspor Dibandingkan Impor di Kota Makassar

Menunjukkan bahwa nilai net ekspor di kota Makassar negative, perkembangan net ekspor di kota makassar berfluktuatif selama tahun 2020-2023 dan secara umum mengalami trend yang meningkat. Hal ini disebabkan nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspornya.

1.4.15. Rendahnya Kontribusi PDRB Kota Makassar Terhadap PDB Nasional Rendahnya kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap PDRB Nasional

Secara umum, tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian Indonesia cenderung memperlihatkan tren kontribusi PDRB Kota Makassar terhadap perekonomian nasional dari 2020 hingga 2024 cenderung menunjukkan sedikit penurunan, dari 1,15% di 2020 menjadi sekitar 1,10% di 2024. Meskipun demikian, kontribusi ini relatif stabil di kisaran 1,1% hingga 1,15%, dan fluktuasi kecil tersebut menunjukkan bahwa peran ekonomi Makassar terhadap perekonomian nasional tetap konsisten meskipun mengalami sedikit penurunan selama periode tersebut.

1.4.16. Rendahnya Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Selama periode 2020 hingga 2024, pendapatan daerah Kota Makassar menunjukkan tren peningkatan yang cukup positif, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp1,07 triliun lebih pada tahun 2020 menjadi Rp1,60 triliun lebih pada tahun 2024, dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 10,52 persen per tahun. Peningkatan ini terutama didorong oleh kinerja pajak daerah dan retribusi daerah yang mengalami lonjakan pada tahun 2022 dan 2023. Sementara itu, pendapatan transfer cenderung stabil namun menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2023 dan 2024, terutama dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pendapatan lain-lain daerah yang sah bersifat fluktuatif, dengan penurunan tajam pada tahun 2022 yang disebabkan tidak diterimanya bantuan keuangan pada tahun tersebut. Secara keseluruhan, total pendapatan daerah meningkat dari Rp. 3,32 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp. 4,20 triliun pada tahun 2024, atau tumbuh rata-rata sekitar 6 persen per

tahun.

1.4.17. Rendahnya Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Masih Rendahnya Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Pada tahun 2020, tax ratio kota Makassar berada di angka 0.48 dan meningkat menjadi 0.49 pada tahun selanjutnya. Memasuki tahun 2022, tax ratio meningkat menjadi 0.57, didorong oleh kenaikan pajak daerah menjadi sekitar 1.18 triliun dan kenaikan nilai PDRB menjadi sekitar 208.9 triliun. Pada tahun 2023, Tax Ratio berada di angka 0,60 dengan kondisi pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1,35 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 226,9 triliun. Tax ratio Kota Makassar pada tahun 2024 di angka 0,58, dengan pajak daerah meningkat menjadi sekitar 1,41 triliun dan nilai PDRB meningkat menjadi sekitar 243 triliun.

1.5. Pendidikan Yang Berkualitas Yang Merata

1.5.1. Indeks Pendidikan

7 tahun 2020 menjadi 15,62 tahun 2025, demikian halnya Rata-Rata lama sekolah meningkat 4,36 poin dari 11,21 pada tahun 2021 menjadi 11,57 pada tahun 2025. Kedua komponen tersebut telah memberi kontribusi peningkatan Indeks Pendidikan dengan kenaikan 1,33 poin pada tahu periode tahun yang sama. Hal ini menunjukan, masyarakat semakin menyadari bahwa Pendidikan merupakan kebutuhan dasar dan memiliki potensi untuk dilakukan pembinaan dan peningkatan dalam pencapaian pendidikan yang lebih baik di Kota Makassar yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan.

Penduduk Kota Makassar berdasarkan tingkat pendidikan, yang tertinggi berada pada tingkat Sekolah Menengah (SMA/MA/Sederajat) dengan jumlah 457.346 jiwa (30,90%), dan yang terendah berada pada tingkat Doktoral (S3) yakni sebesar 2.692 jiwa atau 0,17%. Tingkat pendidikan menentukan Kualitas Sumber Daya Manusia, sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan sebuah kota. SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang tinggi dapat memberikan kontribusi besar dalam sektor-sektor yang memerlukan keahlian khusus, seperti industri, teknologi, dan pelayanan profesional. SDM dengan Pendidikan yang baik menciptakan masyarakat yang lebih terdidik, inovatif, dan dapat bersaing secara global. Pentingnya pengembangan SDM dalam kemajuan sebuah kota menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pembangunankapasitas manusia merupakan langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan dan keberlanjutan jangka

panjang

1.5.2. Minat Baca Masyarakat (Literasi)

Selama ini Indonesia mengukur pencapaian sektor pendidikan menggunakan indikator yang sifatnya kuantitas seperti rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dll. Indikator ini penting dalam melihat pencapaian pembangunan pendidikan, tapi tidak cukup karena tidak menggambarkan sejauh mana kualitas pendidikan di Indonesia. Bank Dunia merilis laporan tentang kualitas pendidikan Indonesia. Dalam laporannya, dijelaskan bahwa Indonesia telah meraih banyak pencapaian pembangunan pendidikan diukur dengan berbagai indikator kuantitatif, misalnya angka partisipasi sekolah (APS). Bank Dunia memberikan catatan kritis terhadap pencapaian pendidikan Indonesia yang bermasalah dalam kualitas pendidikan dengan menyebut bahwa sebagian besar siswa di Indonesia memang bersekolah tapi tidak belajar.

Pada tahun 2022 pengukuran dilakukan secara mandiri oleh Dinas Perpustakaan Kota Makassar melalui kegiatan kegiatan survey minat baca diangka 44,81 persen. Pada tahun 2021-2024 Pembangunan literasi masyarakat dalam perhitungan IPLM yang dilakukan Perpustakaan Nasional RI bekerja sama dengan Lembaga kajian, selama kurun waktu empat tahun terakhir, indeks pembangunan literasi masyarakat yang menunjukkan tren pertumbuhan positif yang signifikan.

Pada tahun 2021, dengan target capaian sebesar 47 persen IPLM berhasil dicapai pada angka 45,31 persen sedikit melampaui target yang ditetapkan. Kinerja ini terus meningkat pada tahun 2022, dimana target 50 persen berhasil dicapai 64,56 persen. Peningkatan yang konsisten berlanjut pada tahun 2023 dengan target 55 persen namun capaian berhasil menembus angka 74,14 persen. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, dimana target 60 persen dilampaui dengan capaian mengesankan sebesar 78,99 persen. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas literasi masyarakat melalui berbagai program dan inisiatif strategi, serta partisipatif aktif masyarakat dalam membangun budaya literasi yang berkelanjutan.

1.5.3. Rendahnya Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

Tahun 2019, ada 22,8% penduduk usia kerja di Kota Makassar yang berkualifikasi pendidikan tinggi atau setara 258.431 orang. Dari total penduduk usia kerja yang berkualifikasi pendidikan tinggi, 75,13% adalah angkatan kerja dan 24,87% bukan angkatan kerja. Dua tahun kemudian, proporsinya naik ke 23,15% atau setara 281.364

orang, menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi tinggi Kota Makassar bertambah sebanyak 22.933 orang, 74,59% diantaranya adalah angkatan kerja dan sisanya bukan angkatan kerja. Tahun 2022, jumlah penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Makassar turun sebanyak 35.582 orang sehingga totalnya menjadi 245.782 orang atau 19,97%.

Penurunan terjadi pada penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi yang termasuk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja masing-masing berkurang 21.382 orang dan 14.200 orang dari tahun sebelumnya. Tahun 2023, proporsinya kembali naik ke 21,91% atau 243.183 orang, namun masih relatif lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dan 2021. Pada tahun 2023, jumlah penduduk usia kerja yang memiliki kualifikasi pendidikan tinggi hanya bertambah 2.599 orang, tapi jika dibandingkan pada kategori angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, penambahan hanya terjadi pada kategori bukan angkatan kerja, sementara pada angkatan kerja terjadi penurunan penduduk usia kerja berkualifikasi pendidikan tinggi.

1.5.4. Masih Rendahnya Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang yang Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan

Dalam lima tahun terakhir persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan tinggi yang ditamatkan di Kota makassar cenderung turun kemudian mulai meningkat di tahun 2023 dan menurun di tahun 2024. Tahun 2020, dari total pekerja di Kota Makassar, 29,19 persen diantaranya berkualifikasi pendidikan tinggi atau setara dengan 170.859 orang. Kemudian di tahun 2021 sebesar 29.09 persen atau setara dengan 183.243, tahun 2022 sebesar 27.46 persen atau setara dengan 176.654, tahun 2023 sebesar 28.37 persen atau setara dengan 165.343 orang. Tahun 2024 sebesar 26.84 persen atau setara dengan 168.883 persen.

1.6. Permasalahan dari Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

1.6.1. Rendahnya Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Jumlah hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan fluktuasi dan jika dirata-ratakan mengalami pertumbuhan dari capaian pada tahun 2020, sebesar 9,14% jika dibandingkan terhadap jumlah rumah tangga keseluruhan.

1.7. Permasalahan dari Daya Saing Iklim Investasi

1.7.1. Belum Optimalnya Kualitas Ketertiban dan Keamanan Masyarakat

Data tahun 2020 dan 2021 persentase tindak kriminal yang ditangani di Kota Makassar cenderungnaik yakni 56,86% dan 59,55% dikarenakan turunnya jumlah kasus yang dilaporkan. Namun pada tahun 2022 persentase tindak kriminal yang ditangani di Kota Makassar turun menjadi 32,58% karena kasus yang dilaporkan menurun dan belum semua tindak kejahatan tersebut berhasilditangani. Kenaikan kembali terjadi dua tahun berturut-turut, tahun 2023 menjadi 53,04 persen, dan sampai ke angka 54,03 persen pada tahun 2024.

1.7.2. Masih Rendahnya harmonisasi kehidupan beragama

Pada tahun 2020, Kota Makassar mengalami beberapa peristiwa yang dinilai mencederai toleransi. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga Kota Makassar dimasukkan dalam 10 kota dengan indeks paling rendah pada tahun 2020. Sepanjang tahun 2020, di Kota Makassar telah terjadi 11 peristiwa intoleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan.

1.8. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum

1.8.1. Belum Optimalnya Kualitas Pelayanan Publik

Selama 5 tahun terakhir terdapat perubahan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kota Makassar. Pada tahun 2020 nilai IPP 0 (Na) dan pada tahun 2021 nilai IPP mencapai 4,06, tapi tiga tahun berikutnya nilai tersebut terus menurun ke angka 4,04 dan 3,86 bahkan di tahun 2024 nilainya hanya 3,21. dimana salah satu perangkat daerah yang menjadi lokus penilaian Nilai IPP KemenPANRB yang rendah mempengaruhi nilai Indeks Pelayanan Publik secara keseluruhan. Capaian IPP Kota Makassar tahun 2023 dan 2024 menempati kategori "baik". Hal ini menunjukkan bahwa unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memiliki sarana prasarana yang baik, dan sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.

1.8.2. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai Indeks SPBE mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dari nilai predikat baik dengan nilai indeks 2,6 pada tahun 2020 menjadi sangat baik dengan nilai indeks 4,01 pada tahun 2024, berdasarkan hasil evaluasi secara nasional terhadap 4 domain dan 8 aspek penilaian. Indeks SPBE Kota Makassar lebih tinggi jika dibandingkan terhadap rata-rata capaian indeks secara nasional, provinsi,

kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah Non Kementerian serta Lembaga Non Struktural dan instansi lainnya, dan lebih rendah 0,02 jika dibandingkan nilai SPBE Kementerian.

1.8.3. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Terintegrasi.

Dalam kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, layanan publik di Kota Makassar mengalami peningkatan dalam aspek digitalisasi. Namun hingga tahun 2024 hanya 49% layanan publik yang telah diselenggarakan secara online dan terintegrasi, yaitu sebanyak 21 dari 43 layanan publik online. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam digitalisasi layanan, masih terdapat tantangan dalam integrasi sistem dan interoperabilitas antar aplikasi.

1.8.4. Kualitas Penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian.

Kualitas Penelitian terhadap hasil penelitian telah mengalami peningkatan terlihat dari capaian kinerja dan 78,38%, dan anggaran 96,57%.

1.8.5. Rendahnya Kualitas Reformasi Birokrasi

Tahun 2023 IRB pemerintah Kota Makassar mengalami kenaikan yang cukup signifikan hingga 77,30 atau naik 11,03 poin dan menjadi angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan catatan terkait dengan capaian tahun 2023 yaitu angka IRB tahun 2023 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena adanya perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot, dan kriteria penilaian yang sangat berbeda dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 nilai IRB Kota Makassar mengalami penurunan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya yaitu 76,78. Meskipun demikian dengan capaian ini Kota Makassar masih termasuk dalam kategori BB atau baik.

1.8.6. Rendahnya Penilaian Integritas Pemerintah Kota Makassar

Tahun 2023, indeks SPI kembali naik 6,73 poin menjadi 73,11 atau masuk dalam kategori "waspada". Capaian tahun 2024 lebih rendah dari nilai tahun sebelumnya 62,33. Nilai indeks menunjukkan bahwa pemerintah kota pada dimensi keyakinan bahwa petugas memberikan informasi dan prosedur layanan yang lengkap kepada pengguna layanan masuk dalam kategori Terjaga dengan angka tertinggi 78.0,

1.8.7. Belum Optimalnya Pengendalian Intern Pemerintah

Sejak tahun 2020 hingga tahun 2025, nilai indeks maturitas pemerintah Kota Makassar sudah mencapai level 3 atau termasuk kategori "terdefinisi". Tingkat maturitas "Terdefinisi" menunjukkan bahwa organisasi, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Pemerintah Kota Makassar tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah

mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Selain itu Pemerintah Kota Makassar juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi. Level terdefinisi merupakan level ketiga dari lima level maturitas, dimana dua level di atasnya adalah Tingkat Terkelola dan Terukur dan Tingkat Optimum.

1.8.8. Indeks Inovasi Daerah

Selama empat tahun terakhir, Kota Makassar berhasil mencatat angka indeks inovasi daerah yang cenderung naik. Tahun 2021, angka indeks Makassar sudah mencapai 60,1 atau termasuk kategori "sangat inovatif", tapi setahun kemudian turun ke 53,09 atau kategori "inovatif", tahun 2023 mendapat nilai sebesar 70,15. Memasuki tahun 2024, Kemendagri memberikan nilai indeks inovasi daerah ke Kota Makassar sebesar 76,56, tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Capaian tersebut kembali menjadikan Kota Makassar sebagai daerah yang "sangat inovatif". Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah Selanjutnya pada tahun 2023 jumlah inovasi yang terealisasi kembali meningkat sebanyak 79 atau terjadi peningkatan sebesar 46,30%. Pada tahun 2025 jumlah inovasi terus meningkat menjadi 101 inovasi dengan persentase kenaikan 27,85%.

H. VISI DAN MISI KEPALA DAERAH.

VISI

Visi Pembangunan Kepala Daerah terpilih adalah dalam Periode tahun 2025-2029 adalah :

"Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan"

Rumusan Visi Pembangunan Kota Makassar, merupakan pernyataan mengenai keadaan (*clarity of direction*) yang ingin dicapai dimasa depan (*desired future*) dalam 5 (lima), yang menunjukkan gambaran ideal masa depan bagi Kota Makassarberdasarkan kondisi dan situasi saat ini. Rumusan visi ini mengandung 4 (empat) Pokok Visi, yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.20
Penjelasan Visi RPJMD Kota Maakassar Tahun 2025-2029

VISI	POKOK-POKOK VISI	PENJELASAN VISI
MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN dan BERKELANJUTAN	**UNGGUL**	Makassar sebagai kota yang maju dengan kualitas modal manusia yang unggul, masyarakat yang sejahtera, perekonomian yang produktif, infrastruktur yang ramah lingkungan, dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin).
	Inklusif	Makassar sebagai kota dimana semua lapisan dan golongan masyarakat terlibat dan mendapat manfaat dari pembangunan kota, tanpa memandang usia, jenis kelamin, status ekonomi, latar belakang budaya, atau kelompok sehingga dapat hidup, bekerja, dan berpartisipasi secara setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Makassar yang ramah terhadap kelompok disabilitas dan kelompok rentan lainnya, membuka panggung partisipasi dan inisiatif untuk berbagai kelompok masyarakat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kota.
	Aman	Makassar sebagai kota yang bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban umum, kriminalitas dan konflik sosial, serta menjamin keselamatan publik
	Berkelanjutan	Makassar sebagai kota yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan penggunaan sumber daya secara efisien serta tangguh dalam penanganan bencana dan dampak perubahan iklim. Kondisi ini didukung oleh tata kelola yang berintegritas serta masyarakat sipil yang partisipatif

Sumber : Bappeda Kota Makassar (RPJMD tahun 2025-2029 Kota Makassar)

MISI

Untuk mewujudkan Visi tersebut, disusun Misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan. Misi merupakan penggambaran Visi yang ingin dicapai dan disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan untuk mencapai Visi tersebut. Rumusan Misi RPJMD Kota Makassar 2025 – 2029 adalah :

1. Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja;
2. Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
3. Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan;
4. Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata;
5. Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum ;
6. Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga ;
7. Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana

Misi disusun untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Keterkaitan antara pokok-pokok visi dengan penjelasan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel I.21
Penjelasan Visi Misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

"MAKASSAR UNGGUL, INKLUSIF, AMAN, DAN BERKELANJUTAN"

POKOK VISI	MISI	PENJELASAN MISI
MAKASSAR UNGGUL	Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja	Misi ini mencakup upaya mewujudkan Kota Makassar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi makro daerah yang terjaga. Pertumbuhan ekonomi didorong melalui peningkatan produktivitas sektor industri, perdagangan, dan sektor unggulan lainnya yang berkontribusi dominan terhadap PDRB. Upaya ini juga meliputi perluasan kesempatan kerja dan berusaha, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penguatan ekonomi kreatif dan UMKM. Stabilitas ekonomi makro diwujudkan melalui penguatan kemandirian fiskal daerah, peningkatan realisasi investasi, pengendalian inflasi, serta ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi makro diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus memperluas lapangan kerja bagi masyarakat.
	Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Misi ini mencakup upaya peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, serta penguatan daya beli masyarakat untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan kompetitif. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pemenuhan pelayanan dasar pendidikan yang merata, berkualitas, dan terjangkau; penyelenggaraan pendidikan yang adaptif dan inovatif; serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Di bidang kesehatan, diarahkan pada pembudayaan perilaku hidup sehat, pemenuhan akses layanan kesehatan berkualitas dan inklusif, percepatan eliminasi penyakit, penerapan kebijakan promotif–preventif, dan penguatan sistem surveilans kesehatan. Sementara itu, peningkatan daya beli masyarakat dilakukan melalui penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, dan penguatan usaha produktif masyarakat
	Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan	Misi ini mencakup upaya mewujudkan peningkatan infrastruktur perkotaan yang berkualitas, merata, dan terintegrasi untuk mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebinamargaan, dan keciptakaryaan, serta prasarana publik lainnya yang aman, tangguh, dan berkelanjutan. Di sisi lain, penataan ruang difokuskan pada peningkatan ketersediaan dan keterpenuhan dokumen rencana tata ruang, pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara konsisten. Penataan ruang ini dilaksanakan dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, daya saing, dan mitigasi risiko bencana, sehingga mampu menciptakan kota yang tertata, nyaman, dan responsif terhadap perkembangan kebutuhan masyarakat.
	Misi 4: Mengembang kan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata	Misi ini mencakup upaya-upaya untuk mewujudkan kondisi meningkatnya kualitas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta meningkatnya daya saing pariwisata. Peningkatan kualitas penguasaan Iptek diwujudkan melalui rangkaian kinerja berupa penguatan kapabilitas inovasi daerah dan peningkatan kualitas transformasi digital. Pada saat yang sama, pengembangan sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari sektor pariwisata, yang didukung oleh peningkatan kualitas dan kuantitas industri ekonomi kreatif, serta pemajuan seni dan budaya. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu untuk menciptakan ekosistem inovasi, seni budaya, dan pariwisata yang saling menguatkan,sehingga mampu mendorong daya saing Kota Makassar di tingkat nasional maupun internasional.
MAKASSAR AMAN	Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing, Serta Menegakkan Ketertiban Umum	Misi ini mencakup upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas birokrasi yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik. Pencapaian good governance dilakukan melalui pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten, penguatan integritas aparatur, dan peningkatan kapasitas manajerial organisasi perangkat daerah. Selain itu, misi ini juga mengakomodasi peningkatan kinerja urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Hal tersebut mencakup upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif, bebas dari gangguan keamanan, kriminalitas, dan konflik sosial, serta terjaminnya keselamatan publik.

MAKASSAR INKLUSIF	Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga	Misi ini mencakup upaya peningkatan kualitas kesetaraan gender, perlindungan anak, dan perlindungan sosial yang adaptif serta tepat sasaran. Peningkatan kesetaraan gender diarahkan pada penurunan ketimpangan gender dan penguatan perlindungan anak, termasuk upaya memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Perlindungan sosial yang adaptif dilaksanakan untuk menurunkan angka kemiskinan, mengurangi disparitas pendapatan, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat. Selain itu, misi ini juga mencakup pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai sarana pembinaan karakter, peningkatan prestasi, dan penguatan peran generasi muda dalam pembangunan daerah.
MAKASSAR BERKELANJUTAN	Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup, dan Mitigasi Bencana	Misi ini mencakup upaya mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan kualitas air dan udara, penambahan dan perbaikan ruang terbuka hijau, serta optimalisasi pengelolaan persampahan. Selain itu, misi ini juga mencakup peningkatan ketangguhan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim melalui penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi, guna menjaga keselamatan, keberlanjutan lingkungan, dan ketahanan

KOTA MAKASSAR
SEKALI LAYAR TERKEMBANG
PANTANG BIDUK SURUT KE PANTAI

I. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH

Tabel I.22
Program Prioritas RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2030

Visi: Makassar Unggul, Inklusif, Aman, dan Berkelanjutan

Misi/Tujuan/Sasaran/Program Prioritas	Outcome	Indikator Tujuan/Sasaran/Program	Baseline 2024	Target 2025	*Program Prioritas*	*Prioritas Pembangunan Daerah*
Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah. dan Penciptaan Lapangan Kerja						
Tujuan 1.1: Terwujudnya Kota Makassar Dengan Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi		**Pertumbuhan Ekonomi (%)**	5,56%	5,73%		
Sasaran 1.1.1: Meningkatnya Kontribusi Sektro Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah		**1.Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)**	18,17%	19,29%		
		2.Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor (%)	20,03%	20,10%%		
	Outcome: Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4,8%	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1. Mendorong sektor unggulan daerah, penciptaan kesempatan kerja, dan kemudahan berusaha yang didukung peningkatan skill dan pengembangan ekonomi kreatif terintegrasi
	Outcome: Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai ekspor barang kota Makassar	11,95%	12,10%	Program Pengembangan Ekspor	
	Outcome: Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	60%	70%	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
	Outcome: Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N/A	1%	Program Pengembangan UMKM	
Sasaran 1.1.2: Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat		**1.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)**				
		2.PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)				

	Outcome: Meningkatnya produktivitas dan kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20,49%	21,21%	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2. Penciptaan iklim investasi yang kompetitif dan peningkatan
	Outcome: Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,05%	61%	Program Penempatan Tenaga Kerja	andirian fiskal daerah, yang didukung stabilitas harga, dan ketahanan pangan
	Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,45%	15%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%		
	Outcome: Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	20,603.90 Ton	21,401 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	
	Outcome: Meningkatnya kualitas SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	10%	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
	Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16,61%	17,75%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
Tujuan 1.2: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	4,10%	4,17%		
Sasaran 1.2.1: Meningkatnya Kemandirian Fiskal		Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,58%	0,59%		

Daerah						
	Outcome: Meningkatnya pendapatan daerah melalui pajak daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	38,17	42,30%	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	
		Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	-	-		
		Persentase Penerapan sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	-	-		
Sasaran 1.2.2: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan		Tingkat Inflasi (%)	1,19%	1,52%		
		Indeks Ketahanan Pangan	87,95%	88,00%		
	Outcome: Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	100%	100%	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%		
	Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	100%	100%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	

	Outcome: Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian (urban farming)	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	15,614 Ton	15,615 Ton	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
		Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	5,4 Ton	7 Ton		
		Peningkatan Produksi Hortikultura	310.1 Ton	40 Ha		
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas penganekaragaman pangan di masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKG)	2,812 kkal/kapita	2,825 kkal/kapita	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
		Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi	2,041 kkal/kapita	2,042 kkal/kapita		
	Outcome: Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1,519.58 Ton	1,559 Ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
	Outcome: Meningkatnya jumlah wilayah tahan pangan sesuai kewenangan kota	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,31%	1,30%	Program Penanganan Kerawanan Pangan	
Sasaran 1.2.3: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar		Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah (%)	-50,26%	8,75%		
	Outcome: Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investas	Rp.3,827,931,439,043	Rp.30,00,000,000,000,	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	

	Outcome: Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	80%	90%	Program Pelayanan Penanaman Modal	
	Outcome: Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Misi 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing						
Tujuan 2.1: Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia	85,23%	85,46%		
Sasaran 2.1.1: Meningkatnya Kualitas Dan Aksesibilitas Pendidikan		Indeks Pendidikan	81,96%	82,03%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar	Angka Partisipasi Sekolah (5-6 tahun)	65,82%	72,19%	Program Pengelolaan Pendidikan	3. Peningkatan akses dan kualitas layanan Pendidikan dan Kesehatan
		Angka Partisipasi Sekolah (7-15 tahun)	98,72%	99,80%		
		Skor Kemampuan Literasi SD	62,86%	65,36%		
		Skor Kemampuan Literasi SMP	71,66%	72,76%		
		Skor Kamampuan Numerasi SD	54,38%	57,28%		
		Skor Kemampuan Numerasi SMP	62,85%	64,35%		

		Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	N/A	100%	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	84,52%	84,60%	Program Pembinaan Perpustakaan	
Sasaran 2.1.2: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (Tahun)	75,33%	75,51%		
	Outcome: Meningkatnya upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	
		Persentase ibu bersalin mendapatkanPelayanan persalinan	100%	100%		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%		
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%		
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,88%	100%		
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatasmendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar	93,61%	100%		

		Persentase penderita hipertensi yangMendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83,56%	100%		
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanankesehatan sesuai standar	100%	100%		
		Persentase ODGJ berat Yang mendapatkan Pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%		
		Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%		
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%		
Sasaran 2.1.3: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat		Pengeluaran Per Kapita (Juta Rupiah/Per Kapita/Tahun)	18,386	19,301		
	Outcome: Meningkatnya realisasi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investas	Rp.3,827,931,493,043	Rp.30,00,000,000,000	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	Outcome: Meningkatnya kapasitas UMKM yang mandiri	Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,45%	15%	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
		Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%		
	Outcome: Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,05%	61%	Program Penempatan Tenaga Kerja	

Misi 3: Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota Yang Berkeadilan						
Tujuan 3.1: Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan Yang Berkualitas dan Merata		Indeks Layanan Infrastruktur	74,25%	78,69%		
Sasaran 3.1.1: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi		1. Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35,40%	83,59%		
		2. Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49,39%	26,49%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan perkotaan	Persentase Jalan dalam kondisi baik	98,00%	87,74%	Program Penyelenggaraan Jalan	4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan yang didukung pengelolaan penataan ruang yang berkelanjutan
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	20 Perumahan	100%	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	
	Outcome: Meningkatnya jumlah rumah layak huni pada kawasan kumuh	Persentase Pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah pencegahan kumuh	N/A	3,69%	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	
	Outcome: Meningkatnya perlindungan masyarakat dari banjir, dan genangan	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Makassar	89,15%	54,85%	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	

		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi. erosi. dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	54,45%	55,64%		
	Outcome: Meningkatnya akses rumah tangga terhadap air siap minum perpipaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3,75%	4,12%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
		Persentase Rumah Tangga Yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	0,08%	0,19%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas sistem drainase perkotaan	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3,75%	4,12%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan gedung pemerintah	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	N/A	49,65%	Program Penataan Bangunan Gedung	
Sasaran 3.1.2: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (%)	10%	10%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	N/A	100%	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni Budaya, dan Pariwisata						
Tujuan 4.1:		Indeks Inovasi Daerah	76,56%	77,59%		

Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah						
Sasaran 4.1.1: Meningkatnya Penguasaan IPTEK		Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46%	4,51%		
	Outcome: Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	Program Riset dan Inovasi Daerah	
Sasaran 4.1.2: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan		Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah (%)	101 Inovasi	2 Inovasi		
	Outcome: Meningkatnya hasil riset dan inovasi yang dimanfaatkan dalam pembangunan daerah	Persentase Produk Inovasi Yang Dimanfaatkan	N/A	100%	Program Riset dan Inovasi Daerah	5. Peningkatan daya saing sektor pariwisata dengan penguatan industri ekonomi kreatif berbasis kekayaan seni budaya lokal
Tujuan 4.2: Meningkatnya Daya Saing Pariwisata		Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi, Makan dan Minum Terhadap PDRB (%)	2,18%	2,23%		
Sasaran 4.2.1: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan		Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Orang)	Rp. 5,619,596	Rp. 5,626,657		
		Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan (Hari)	1,51%	1,63%		
	Outcome: Meningkatnya kuantitas daya tarik pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	24,88%	5%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	

Sasaran 4.2.2: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya		Persentase peningkatan karya budaya terdaftar dalam Warisan Budaya Takbenda (%)	75%	33,3%		
		Persentase cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan	N/A	100%		
	Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Persentase Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100% (350 Orang)	100%	Program Pengembangan Kebudayaan	
	Outcome: Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	N/A	20%	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
Sasaran 4.2.3: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif		Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	4,220	4,515		
		Persentase Industri Ekonomi kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital	N/A	12,44%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2,20%	2,75%	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Berdaya Saing. Serta Menegakkan Ketertiban Umum						
Tujuan 5.1: Meningkatnya Kualitas Birokrasi Yang Berintegritas Dan Adaptif		Indeks Reformasi Birokrasi	78,64%	79,97%		

Sasaran 5.1.1: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	69,69%	69,75%		
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01%	4,02%		
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	87,00%	87,48%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan penguatan meritokrasi dan
	Outcome: Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	76,21%	78,21%	Program Penyelenggaraan Pengawasan	pemanfaatan teknologi digital
	Outcome: Meningkatnya tata kelola keuangan daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	26,59%	29,69%	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,99%	40,58%		
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80,71%	85%		
		Persentase Penurunan SILPA	5,59%	4,35%		
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	100%	100%		

	Outcome: Meningkatnya pemenuhan kebutuhan layanan kepegawaian	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	65%	73%	Program Kepegawaian Daerah	
		Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	55%	71%		
	Outcome: Meningkatnya integrasi aplikasi pemerintah daerah (Makassar super apps)	Persentase SKPD yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	N/A	100%	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	
Tujuan 5.2: Meningkatnya Kualitas Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Umum		Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	N/A	75%		
Sasaran 5.2.1: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat		Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani (%)	54,03%	55,03%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kota Makassar	100%	100%	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum serta keamanan masyarakat, dengan penguatan nilai- nilai agama dan toleransi
	Outcome: Meningkatnya kualitas sistem keamanan lingkungan di setiap RT/RW	Persentase gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	90%	90%	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
Sasaran 5.2.2: Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat		Indeks Kota Toleran	4,363	4,688		
	Outcome: Menurunnya jumlah konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	85%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	

					Penanganan Konflik Sosial	
	Outcome: Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan, Penyalagunaan, Narkotika, Fasilitasi Kerukunan, Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	85%	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penyandang Disabilitas, Serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga						
Tujuan 6.1: Meningkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender		Indeks Pembangunan Keluarga	63,13%	63,14%		
Sasaran 6.1.1: Menurunnya Ketimpangan Gender		Indeks Ketimpangan Gender	0,183%	0,179%		
	Outcome: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71%	75%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	8. Peningkatan kualitas keluarga dan pembangunan gender, pemberdayaan kelompok marjinal, serta penguatan daya saing kepemudaan dan keolahragaan
	Outcome: Meningkatnya kualitas dan kuantitas	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	1,05%	1%	Program Perlindungan Perempuan	

	penanganan kekerasan terhadap perempuan					
Sasaran 6.1.2: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak		Indeks Perlindungan Anak	67,04%	69,44%		
	Outcome: Meningkatnya pemenuhan hak anak secara komprehensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	61,65%	65,55%	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
	Outcome: Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi terhadap anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait di Kota Makassar	100%	100%	Program Perlindungan Khusus Anak	
Sasaran 6.1.3: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga		1.Indeks Pembangunan Pemuda	57,67%	59%		
		2.Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476%	0,497%		
	Outcome: Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	16,61%	17,75%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	
	Outcome: Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100%	100%	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	
Tujuan 6.2: Meningkatnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif Dan Tepat Sasaran		Tingkat Kemiskinan (%)	4,97%	3,62%		
Sasaran 6.2.1: Menurunnya Disparitas		Gini Rasio	0,372%	0,366%		

Pendapatan						
	Outcome: Meningkatnya kualitas perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100%	100%	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	N/A	80%		
Sasaran 6.2.2: Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	41,1%	41,81%		
	Outcome: Meningkatnya layanan penempatan tenaga kerja bagi pencari kerja	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kota Makassar	60,05%	61%	Program Penempatan Tenaga Kerja	
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		
		Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%		
		Jumlah Warga Negara Gelandang dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti	100%	100%		
Misi 7:						

Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup. Serta Mitigasi Bencana						
Tujuan 7.1: Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41%	66,17%		
Sasaran 7.1.1: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		1. Indeks Kualitas Air	58,70%	73,95%		
		2. Indeks Kualitas Udara	74,92%	75,22%		
		3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92%	36,06%		
		4. Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01	6		
	Outcome: Meningkatnya kualitas pemenuhan baku mutu lingkungan	Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100%	100%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	9. Pelestarian lingkungan hidup, penguatan mitigasi bencana, dan adaptasi perubahan iklim
	Outcome: Meningkatnya keterpenuhan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	5,66%	6,23%	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	
	Outcome: Meningkatnya pengelolaan persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01%	10%	Program Pengelolaan Persampahan	
	Outcome: Meningkatnya kinerja pelayanan publik berbasis kelurahan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	96%	90%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	

Tujuan 7.2: Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana	113,71%	110%		
Sasaran 7.2.1: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim		Indeks Ketahanan Daerah	0,46%	0,47%		
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	N/A	32,46		
	Outcome: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%		
		Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%		
	Outcome: Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	Program Penanganan Bencana	
	Outcome: Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
		Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (response time 15 Menit)	15 Menit	15 Menit		

	Outcome:Meningkatnya pengelolaan persampahan	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01%	10%	Program Pengelolaan Persampahan	
	Outcome: Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Kinerja Lalu Lintas Kota	0,48%	0,47%	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	
		Persentase Kelengkapan Jalan Yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57,22%	60%		

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029

J. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN.

Adapun kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel I.23
Kegiatan Pembangunan Daerah berdasarkan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar tahun 2025

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.01.01.2.13	Penataan Organisasi
1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
1.01.05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
1.03.0.00.0.00.02.0000	DINAS PENATAAN RUANG
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
1.04.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.04.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.04.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.04.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.04.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
1.04.02.2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.06.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
1.05.0.00.0.00.02.0000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia
1.05.0.00.0.00.03.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.05.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**
2.07.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETENAGAKERJAAN
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**
2.08.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**
2.09.0.00.0.00.01.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**
2.10.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERTANAHAN
2.10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.10.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.10.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.10.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
2.10.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.10.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.10.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.10.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.10.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3
2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah
2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**
4.01.2.13.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.14.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.14.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.14.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.15.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**
2.17.0.00.0.00.01.0000	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.17.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.02.2.02	Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**
2.19.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**
2.16.2.20.2.21.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**
2.22.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.22.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.22.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.22.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.22.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.22.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.22.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.22.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
2.22.05.2.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**
2.23.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERPUSTAKAAN
2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
2.23.03.2.02	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**
2.24.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEARSIPAN
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.24.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2.24.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2.24.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
2.24.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2.24.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
2.24.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.24.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.24.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota
2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**
3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**
3.26.0.00.0.00.01.0000	DINAS PARIWISATA
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
3.26.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.26.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.26.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.26.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.26.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.26.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**
3.25.3.27.0.00.01.0000	DINAS PERIKANAN DAN PERTANIAN
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**
3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN
3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
3.30.02.2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**
3.30.3.31.0.00.01.0000	DINAS PERDAGANGAN
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**
4.01.2.13.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.0.00.0.00.01.0000	**SEKRETARIAT DPRD**
4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**
5.01	**PERENCANAAN**
5.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
5.02	**KEUANGAN**
5.02.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah
5.02.0.00.0.00.03.0000	**BADAN PENDAPATAN DAERAH**
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
5.03	**KEPEGAWAIAN**
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
5.03.5.04.0.00.01.0000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
5.05.0.00.0.00.02.0000	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
5.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
5.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
5.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**
6.01.0.00.0.00.03.0000	INSPEKTORAT DAERAH
6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**
7.01	**KECAMATAN**
7.01.0.00.0.00.01.0000	KECAMATAN BIRINGKANAYA
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.02.0000	**KECAMATAN BONTOALA**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.03.0000	**KECAMATAN MAKASSAR**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.04.0000	**KECAMATAN MAMAJANG**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.05.0000	**KECAMATAN MANGGALA**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.06.0000	**KECAMATAN MARISO**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.07.0000	**KECAMATAN PANAKKUKANG**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.08.0000	**KECAMATAN RAPPOCINI**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.09.0000	**KECAMATAN TALLO**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.10.0000	**KECAMATAN TAMALANREA**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.11.0000	**KECAMATAN TALLO**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.12.0000	**KECAMATAN UJUNG PANDANG**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.0.00.0.00.13.0000	**KECAMATAN UJUNG TANAH**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.14.0000	**KECAMATAN WAJO**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
7.01.0.00.0.00.15.0000	**KECAMATAN KEPULAUAN SANGKARRANG**
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KODE	URUSAN/PERANGKAT DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8.01.01.2.13	Penataan Organisasi
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayaan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara baik barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup layak. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Pelaksanaan SPM didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Standar Pelayanan Minimal disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Pelayanan dasar merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Dalam melaksanakan pelayanan dasar, yang tidak kalah penting yang harus diperhatikan adalah mutu pelayanan dasar yang diberikan. Mutu pelayanan dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Penerapan SPM didasarkan pada pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdiri atas: 1) Pendidikan, 2) Kesehatan, 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang, 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman, 5) Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, 6) Sosial.

Pelayanan Dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayaan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Yang dimaksud dengan Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara baik barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah

tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan / atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Pelaksanaan SPM didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kreteria barang dan atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan. Pemerintah daerah wajib menerapkan SPM yang meliputi pengumpulan data, penghitungan kebutuhan, penyusunan rencana serta palaksanaannya. Program prioritas SPM dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel I.24
Jenis Pelayanan, Indikator Pencapaian dan Target Pencapaian
Standar Pelayanan Minimal Kota Makassar Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	PROGRAM
I	**BIDANG URUSAN PENDIDIKAN**			
1	Pendidikan Dasar	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100%	Program Pendidikan Dasar
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	Belum ada pengukuran hasil Asesmen Nasional	
2	Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Program Pendidikan Kesetaraan
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	Belum ada pengukuran hasil asesmen nasional	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Program Pendidikan Usia Dini
II	**BIDANG URUSAN KESEHATAN**			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	PROGRAM
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100 %	Program pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan terduga tuberculosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) yang mendapatkan Pelayanan kesehatan	100 %	Program Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular
III	**BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM**			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Program penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Program penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET PENCAPAIAN	PROGRAM
IV	**BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT**			
1	Penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Program penyediaan & rehabiitasi rumah yg layak
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Program penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program
V	**BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada Kabupaten/Kota	100%	Program pelayanan ketentraman
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Program pelayanan informasi rawan
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Program pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Program pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Program pelayanan Penyelamatan dan evakuasi
VI	**BIDANG URUSAN SOSIAL**			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Program rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Program rehabilitasi sosial dasar anak
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Program rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Program rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100%	Program perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.

Proses pembangunan ekonomi di suatu wilayah merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, yang selalu dijalankan oleh pemerintah daerah secara berkelanjutan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari besarnya indikator baik ekonomi maupun sosial, yang pada dasarnya menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan proses pembangunan. Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pemerintah daerah berupaya untuk memastikan bahwa tahapan proses pembangunan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan target-target yang ditentukan. Dalam kondisi perekonomian yang berjalan normal, proses pembangunan relatif tidak mengalami kendala yang signifikan, tetapi apabila perekonomian mengalami guncangan, maka pemerintah daerah sedapat mungkin dapat mengantisipasi agar perekonomian di daerah tidak mengalami penurunan yang tajam. Proses pembangunan tetap harus berjalan dengan perencanaan yang baik dan terarah menjadi salah satu kunci terlaksananya pembangunan ekonomi yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat merupakan agenda terpenting bagi pemerintah daerah tidak terkecuali, Kota Makassar. Langkah awal untuk memulai proses pembangunan adalah menyusun perencanaan pembangunan yang baik dan tepat. Hal ini dimaksudkan agar langkah-langkah untuk mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala yang signifikan. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya akan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Makassar. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan

pemerintahan diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjenjang dari aspek waktu yaitu meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam periode lima tahunan, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode tahunan. Berdasarkan undang-undang di atas, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun perencanaan pembangunan yang memadai dengan target capaian disesuaikan dengan kondisi daerah dan informasi yang ada mengenai program-program di masa datang yang mungkin akan berpengaruh pada besaran target indikator Ekonomi makro. Kajian ekonomi daerah selalu dibutuhkan dalam penyusunan setiap dokumen perencanaan, termasuk dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun rutin setiap tahunnya. Kajian indikator ekonomi makro ini diharapkan dapat membantu dalam menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dan mengetahui sejauh mana capaian indikator ekonomi sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Di samping sebagai dasar untuk penyusunan dokumen RKPD, analisis indikator ekonomi makro ini juga digunakan sebagai salah satu input utama dalam membuat analisis keuangan daerah. Itulah sebabnya mengapa sejak tahun 2014, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar setiap tahun melakukan analisis indikator Ekonomi Makro Kota Makassar untuk memastikan bahwa desain kebijakan pengembangan ekonomi benar-benar didasarkan atas bukti (evidence based). 3 (tiga) Analisis terhadap perekonomian makro biasanya dilakukan dengan mengamati dinamika berbagai indikator utama ekonomi makro. Sebagian indikator ekonomi makro merupakan turunan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menggambarkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu daerah pada waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu satu tahun. Data PDRB disajikan dalam dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. Indikator ekonomi yang merupakan turunan dari PDRB yaitu laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian, PDRB per kapita, dan lain-lain. Selain indikator yang terkait dengan PDRB, indikator ekonomi makro lainnya adalah tingkat inflasi, tingkat pengangguran, kemiskinan dan pembangunan, keuangan daerah dan sebagainya Dalam pespektif kebijakan, analisis indikator ekonomi makro yang dilakukan secara kesinambungan, akan membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan kebijakan untuk mengakselerasi perekonomian daerah dari waktu ke

waktu. Selain itu, analisis semacam ini juga dapat bermanfaat dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi dan juga sekaligus menjadi bahan evaluasi atas hasil-hasil pembangunan yang sudah dicapai dalam periode waktu tertentu.

Adapun rincian Indikator Kinerja Makro Kota Makassar tahun 2024 – 2025 sebagai berikut :

Tabel II.1
Indikator Kinerja Makro Kota Makassar
Tahun 2024 – 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Perubahan %
		Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Indeks Pembangunan Manusia	85,23	85,66	0,505
2	Persentase Penduduk Miskin	4,97	4,43	10,87
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,71	9,60	1,13
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,56	5,34	-3,96
5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	165,95	176,28	6,22
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,372	0,391	-5,108

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Indeks Pembangunan Manusia diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan tahunan Pembangunan Manusia. Istilah Indeks atau Indikator Komposit, adalah suatu istilah yang digunakan untuk indikator yang lebih rumit. Indeks atau indikator komposit memiliki ukuran-ukuran multidimensional yang merupakan gabungan dari sejumlah indikator.

Indeks ini biasanya dikembangkan melalui penelitian khusus karena penggunaannya secara praktis sangat terbatas. Indeks Pembangunan Manusia idealnya mencakup sebanyak mungkin variabel sehingga benar-benar dapat mencerminkan berbagai segi kehidupan manusia yang sangat banyak dan kompleks, namun ketersediaan data statistik membatasi hal tersebut.

Pertumbuhan IPM menggambarkan kecepatan Pembangunan Manusia pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil penghitungan Badan Pusat Statistik, IPM Kota

Makassar tahun 2024 sebesar 85,23 sedangkan pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 85,66 menjadi sebesar 0,505 persen Capaian ini merupakan agregasi dari tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. selama periode 2024 – 2025, Kota Makassar dengan pertumbuhan IPM sebesar 0,505 persen.

Tabel II.2
Indeks Pembangunan Manusia Kota Makassar
Tahun 2024 – 2025

NO.	URAIAN	IPM		
		2024	2025	PERTUMBUHAN
1	Indeks Pembangunan Manusia	85,23	85,66	0,505

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

Adapun nilai Komponen Pembentuk IPM Kota Makassar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
IPM dan Komponen Pembentuk IPM
Kota Makassar Tahun 2024 – 2025

NO.	KOMPONEN	JUMLAH		
		2024	2025	PERTUMBUHAN (%)
1	Umur Harapan Hidup (tahun)	75,33	75,33	0,0
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	11,57	11,59	0,17
3	Harapan Lama Sekolah (tahun)	15,62	15,63	0,06
4	Paritas Daya Beli (ribu rupiah)	18.386	18.878	2,67
Indeks Pembangunan Manusia		**85,23**	**85,66**	**0,505**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.2. Persentase Penduduk Miskin.

Miskin adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang / rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan yang layak bagi kehidupan. Penduduk atau rumah tangga miskin yang mengalami masalah / hambatan untuk dapat hidup secara layak, secara konseptual disebut sebagai fakir miskin dan digolongkan sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Sesuai dengan defenisi yang disepakati fakir miskin adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena sebab-sebab tertentu tidak dapat

melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum, baik berupa kebutuhan jasmani, rohani maupun sosial.

BPS mendefiniskan kemiskinan sebagai ketidak mampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar makanan setara dengan 2100 kalori energy perkapita perhari, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar bukan makanan yang paling pokok.

Penduduk dengan pengeluaran perkapita di bawah garis kemiskinan diklasifikasikan sebagai penduduk miskin demikian pula penghitungan untuk penduduk fakir miskin. Pemanfaatan data kemiskinan yang dihasilkan oleh BPS biasanya digunakan Pemerintah untuk perencanaan makro, khususnya untuk menentukan alokasi dan besaran dana untuk membantu penduduk miskin dan fakir miskin, baik untuk tingkat nasional maupun tingkat wilayah.

Kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultutral, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor - faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor - faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekolompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil.

Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per

kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumahtangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).

Garis Kemiskinan Kota Makassar pada tahun 2024 sebanyak Rp.592,753 dengan Jumlah Penduduk Miskin sebanyak 79,53 ribu dan persentase penduduk miskin sebesar 4,97 persen, sedangkan tahun 2025 Garis Kemiskinan Kota Makassar berada pada angka Rp.610.753 dengan Jumlah Penduduk Misikin sebanyak 71,63 ribu dan persentase penduduk miskin sebesar 4,43 persen. Adapun Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Makassar
Tahun 2024 – 2025

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
2024	592.753	79,53	4,97
2025	610.536	71,63	4,43

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka.

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi makro yang selalu masuk prioritas pembangunan daerah, termasuk agenda pembangunan daerah Kota Makassar. Upaya para pengambil kebijakan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi bertujuan agar kesempatan kerja semakin luas sehingga angkatan kerja yang kecenderungannya bertambah setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, dapat terserap di pasar tenaga kerja. Pengangguran tidak hanya sekadar indikator ekonomi makro, tapi seringkali dipakai untuk mengukur tingkat "kesehatan" perekonomian. Negara/daerah yang memiliki tingkat pengangguran yang tinggi hampir pasti disebabkan karena ketidakmampuan kegiatan ekonomi menyediakan kesempatan kerja, begitupun sebaliknya.

Tingkat pengangguran penting untuk dikendalikan karena empat alasan; pertama, pengangguran tidak hanya menimbulkan biaya ekonomi, tapi efeknya bisa meluas ke dimensi sosial (tingkat kriminalitas tinggi). Kedua, orang-orang yang menganggur tidak hanya kehilangan penghasilan tetapi juga berhadapan dengan tantangan kesehatan fisik dan mental. Ketiga, biaya sosial dari pengangguran sangat tinggi termasuk didalamnya meningkatnya kejahatan dan berkurangnya tingkat

kesukarelaan. Keempat, negara/daerah dengan tingkat pengangguran tinggi berpotensi kehilangan nilai tambah sebab angkatan kerja yang seharusnya terlibat dalam kegiatan produksi, justru tidak terserap di pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah memasukkan pengangguran sebagai salah satu sasaran pembangunan daerah.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Makassar pada tahun 2024 sebesar 9,71 persen, sedangkan pada tahun 2025 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,60 persen atau mengalami penurunansebesar 0,11 persen.

Adapun perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Makassar tahun 2024 – 2025 sebagai berikut :

Tabel II.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Makassar Tahun 2024 – 2025

NO.	TAHUN	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
1	2024	9,71%
2	2025	9,60%

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar pada Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang positif dan relatif stabil di tengah dinamika perekonomian nasional maupun global. Perekonomian daerah yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terus mengalami peningkatan seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatnya investasi, serta penguatan sektor perdagangan dan jasa sebagai penopang utama struktur ekonomi kota.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar, perekonomian Kota Makassar pada tahun 2025 tumbuh sekitar **5,34 persen secara tahunan (year on year)**. Pada triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar **5,34 persen**, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa perekonomian Kota Makassar memiliki daya tahan dan dinamika yang cukup kuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia.

Dari sisi struktur ekonomi, pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh sektor tersier atau sektor jasa yang meliputi perdagangan besar dan eceran, transportasi dan

pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta jasa keuangan. Sektor tersebut mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sektor lainnya, sejalan dengan peran Kota Makassar sebagai pusat perdagangan, jasa, dan distribusi barang dan jasa di wilayah Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Selain itu, peningkatan investasi dan aktivitas pembangunan juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui komponen pembentukan modal tetap bruto.

Selain didukung oleh sektor jasa, pertumbuhan ekonomi Kota Makassar juga ditopang oleh meningkatnya konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah yang mendorong aktivitas ekonomi lokal. Berbagai program pembangunan daerah, pengembangan infrastruktur, serta peningkatan aktivitas perdagangan dan jasa memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja.

Secara regional, Kota Makassar juga memiliki peran strategis sebagai pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kontribusi perekonomian Kota Makassar mencapai sekitar **34,84 persen terhadap total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan**, sehingga menjadikan kota ini sebagai motor penggerak utama perekonomian regional sekaligus sebagai hub perdagangan dan jasa di kawasan Indonesia Timur.

Dengan capaian tersebut, Pemerintah Kota Makassar terus berupaya menjaga stabilitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, penguatan sektor perdagangan dan jasa, pengembangan ekonomi kreatif dan UMKM, serta peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Makassar.

Tabel II.6
Pertumbuhan Ekonomi 2023, 2024 - 2025

NO	Rincian	Satuan / Unit	2023	2024	2025
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Triliun Rupiah	226,90	243,06	261,38
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,31	5,56	5,34
3	PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta Rupiah	155,95	165,95	176,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota, Tahun 2025

Adapun perhitungan Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Makassar 2024 – 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel II.7
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Makassar (persen), 2024 – 2025

NO	LAPANGAN USAHA	TAHUN	
		2024	2025
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,90	4,46
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-
C	Industri Pengolahan	4,80	5,92
D	Pengadaan Listrik dan Gas/	1,11	0,56
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,04	4,46
F	Konstruksi	1,05	4,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,35	4,48
H	Transportasi dan Pergudangan	6,26	5,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,62	5,92
J	Informasi dan Komunikasi	6,75	5,29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,98	8,54
L	Real Estate	5,27	5,56
M, N	Jasa Perusahaan	7,46	7,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-0,10	0,71
P	Jasa Pendidikan	7,41	4,18
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13,79	7,77
R, S, T, U	Jasa Lainnya	15,14	10,93
Produk Domestik Regional Bruto		**5,56**	**5,34**

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.1.5. PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) adalah indikator ekonomi yang memberikan gambaran kasar mengenai rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk di suatu wilayah dalam satu tahun, dihitung menggunakan harga yang sedang berlaku pada saat itu. Adapun fungsi perhitungan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) antara lain mengukur kemakmuran nominal yang digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomi suatu daerah secara total dibandingkan daerah lain di waktu yang sama. Menunjukkan kapasitas sumber daya ekonomi dan nilai tambah yang diciptakan oleh berbagai sektor seperti perdagangan, industri, atau jasa pada tahun berjalan. Selain itu PDRB Per

Kapita ADHB sering digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pajak atau distribusi bantuan.

Perhitungan PDRB Per Kapita ADHB merupakan rasio antara Total PDRB ADBH Wilayah dengan Jumlah Penduduk Tengah Tahun, sehingga hasilnya menunjukkan rata-rata pendapatan setiap orang dalam perekonomian. Meski dipakai untuk mengukur rata-rata pendapatan perorang, tapi indikator ini tidak menggambarkan pendapatan riil setiap individu dalam sebuah perekonomian dan yang paling penting adalah tidak menggambarkan distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat.

Tabel II.8
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Kota Makassar Tahun 2024 – 2025

NO.	TAHUN	PENDAPATAN PERKAPITA
1	2024	165,95
2	2025	176,28

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

Sebagai daerah yang memiliki nilai PDRB paling tinggi dan menjadi pusat pertumbuhan di Provinsi Sulawesi Selatan, pada tahun 2024 penduduk Kota Makassar menikmati standar hidup lebih tinggi dari penduduk daerah lain, dilihat dari PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 165,95 juta rupiah. Sedangkan pada tahun 2025 PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku penduduk Kota Makassar sebesar 176,28 juta rupiah, mengalami peningkatan menjadi sebesar 6,22%.

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang tinggi, namun yang tak kalah pentingnya adalah ketimpangan pendapatan antar golongan. Permasalahan besar yang dihadapi oleh suatu daerah adalah terjadinya gap yang semakin melebar antar golongan pendapatan meskipun dengan kinerja pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Kota Makassar merupakan salah satu daerah menghadapi permasalahan ketimpangan pendapatan yang cukup serius meskipun terdapat kecenderungan yang menurun.

Sektor-sektor produktif ekonomi Kota Makassar didominasi oleh kelompok golongan pendapatan menengah ke atas sehingga porsi besar balas jasa dari penggunaan faktor-faktor produksi tersebut kembali kepada kepemilikannya. Sementara sektor-sektor informal yang tidak produktif digerakkan oleh golongan rakyat kecil dengan balas jasa yang lebih kecil pula.

Dengan mencermati fakta empiris tersebut semakin memperkuat analisis bahwa ketimpangan di Kota Makassar masih menjadi permasalahan dan harus segera dituntaskan. Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita sebagian besar dinikmati oleh segelintir (sejumlah kecil orang kaya), sementara sebagian kecil pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita dinikmati oleh sejumlah besar orang miskin.

Namun perlu pula dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 2024 angka rasio gini sebesar 0,372. Sedangkan Rasio Gini pada tahun 2025 sebesar 0,391 menunjukan tren Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) mengalami kenaikan sebesar 0,019 poin.

Tabel II.9
Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)
Tahun 2024 – 2025

NO.	TAHUN	RASIO GINI
1	2024	0,372
2	2025	0,391

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar, Tahun 2025

2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.

Capaian Kinerja urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing – masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang.

Pemerintah Kota Makassar menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari :

1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar, terdiri dari :

1.1. Urusan Pendidikan

1.2. Urusan Kesehatan

1.3. Urusan Pekerjaan Umum

1.4. Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

1.6. Urusan Sosial

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, terdiri dari :

2.1. Urusan Tenaga Kerja

2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

2.3. Urusan Pangan

2.4. Urusan Pertanahan

2.5. Urusan Lingkungan Hidup

2.6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2.7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.9. Urusan Perhubungan

2.10. Urusan Komunikasi dan Informatika

2.11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2.12. Urusan Penanaman Modal

2.13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

2.14. Urusan Statistik

2.15. Urusan Persandian

2.16. Urusan Kebudayaan

2.17. Urusan Perpustakaan

2.18. Urusan Kearsipan

3. Urusan Pilihan, terdiri dari :

3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

3.2. Urusan Pariwisata

3.3. Urusan Pertanian

3.4. Urusan Perdagangan

3.5. Urusan Perindustrian

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, terdiri dari :

4.1. Urusan Perencanaan Dan Keuangan

4.2. Urusan Manajemen Keuangan

4.3. Urusan Transparansi Dan Partisipasi Publik

4.4. Urusan Pengadaan

4.5. Urusan Kepegawaian

Pelaksanaan Program Utama dari setiap Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar dapat diuraikan dalam Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Kunci Hasil terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

Tabel II.10
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)
CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN TAHUN 2025

KOTA : MAKASSAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	**PENDIDIKAN**	**1.a1 Presentase Anak Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini** Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini ---------- x 100 % Jumlah anak usia 5-6 tahun di Kota Makassar	**98.02%** 51.208 ---------- 52.242	**Sumber :** Dinas Pendidikan Kota Makassar	
		1.a2 Presentase Anak Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar Jumlah anak usia 7-15 tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-15 tahun di Kota Makassar	**98.03%** 232.779 ---------- 237.450	**Sumber :** Dinas Pendidikan Kota Makassar	
		1.a3 Persentase Anak Usia 7-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan	**100.00%** 4.952 ---------- 4.952	**Sumber :** Dinas Pendidikan Kota Makassar	
		1.a4 Persentase Toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kota yang bersangkutan	**56.71%** 1.530 ---------- 2.698	**Sumber :** Dinas Pendidikan Kota Makassar	
		1.a5 Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam Kondisi Baik JumlahRuang Kelas Sekolah dasar dan Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik ---------- x 100 % Jumlah Ruang Kelas	**52.57%** 3.464 ---------- 6.589	Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
2	KESEHATAN	**1.b1 Persentase Kematian Ibu** Jumlah Kematian Ibu Tahun 2025 ---------- x 100 % Jumah Ibu Melahirkan Tahun 2025	**0.05%** 13 ---------- 25.558	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b2 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita Jumlah balita umur 0-59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu ---------- x 100 % Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	**3.65%** 2.824 ---------- 77.383	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b3 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator) ---------- x 100 % Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100.00%** 26.374 ---------- 26.374	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b4 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100.00%** 25.558 ---------- 25.558	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b5 Persentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100.00%** 25.532 ---------- 25.532	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b6 Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Jumlah balita usia 12-23 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 1+ jumlah balita usia 24-35 bulan mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2+ balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3 ---------- x 100 % Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	**100.00%** 86.472 ---------- 86.472	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		1.b7 Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran ---------- x 100 % Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	**100.00%** 197.812 ---------- 197.812	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b8 Persentase Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Sesuai Standar Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	**98.13%** 953.289 ---------- 971.476	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b9 Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator) ---------- x 100 % Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	**100.00%** 152.427 ---------- 152.427	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b10 Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**90.72%** 299.747 ---------- 330.427	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b11 Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kota makassar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kota makassar berdasarkan angka prevalensi kota makassar tahun 2025	**100.00%** 32.574 ---------- 32.574	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		1.b12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kota makassar yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	**100.00%** 3.374 ---------- 3.374	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b13 Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun ---------- x 100 % Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	**100.00%** 47.499 ---------- 47.499	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
		1.b14 Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia *(Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan tahun 2025 ---------- x 100 % Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di wilaya kota makassar tahun 2025	**100.00%** 40.256 ---------- 40.256	**Sumber :** Dinas Kesehatan Kota Makassar	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	**1.c1 Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kota** Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota dalam kondisi baik (Ha) ---------- x 100 % Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kota (Ha)	**0,00%** 1 ---------- 1	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
		1.c2 Persentase Kemantapan Jalan Kota Panjang jalan kewenangan Kota (Km) (Panjang jalan kondisi baik+ panjang jalan kondisi sedang) ---------- x 100 % Panjang jalan kewenangan Kota	**98.03%** 1.823,67 ---------- 1.860,38	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		1.c3 Persentase Peningkatan Jumlah Penduduk Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan Terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Jumlah Penduduk di Kota Makassar Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Makassar pada Tahun N ---------- x 100 % Jumlah total penduduk Kota Makassar	**83.17%** 1.235.199 ---------- 1.485.077	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar DAN Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Makassa	
		1.c4 Persentase Jumlah Rumah yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah dioleh di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik ---------- x 100 % Jumlah rumah di Kota Makassar	**98.45%** 283.514 ---------- 287.974	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
		1.c5 Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian dan Mitigasi Banjir Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (Ha) ---------- x 100 % Luas Kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (Ha)	**100.00%** 3.764,95 ---------- 3.765	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
		1.c6 Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Kewenangan Kota Makassar Luas Kawasan sepanjang Pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan Kota Makassar (Ha) ---------- x 100 % Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan Kota Makassar (Ha)	**55.64%** 62.25 ---------- 111.88	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
		1.c7 Persentase Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kota Makassar Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang digunakan sesuai peruntukannya ---------- x 100 % Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku	**100.00%** 1.285 ---------- 1.285	**Sumber :** Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		1.c8 Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah permohonan persetujuan bangunan gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk	**100.00%** 5 ---------- 5	**Sumber :** Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	
		1.c9 Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis ---------- x 100 % Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi Pemerintah Kota Makassar	**100.00%** 524 ---------- 524	**Sumber :** Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar	
		1.c10 Persentase Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Sudah diterbitkan di Kota Makassar Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 (satu) tahun ---------- x 100 % Jumlah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 (satu) tahun	**40.11%** 150 ---------- 374	**Sumber :** Dinas Penataan Ruang Kota Makassar	
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	**1.d1 Persentase Warga Negara Korban Bencana Kota Makassar Yang Memperoleh Rumah Layak Huni** Jumlah warga negara korban bencana kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N ---------- x 100 % Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	**100.00%** 100 ---------- 100	**Sumber :** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	
		1.d2 Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang Ditangani Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani tahun N (Ha) ---------- x 100 % Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	**100.00%** 2.8 ---------- 2.8	**Sumber :** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	
		1.d3 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani Jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani pada tahun N ---------- x 100 % Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun N	**1.89%** 368 ---------- 19.516	**Sumber :** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		1.d4 Persentase Perumahan Yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N ---------- x 100 % Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	**100.00%** 30 ---------- 30	**Sumber :** Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar	
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	**1.e1 Persentase Dokumen Kebencanaan yang Telah Ditetapkan dan Masih Berlaku** Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N ---------- x 100 % Jumlah dokumen kebencanaan Kajian Resiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), dan Rencana Kontijensi (Rekon) = 3	**100.00%** 3 ---------- 3	**Sumber :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar	
		1.e2 Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Ditangani ---------- x 100 % Jumlah Pengaduan Pelanggaran Trantibum Yang Dilaporkan	**100.00%** 16 ---------- 16	**Sumber :** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	
		1.e3 Persentase Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Ditegakkan Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan ---------- x 100 % Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	**100.00%** 20 ---------- 20	**Sumber :** Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar	
		1.e4 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang tinggal di Kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	**100.00%** 179.685 ---------- 179.685	**Sumber :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar	
		1.e5 Persentase Jumlah Warga Negara yang Mendapatkan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ---------- x 100 % Jumlah warga negara yang menjadi Korban Bencana	**100.00%** 6.942 ---------- 6.942	**Sumber :** Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar	
		1.e6 Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/ kota dalam tingkat waktu tanggap ---------- x 100 % Jumlah kejadian kebakaran di Kota	**100.00%** 258 ---------- 258	**Sumber :** Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
6	SOSIAL	1.f1 **Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti** Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	**100.00%** 610 ---------- 610	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	
		1.f2 **Persentase Anak Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti** Jumlah anak Terlantar di Luar Panti yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya ---------- x 100 % Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	**100.00%** 298 ---------- 298	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	
		1.f3 **Persentase Lanjut Usia Terlantar Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti** Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sesuai hasil asesmen	**100.00%** 59 ---------- 59	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	
		1.f4 **Persentase Gelandangan dan Pengemis Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti** Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	**100.00%** 143 ---------- 143	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	
		1.f5 **Persentase Korban Bencana Alam, Sosial Dan/Atau Non Alam Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana** Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ---------- x 100 % Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	**100.00%** 7.019 ---------- 7.019	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	
		1.f6 **Persentase Penerima Manfaat Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar** Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar ---------- x 100 % Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kota makassar	**100.00%** 8.129 ---------- 8.129	**Sumber :** Dinas Sosial Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
7	**TENAGA KERJA**	**2.a1 Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan Yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja** Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah ---------- x 100 % Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di Kota	**100.00%** 50 ---------- 50	**Sumber :** Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	
		2.a2 Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) Jumlah perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak ---------- x 100 % Jumlah Perusahaan	**31.10%** 565 ---------- 1.817	**Sumber :** Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	
		2.a3 Persentase Pekerja Bukan Penerima Upah dan Atau Pekerja Rentan Yang Mendapatkan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar ---------- x 100 % Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah	**100.00%** 81.466 ---------- 81.466	**Sumber :** Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar	
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	**2.b1 Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif** Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif ---------- x 100 % Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	**100.00%** 469 ---------- 469	**Sumber :** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	
		2.b2 Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang Mendapatkan Layanan Komprehensif Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif ---------- x 100 % Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	**100.00%** 127 ---------- 127	**Sumber :** Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
9	**PANGAN**	**2..c1 Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah** Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Makassar ---------- x 100 % Target Jumlah Cadangan Pangan	**78.79%** 82.178 ---------- 104.3	**Sumber :** Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar	
10	**PERTANAHAN**	**2.d1 Persentase Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah Kota Makassar** Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan pemerintah daerah kota makassar ---------- x 100 % Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset pemerintah daerah kota makassar	**22.82%** 3.223.736 ---------- 14.123.721,58	**Sumber :** Dinas Pertanahan Kota Makassar	
		2.d2 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting ---------- x 100 % Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	**2.63%** 5.291.062,4 ---------- 201.270.000	**Sumber :** Dinas Pertanahan Kota Makassar	
		2.d3 Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Dilegalkan Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Sudah Legal ---------- x 100 % Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang Diamanatkan Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	**0,00%** 0 ---------- 1	**Sumber :** Dinas Pertanahan Kota Makassar	
11	**LINGKUNGAN HIDUP**	**2.e1 Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar** Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan ---------- x 100 % Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	**54.55%** 36 ---------- 66	**Sumber :** Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		2.e2 Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah ---------- x 100 % Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kota makassar	**100.00%** 388.382 ---------- 388.382	**Sumber :** Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar	
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**	**2.f1 Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan** Akta kelahiran yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah anak usia 0 - 17 tahun	**98.92%** 426.396 ---------- 431.041	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
		2.f2 Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah Anak yang Memiliki KIA ---------- x 100 % Jumlah anak wajib KIA	**74.63%** 301.340 ---------- 403.772	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
		2.f3 Jumlah Data Profil Kependudukan yang Disusun dan Dipublikasikan Jumlah Data profil Kependudukan yang disusun dan dipublikasikan ---------- x 100 % 2 (Dua) Dokumen	**100.00%** 2 ---------- 2	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
		2.f4 Presentase Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik ---------- x 100 % Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	**95.97%** 1.037.709 ---------- 1.081.313	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
		2.f5 Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan Akta kematian yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	**100.00%** 39.087 ---------- 39.087	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
		2.f6 Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan Akta perkawinan yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	**100.00%** 383.674 ---------- 383.674	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		2.f7 Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan Bagi yang Melaporkan Akta perceraian yang diterbitkan ---------- x 100 % Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	**100.00%** 14.229 ---------- 14.229	**Sumber :** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar	
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	**2.g1 Persentase pengentasan desa tertinggal** Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)	**0.00%** 1 ---------- 1	**Sumber :** Sekretariat Daerah Kota Makassar	
		2.g2 Persentase peningkatan status desa mandiri Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun ---------- x 100 % Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)	**0.00%** 1 ---------- 1	**Sumber :** Sekretariat Daerah Kota Makassar	
		2.g3 Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku ---------- x 100 % Jumlah kerja sama desa yang ditangani	**0.00%** 1 ---------- 1	**Sumber :** Sekretariat Daerah Kota Makassar	
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	**2.h1 Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) Per Wanita Usia Subur Usia 15-49 Tahun** Total Fertility Rate/TFR kota ---------- x 100 % Target Fertility Rate/TFR Kab/Kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terhadap kota yang bersangkutan	**97.01%** **1.95** ---------- 2.01	**Sumber :** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	
		2.h2 Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) Total peserta KB Aktif Modern ---------- x 100 % Total Pasangan Usia Subur Usia 15-49 Tahun	**64.52%** 92.480 ---------- 143.325	**Sumber :** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	
		2.h3 Persentase Kebutuhan ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) ---------- x 100 % Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kab/kota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk kota makassar yang bersangkutan	**57.88%** 4.63 ---------- 8	**Sumber :** Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
15	PERHUBUNGAN	**2.i1 Konektovitas Kota** KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	**0.63** 0.63	**Sumber :** Dinas Perhubungan Kota Makassar	
		2.i2 Volume/Capacity Ratio di Jalan Kota Makassar V/C Ratio di Jalan Kota	0.47 0.47	**Sumber :** Dinas Perhubungan Kota Makassar	
		2.i3 Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan ---------- x 100 % Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	**70.00%** 7 ---------- 10	**Sumber :** Dinas Perhubungan Kota Makassar	
16	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	**2.j1 Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika** Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo ---------- x 100 % Jumlah Perangkat Daerah dan atau unit pelaksana teknis daerah	**100.00%** 51 ---------- 51	**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	
		2.j2 Presentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi Jumlah layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ---------- x 100 % Jumlah Layanan Publik	**100.00%** 25 ---------- 25	**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	
		2.j3 Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kota Makassar Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota makassar ---------- x 100 % Jumlah penduduk	**100.00%** 1.002.681 ---------- 1.002.681	**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
17	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.k1 **Mengukur Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi** ∑ Volume usaha koperasi tahun berjalan - ∑ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya ---------- x 100 % ∑ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	**66.16%** 380.252.239.334 ---------- 228.851.993.631	**Sumber :** Dinas Koperasi Kota Makassar	
		2.k2 **Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal ke Formal** ∑ Usaha Mikro yang Memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) ---------- x 100 % ∑ Usaha Mikro	**10.8%** 3.606 ---------- 33.270	**Sumber :** Dinas Koperasi Kota Makassar	
18	PENANAMAN MODAL	2.l1 **Persentase peningkatan investasi di Kota** Jumlah Investasi Tahun N - Jumlah nilai Investasi tahun N-1 di Kota ---------- x 100 % Jumlah Nilai Investasi Tahun N-1 di Kota	**38.30%** 5.293.855.435.328 ---------- 3.827.938.200.000	**Sumber :** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	
		2.l2 **Realisasi Total Terhadap Target Investasi** Total realisasi investasi ---------- x 100 % Target investasi Kab/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kab/kota yang bersangkutan	**176.46%** 5.293.855.435.471 ---------- 3.000.000.000.000	**Sumber :** Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar	
19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.m1 **Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri** Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kota ---------- x 100 % Jumlah target pemuda usia (16-30) tahun yang mendapatkan pembinaan wirausaha di Kota Makassar	**54.32%** **3.705** ---------- 6.821	**Sumber :** Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	
		2.m2 **Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan** Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan di kota ---------- x 100 % Jumlah Pemuda (umur 16 - 30 tahun) di Kota Makassar	**14.50** 55.275 ---------- 381.082	**Sumber :** Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	
		2.m3 **Persentase Atlet yang Berasal Dari Kabupaten/Kota yang Masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi** Jumlah atlet daerah di kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi ---------- x 100 % Jumlah atlet daerah yang dibina ditingkat kota (Komite Olahraga Nasional Indonesia, Pusat Pendidikan dan Latihan Daerah, Induk Cabang Olahraga)	**1.19%** 10 ---------- 838	**Sumber :** Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		2.m4 Persentase Jumlah Atlet Berprestasi Jumlah atlet peraih medali ---------- x 100 % Jumlah atlet yang ikut event nasional dan internasional	**100.00%** 7 ---------- **7**	**Sumber :** Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar	
20	**STATISTIK**	**2.n Persentase Kepatuhan Daftar Data yang Dilaporkan kepada Wali Data Berdasarkan Kesepakatan Forum Satu Data Daerah** Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah ---------- x 100 % Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	**30.77%** 472 ---------- 1.534	**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	
21	**PERSANDIAN**	**2.o Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah** Nilai Indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi ---------- x 100 % Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	**46.19%** 424 ---------- 918	**Sumber :** Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar	
22	**KEBUDAYAAN**	**2.p1 Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan** Jumlah cagar Budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan ---------- x 100 % Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	**100.00%** 42 ---------- 42	**Sumber :** Dinas Kebudayaan Kota Makassar	
		2.p2 Persentase Peningkatan Jumlah Masyarakat Yang Mengunjungi Pusat Seni dan Pusat Sejarah Jumlah Kinjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N - Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1 ---------- x 100 % Jumlah Kunjungan ke Pusat Peninggalan Bersejarah Tahun N-1	**-2.59%** 62.257 ---------- 63.911	**Sumber :** Dinas Kebudayaan Kota Makassar	
23	**PERPUSTAKAAN**	**2.q1 Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) Masyarakat** TKM = {(0,15 x Pra Membaca) + (0,50 x Saat Membaca) + (0,35 x Pasca Membaca)} x 100	**59.04** 59.04	**Sumber :** Dinas Perpustakaan Kota Makassar	
		2.q2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) IPLM = {(0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kerja)} x 100	**10.24** 10.24	**Sumber :** Dinas Perpustakaan Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
24	**KEARSIPAN**	**2.r** **Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional** T = (a + i + s + j)/4	**99.00%** 99	**Sumber :** Dinas Kearsipan Kota Makassar	
III. URUSAN PILIHAN					
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.a1** **Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya** Produksi Perikanan tangkap dan budidaya (ton) ---------- x 100 % Target Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya (ton)	**100.92%** 22.476,38 ---------- 22.272	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
		3.a2 **Angka Konsumsi Ikan (Kg/Kap/Th)** Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Anga KTT	**33.25** 33.25	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
26	**PARIWISATA**	**3.b1** **Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan, Minum** Realisasi investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) ---------- x 100 % Realisasi Investasi tahun N	**10.00%** 529.299.800.333 ---------- 5.293.855.435.471	**Sumber :** Dinas Pariwisata Kota Makassar	
		3.b2 **Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Asing** Jumlah wisatawan asing tahun N - Jumlah wisatawan asing tahun N-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan asing tahun N-1	**-18.32%** 78.080 ---------- 95.596	**Sumber :** Dinas Pariwisata Kota Makassar	
		3.b3 **Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kota Makassar** Jumlah wisatawan nusantara tahun N - Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1 ---------- x 100 % Jumlah wisatawan nusantara tahun N-1	**12.06%** 6.189.997 ---------- 5.524.000	**Sumber :** Dinas Pariwisata Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
27	PERTANIAN	3.c1 **Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan** Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1 ---------- x 100 % Produksi tanaman pangan tahun N-1	**-10.30%** 14.437,3 ---------- 16.094,93	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
		3.c2 **Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura** Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1 ---------- x 100 % Produksi hortikultura tahun N-1	**-25.24%** 821.56 ---------- 1.098,88	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
		3.c3 **Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan** Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1 ---------- x 100 % Produksi komoditas peternakan tahun N-1	**36.85%** 1.053,5 ---------- 769.8	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
		3.c4 **Persentase Wilayah yang Terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (Diperoleh Dari Surveylance Penyakit Dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))** Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini ---------- x 100 % Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	**100.00%** 16.6697 ---------- 16.6697	**Sumber :** Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar	
28	PERDAGANGAN	3.f **Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah Yang Berlaku** Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku ---------- x 100 % Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota makassar	**87.84%** 3.936 ---------- 4.481	**Sumber :** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	
29	PERINDUSTRIAN	3.g1 **Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Daerah Kota Makassar** 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	**0.00%** 0 ---------- 1	**Sumber :** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	
		3.g2 **Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah Yang Melaporkan Informasi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional** Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional ---------- x 100 % Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	**3.73%** 864 ---------- 23.171	**Sumber :** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		3.g3 Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kota Makassar Jumlah industri kecil dan menengah tahun N - Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1 ---------- x 100 % Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	**33.45%** 33.116 ---------- 24.815		
		3.g4 Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri Dibandingkan Realisasi Investasi Seluruh Sektor Jumlah investasi sektor industri ---------- x 100 % Total investasi seluruh sektor	**15.82%** 95.369.392.425 ---------- 602.847.976.286	**Sumber :** Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassa	

Tabel II.11
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL (OUTCOME)
FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
TAHUN 2025

KOTA : MAKASSAR

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
IV. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
1. PERENCANAAN DAN KEUANGAN					
		4.a1 **Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan ---------- x 100 % Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden	**94.12%** 16 ---------- 17	**Sumber :** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar	
		4.b1 **Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya** Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) ---------- x 100 % Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	**32.03%** 1.621.618.922.795,13 ---------- 5.063.385.851.736,13	**Sumber :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	
		4.b2 **Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah** Realisasi Pendapatan Asli Daerah ---------- x 100 % Realisasi pendapatan daerah	**40.65%** 1.942.374.160.175,25 ---------- 4.778.775.566.771,25	**Sumber :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		4.b3 Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N ---------- x 100 % Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	**56,99%** 2.455.602.301.407,91 ---------- 4.309.122.273.081,42	**Sumber :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	
		4.b4 Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik ---------- x 100 % Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	**34.66%** 1.754.220.318.121 ---------- 5.061.885.851.736,13	**Sumber :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	
2. KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
		4.c Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) ---------- x 100 % Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	**70.57%** 3.892 ---------- 5.515	**Sumber :** Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	
3. FUNGSI PENGAWASAN					
		4.e1 Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) **Nilai :** 1. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1; 2. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; 3. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; 4. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan 5. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5.	**5.00** 5	**Sumber :** Inspektorat Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
		4.e2 Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) **Nilai :** a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 2; b. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; c. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan d. Dievaluasi - dengan hasil level 3, nilai capaian 5.	**5.00** 5	**Sumber :** Inspektorat Kota Makassar	
		4.e3 Manajemen risiko Indeks **Nilai :** a. Melakukan Penilaian Mandiri (PM), nilai capaian 1 b. Melakukan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK), nilai capaian 2; c. Dievaluasi - dengan hasil level 1, nilai capaian 3; d. Dievaluasi - dengan hasil level 2, nilai capaian 4; dan e. Dievaluasi - dengan hasil level 3 ke atas, nilai capaian 5.	**4.00** 4	**Sumber :** Inspektorat Kota Makassar	
		4.e4 Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1 Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1 ---------- x 100 % Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	**100.00%** 100 **------** 100	**Sumber :** Inspektorat Kota Makassar	
4. PENGADAAN					
		4.f1 Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	**35.56** 35.56	**Sumber :** Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar	
		4.f2 Pemanfaatan sistem pengadaan Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	**17.44** 17.44	**Sumber :** Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar	
		4.f3 Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	**25.50** 25.5	**Sumber :** Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Makassar	

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	IKK HASIL (OUTCOME)	CAPAIAN KINERJA	SUMBER DATA	KETETERANGAN
5. HUBUNGAN DENGAN PERWAKILAN DAERAH					
		4.g1 Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N 1. Tepat Waktu; dan 2 Tidak Tepat Waktu.	Tepat Waktu	**Sumber :** Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar	
		4.g2 Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah tahun N Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan Tahun N ---------- x 100 % Jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N	**46.67%** 7 ---------- 15	**Sumber :** Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar	
6. PELAYANAN PUBLIK					
		4.h Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	**79.14** 79.14	**Sumber :** Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Makassar	
7. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
		4.d Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah ---------- x 100 % Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	**59.69%** 77 ---------- 129	**Sumber :** Badan Riset Inovasi Daerah Kota Makassar	

2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih unggul, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat atas penggunaan sumber daya publik dan pencapaian target Pembangunan Tahun 2025. Penguatan akuntabilitas kinerja menjadi prioritas Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong birokrasi berkinerja tinggi, adaptif dan berorientasi hasil guna mendukung percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah ini dimulai dari pengumpulan data dan pemilahan data dari setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang disatukan dan diperiksa ulang secara seksama, sehingga menghasilkan suatu ikhtisar mengenai hasil capaian kinerja seluruh perangkat daerah yang mencerminkan capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2025-2029 untuk Tahun 2025 dilaksanakan dan ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Kota Makassar sebanyak 25 (dua puluh lima) sasaran dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator tujuan utama yang didukung 70 (tujuh puluh) program dimana 8 (delapan) diantaranya mendukung 2 (dua) sasaran sekaligus serta 113 (seratus tiga belas) indikator dan target kinerja dimana 8 (delapan) diantaranya juga mendukung 2 (dua) sasaran sekaligus.

Akuntabilitas kinerja pemerintah Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian Tahun 2025, terhadap capaian tahun sebelumnya, dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dinyatakan "Sangat Tinggi" karena rata-rata capaiannya 102,26% sebelum perubahan atau peralihan dan/ atau 127,19% setelah perubahan atau peralihan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Makassar akan melakukan reviuw program prioritas pembangunan, penekanan strategi maupun target dalam perjanjian kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun 2025-2029.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Pemerintah Kota Makassar sesuai dengan hasil pengukuran kinerja untuk membandingkan antara target dan realisasi kinerja sebagai berikut:

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

A. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.12
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Sasaran
Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,82
		Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	18,35 jt
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,8
		Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	3,572 (Sangat Tinggi)
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Mitigasi Sosial	Indeks Kesehatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup	75,33 th
Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan	4,97%
		Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	9,71%
			Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	62,04%
		Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (Juta)	165,95 jt
			Rasio Gini	0,372
Mewujudkan Makassar Menjadi "Livable City" dan "Resilient City"	Indeks Kota Nyaman (Livable City Index)	Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	74,253
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61,41

Sumber: Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar Tahun 2025

Penetapan tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam memastikan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar berjalan secara terukur, sistematis, dan berorientasi pada hasil. Setiap tujuan pembangunan dijabarkan ke dalam sasaran strategis yang dilengkapi dengan indikator kinerja serta target capaian sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah.

Tujuan pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi utama dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan dengan indikator Indeks Pendidikan yang ditargetkan sebesar 0,82. Target ini mencerminkan upaya peningkatan akses pendidikan serta peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi masyarakat. Selain itu, sasaran meningkatnya daya beli masyarakat diukur melalui indikator pengeluaran per kapita yang ditargetkan mencapai Rp18,35 juta,

yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat sebagai salah satu komponen penting dalam pembentukan kualitas SDM.

Selanjutnya, tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Pencapaian tujuan ini didukung oleh sasaran terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang ditargetkan sebesar 86,8. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Selain itu, sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan diukur melalui Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dengan target nilai 3,572 yang berada pada kategori Sangat Tinggi. Hal ini menunjukkan upaya peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan berikutnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mitigasi sosial yang diukur melalui Indeks Kesehatan. Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup yang ditargetkan mencapai 75,33 tahun. Target ini mencerminkan keberhasilan pembangunan sektor kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata diukur melalui indikator pertumbuhan ekonomi. Dalam mendukung tujuan ini, ditetapkan beberapa sasaran strategis, di antaranya meningkatnya perlindungan masyarakat miskin yang diukur melalui angka kemiskinan dengan target sebesar 4,97%. Selain itu, sasaran tersedianya kemudahan akses peluang kerja dan bisnis baru diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dengan target 9,71% serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 62,04%. Sasaran lainnya yaitu terwujudnya gerakan masyarakat dalam memperkuat ketahanan ekonomi, yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dengan target Rp165,95 juta serta Rasio Gini sebesar 0,372 sebagai indikator tingkat pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.

Adapun tujuan terakhir yaitu mewujudkan Kota Makassar sebagai "Livable City" dan "Resilient City", yang diukur melalui Indeks Kota Nyaman (Livable City Index). Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut ditetapkan sasaran tersedianya infrastruktur menuju kota nyaman dengan indikator Indeks Layanan Infrastruktur yang ditargetkan sebesar 74,253. Selain itu, terdapat sasaran meningkatnya tata kelola lingkungan hidup

yang lestari dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang ditargetkan sebesar 61,41. Pencapaian target ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mampu memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, penetapan target pada masing-masing tujuan dan sasaran tersebut menunjukkan arah kebijakan pembangunan Kota Makassar yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, pemerataan kesejahteraan, serta pembangunan kota yang berkelanjutan dan berdaya saing.

B. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan

Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar Setelah Perubahan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.13
Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Produktivitas Sektor Industri dan Perdagangan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Persen	19,29
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor	Persen	20,10
2.	Meningkatnya Kesempatan Kerj dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	9,62
		PDRB Per Kapita	(Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	175,46
3.	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	Persen	0,59
4.	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi	Persen	1,52
		Indeks Ketahanan Pangan	Skor	88
5.	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	Persen	8,75
6.	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	Nilai	82,03
7.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,51
8.	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Juta Rupiah Per Kapita/Tahun)	19.301
9.	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	Nilai	83,59
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	Nilai	26,49
10.	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Persen	10
11.	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	4,51
12.	Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	Persen	2
13.	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Orang	5.626.657
		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,63
14.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Tak benda	Persen	13,33
		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan	Persen	16,66
15.	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	Industri	4.515
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital	Persen	12,44
16.	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	69,75
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik (SPBE)	Nilai	4,02

		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	Nilai	87,48
17.	Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani	Persen	55,03
18.	Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	Skor	4,688
19.	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	Nilai	0,179
20.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	Nilai	69,44
21.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	59
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	Skor	0,497
22.	Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	Nilai	0,366
23.	Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	41,81
24.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	Nilai	73,95
		Indeks Kualitas Udara	Nilai	75,22
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai	36,06
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	6
25.	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,47
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Persen	32,46

Sumber: Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar Tahun 2025 Setelah Perubahan

Pembangunan Kota Makassar diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor ekonomi unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam berbagai tujuan dan sasaran strategis yang diukur melalui indikator kinerja utama sebagai berikut.

Pada aspek penguatan struktur ekonomi daerah, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kontribusi sektor unggulan terhadap perekonomian. Hal ini tercermin dari target Rasio PDRB Industri Pengolahan sebesar 19,29 persen serta Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,10 persen. Kedua indikator ini menunjukkan upaya mendorong sektor industri dan perdagangan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan nilai tambah kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, ditetapkan target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 9,62 persen serta PDRB Per Kapita sebesar 175,46 juta rupiah per kapita per tahun. Target ini menggambarkan komitmen pemerintah daerah untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan.

Pada aspek kemandirian fiskal daerah, indikator yang digunakan adalah Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB sebesar 0,59 persen. Target ini menunjukkan upaya optimalisasi pendapatan asli daerah melalui peningkatan kontribusi pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi yang berkembang di wilayah kota.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi dan ketahanan pangan, ditetapkan target tingkat inflasi sebesar 1,52 persen serta Indeks Ketahanan Pangan sebesar 88,00. Kedua indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok serta memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas pangan bagi masyarakat.

Pada sektor investasi, pemerintah daerah menargetkan persentase peningkatan nilai investasi daerah sebesar 8,75 persen. Target ini menunjukkan upaya peningkatan daya tarik investasi melalui perbaikan iklim usaha, kemudahan perizinan, serta pengembangan potensi ekonomi daerah.

Selanjutnya, pada aspek pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah menargetkan Indeks Pendidikan sebesar 82,03 serta Usia Harapan Hidup sebesar 75,51 tahun. Kedua indikator ini menggambarkan upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama dalam pembangunan manusia yang berkelanjutan.

Dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, indikator pengeluaran per kapita sebesar 19,301 juta rupiah per kapita per tahun digunakan untuk mengukur peningkatan daya beli masyarakat yang mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi rumah tangga.

Pada aspek infrastruktur, pemerintah daerah menargetkan Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan sebesar 83,59 serta Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan sebesar 26,49. Hal ini menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, drainase, air bersih dan sarana prasarana perkotaan yang mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

Selain itu, dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, ditargetkan persentase ketersediaan dokumen RDTR sebesar 10 persen sebagai instrumen penting dalam memastikan pembangunan yang tertata, terarah dan berkelanjutan.

Dalam mendukung transformasi menuju ekonomi berbasis pengetahuan, pemerintah daerah menargetkan Indeks Kapabilitas Inovasi sebesar 4,51 serta persentase peningkatan

inovasi pembangunan daerah sebesar 2 persen. Target ini menunjukkan komitmen untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor pembangunan.

Pada sektor pariwisata, pemerintah menargetkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara sebesar 5.626.657 orang dengan rata-rata lama tinggal wisatawan sebesar 1,63 hari. Peningkatan indikator ini diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi bagi sektor jasa, perdagangan dan ekonomi kreatif.

Dalam aspek pelestarian budaya, pemerintah daerah menargetkan peningkatan karya budaya terdaftar sebagai warisan budaya tak benda sebesar 13,33 persen serta cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan sebesar 16,66 persen sebagai upaya menjaga identitas dan kekayaan budaya daerah.

Penguatan sektor ekonomi kreatif juga menjadi perhatian melalui target jumlah industri ekonomi kreatif aktif sebanyak 4.515 unit serta 12,44 persen industri ekonomi kreatif yang memanfaatkan platform digital untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah menargetkan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sebesar 69,75, Indeks SPBE sebesar 4,02, serta nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK sebesar 87,48. Ketiga indikator ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi, digitalisasi pemerintahan dan pencegahan korupsi.

Dalam menjaga keamanan masyarakat, ditargetkan persentase tindak kriminal yang ditangani sebesar 55,03 persen. Selain itu, untuk memperkuat harmoni sosial ditargetkan Indeks Kota Toleran sebesar 4,688.

Pada aspek kesetaraan dan perlindungan sosial, pemerintah daerah menargetkan Indeks Ketimpangan Gender sebesar 0,179, Indeks Perlindungan Anak sebesar 69,44, serta persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal sebesar 41,81 persen sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan inklusif.

Selanjutnya, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, ditetapkan target Gini Rasio sebesar 0,366 yang mencerminkan upaya menurunkan disparitas pendapatan masyarakat.

Dalam aspek pembangunan pemuda dan olahraga, ditargetkan Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 59,00 serta Indeks Pembangunan Keolahragaan sebesar 0,497 sebagai upaya meningkatkan kualitas generasi muda yang sehat, produktif dan berdaya saing.

Pada bidang lingkungan hidup, pemerintah daerah menargetkan peningkatan kualitas lingkungan melalui Indeks Kualitas Air sebesar 73,95, Indeks Kualitas Udara sebesar 75,22, Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 36,06, serta persentase timbulan sampah yang terolah sebesar 6 persen.

Terakhir, dalam menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, ditetapkan target Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,47 serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 32,46 persen sebagai bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan dan peningkatan ketahanan kota terhadap dampak perubahan iklim.

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Dan Tahun Sebelumnya Baseline Tahun 2024

Realisasi rata-rata Capaian Kinerja Pemerintah Kota Makassar Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 102,40% sebelum perubahan dan 127,46% setelah perubahan dengan kategori SANGAT TINGGI. Perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, diuraikan pada tabel berikut :

Tabel II.14
Perbandingan Antara Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024 dengan 2025 Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Sebelum Perubahan														
Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	0,837	0,85	0,856	0,88	0,818	0,82	0,82	0,815	97,73	96,47	95,79	92,61	92,61
Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Perkapita (Juta)	17,94	18,26	18,58	18,35	17,406	17,889	18,878	18,88	97,02	97,97	98,98	102,89	102,89
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere' dan Smart	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*	79,5	80	80,5	86,8	80,47	81,45	86,8	87,94	101,22	101,81	107,83	101,31	101,31
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	*Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)*	3,8	3,8	Sangat tinggi	Sangat Tinggi	3,35 (Sedang)	3,5660 (Tinggi)	(Tinggi)	-	88,16	93,84	3,572 (tinggi)	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,1	72,2	72,3	75,33	72,4	75,15	75,33	75,6	100,42	104,08	104,19	100,36	100,36
Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin	Angka Kemiskinan	4,4	4,43	4,2	4,97	4,58	5,07	4,97	4,43	95,91	85,55	81,67	110,87	110,87
Tersedianya Kemudahan Meningkatnya Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	10,31	11,5	11	9,71	11,82	10,6	9,71	9,6	85,35	107,83	111,73	101,13	101,07
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	59,52	60,28	61,04	60,04	59,27	58,86	62,04	60,65	99,58	97,64	101,64	101,01	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita (Juta)	125,4	131,3	137,3	165,95	145,89	155,95	165,95	176,28	116,34	118,77	120,87	106,22	100,56
	Rasio Gini	0,395	0,392	0,39	0,372	0,395	0,387	0,372	0,391	100	101,27	104,62	94,89	
Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman	Indeks Layanan Infrastruktur	74,22	75,03	76,27	74,253	78,56	78,56	74,253	77,22	105,84	104,7	97,36	104,00	104,00
Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup Yang Lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	58,08	58,47	58,97	61,4	60,96	57,53	61,41	66,28	104,96	98,39	104,14	107,95	107,95
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA														**102,40**
Setelah Perubahan														
Sasaran 1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)				19,29				19,1				99,02	99,01
	Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)				20,1				19,9				99,00	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
Sasaran 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)				9,62				9,6				100,21	100,34
	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)				175,46				176,28				100,47	
3.Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)				0,59				0,67				113,56	113,56
4.Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)				1,52				2,69				23,03	54,93
	Indeks Ketahanan Pangan				88				76,42				86,84	
5. Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)				8,75				5,5				62,86	62,86
6 .Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Nilai)				82,03				82,05				100,02	100,02

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
7. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)				75,51				75,6				100,12	100,12
8. Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun				19.301				18.878				97,81	97,81
9. Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan				83,59				84,74				101,38	96,89
	Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryawan				26,49				24,48				92,41	
10. Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)				10				50				500	500
11. Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi				4,51				4,5				99,78	99,78

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
12. Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah				2				6,93				346,50	346,50
13. Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara				5.626.657				6.268.077				111,40	131,47
	Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)				1,63				2,47				151,53	
14. Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda (%)				13,33				13,33				100,00	108,34

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan (%)				16,66				19,44				116,69	
15. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kota Makassar (Industri)				4.515				5.081				112,54	99,40
	Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital (%)				12,44				10,73				86,25	
16. Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)				69,75				68,94				98,84	97,54

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)				4,02				N/A				N/A	
	Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK (Nilai)				87,48				84,2				96,25	
17. Meningkatnya kualitas keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)				55,03				43,90				79,77	79,77
18. Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran (Skor)				4,688				N/A				N/A	N/A
19.Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)				0,179				N/A				N/A	N/A
20. Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (Nilai)				69,44				N/A				N/A	N/A

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
21.Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)				59				67,17				113,85	111,45
	Indeks Pembangunan Keolahragaan (Skor)				0,497				0,542				109,05	
22. Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio (Nilai)				0,366				0,391				93,17	93,17
23. Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)				41,81				N/A				N/A	N/A
24. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai)				73,95				74.17				100,30	81,58
	Indeks Kualitas Udara (Nilai)				75,22				73,63				97,89	
	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai)				36,06				39,17				108,62	
	Timbulan Sampah yang Terolah di				6				1,17				19,50	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)				Realisasi (%)				Capaian Kinerja (%)				Rata-Rata Capaian
		2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
	Fasilitasi Pengolahan Sampah (%)													
25. Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah				0,47				0,48				102,13	102,13
	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)				32,46				N/A				N/A	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA														**127,46**

Sumber: RPJMD Kota Makassar, LPPD Tahun 2022 LPPD Tahun 2023, LPPD Tahun 2024, LKjIP SKPD Tahun 2025 dan BPS Kota Makassar

Kondisi Target dan Realisasi Kinerja Sebelum Perubahan

Pada sasaran strategis Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan, yang diukur melalui indikator Indeks Pendidikan, capaian kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 97,73%, kemudian sedikit menurun pada Tahun 2023 menjadi 96,47%, kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 95,79%, dan pada Tahun 2025 mencapai 92,61%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nilai indeks pendidikan secara bertahap, namun laju peningkatan tersebut masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Bentuk nyata kontribusi perluasan kemudahan akses pendidikan tahun 2025



Indeks pendidikan pada umumnya merupakan indikator komposit yang dibentuk oleh beberapa komponen utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), serta Angka Partisipasi Murni (APM) pada berbagai jenjang pendidikan. Belum tercapainya target tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pada komponen-komponen pembentuk indeks pendidikan tersebut masih belum optimal. Nilai HLS yang belum meningkat secara signifikan menunjukkan bahwa ekspektasi lama sekolah yang dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah masih belum sepenuhnya mengalami peningkatan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, RLS yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh penduduk dalam mengikuti pendidikan formal juga belum mengalami peningkatan yang cukup kuat untuk mendorong kenaikan indeks secara lebih signifikan. Di sisi lain, APM yang mencerminkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai juga masih menunjukkan ruang perbaikan, khususnya dalam memastikan partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan usia dini. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keberlanjutan pendidikan peserta didik, dinamika sosial ekonomi masyarakat perkotaan, serta variasi tingkat partisipasi pendidikan

pada kelompok usia tertentu. Dengan demikian, meskipun Kota Makassar memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan yang relatif baik dibandingkan dengan daerah lain, peningkatan kinerja pada komponen HLS, RLS dan APM masih perlu terus diperkuat melalui berbagai intervensi kebijakan dan program pendidikan yang lebih terarah guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara lebih optimal.

Pada sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, indikator Pengeluaran Perkapita menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 97,02%, meningkat menjadi 97,97% pada Tahun 2023, kemudian 98,98% pada Tahun 2024, dan pada Tahun 2025 melampaui target dengan capaian 102,89%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang mencerminkan kondisi perekonomian daerah yang semakin membaik.

Pencapaian ini mencerminkan bahwa tingkat daya beli masyarakat Kota Makassar relatif terjaga bahkan meningkat dibandingkan dengan proyeksi yang telah direncanakan. Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia Timur, Kota Makassar memiliki aktivitas ekonomi yang cukup dinamis, khususnya pada sektor perdagangan, jasa, transportasi, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan pengeluaran per kapita dipengaruhi oleh berkembangnya aktivitas ekonomi perkotaan, meningkatnya kesempatan usaha, serta perputaran ekonomi yang cukup tinggi di Kota Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa regional. Selain itu, berbagai program pemerintah daerah yang berfokus pada penguatan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan pelaku usaha lokal juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kemampuan konsumsi masyarakat.



Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terus Meningkat

Selama 4 Tahun terakhir

Pada tahun 2025 realisasi IKM Kota Makassar Sebesar 87,94

Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik kota Makassar semakin membaik

2022 2023 2024 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat 4 tahun terakhir

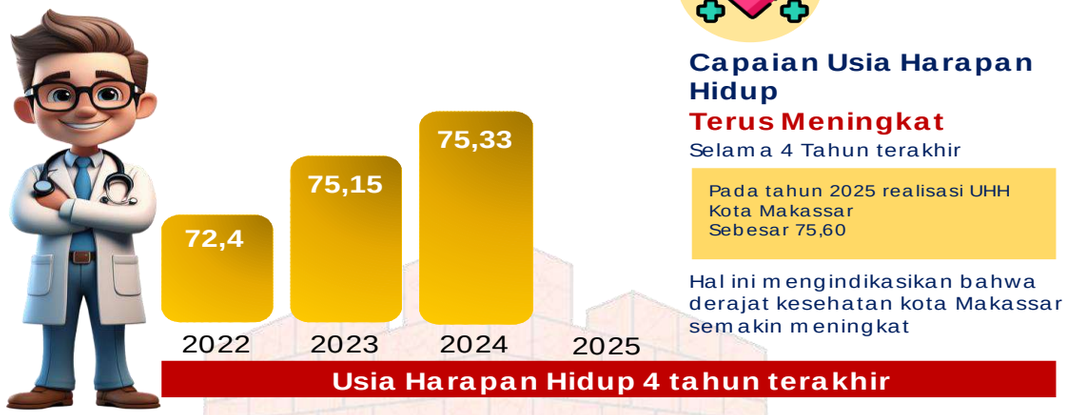
Pada sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik yang Sombere' dan Smart, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) menunjukkan kinerja yang sangat baik. Capaian kinerja secara konsisten melampaui target yaitu 101,22% pada Tahun 2022, 101,81% pada Tahun 2023, meningkat signifikan menjadi 107,83% pada Tahun 2024, dan tetap berada di atas target pada Tahun 2025 dengan capaian 101,31%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kota Makassar semakin meningkat dan mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Bentuk nyata kontribusi kinerja pelayanan tahun 2025

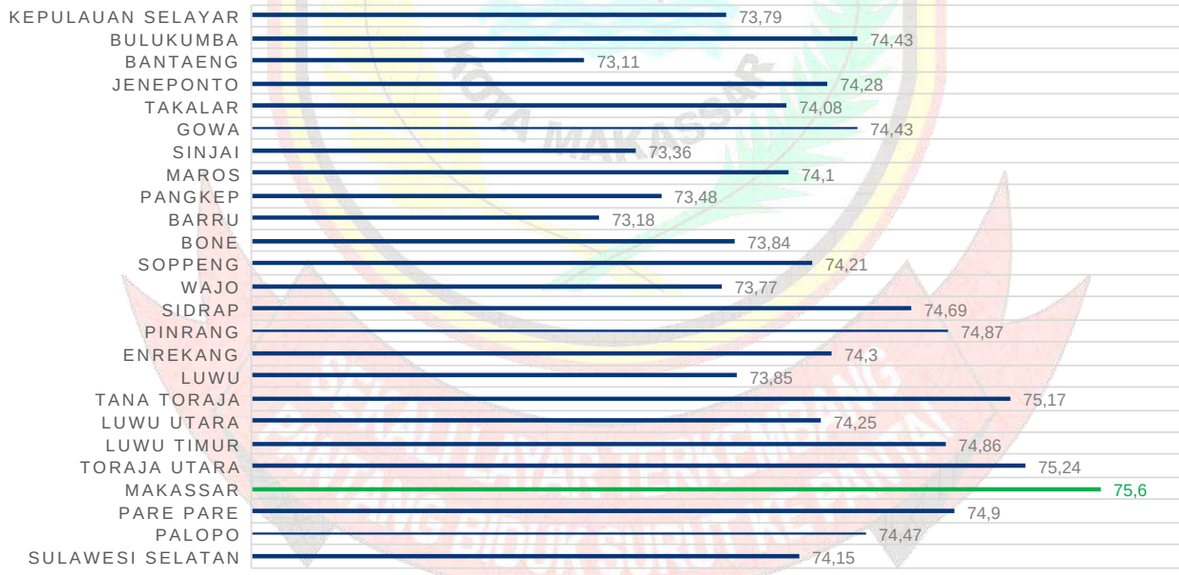


Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator komposit yang dibentuk dari berbagai unsur pelayanan publik, antara lain persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian layanan, kompetensi petugas pelayanan, sarana dan prasarana pelayanan, serta penanganan pengaduan masyarakat. Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari berbagai inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Makassar dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik serta upaya penyederhanaan proses birokrasi. Selain itu, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan serta perbaikan fasilitas pelayanan publik juga turut memberikan dampak positif terhadap persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pada sasaran Meningkatnya LPPD menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari kategori Sedang pada Tahun 2022, meningkat menjadi Tinggi pada Tahun 2023, dan tetap berada pada kategori Tinggi dengan nilai 3,573 pada Tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta peningkatan kualitas pelaporan dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Adapun data untuk Tahun 2025 belum dapat disediakan karena status LPPD belum diterbitkan oleh pihak menterian.



Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan, indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan peningkatan yang konsisten dan melampaui target pada sebagian besar tahun pengukuran. Capaian kinerja pada Tahun 2022 sebesar 100,42%, meningkat menjadi 104,08% pada Tahun 2023, 104,19% pada Tahun 2024, dan 100,36% pada Tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan serta keberhasilan program pembangunan di bidang kesehatan.



Berdasarkan data capaian Umur Harapan Hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 75,6 tahun. Nilai tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga menempatkan Kota Makassar sebagai daerah dengan tingkat harapan hidup masyarakat paling tinggi di provinsi ini. Selain itu, capaian UHH Kota Makassar juga berada di atas rata-rata UHH Provinsi Sulawesi Selatan yang sebesar 74,15 tahun.

Inovasi Kesehatan Kota Makassar 2025



Peningkatan usia harapan hidup mencerminkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat di Kota Makassar. Sebagai wilayah perkotaan dengan akses layanan kesehatan yang relatif lebih baik, Kota Makassar memiliki berbagai fasilitas kesehatan yang cukup memadai, mulai dari puskesmas, rumah sakit, hingga fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Peningkatan usia harapan hidup dipengaruhi oleh meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, serta keberhasilan berbagai program kesehatan masyarakat seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit menular, serta program perbaikan gizi masyarakat. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola hidup sehat juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat secara umum.

Pada sasaran Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Miskin, indikator Angka Kemiskinan menunjukkan dinamika capaian yang cukup fluktuatif. Pada Tahun 2022 capaian kinerja sebesar 95,91%, menurun pada Tahun 2023 menjadi 85,55%, dan kembali menurun pada Tahun 2024 menjadi 81,67%. Namun pada Tahun 2025 capaian meningkat signifikan hingga 110,86%, yang menunjukkan keberhasilan upaya pengendalian angka kemiskinan sehingga realisasi berada di bawah target yang ditetapkan.

Penurunan angka kemiskinan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penurunan angka kemiskinan dapat dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Makassar, berkembangnya sektor perdagangan dan jasa, serta meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, program perlindungan sosial, bantuan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta berbagai

program pemberdayaan ekonomi masyarakat juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan.



Tingkat Pengangguran Terbuka 4 tahun terakhir

Pada sasaran Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru, indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan tren perbaikan sejak Tahun 2023 dengan capaian 107,83%, meningkat menjadi 111,73% pada Tahun 2024, meskipun pada Tahun 2025 sedikit menurun menjadi 101,13 % namun telah mencapai target yang ditetapkan. Sementara itu indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan capaian 99,58% pada Tahun 2022, 97,64% pada Tahun 2023, kemudian meningkat menjadi 101,64% pada Tahun 2024, dan 101,01% pada Tahun 2025.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kota Makassar berhasil ditekan hingga berada di bawah target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam dinamika pasar tenaga kerja di Kota Makassar, meskipun sebagai kota metropolitan yang menjadi pusat kegiatan ekonomi dan urbanisasi di kawasan Indonesia Timur, Makassar memiliki tantangan yang cukup kompleks dalam pengelolaan ketenagakerjaan. Keberhasilan menurunkan tingkat pengangguran tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, pariwisata, serta sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah. Selain itu, berbagai program pemerintah daerah yang mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, pelatihan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan juga turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan sektor informal di kawasan perkotaan

juga dapat menjadi salah satu faktor yang membantu menyerap tenaga kerja yang sebelumnya belum terserap di sektor formal. Dengan demikian, capaian kinerja TPT yang melampaui target menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong perluasan kesempatan kerja dan peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat pengangguran di daerah.

Pada indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), capaian kinerja tahun 2025 mencapai 101,01 persen, yang menunjukkan bahwa indikator ini berhasil melampaui target yang ditetapkan. Target TPAK pada tahun 2025 sebesar 60,04 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 60,65 persen. Peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja di Kota Makassar yang aktif dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh meningkatnya kesempatan kerja di berbagai sektor ekonomi perkotaan, berkembangnya kegiatan usaha masyarakat, serta meningkatnya partisipasi kelompok masyarakat tertentu, termasuk perempuan dan generasi muda, dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, berbagai program pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah juga dapat mendorong meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pasar kerja.

Pada sasaran Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi, indikator PDRB Perkapita menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan capaian kinerja 116,34% pada Tahun 2022, meningkat menjadi 118,77% pada Tahun 2023, dan 120,87% pada Tahun 2024, yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup kuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Makassar belum sepenuhnya mencapai tingkat yang diproyeksikan dalam dokumen perencanaan pembangunan. PDRB per kapita dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kinerja sektor-sektor ekonomi utama seperti perdagangan, jasa, transportasi, industri pengolahan, serta tingkat investasi yang masuk ke daerah. Belum tercapainya target ini dipengaruhi oleh fluktuasi aktivitas ekonomi pada beberapa sektor strategis, perubahan dinamika permintaan pasar, serta pengaruh kondisi ekonomi nasional dan global yang turut mempengaruhi kinerja perekonomian daerah.

Sementara itu indikator Rasio Gini menunjukkan perbaikan distribusi pendapatan masyarakat dengan capaian 100% pada Tahun 2022, meningkat menjadi 101,27% pada Tahun 2023, 104,62% pada Tahun 2024, dan mengalami penurunan 94,89 % pada Tahun 2025. Rasio Gini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan di Kota Makassar masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketimpangan distribusi pendapatan dipengaruhi oleh berbagai faktor,

antara lain dinamika pertumbuhan ekonomi, perbedaan akses terhadap kesempatan kerja, serta ketimpangan dalam kepemilikan aset dan sumber daya ekonomi. Meskipun pemerintah daerah telah mengupayakan berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, hasil yang dicapai menunjukkan bahwa efektivitas intervensi tersebut masih perlu diperkuat. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur serta peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan tetap menjadi faktor penting yang perlu terus ditingkatkan guna menekan kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat.

Pada sasaran Tersedianya Infrastruktur Menuju Kota Nyaman, indikator Indeks Layanan Infrastruktur menunjukkan capaian yang relatif baik dengan capaian 105,84% pada Tahun 2022, 104,70% pada Tahun 2023, 97,36% pada Tahun 2024 dan kembali meningkat pada Tahun 2025 menjadi 103,99%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan infrastruktur perkotaan terus mengalami peningkatan untuk mendukung kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat.

Bentuk nyata kontribusi kinerja infrastruktur tahun 2025



Pencapaian ini mengindikasikan bahwa kualitas dan ketersediaan layanan infrastruktur di Kota Makassar secara umum berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan proyeksi yang direncanakan. Indeks layanan infrastruktur pada umumnya merupakan indikator komposit yang mencerminkan beberapa aspek utama pembangunan infrastruktur perkotaan, seperti kondisi dan aksesibilitas jaringan jalan, ketersediaan infrastruktur transportasi, kualitas sistem drainase, serta ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang mendukung aktivitas masyarakat. Keberhasilan capaian indikator ini dipengaruhi oleh berbagai upaya Pemerintah Kota Makassar dalam meningkatkan kualitas infrastruktur

perkotaan melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan, penataan kawasan perkotaan, peningkatan fasilitas transportasi, serta penguatan infrastruktur pendukung mobilitas masyarakat. Selain itu, peningkatan koordinasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur serta integrasi program pembangunan perkotaan juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya kualitas layanan infrastruktur di Kota Makassar.

Upaya perbaikan atas kinerja Infrastruktur Menuju Kota Nyaman



Selanjutnya pada sasaran Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari, indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan capaian yang cukup baik dengan capaian 104,96% pada Tahun 2022, 98,39% pada Tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 104,14% pada Tahun 2024, dan 107,93% pada Tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar.

Bentuk aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup tahun 2025



Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Makassar mengalami perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan target yang telah

direncanakan. IKLH merupakan indikator komposit yang dibentuk dari beberapa komponen utama, yaitu kualitas udara, kualitas air, serta kondisi tutupan lahan atau ruang terbuka hijau. Peningkatan nilai IKLH di Kota Makassar dipengaruhi oleh berbagai upaya pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seperti peningkatan pengelolaan persampahan, pengembangan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran lingkungan, serta penguatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Selain itu, program penataan kawasan perkotaan yang lebih ramah lingkungan serta berbagai inisiatif pembangunan kota yang berorientasi pada keberlanjutan juga turut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kualitas lingkungan hidup di Kota Makassar. Dengan demikian, keberhasilan capaian kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Makassar telah berjalan secara cukup efektif dalam mendukung terwujudnya kota yang lebih nyaman, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian kinerja sasaran strategis selama periode Tahun 2022–2025 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Makassar.

Kondisi Target dan Realisasi Kinerja Setelah Perubahan

Setelah dilakukan perubahan atau peralihan RPJMD Kota Makassar dari periode 2021-2026 beralih ke periode 2025-2029, capaian kinerja sasaran strategis menunjukkan variasi yang cukup signifikan antar sektor sehingga agak sulit untuk membandingkan capaian dengan tahun sebelumnya.

Pada Sasaran 1: Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang secara umum mendekati target, namun tidak melampaui, sehingga perlu dibaca secara lebih hati-hati, bukan langsung dikategorikan sebagai kinerja kuat. Hal ini tercermin dari indikator Rasio PDRB Industri Pengolahan yang memiliki target sebesar 19,29 persen dengan realisasi 19,1 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,01 persen. Sementara itu, indikator Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memiliki target sebesar 20,1 persen dengan realisasi 19,9 persen, dengan capaian kinerja sebesar 99 persen.

Secara numerik, kedua indikator ini memang berada sangat dekat dengan target. Namun, fakta bahwa keduanya tidak mencapai 100 persen menunjukkan adanya sedikit kontraksi atau setidaknya stagnasi relatif terhadap ekspektasi yang telah ditetapkan. Ini penting, karena pada indikator berbasis struktur ekonomi, deviasi kecil sering kali mencerminkan pergeseran yang lebih dalam pada dinamika sektor. Kedua indikator tersebut merupakan representasi utama dari struktur ekonomi daerah. Rasio PDRB sektor industri pengolahan mencerminkan kapasitas daerah dalam menciptakan nilai tambah melalui proses produksi dan hilirisasi. Sementara itu, rasio PDRB sektor perdagangan menggambarkan kekuatan aktivitas distribusi dan konsumsi sebagai penggerak ekonomi perkotaan. Capaian yang hanya berada di kisaran 99 persen mengindikasikan bahwa peran kedua sektor ini masih stabil, tetapi tidak mengalami akselerasi yang signifikan. Dengan kata lain, sektor industri dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi Kota Makassar, namun belum menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup kuat untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih progresif.

Pada Sasaran 2: Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang memiliki target sebesar 9,62 persen dengan realisasi 9,6 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,21 persen. Indikator TPT pada dasarnya menggambarkan proporsi angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan terhadap total angkatan kerja yang tersedia. Oleh karena itu, semakin rendah nilai TPT menunjukkan semakin baik kondisi pasar tenaga kerja di suatu daerah.

Selain itu, indikator PDRB Per Kapita memiliki target sebesar 175,46 juta rupiah per kapita per tahun dengan realisasi sebesar 176,28 juta rupiah, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,47 persen. PDRB per kapita merupakan indikator komposit yang menggambarkan rata-rata tingkat pendapatan masyarakat yang dihasilkan dari total aktivitas ekonomi daerah. Capaian yang melampaui target pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Pada Sasaran 3: Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Hal ini terlihat pada indikator Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB yang memiliki target sebesar 0,59 persen, dengan realisasi sebesar 0,67 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 113,56 persen.

Bentuk nyata kontribusi kinerja keuangan tahun 2025



Indikator ini merupakan indikator yang menggambarkan tingkat kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan pajak daerah dibandingkan dengan total aktivitas ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut. Dengan kata lain, rasio pajak daerah terhadap PDRB menunjukkan seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam menopang kapasitas fiskal pemerintah daerah. Capaian yang melampaui target ini mengindikasikan bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi daerah telah berjalan dengan baik, serta menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.

Pada Sasaran 4: Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup beragam. Indikator Tingkat Inflasi memiliki target sebesar 1,52 persen, namun realisasi tercatat sebesar 2,69 persen, sehingga capaian kinerjanya hanya mencapai 23,03 persen. Indikator inflasi menggambarkan tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Realisasi inflasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan adanya tekanan harga pada beberapa komoditas tertentu, yang dapat dipengaruhi oleh faktor distribusi, pasokan pangan, maupun dinamika harga di tingkat nasional. Sementara itu, indikator Indeks Ketahanan Pangan memiliki target sebesar 88 dengan realisasi 76,42, sehingga capaian kinerjanya mencapai 86,84 persen dan belum sepenuhnya mencapai target. Indeks ketahanan pangan merupakan indikator komposit yang mencerminkan kondisi ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta kualitas konsumsi pangan masyarakat. Oleh karena itu, capaian indikator ini menggambarkan sejauh mana sistem pangan daerah mampu menjamin ketersediaan dan akses masyarakat terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam mendukung ketahanan pangan tahun 2025



Gerakan urban farming menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lorong, dan ruang terbuka yang produktif, gerakan ini tidak hanya mendukung ketersediaan pangan rumah tangga, tetapi juga membantu menjaga stabilitas pasokan pangan, mengurangi ketergantungan pada distribusi dari luar daerah, serta mendorong pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selain itu, urban farming memiliki nilai ekonomi dan sosial karena mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat pemberdayaan kelompok warga, serta menjadi salah satu upaya adaptif pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan inflasi pangan dan kerentanan ketahanan pangan di wilayah perkotaan.

Pada Sasaran 5: Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang masih relatif rendah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Peningkatan Investasi Daerah yang memiliki target sebesar 8,75 persen, dengan realisasi sebesar 5,5 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 62,86 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat pertumbuhan realisasi investasi yang masuk ke daerah dalam suatu periode tertentu. Investasi merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah karena berperan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong perkembangan sektor usaha. Capaian yang belum optimal ini mengindikasikan bahwa peningkatan realisasi investasi di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan dinamika ekonomi makro, tingkat kepastian usaha, maupun faktor pendukung seperti infrastruktur dan kemudahan perizinan.

Upaya Perbaikan kinerja dalam mendukung investasi



Pada Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator Indeks Pendidikan yang memiliki target sebesar 82,03 dengan realisasi 82,05, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,96 persen dengan rata-rata capaian sebesar 100,02 persen. Indeks pendidikan merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan secara menyeluruh, yang umumnya disusun dari beberapa komponen seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Oleh karena itu, indikator ini mencerminkan tidak hanya akses masyarakat terhadap pendidikan, tetapi juga tingkat pencapaian pendidikan penduduk. Capaian yang hampir mencapai target ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan serta akses masyarakat terhadap pendidikan di Kota Makassar relatif terjaga dan berkembang secara positif.

Pada Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Usia Harapan Hidup yang memiliki target sebesar 75,51 tahun dengan realisasi 75,6 tahun, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,12 persen. Usia harapan hidup merupakan indikator komposit yang menggambarkan rata-rata perkiraan umur yang dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir apabila pola mortalitas yang berlaku pada saat ini terus berlangsung. Indikator ini sering digunakan sebagai gambaran umum kondisi kesehatan masyarakat, karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas layanan kesehatan, status gizi masyarakat, sanitasi lingkungan, serta tingkat kesejahteraan masyarakat. Pencapaian yang melampaui target menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat di Kota Makassar terus mengalami perbaikan.

Pada Sasaran 8: Meningkatnya Daya Beli Masyarakat, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang

ditetapkan. Hal ini tercermin dari indikator Pengeluaran Per Kapita yang memiliki target sebesar 19.301 ribu rupiah per kapita per tahun dengan realisasi 18.878 ribu rupiah, sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,81 persen. Pengeluaran per kapita merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pendapatan, stabilitas harga, serta aktivitas ekonomi secara umum. Capaian ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat relatif terjaga, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang diharapkan.

Pada Sasaran 9: Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian yang bervariasi antar indikator. Hal ini tercermin dari indikator Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan yang memiliki target sebesar 83,59 dengan realisasi 84,74, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,38 persen.

Sementara itu, indikator Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan memiliki target sebesar 26,49 dengan realisasi 24,48, sehingga capaian kinerjanya mencapai 92,41 persen. Kedua indikator tersebut merupakan indikator komposit yang menggambarkan kualitas layanan infrastruktur dasar yang disediakan oleh pemerintah daerah, khususnya pada sektor jalan, drainase, sanitasi, air bersih, dan infrastruktur permukiman. Indeks layanan infrastruktur kebinamargaan mencerminkan kondisi jaringan jalan dan sarana pendukung transportasi yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Sementara itu, indeks layanan keciptakaryaan menggambarkan kualitas pelayanan infrastruktur dasar perkotaan seperti air minum, sanitasi, pengelolaan limbah, dan infrastruktur permukiman. Capaian yang berbeda antar indikator ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur sudah menunjukkan hasil pada aspek tertentu, namun masih terdapat kebutuhan peningkatan pada aspek layanan dasar lainnya agar lebih merata.

Pada Sasaran 10: Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat tinggi. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang memiliki target sebesar 10 persen dengan realisasi sebesar 50 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 500 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat ketersediaan dokumen perencanaan tata ruang rinci yang menjadi dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan. Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan percepatan yang signifikan dalam penyusunan dokumen RDTR. Namun demikian, perbedaan yang sangat besar antara target dan realisasi juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan kemungkinan belum mencerminkan kapasitas riil pelaksanaan di lapangan, sehingga ke depan diperlukan penyesuaian target agar lebih proporsional dan terukur.

Pada Sasaran 11: Meningkatnya Penguasaan IPTEK, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator Indeks Kapabilitas Inovasi yang memiliki target sebesar 4,51 dengan realisasi 4,5, sehingga capaian kinerjanya mencapai 99,78 persen. Indeks kapabilitas inovasi merupakan indikator komposit yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan ekosistem inovasi daerah, baik melalui kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dan pembangunan daerah. Indikator ini umumnya disusun berdasarkan berbagai dimensi seperti kapasitas kelembagaan inovasi, dukungan kebijakan, implementasi inovasi pelayanan publik, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong pengembangan inovasi daerah. Capaian yang mendekati target menunjukkan bahwa kapasitas inovasi di Kota Makassar relatif berkembang dengan baik dan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada Sasaran 12: Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah yang memiliki target sebesar 2 persen, dengan realisasi mencapai 6,93 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 346,5 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Tingginya capaian indikator ini menunjukkan bahwa aktivitas inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berkembang secara signifikan, yang dapat dipengaruhi oleh meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong budaya inovasi di lingkungan birokrasi serta dukungan kebijakan terhadap implementasi inovasi.

Pada Sasaran 13: Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari indikator Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara yang memiliki target sebesar 5.626.657 kunjungan dengan realisasi 6.268.077 kunjungan, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,32 persen.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam mendukung sektor pariwisata 2025



Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 8–9 Desember 2025, dan diikuti 67 peserta dari kalangan event organizer, termasuk peserta dari luar daerah seperti Bandung.

Pemerintah Kota Makassar menyiapkan anggaran sekitar Rp5 miliar setiap bulan untuk mendukung penyelenggaraan **event kreatif berskala besar**. Wali Kota Munafri mengajak para kreator, event organizer, dan pelaku pariwisata untuk memanfaatkan peluang ini, memaksimalkan keindahan alam kota seperti laut, sunset, pulau Spermonde, dan sungai sebagai modal kreatif dalam setiap event.

Indikator ini menggambarkan tingkat daya tarik sektor pariwisata daerah yang diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke wilayah kota. Selain itu, indikator rata-rata lama tinggal wisatawan menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan target sebesar 1,63 hari dan realisasi sebesar 2,47 hari, sehingga capaian kinerjanya mencapai 151,53 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kenyamanan dan daya tarik destinasi wisata dalam mendorong wisatawan untuk tinggal lebih lama. Tingginya capaian pada kedua indikator ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata Kota Makassar tidak hanya mampu menarik kunjungan wisatawan, tetapi juga meningkatkan kualitas pengalaman wisata yang berdampak pada lamanya masa tinggal wisatawan.

Pada Sasaran 14: Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Peningkatan Karya Budaya yang Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda yang memiliki target sebesar 13,33 persen dengan realisasi sebesar 13,33 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 persen. Indikator ini menggambarkan upaya pemerintah daerah dalam melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya lokal melalui pencatatan dan pengakuan terhadap karya budaya. Selain itu, indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan memiliki target sebesar 16,66 persen dengan realisasi sebesar 19,44 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 116,69 persen. Indikator ini mencerminkan tingkat perlindungan sekaligus pemanfaatan aset budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga mengalami percepatan yang signifikan.

Pada Sasaran 15: Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik dengan capaian yang bervariasi antar indikator. Hal ini tercermin dari indikator Jumlah Industri Ekonomi Kreatif

Yang Aktif dan memiliki target sebesar 4.515 industri dengan realisasi sebesar 5.081 industri, sehingga capaian kinerjanya mencapai 112,5 persen. Indikator ini menggambarkan jumlah pelaku usaha atau unit usaha yang bergerak dalam sektor ekonomi kreatif, yang meliputi berbagai subsektor seperti kuliner, fesyen, kriya, desain, seni pertunjukan, hingga konten digital.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam mendukung ekonomi kreatif tahun 2025



Sementara itu, indikator Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital memiliki target sebesar 12,44 persen dengan realisasi sebesar 10,73 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 86,25 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat adopsi teknologi digital oleh pelaku ekonomi kreatif dalam mendukung pemasaran dan pengembangan usaha. Capaian yang belum optimal pada indikator ini menunjukkan bahwa transformasi digital pada sektor ekonomi kreatif masih memerlukan penguatan, meskipun dari sisi kuantitas jumlah pelaku usaha telah menunjukkan peningkatan yang signifikan..

Pada Sasaran 16: Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang kurang baik. Hal ini terlihat dari indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (SAKIP) yang memiliki target sebesar 69,75 dengan realisasi 68,94, sehingga capaian kinerjanya mencapai 98,84 persen. Nilai ini menggambarkan tingkat kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menilai keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Selain itu, indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki target sebesar 4,02 dengan realisasi N/A untuk tahun 2025 tidak dilakukan penilaian, sehingga capaian kinerjanya belum dapat disajikan. Indeks SPBE merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat kematangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mencakup aspek kebijakan, tata kelola, layanan digital, serta infrastruktur teknologi informasi. Selanjutnya, indikator Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK memiliki target sebesar 87,48 dengan realisasi sebesar 84,2, sehingga capaian kinerjanya mencapai

96,25 persen. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan korupsi yang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bentuk nyata kontribusi kinerja anti korupsi tahun 2025







Secara keseluruhan, capaian pada sasaran ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah di Kota Makassar telah berjalan dengan cukup baik, terutama dalam aspek akuntabilitas kinerja, pemanfaatan teknologi informasi, serta upaya pencegahan korupsi, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam peningkatan kualitas implementasi dan konsistensi kinerja..

Pada Sasaran 17: Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani yang memiliki target sebesar 55,03 persen, dengan realisasi sebesar 43,90 persen, sehingga capaian kinerjanya 79,77 persen masih berada di bawah target yang ditetapkan. Indikator ini menggambarkan tingkat kemampuan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menangani kasus kriminal yang terjadi di wilayah kota. Realisasi yang lebih rendah dari target menunjukkan bahwa masih terdapat tantangan dalam efektivitas penanganan tindak kriminal, sehingga diperlukan peningkatan koordinasi serta penguatan sistem keamanan dan penegakan hukum di daerah.

Pada Sasaran 18: Meningkatnya Kualitas Toleransi dalam Masyarakat, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Indeks Kota Toleran yang memiliki target sebesar 4,688 belum dapat disajikan realisasi dan capaian kinerjanya, karena data yang dimaksud belum rilis dari Setara Institut selaku Lembaga yang mengeluarkan nilai Indeks Kota Toleran. Indeks kota toleran merupakan indikator komposit yang menggambarkan tingkat toleransi sosial dalam suatu wilayah, yang diukur melalui berbagai dimensi seperti kebijakan pemerintah daerah, praktik sosial masyarakat, serta kondisi kebebasan beragama dan keberagaman sosial.

Pada Sasaran 19: Menurunnya Ketimpangan Gender, dengan indikator Indeks Ketimpangan Gender pada tahun 2025 memiliki target 0,719 namun belum ada data realisasi dan capaian kinerjanya sehingga belum dapat disajikan. Indeks ketimpangan gender merupakan indikator komposit yang menggambarkan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan, seperti kesehatan, pendidikan, serta partisipasi ekonomi dan politik. Namun demikian, perlu dicermati bahwa semakin tinggi nilai indeks ini justru menunjukkan peningkatan ketimpangan, sehingga capaian yang sangat tinggi ini tidak serta-merta mencerminkan kondisi yang lebih baik, melainkan mengindikasikan adanya peningkatan kesenjangan gender yang perlu menjadi perhatian serius dalam kebijakan pembangunan.

Pada Sasaran 20: Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak, dengan Indikator Indeks Perlindungan Anak pada Tahun 2025 Memiliki target 69,44 namun belum ada data realisasi dan capaian kinerjanya sehingga belum dapat disajikan. Indeks perlindungan anak merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi perlindungan anak dalam berbagai dimensi, seperti perlindungan dari kekerasan, akses terhadap layanan dasar, pemenuhan hak anak, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam perlindungan anak tahun 2025







Meski demikian Pemerintah Kota Makassar telah melakukan beberapa kegiatan yang mendukung sasaran tersebut yang menunjukkan bahwa upaya perlindungan anak di Kota Makassar telah dilakukan, meskipun masih diperlukan peningkatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal.

Pada Sasaran 21: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik pada kedua indikator yang digunakan. Hal ini tercermin dari indikator Indeks Pembangunan Pemuda yang memiliki target sebesar 59 dengan realisasi 67,17 sehingga capaian kinerjanya mencapai 113,85 persen. Indeks pembangunan pemuda merupakan indikator komposit yang

menggambarkan kualitas pembangunan pemuda dalam berbagai dimensi seperti pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, serta partisipasi sosial pemuda dalam pembangunan. Selain itu, indikator Indeks Pembangunan Keolahragaan memiliki target sebesar 0,497 dengan realisasi 0,542, sehingga capaian kinerjanya mencapai 109,05 persen. Indikator ini mencerminkan tingkat perkembangan pembangunan olahraga yang diukur melalui berbagai dimensi seperti partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, ketersediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pembinaan prestasi olahraga. Capaian yang melampaui target menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan kepemudaan dan olahraga telah berjalan dengan baik.

Pada Sasaran 22: Menurunnya Disparitas Pendapatan, capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat pada indikator Gini Rasio yang memiliki target sebesar 0,366 dengan realisasi 0,391, sehingga capaian kinerjanya mencapai 93,17 persen. Gini rasio merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Nilai gini rasio yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata, sedangkan nilai yang lebih tinggi menunjukkan ketimpangan yang lebih besar. Realisasi yang sedikit lebih tinggi dari target menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di Kota Makassar masih perlu mendapatkan perhatian lebih, meskipun secara umum tingkat ketimpangan tersebut masih berada pada kategori yang relatif terkendali.

Pada Sasaran 23: Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini terlihat pada indikator Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal yang memiliki target sebesar 41,81 persen dengan realisasi sebesar 49,08 persen, sehingga capaian kinerjanya mencapai 117,39 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat inklusivitas pasar kerja bagi penyandang disabilitas serta upaya pemerintah daerah dalam mendorong kesempatan kerja yang setara. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam sektor formal. Selain itu, Dinas Ketenagakerjaan memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dengan memberi bantuan iuran JHT dan JKK kepada 81.466 orang pekerja rentan dan disabilitas.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam mendukung Inkusifitas tahun 2025



Pada Sasaran 24: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup, capaian kinerja tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator utama yang tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator-indikator pada sasaran ini sebagian merupakan indikator komposit, yaitu indikator yang dibentuk dari gabungan beberapa parameter atau sub-indikator yang merepresentasikan kondisi lingkungan secara lebih komprehensif. Penggunaan indikator komposit bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas lingkungan hidup, sehingga evaluasi kebijakan dan program pengelolaan lingkungan dapat dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Indikator Indeks Kualitas Air merupakan indikator komposit yang menggambarkan kondisi mutu air pada badan air utama di suatu wilayah. Indeks ini umumnya disusun dari beberapa parameter kualitas air seperti tingkat pencemaran organik, kandungan zat kimia tertentu, serta parameter fisika dan biologi air yang mencerminkan tingkat kesehatan ekosistem perairan. Pada tahun 2025, indikator ini memiliki target sebesar 73,95, dengan realisasi mencapai 74,17, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,297 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas air di wilayah daerah berada sedikit di atas target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah domestik dan industri, serta perlindungan sumber daya air telah berjalan secara relatif efektif. Indeks kualitas air yang baik sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan ekosistem perairan, ketersediaan air bersih, serta kesehatan masyarakat.

Indikator Indeks Kualitas Air memiliki target sebesar 73,95 dengan realisasi sebesar 74,17, sehingga capaian kinerjanya mencapai 100,3 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas air berada sedikit di atas target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa upaya pengendalian pencemaran air serta pengelolaan sumber daya air telah berjalan relatif efektif. Indikator Indeks Kualitas Udara memiliki target sebesar

75,22 dengan realisasi sebesar 73,63, sehingga capaian kinerjanya mencapai 97,89 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas udara masih berada di bawah target, sehingga diperlukan penguatan dalam pengendalian sumber pencemar udara serta peningkatan kualitas lingkungan perkotaan.

Selanjutnya, indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan memiliki target sebesar 36,06 dengan realisasi sebesar 39,17, sehingga capaian kinerjanya mencapai 108,62 persen. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi tutupan lahan yang melampaui target, yang dapat mencerminkan keberhasilan program rehabilitasi lahan serta pengembangan ruang terbuka hijau. Namun demikian, indikator timbulan sampah yang terkelola menunjukkan capaian yang masih sangat rendah, dengan target sebesar 6 dan realisasi sebesar 1,17, sehingga capaian kinerjanya hanya sekitar 19,5 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah masih menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya dalam aspek pengumpulan dan pengolahan sampah secara terintegrasi..

Pada Sasaran 25: Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan indicator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator Indeks Ketahanan Daerah memiliki target sebesar 0,47 dengan realisasi sebesar 0,48 sehingga capaian kinerjanya mencapai 102,13 persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kesiapsiagaan dan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam mewujudkan ketahanan daerah tahun 2025



Bentuk nyata kontribusi kinerja dalam inovasi kebencanaan tahun 2025



Selain itu, indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) memiliki target sebesar 32,46 persen belum tersedia data realiasi dan capaian kinerja Tahun 2025, sehingga belum dapat disajikan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengendalian emisi belum terlaksana dan terukur sepenuhnya.



Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmen yang kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim melalui langkah yang konkret, terarah dan kolaboratif salah satunya melalui penguatan kerja sama dengan Pemerintah Kota Yokohama, Jepang, dalam proyek Zero Carbon City yang didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Kerja sama ini menjadi bentuk nyata upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat strategi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) secara lebih sistematis, terutama melalui pengembangan kebijakan, perencanaan dan implementasi program pembangunan rendah karbon pada berbagai sektor, seperti energi, transportasi, pengelolaan limbah, dan lingkungan perkotaan. Inisiatif ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian GRK di Kota Makassar tidak hanya dilakukan melalui pendekatan administratif tetapi juga melalui kemitraan strategis yang dapat memperkuat kapasitas daerah,

mendorong transfer pengetahuan dan praktik baik serta mempercepat terwujudnya kota yang lebih berkelanjutan, tangguh dan adaptif terhadap dampak perubahan iklim.

Sasaran- sasaran tersebut di atas didukung dengan program- program prioritas yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Wali Kota Makassar Tahun 2025.

1. Sasaran "Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah"

Dalam rangka pelaksanaan Misi 1: Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah, dan Penciptaan Lapangan Kerja, ditetapkan Tujuan Terwujudnya Kota Makassar dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dengan salah satu sasaran yaitu Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah dengan dua indikator kinerja utama yaitu Rasio PDRB Industri Pengolahan dan Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor.

Adapun perhitungan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio PDRB Industri Pengolahan} = \frac{PDRB\ Sektor\ Industri}{Total\ PDRB} x100\%$$

Dan indikator kinerja Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%) telah berhasil mencapai 99,00% atau kategori sangat tinggi. Adapun perhitungan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor} = \frac{PDRB\ Perdagangan\ Besar\ dan\ Eceran, Reparasi\ Mobil\ dan\ Sepeda\ Motor}{Total\ PDRB} x100\%$$

Tabel II.15
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 1		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja				
Terwujudnya Kota Makassar dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,17	19,29	19,1	99,02
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,03	20,1	19,9	99,00
Rata- Rata Capaian						**99,01**

Sumber: RPJMD Kota Makassar Taun 2025-2029 dan BPS Kota Makassar Tahun 2025

Dengan target 19,29%; Rasio PDRB Industri Pengolahan terealisasi sebesar 19,1% dengan capaian 99,02% dimana realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan Baseline 2024 atau tahun sebelumnya yang hanya 18,17%. Sementara untuk indikator Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor ditarget 20,1% terealisasi 19,9% dengan capaian 99%, mengalami penurunan dari realisasi Tahun 2024 yang sebesar 20,03%.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata - rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{99{,}01\% + 99\%}{2} = 99{,}005\%$$

Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah didukung 4 (empat) program yaitu Program Perencanaaan dan Pembangunan Industri; Program Pengembangan Ekspor; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri serta Program Pengembangan UMKM.

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Meningkatnya realisasi pembangunan industri melalui Program Perencanaan dan Pembangunan Industri pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri.

Tabel II.16
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	N/A	4,8%	4,69%	97,70%	Rp4.446.982.120	Rp3.841.966.608	86%

Sumber : LKjIP Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2025

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dilaksanakan dalam rangka mendorong peningkatan investasi pada sektor industri serta pengembangan kawasan industri guna memperkuat struktur perekonomian daerah. Program ini diarahkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan daya tarik sektor industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor industri yang berkelanjutan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 4,8%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator tercapai sebesar 4,69%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,70% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp4.446.982.120. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp3.841.966.608 atau 86% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan.

Faktor Penghambat: Keterbatasan lahan industri yang siap investasi, terutama lahan yang sudah memiliki legalitas dan utilitas lengkap.

Faktor Pendorong: Kebijakan pemerintah yang mendukung investasi, seperti kemudahan perizinan melalui sistem OSS dan regulasi yang pro-investasi.

Tindak Lanjut: Menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan investasi, serta memberikan pendampingan kepada calon investor.

Capaian kinerja indikator program menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun realisasi indikator masih sedikit di bawah target yang ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui penguatan perencanaan pembangunan industri, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung peningkatan investasi pada sektor industri dan kawasan industri di masa yang akan datang.

Program Pengembangan Ekspor

Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor melalui Program Pengembangan Ekspor pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor Barang Kota Makassar.

Tabel II.17
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekspor

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pertumbuhan Nilai Ekspor	11,95%	12,1%	7,931%	65,56%	Rp1.273.778.340	Rp1.129.948.079	89%

Barang Kota Makassar							

Sumber : LKjIP Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengembangan Ekspor dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perdagangan luar negeri serta memperluas akses pasar bagi produk daerah. Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan nilai ekspor barang melalui penguatan daya saing produk, perluasan jaringan pemasaran, serta fasilitasi promosi dan kemitraan perdagangan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 11,95% dengan target kinerja sebesar 12,1%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator tercapai sebesar 7,93%, sehingga tingkat capaian kinerja terhadap target sebesar 65,56%.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.273.778.340. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.129.948.079 atau sebesar 89% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran tergolong baik, capaian indikator kinerja program masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui penguatan fasilitasi ekspor, peningkatan kualitas dan daya saing produk daerah, serta perluasan akses pasar ekspor guna mendorong peningkatan nilai ekspor barang Kota Makassar pada periode selanjutnya.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan kapasitas produksi dan kontinuitas pasokan dari pelaku usaha lokal.
b. Masih terbatasnya pelaku usaha yang memiliki kemampuan ekspor, termasuk pemahaman prosedur ekspor dan akses pasar luar negeri.
c. Standar mutu dan persyaratan ekspor yang cukup ketat di negara tujuan.

Faktor Pendorong:

a. Potensi komoditas ekspor daerah yang cukup besar, seperti hasil perikanan, hasil pertanian, dan produk olahan industri.
b. Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan ekspor dan peningkatan daya saing produk lokal.
c. Peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor oleh pelaku usaha sehingga mampu bersaing di pasar internasional.

Tindak Lanjut:

a. Memperluas promosi produk unggulan daerah melalui pameran dagang, business matching, dan kerja sama perdagangan internasional.
b. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti bea cukai, karantina, dan kementerian perdagangan untuk memperlancar proses ekspor.
c. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha/UMKM agar mampu menghasilkan produk yang memenuhi standar ekspor.

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri melalui Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan.

Tabel II.18
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	60%	70%	70%	100%	Rp666.714.456	Rp629.981.279	94%

Sumber : LKjIP Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2025

Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan penggunaan serta memperluas pemasaran produk lokal, sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk dalam negeri di pasar daerah maupun nasional. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat keberpihakan terhadap produk lokal melalui berbagai kegiatan promosi dan fasilitasi pemasaran.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah persentase promosi produk lokal yang difasilitasi/dilaksanakan dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 60%, dengan target yang ditetapkan sebesar 70%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 70%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp666.714.456. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp629.981.279 atau sebesar 94% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi anggaran

tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan secara optimal.

Secara umum, capaian kinerja program menunjukkan hasil yang baik, dimana target indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ke depan, pelaksanaan program diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui penguatan kegiatan promosi, perluasan akses pemasaran, serta peningkatan kualitas produk lokal guna mendorong penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri secara lebih luas.

Faktor Penghambat:

a. Keterbatasan anggaran kegiatan promosi, sehingga jumlah kegiatan promosi yang difasilitasi masih terbatas.
b. Sebagian pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam kualitas produk, kemasan, dan branding.
c. Keterbatasan akses pasar yang lebih luas, khususnya untuk menembus pasar nasional maupun internasional.
d. Sebagian pelaku usaha masih memiliki keterbatasan dalam kualitas produk, kemasan, dan branding.

Faktor Pendorong:

a. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan dan promosi produk lokal/UMKM.
b. Penyelenggaraan event, pameran, dan festival daerah yang menjadi sarana promosi produk lokal.
c. Antusiasme pelaku UMKM untuk mengikuti kegiatan promosi yang difasilitasi pemerintah.
d. Banyaknya potensi produk unggulan daerah, seperti produk kuliner, kerajinan, dan hasil olahan perikanan.

Tindak Lanjut:

a. Meningkatkan fasilitasi promosi produk lokal melalui pameran, expo, festival, dan kegiatan business matching.
b. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM terkait peningkatan kualitas produk, desain kemasan, dan strategi pemasaran.
c. Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta, marketplace, dan komunitas bisnis untuk memperluas jaringan pemasaran.
d. Melakukan kurasi dan pembinaan produk unggulan daerah agar memiliki daya saing di pasar yang lebih luas.

Program Pengembangan UMKM

Meningkatnya daya saing UMKM melalui Program Pengembangan UMKM pada Tahun dan terdiri dari indikator kinerja Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor.

Tabel II.19
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan UMKM

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N/A	1%	0%	0%	Rp3.373.309.180	Rp2.852.448.415	84,56%

Sumber : LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengembangan UMKM diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya dalam memperluas akses kemitraan usaha serta mendorong partisipasi UMKM dalam kegiatan ekspor. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian program ini adalah proporsi UMKM yang menjalin kemitraan dan melakukan ekspor, dengan satuan pengukuran persentase (%).

Pada tahun pelaporan, target kinerja indikator tersebut ditetapkan sebesar 1%. Namun demikian, hingga akhir periode pelaporan, realisasi capaian indikator tercatat sebesar 0%, sehingga tingkat capaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, program ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp3.373.309.180 Hingga akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp2.852.448.415 atau 84,56% dari total pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dalam program telah dilaksanakan.

Meskipun tingkat realisasi anggaran tergolong cukup baik, capaian indikator kinerja yang belum memenuhi target menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam mendorong UMKM untuk menjalin kemitraan dan melakukan ekspor masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap strategi pelaksanaan program, termasuk penguatan fasilitasi kemitraan, peningkatan kapasitas pelaku UMKM, serta perluasan akses pasar guna mendorong keterlibatan UMKM dalam jaringan kemitraan dan kegiatan ekspor pada periode selanjutnya.

Faktor Pendorong : Kegiatan inkubator UMKM dilaksanakan berdasarkan jumlah pendaftar yang masuk untuk dilakukan proses Pra-inkubasi sehingga harus menunggu peserta untuk mendaftar kemudian melaksanakan pra inkubasi

Faktor Penghambat : Kegiatan Inkubator UMKM dilaksanakan berdasarkan jumlah pendaftar yang masuk untuk dilakukan proses Pra Inkubasi

Tindak Lanjut : Memaksimalkan peran inkubator center dengan menarik pelaku UMKM yang belum masuk ke inkubator untuk bergabung.

2. Sasaran "Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat"

Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan PDRB Per Kapita dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel II.20
Capaian Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Baseline 2024	Indikator Kinerja	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 1	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja					
Terwujudnya Kota Makassar dengan Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	9,71	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,62	9,6	100,21%
		165.95	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	175,46	176,28	100,47%
Rata- Rata Capaian						**100,34%**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan BPS Kota Makassar

Pada Tahun 2025, sasaran Meningkatkan Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat menunjukkan hasil yang baik. Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditarget 9,62% terealisasi 9,6% dengan capaian 100,21% mengalami penurunan dengan arti baik dari Tahun 2024 yaitu sebesar 9,71% dimana semakin kecil realisasi maka semakin baik kinerjanya.

Untuk menghitung capaian Tingkat Pengangguran Terbuka digunakan rumus:

(1+(1-(realisasi/target))) x 100

Capaian TPT = (1+(1-(9,6/9,62))) x 100

= (1+(1-0,9979)) x 100

= (1+0,0021) x 100

= 1,0021 x 100

= 100,21%

Selain itu, PDRB per kapita melampaui target dari 175,46 juta rupiah menjadi 176,28 juta rupiah dengan capaian 100,47%. Realisasi tersebut menunjukkan peningkatan dari Tahun 2024 yang sebesar 165.95 juta rupiah/ kapita/ tahun. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi.

Secara keseluruhan, capaian kedua indikator tersebut menandakan bahwa upaya peningkatan kualitas SDM dan reformasi birokrasi telah berjalan efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Sasaran ini memiliki 6 (enam) program yaitu Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Pemberdayaan UMKM; Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

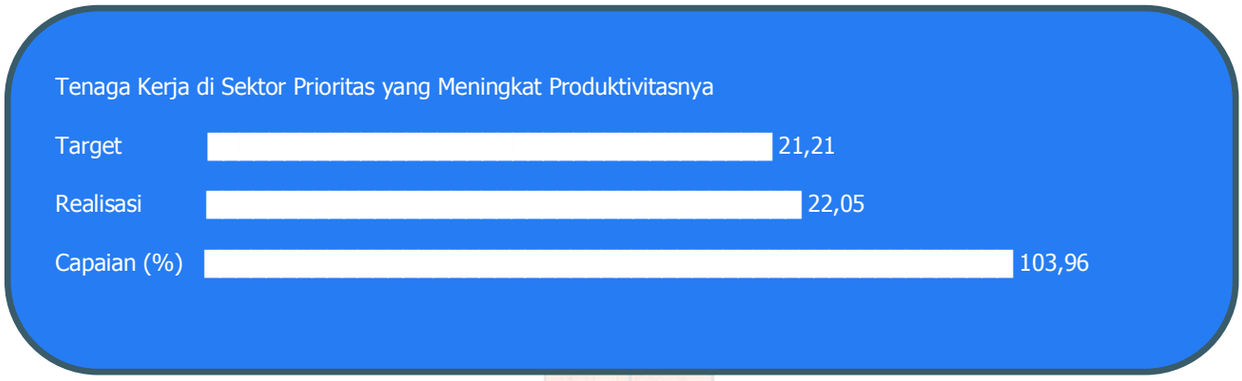
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, khususnya pada sektor-sektor prioritas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya. Dengan satuan "Milliar Rupiah Per Tenaga Kerja" diganti dengan Makassar Creative Hub (MCH) bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan Makassar menghadirkan pelatihan host profesional di era digital dengan pendekatan content creator Belajar langsung cara tampil percaya diri di depan kamera sampai mengelola konten live. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) merupakan lembaga yang paling membantu tugas pemerintah dalam menangani masalah tenaga kerja, yang belum bekerja menjadi bisa bekerja, yang belum kompeten menjadi lebih kompeten dibidangnya. Pembinaan kepada LPK Swasta diharapkan dapat memberi gambaran hal apa saja yang harus dipersiapkan pengelola LPK pada saat mengikuti akreditasi, yang menjadi salah satu tolak ukur kualitas Lembaga penyelenggara pelatihan kerja.

Tabel II.21
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20,49	21,21	22,05	103,96%	Rp3.168.409.400	Rp2.964.909.522	93,58%

Sumber : LKjIP Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Tahun 2025

Grafik II.1
Grafik Kinerja Program



Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 21,21 milyar rupiah per tenaga kerja, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 22,05 milyar rupiah per tenaga kerja, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 103,96%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, serta upaya peningkatan produktivitas tenaga kerja telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai produktivitas tenaga kerja pada sektor prioritas.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp3.168.409.400, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.964.909.522 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,58%. Tingkat penyerapan anggaran yang cukup tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 103,96% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,58%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,11. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.22
Analisis Kinerja Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	21,21	22,05	103,96	3.168.409.400	2.964.909.522	93,58	1,11	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

   Capaian=(Realisasi÷Target)×100

   =(22,05÷21,21)×100

   = 103,96%

Kategori capaian kinerja dalam evaluasi SAKIP:

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan demikian, capaian 103,96% termasuk kategori Berhasil.

2. Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

   Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

   = 103,96 ÷ 93,58

   = 1,11

Interpretasi:

Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Ringkasan Analisis Program

Aspek Analisis	Hasil
Capaian Kinerja	103,96%
Penyerapan Anggaran	93,58%
Rasio Efisiensi	1,11
Kategori Kinerja	Berhasil

Kesimpulan Analisis

Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 103,96% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,58% menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mampu menghasilkan kinerja yang melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor prioritas.

Faktor Penghambat:

a. Belum adanya PNS Pejabat Fungsional Pelatihan Kerja;

b. Tidak adanya instruktur dan sarana Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang dimiliki oleh Kota Makassar.

Faktor Pendorong:

a. Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut antara lain adanya Program Strategis Wali Kota "Makassar Creative Hub (MCH)"

b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar lebih mengikuti perkembangan IPTEK dan kebutuhan pasar kerja.

Tindak Lanjut :

a. Melakukan evaluasi pelatihan, dilakukan setelah pelatihan selesai dilaksanakan untuk evaluasi penyelenggaraan pelatihan dan pelaksanaan pelatihan;

b. Melakukan pemantauan akreditasi lembaga pelatihan kerja (LPK) serta kurikulum pelatihan;

c. Peningkatan tata kelola penyelenggaraan program pelatihan untuk mempercepat sertifikasi pekerja melalui pengelolaan program pelatihan yang komprehensif;

d. Mengembangkan program kemitraan antara pemerintah dengan dunia usaha dan antara pemerintah pusat-daerah untuk peningkatkan kualitas tenaga kerja melalui Pengembangan standar kompetensi dilaksanakan oleh pihak pengguna; dan

e. Pengembangan program pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, dan Pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi oleh LSP.

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar, sehingga dapat memperluas akses kesempatan kerja serta mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha secara lebih optimal. Kinerja

program ini diukur melalui indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar.

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 61%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 64,08%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja telah berjalan efektif dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha di daerah. Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.084.221.660, dengan realisasi anggaran sebesar Rp925.538.118 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 105,05% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.23
Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61	64,08	105,05	1.084.221.660	925.538.118	85,36	1,23	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Tahun 2025

Perhitungan Efisiensi

Rasio Efisiensi = Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 105,05 ÷ 85,36

= 1,23

Interpretasi:

Rasio >1 menunjukkan kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan penggunaan anggaran, sehingga program dapat dikategorikan efisien.

Kategori Capaian Kinerja .

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 105,05%, indikator termasuk kategori Berhasil.

Faktor Penghambat:

a. Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan
c. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas

Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri mapun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya". Selain itu akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Meningkatnya kapasitasa UMKM yang mandiri melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dan Pertumbuhan Wirausaha.

Tabel II.24
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,45%	15%	10,89%	72,6%	Rp3.887.493.000	Rp3.531.023.700	91%
Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%	11,8%	81,3%			

Sumber Data: LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Tahun 2025

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta daya saing pelaku UMKM. Program ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju sektor formal serta meningkatkan pertumbuhan jumlah wirausaha di daerah.

Salah satu indikator kinerja program ini adalah persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 10,45%, dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 15%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 10,89%, sehingga capaian kinerja terhadap target masih belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan melalui penguatan fasilitasi legalitas usaha, pendampingan perizinan, serta peningkatan akses pelaku usaha terhadap sistem administrasi usaha formal.

Indikator lainnya adalah pertumbuhan wirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha baru sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 12,43%, dengan target sebesar 14,5%. Realisasi yang dicapai hingga akhir tahun sebesar 11,8%, sehingga capaian indikator ini juga masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, Program Pemberdayaan UMKM didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp3.887.493.000, dengan realisasi belanja mencapai Rp3.531.023.700 atau sebesar 91% dari total pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Meskipun realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, capaian beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pelaksanaan program, antara lain melalui peningkatan pendampingan usaha, fasilitasi legalitas dan perizinan usaha, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM guna mendorong peningkatan kinerja program pada periode selanjutnya.

Faktor Pendorong : Kegiatan pada program ini sudah terlaksana sesuai dengan arus kas

Faktor Penghambat : Masih terbatasnya pelaku usaha mikro yang bermitra dengan industri besar khususnya keterlibatan dalam rantai pasok

Tindak Lanjut : Mempersiapkan dokumen dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program Pengelolaan Perikanan Tangkap bertujuan untuk meningkatkan produksi sektor perikanan tangkap sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan nelayan. Kinerja program ini diukur melalui indikator jumlah produksi perikanan tangkap.

Pada tahun pelaporan, target produksi perikanan tangkap ditetapkan sebesar 21.401 ton, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 20.917,3 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,74%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sedikit selisih antara target dan realisasi produksi.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.150.340.980, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.072.420.300 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,23%. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan pada tahun berjalan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 97,74% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,23%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan relatif sebanding dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dapat dikategorikan cukup efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.25
Analisis Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	21.401	20.917,3	97,74	1.150.340.980	1.072.420.300	93,23	1,05	Berhasil

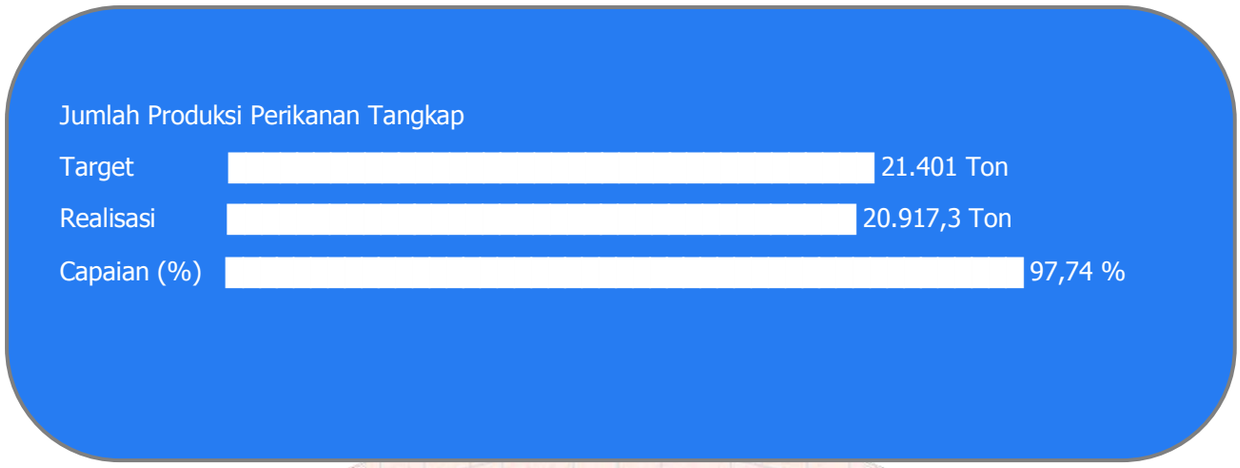
Sumber Data: LKjIP Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025

Kategori Capaian Kinerja

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 97,74%, indikator ini termasuk kategori Berhasil.

Grafik II.2
Grafik Kinerja Program



Grafik menunjukkan bahwa indikator jumlah produksi perikanan tangkap ditargetkan sebesar 21.401 ton, dengan realisasi sebesar 20.917,3 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,74%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap telah mendekati target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pengelolaan dan pengembangan sektor perikanan tangkap telah berjalan cukup efektif dalam mendukung peningkatan produksi perikanan serta kontribusinya terhadap perekonomian daerah.

Faktor pendukung : Sumber Daya Manusia yang mendukung, Adanya anggaran APBD Kota Makassar dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana yang diberikan kepada kelompok kelompok nelayan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pengembangan kapasitas yang mendukung peningkatan produksi di bidang Perikanan,

Faktor Penghambat : Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana dan adanya pengaruh cuaca/iklim dalam melakukan penangkapan ikan oleh nelayan,

Tindak Lanjut : Peningkatan sarana dan prasarana di bidang perikanan tangkap di Kota Makassar

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi.

Tabel II.26
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	N/A	10%	16,42%	164,2%	Rp2.724.325.000	Rp2.028.731.500	74,47%

Sumber Data: LKjIP Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, partisipasi, serta validitas data pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat basis data pelaku usaha yang aktif sehingga dapat mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Indikator kinerja program ini adalah Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 10%, sedangkan realisasi capaian mencapai 16,42%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 164,1%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa jumlah pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif serta telah tervalidasi melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut didukung oleh berbagai kegiatan antara lain peningkatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta pelaksanaan proses pendataan dan validasi pelaku usaha secara lebih optimal.

Dalam pelaksanaannya, program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp2.724.325.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.028.731.500 atau 74,47%. Realisasi anggaran tersebut dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan peningkatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi pengembangan ekonomi kreatif, serta kegiatan pendataan dan validasi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.

Faktor Pendorong :

a. Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendorong pelaku usaha menjadi lebih aktif dalam kegiatan usaha dan pengembangan produk.

b. Adanya kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi pelaku usaha secara berkala, sehingga jumlah pelaku yang terdata dan tervalidasi dapat meningkat.
c. Dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, baik melalui program pembinaan, fasilitasi yakni melalui Makassar Creative Hub (MCH)
d. Tingginya minat masyarakat untuk terlibat dalam usaha pariwisata dan ekonomi kreatif, seiring dengan berkembangnya potensi destinasi wisata dan industri kreatif Kota Makassar
e. Sinergi dengan komunitas, asosiasi, dan pelaku usaha pariwisata serta ekonomi kreatif, yang membantu proses identifikasi dan penguatan jaringan pelaku usaha.

Faktor Penghambat :

a. Keterbatasan data yang terintegrasi mengenai pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga proses pendataan dan validasi membutuhkan waktu dan koordinasi yang lebih intensif.
b. Keterbatasan sumber daya dalam melakukan pembinaan dan pendampingan secara menyeluruh, terutama pada wilayah yang memiliki banyak pelaku usaha.
c. Sebagian pelaku usaha masih bersifat informal, sehingga belum terdaftar atau terdokumentasi dalam sistem pendataan resmi.

Tindak Lanjut :

a. Meningkatkan kegiatan pendataan, verifikasi, dan validasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan melalui sistem data yang lebih terintegrasi.
b. Memperluas program pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha, terutama terkait manajemen usaha, pemasaran, dan pengembangan produk kreatif.
c. Mendorong pelaku usaha untuk melakukan legalisasi dan formalitas usaha, sehingga lebih mudah didata dan tervalidasi.
d. Memperkuat koordinasi dengan komunitas, asosiasi, dan pemangku kepentingan terkait dalam proses pembinaan dan pengembangan pelaku usaha.
e. Mengembangkan sistem database pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis digital untuk memudahkan proses monitoring, pembinaan dan evaluasi program.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda melalui penguatan kapasitas kewirausahaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang produktif serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Kinerja program ini diukur melalui indikator rasio wirausaha pemuda.

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 17,75%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 18,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, seperti pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengembangan usaha pemuda telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausaha pemuda di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp10.764.604.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.205.297.291 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,80%. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 104,17% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,80%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.27
Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Rasio Wirausaha Pemuda	17,75	18,49	104,17	10.764.604.000	10.205.297.291	94,80	1,10	Berhasil

Sumber Data: LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Tahun 2025

Dasar Perhitungan Analisis

1. Capaian Kinerja

   Capaian = (Realisasi ÷ Target) × 100

   = (18,49 ÷ 17,75) × 100

   = 104,17%

Kategori Capaian Kinerja (Standar Evaluasi SAKIP)

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil

Persentase Capaian	Kategori
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 104,17%, indikator termasuk kategori Berhasil.

Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 104,17 ÷ 94,80

= 1,10

Interpretasi:

- Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

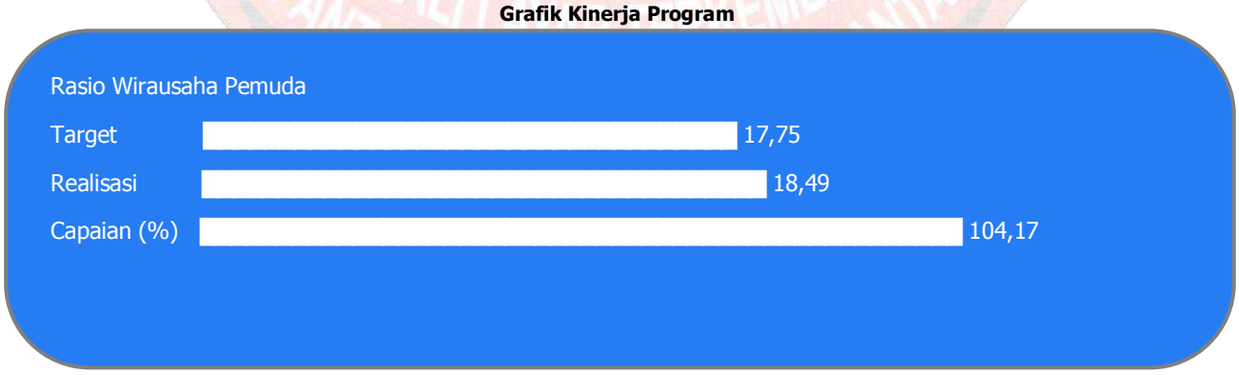
Ringkasan Analisis Program

Aspek Analisis	Hasil
Capaian Kinerja	104,17%
Penyerapan Anggaran	94,80%
Rasio Efisiensi	1,10
Kategori Kinerja	Berhasil

Kesimpulan

Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian indikator yang melampaui target. Selain itu, perbandingan antara capaian kinerja dan tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mampu mendukung peningkatan rasio wirausaha pemuda di daerah.

Grafik II.3
Grafik Kinerja Program



Grafik menunjukkan bahwa indikator rasio wirausaha pemuda ditargetkan sebesar 17,75%, dengan realisasi sebesar 18,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai

104,17%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mampu melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengembangan usaha bagi pemuda telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausaha pemuda di daerah.

Faktor Penghambat : Adanya efisiensi anggaran dan penyesuian dengan visi-misi Walikota Baru

Faktor Pendorong:

1. Bonus Demografi kota Makassar.
2. Komitmen dan Inisiatif Pimpinan serta ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM),

Tindak Lanjut: Optimalisasi terhadap anggaran yang ada dan Reorientasi Indikator Kinerja Program.

3. Sasaran "Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah"

Dalam rangka mewujudkan Tujuan Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dengan sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah dengan indikator Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB.

Tabel II.28
Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 1		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja				
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB	0,58	0,59	0,67	113,56

Sumber : Bapenda Kota Makassar

Dengan target 0,59 terealisasi 0,67 dengan capaian kinerja sasaran sebesar 113,56% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari Tahun 2024 yaitu 0,58.

Adapun perhitungan capaian kinerja sasaran 3 sebagai berikut :

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

Persentase capaian indikator kinerja = $\frac{0,67}{0,59} x100\%$

Persentase capaian indikator kinerja = 113,56%.

Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah relatif terhadap aktivitas ekonomi (PDRB). Hal ini mengindikasikan penguatan kemandirian fiskal daerah, yang menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, keberhasilan ini menunjukkan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah telah berjalan dengan baik dan efektif. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah terhadap PDRB didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase PAD terhadap PDRB.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Target PAD pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Makassar Tahun 2025, yaitu sebesar Rp. 2.484.325.936.732,00 yang selanjutnya mengalami perubahan menjadi Rp. 2.118.036.886.005,00 pada Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kota Makassar Tahun 2025.

Capaian Sasaran I diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dihitung menggunakan rumus:

$$x = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ Asli\ Daerah}{Realisasi\ Pendapatan\ Daerah} x100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, maka realisasi persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel II.29
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2025

Uraian	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah	1.980.134.936.905,54
Pendapatan Daerah	4.754.221.336.409,54
Persentase	41,65%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA (unaudited) Tahun 2025

Tabel II.30
Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian%
Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	53,59%	41,65%	77,72%

Realisasi kinerja Sasaran I Bapenda Kota Makassar Tahun 2025 sebesar 41,65% dari target 53,59%, sehingga capaian Sasaran I pada tahun 2025 adalah 77,72% atau kategori Tinggi. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dalam memaksimalkan pencapaian penerimaan PAD terhadap pendapatan daerah selain dalam bentuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/Wajib Pajak juga

mengoptimalkan penggunaan aplikasi PAKINTA dalam kemudahan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini masih cukup berpengaruh terhadap pencapaian target penerimaan Pajak Daerah Tahun 2025.

Meskipun demikian, beberapa sumber jenis Pajak Daerah yang capaian realisasinya melebihi target yaitu: PBB-P2, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung Walet, PBJT Makan dan/atau Minum, dan PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

Tabel II.31
Perbandingan persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Terhadap 2024 dan 2023

Uraian	2023	2024	2025
Pendapatan Asli Daerah	1.568.234.972.336,92	1.605.505.362.269,46	1.980.134.936.905,54
Pendapatan Daerah	4.049.344.772.471,05	4.205.258.295.118,46	4.754.221.336.409,54
Persentase Pad Terhadap Pendapatan Daerah	38,72%	38,18%	41,65%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran BAPENDA (unaudited) Tahun 2025

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah bertujuan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah sebagai indikator kemandirian fiskal daerah. Pada tahun pelaporan, indikator Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 44,64%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 41,65%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 93,30% dari target yang ditetapkan.

Meskipun realisasi indikator belum sepenuhnya mencapai target, capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan daerah masih berada dalam kategori cukup baik. Realisasi PAD yang belum optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika penerimaan pajak dan retribusi daerah, tingkat kepatuhan wajib pajak daerah, serta fluktuasi aktivitas ekonomi masyarakat yang berdampak pada basis penerimaan daerah.

Dari sisi pengelolaan sumber daya, program ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp30.032.500.228,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.255.924.397,00 atau 64,12%. Dengan capaian kinerja sebesar 93,30%, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program relatif efisien dalam pemanfaatan anggaran, karena capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penyerapan anggaran.

Rasio efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran dapat dihitung sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 93,30 ÷ 64,12 = 1,46

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,46 menunjukkan bahwa setiap 1% penggunaan anggaran mampu menghasilkan capaian kinerja sebesar 1,46%, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi pengelolaan pendapatan daerah yang dilakukan telah mampu menghasilkan output kinerja yang relatif optimal dengan pemanfaatan sumber daya anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Faktor Penghambat :

1. Kegiatan pemutakhiran data PBB senilai Rp3 miliar mengalami gagal lelang akibat minimnya penyedia jasa yang berminat atau mengajukan penawaran. Kondisi tersebut menyebabkan waktu pelaksanaan kegiatan diperkirakan tidak mencukupi untuk melaksanakan proses lelang ulang;
2. Waktu pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan pada bulan November-Desember sehingga proses administrasinya membutuhkan waktu yang lebih lama;
3. Pajak Reklame : Pemanfaatan media digital (iklan online) yang mengurangi permintaan reklame fisik dan masih rendahnya kesadaran wajib pajak untuk melakukan pembayaran tepat waktu mengakibatkan capaian realisasi belum maksimal;
4. Pajak BPHTB : Banyaknya perumahan subsidi di Kota Makassar yang memperoleh pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2025;
5. PBJT Hotel : Kurang maksimalnya realisasi PBJT, khususnya PBJT Jasa Perhotelan salah satunya disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, hal tersebut menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian di sektor perhotelan;
6. Opsen PKB dan BBNKB : Kecenderungan masyarakat untuk menghindari pencatatan transaksi kendaraan dan adanya kemungkinan beberapa kendaraan berpindah daerah, atau STNK-nya mati/tidak diperpanjang. Hal ini membuat data wajib pajak aktif berkurang dan menurunkan potensi penarikan opsen;
7. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah : Masih ditemukan sejumlah pengguna reklame yang tidak mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku, antara lain dengan memasang reklame secara tidak sesuai ketentuan atau secara ilegal;
8. Pajak Air Tanah : Sulitnya mengukur jumlah air tanah yang digunakan, khususnya penggunaan industri. Tanpa pengukuran yang akurat, perhitungan pajak bisa tidak tepat, sehingga penerimaan optimal belum tercapai.

Faktor Pendorong :

1. PBB-P2 : Pemanfaatan sistem pembayaran digital oleh Wajib Pajak dan Kebijakan insentif / stimulus kepatuhan pajak dengan memberikan diskon pajak, antara lain Diskon pokok tunggakan PBB tahun 2024-2012 sebesar 20% dan diskon pokok

tunggakan PBB tahun 2012 kebawah sebesar 50% untuk mendorong pembayaran tepat waktu;

2. PBJT Makanan dan Minuman : Pelaksanaan Uji Petik Pajak Daerah terhadap pengusaha kuliner;
3. PBJT Jasa Kesenian : Pelaksanaan Uji Petik Pajak Daerah terhadap pengusaha sektor hiburan.

Tindak Lanjut :

1. Pajak Reklame : Sosialisasi relaksasi pajak reklame, optimalisasi penagihan dan melakukan penertiban reklame yang tidak memenuhi ketentuan sebagai langkah optimis untuk mencapai target pada akhir tahun;
2. PBB-P2 : Sosialisasi yang masif melalui media elektronik dan non elektronik serta kebijakan relaksasi PBB menjadi faktor utama yang menyebabkan tingginya capaian realisasi;
3. Pajak BPHTB : Melaksanakan pendataan secara rutin guna mengumpulkan data dan informasi, serta melakukan sosialisasi kepada para pengembang dan Memperkuat koordinasi dengan stakeholder, khususnya para notaris, pengembang, dan pengelola apartemen di Kota Makassar;
4. PBJT Parkir : Perlu dilakukan penyuratan kepada pemungut pajak parkir atau pemilik usaha agar melaksanakan kewajibannya dalam menyetorkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Opsen PKB dan BBNKB : Implementasi sistem Host to Host antara Pemerintah Kota Makassar dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB;
6. Retribusi penyewaan tanah : Melaksanakan pendataan dan penagihan secara aktif sebagai upaya untuk mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan.

4. Sasaran "Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan"

Dalam melaksanakan tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah ditetapkan sasaran Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan. Sasaran ini mempunyai 2 (dua) indikator yaitu Tingkat Inflasi dan Indeks Ketahanan Pangan.

Adapun perhitungan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Inflasi} = \frac{Inflasi_{(t)} - Inflasi_{(t-1)}}{Inflasi_{(t-1)}} x100\%$$

Serta Indikator Kinerja Utama Indeks Ketahanan Pangan telah berhasil mencapai 85,59% atau kategori tinggi. Adapun perhitungan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

$$\text{IKP} = \frac{\sum_{k=1}^{n} W_k \times P_{ik}}{\sum_{k-1}^{n} W_k}$$

Tabel II.32
Capaian Sasaran Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 1		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja				
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi	1,19	1,52	2,69	23,03
		Indeks Ketahanan Pangan	87,95	88	76,42	86,84
Rata- Rata Capaian						**54,93**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Dinas Ketahan Pangan Kota Makassar dan BPS Kota Makassar

Indikator tingkat inflasi pada Tahun 2024 (baseline) tercatat sebesar 1,19 sementara target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 1,52. Namun demikian, realisasi inflasi Tahun 2025 mencapai 2,69 yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa stabilitas harga belum sepenuhnya terkendali, dimana terjadi tekanan inflasi yang cukup tinggi dibandingkan kondisi baseline. Dengan capaian kinerja sebesar 23,03% indikator ini tergolong rendah sehingga memerlukan perhatian serius melalui penguatan pengendalian harga dan distribusi pangan.

Sementara itu, indikator Indeks Ketahanan Pangan pada Tahun 2024 berada pada angka 87,95, dengan target Tahun 2025 sebesar 88. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 76,42 yang berarti mengalami penurunan cukup signifikan dibandingkan baseline. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kondisi ketahanan pangan daerah, baik dari aspek ketersediaan, keterjangkauan maupun pemanfaatan pangan. Persentase capaian sebesar 86,84% mengindikasikan bahwa kinerja masih berada pada kategori cukup, namun belum mencapai target yang diharapkan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja sebesar 54,93% menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada sasaran ini masih belum optimal. Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, kondisi Tahun 2025 justru menunjukkan adanya penurunan kinerja pada indikator ketahanan pangan serta tekanan peningkatan pada inflasi, yang menandakan tantangan dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Sasaran ini kemudian didukung oleh beberapa program di antaranya Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Program Penanganan Kerawanan Pangan.

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting melalui Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok; dan persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Tabel II.33
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100%	100%	100%	100%	Rp134.255.600	Rp116.103.395	86%
Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	100%	100%	100%	Rp816.200.840	Rp400.086.500	49%

Sumber Data: LKjIP Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2025

Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dilaksanakan dalam rangka menjaga kestabilan harga serta ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat. Program ini bertujuan untuk mengendalikan fluktuasi harga, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok di wilayah Kota Makassar.

Indikator kinerja pertama pada program ini adalah persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 100%, dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator tersebut mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp134.255.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.103.395 atau 86% dari total pagu anggaran.

Faktor Pendorong:

a. Fluktuasi pasokan dari daerah produsen akibat cuaca, musim, atau gangguan produksi.
b. Permintaan masyarakat yang meningkat pada periode tertentu (misalnya hari besar keagamaan).
c. Praktik penimbunan atau distribusi yang tidak lancar, yang dapat memicu kenaikan harga.
d. Kenaikan biaya distribusi dan transportasi, yang dapat mempengaruhi harga jual di pasar.

Faktor Penghambat:

a. Kelancaran distribusi bahan pokok dari daerah produsen ke pasar-pasar di Makassar.
b. Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok yang cukup di tingkat distributor dan pedagang.
c. Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
d. Pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi potensi kenaikan harga.

Tindak Lanjut:

a. Meningkatkan pemantauan harga bahan pokok secara berkala di pasar tradisional dan ritel modern.
b. Memperkuat koordinasi dengan TPID dan instansi terkait untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.
c. Melaksanakan operasi pasar atau pasar murah ketika terjadi lonjakan harga yang signifikan.
d. Meningkatkan transparansi informasi harga kepada masyarakat melalui media informasi harga pangan.

Selanjutnya, indikator kinerja kedua adalah persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 100% dengan target sebesar 100%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator tercapai sebesar 100%, sehingga capaian kinerja indikator ini juga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaannya, indikator ini didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp816.200.840, dengan realisasi anggaran sebesar Rp400.086.500 atau 49% dari pagu anggaran yang tersedia.

Faktor Pendorong: Kenaikan biaya distribusi dan transportasi, yang dapat mempengaruhi harga jual di pasar.

Faktor Penghambat: Pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar pada saat terjadi potensi kenaikan harga.

Tindak Lanjut: Meningkatkan transparansi informasi harga kepada masyarakat melalui media informasi harga pangan.

Capaian kinerja Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting menunjukkan hasil yang baik karena target indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ke depan, pelaksanaan program diharapkan dapat terus ditingkatkan melalui penguatan pemantauan harga, koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, serta optimalisasi pelaksanaan kegiatan guna menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di masyarakat.

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana perdagangan dan distribusi barang melalui Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya.

Tabel II.34
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100%	100%	87,34%	87,34%	Rp48.802.000	Rp41.968.840	86%

Sumber : LKjIP Dinas Perdagangan Kota Makassar Tahun 2025

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dilaksanakan dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan perdagangan melalui peningkatan kualitas sarana distribusi perdagangan. Ketersediaan sarana perdagangan yang memadai diharapkan dapat menunjang aktivitas perdagangan serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 87,34%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan peningkatan sarana perdagangan telah dapat dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp48.802.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp41.968.840 atau 86% dari

pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut mencerminkan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam program sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi dalam mendukung peningkatan kualitas sarana perdagangan di daerah. Ke depan, pelaksanaan program akan terus dioptimalkan melalui peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan guna mendukung kelancaran distribusi perdagangan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Faktor Pendorong:

a. Kondisi sebagian sarana perdagangan yang sudah tua atau rusak berat sehingga membutuhkan biaya besar untuk rehabilitasi.
b. Kurangnya kesadaran sebagian pedagang dalam menjaga kebersihan dan ketertiban fasilitas perdagangan.
c. Terbatasnya lahan atau ruang untuk pengembangan sarana perdagangan di beberapa lokasi strategis.
d. Keterbatasan anggaran untuk melakukan perbaikan atau pembangunan sarana perdagangan secara menyeluruh.

Faktor Penghambat:

a. Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas sarana perdagangan seperti pasar rakyat, kios, dan fasilitas distribusi.
b. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sarana perdagangan yang bersih, tertata, dan nyaman.
c. Adanya koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait, seperti pengelola pasar dan dinas teknis lainnya.
d. Partisipasi pedagang dan masyarakat dalam menjaga serta memanfaatkan fasilitas perdagangan yang telah diperbaiki.

Tindak Lanjut:

a. Mengusulkan peningkatan alokasi anggaran untuk program revitalisasi dan pemeliharaan sarana perdagangan.
b. Melakukan prioritas perbaikan pada sarana perdagangan yang memiliki tingkat kerusakan paling tinggi.
c. Meningkatkan sosialisasi kepada pedagang mengenai pemeliharaan fasilitas pasar.
d. Mendorong kerja sama dengan pihak swasta atau program pemerintah pusat dalam pengembangan sarana perdagangan.

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui penyediaan sarana produksi, dukungan teknologi budidaya, serta penguatan kapasitas pelaku usaha pertanian. Kinerja program diukur melalui tiga indikator utama yaitu peningkatan produksi tanaman pangan, produksi komoditas peternakan, dan produksi hortikultura.

Pada indikator peningkatan produksi tanaman pangan, target produksi ditetapkan sebesar 15.615 ton, sedangkan realisasi produksi mencapai 14.437 ton, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 92,46%. Capaian ini menunjukkan bahwa produksi tanaman pangan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor iklim, ketersediaan lahan produktif, serta dinamika pola tanam yang berdampak terhadap tingkat produktivitas komoditas pangan.

Sementara itu, pada indikator peningkatan produksi komoditas peternakan, target produksi sebesar 7 ton dapat direalisasikan sebesar 7,4 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,71%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengembangan subsektor peternakan berjalan cukup optimal, yang didukung oleh peningkatan produktivitas ternak serta dukungan program pembinaan dan penguatan kapasitas peternak.

Selanjutnya pada indikator peningkatan produksi hortikultura, target produksi sebesar 320,1 ton berhasil direalisasikan sebesar 328,68 ton dengan tingkat capaian 102,68%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pengembangan komoditas hortikultura memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi komoditas hortikultura di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp5.836.946.032, dengan realisasi anggaran sebesar Rp5.453.823.903 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,44%. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi menunjukkan bahwa kegiatan dalam program ini sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara rata-rata capaian kinerja indikator sebesar 100,28% dengan penyerapan anggaran sebesar 93,44%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,07. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja program relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.35
Analisis Kinerja Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Peningkatan produksi tanaman pangan	15.615 Ton	14.437 Ton	92,46					
Peningkatan produksi komoditas peternakan	7 Ton	7,4 Ton	105,71	5.836.946.032	5.453.823.903	93.44	1,07	
Peningkatan produksi hortikultura	320,1 Ton	328,68 Ton	102,68					
Rata-rata capaian indikator			**100,28**	**5.836.946.032**	**5.453.823.903**	**93,44**	**1,07**	**Berhasil**

Sumber : LKjIP Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025

Rata-rata capaian indikator program:

$$(92{,}46 + 105{,}71 + 102{,}68)/3 = 100{,}28\%$$

Penyerapan anggaran:

$$93{,}44\%$$

Rasio Efisiensi:

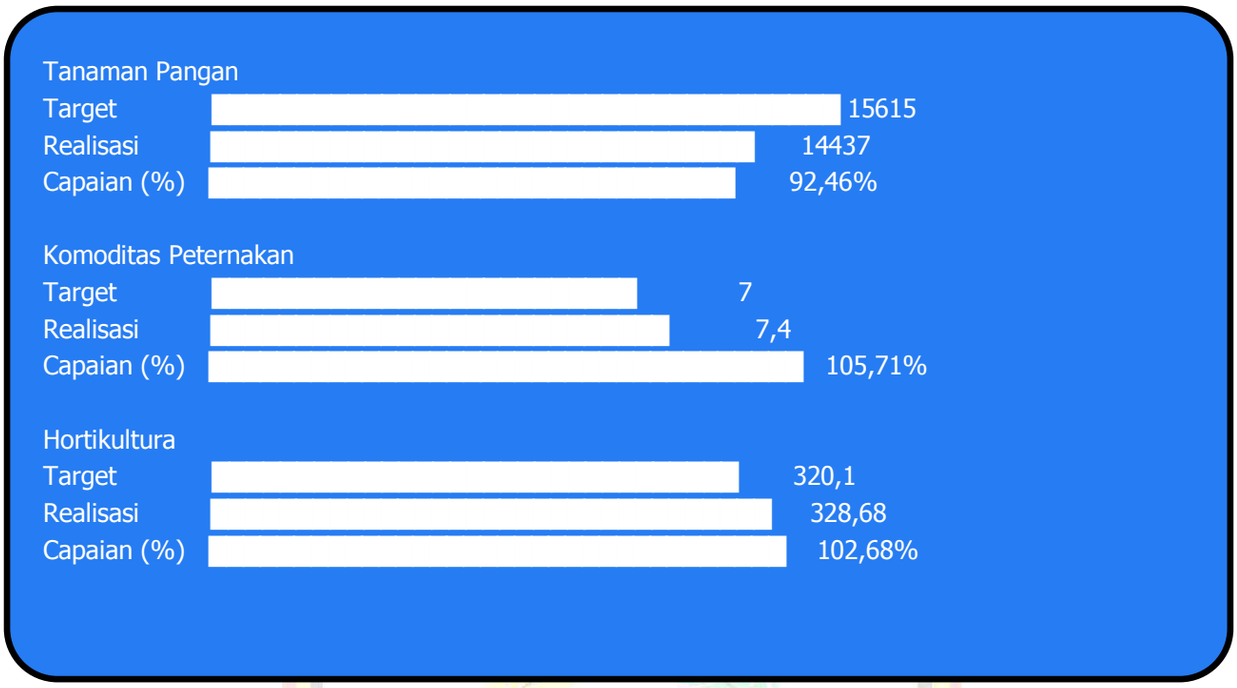
$$100{,}28 \div 93{,}44 = 1{,}07$$

Interpretasi Efisiensi

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,07 menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja program lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Meskipun indikator produksi tanaman pangan belum sepenuhnya mencapai target, capaian pada indikator produksi peternakan dan hortikultura yang melampaui target mampu meningkatkan rata-rata capaian kinerja program hingga 100,28%. Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,44%, program ini menunjukkan bahwa hasil kinerja yang dicapai relatif optimal dibandingkan sumber daya yang digunakan.

Grafik II.4
Grafik Kinerja Program



Faktor Pendukung :

a. Dukungan input dan sarana produksi, Kerjasama & koordinasi yang baik bersama KT & KWT, Optimalisasi penggunaan Alsintan.

b. Komitmen Penerima bantuan untuk melanjutkan keberlangsungan pemeliharaan budi daya ayam ras peterlur, Dukungan dari Dinas dan tim pendamping yang senantiasa mendampingi kelompok

c. Faktor Agroklimat yang lebih baik tahun ini dibanding tahun lalu

Faktor Penghambat :

a. Konversi lahan berdampak terhadap potensi sawah beririgasi maupun sawah tadah hujan. Kondisi cuaca, tingginya curah hujan Lemahnya petani mempertahankan fungsi lahan pertanian.

b. Produktifitas ternak menurun karena faktor usia, Masih rendahnya minat kelompok untuk melakukan peremajaan ternak

c. masa panen yang lebih pendek, Hama dan Penyakit masih terdapat di lapangan

Tindak Lanjut :

a. Perbaikan manajemen pertanaman agar produksi optimal.

b. Mempertahankan lahan sawah untuk tetap berproduksi.

c. Mendorong kelompok untuk melakukan peremajaan ternak.

d. Pemilihan Varietas yang lebih tahan hama dan penyakit serta memiliki produktivitas tinggi.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas ketahanan pangan melalui penguatan ketersediaan energi pangan serta peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat sesuai dengan standar Angka Kecukupan Energi (AKE).

Pada tahun pelaporan, kinerja program diukur melalui dua indikator utama yaitu Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Tingkat Konsumsi Energi Berdasarkan Angka Kecukupan Energi.

Pada indikator tingkat ketersediaan energi berdasarkan AKE, target yang ditetapkan sebesar 2.825 kkal/kapita, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 2.905 kkal/kapita, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,83%. Capaian ini menunjukkan bahwa ketersediaan energi pangan bagi masyarakat berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem penyediaan pangan daerah relatif mampu menjaga ketersediaan energi pangan masyarakat secara memadai.

Faktor Pendorong : Dukungan data dari beberapa SKPD terkait

Faktor Penghambat : Berdasarkan skor PPH ada 5 kelompok pangan yang masih perlu ditingkatkan ketersediaanya antara lain umbi umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, sayuran dan buah. Maka perlu kebijakan/program dari pemerintah atau OPD terkait untuk meningkatkan produksi pada kelompok tersebut.

Tindak Lanjut :

a. Diharapkan kepada Balai Besar Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Selatan dapat memasukkan komoditas-komoditas yang belum tercakup dalam daftar yang menjadi fokus monitoring secara periodik
b. Publikasi data dari masing-masing tim penyedia data disarankan agar diterbitkan secara periodik dan tepat waktu guna kelancaran dalam pengolahan data dan analisis NBM
c. Perlu ketegasan kepada penyedia data atas keterlambatan data selama ini, supaya tidak menghambat dalam pengolahan data. Jika diperlukan, perlu adanya aturan mengikat antara para penyedia data agar memudahkan dalam pemberian data dalam penyusunan NBM

Sementara itu pada indikator tingkat konsumsi energi masyarakat, target yang ditetapkan sebesar 2.042 kkal/kapita, Total konsumsi energi mencapai 2.014 kkal/kapita/hari, sedangkan konsumsi protein berada pada angka 64,3 gram/kapita/hari.

Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum kebutuhan energi dan protein masyarakat telah mendekati standar kecukupan gizi, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,63%.

Dilihat dari kontribusi setiap kelompok pangan, padi-padian merupakan penyumbang energi terbesar. Konsumsinya mencapai 287,85 gram/kapita/hari, dengan sumbangan energi sebesar 1.121 kkal dan protein 25,39 gram. Kelompok ini juga memperoleh skor maksimal 25, yang sama dengan skor PPH- nya, menunjukkan dominasi konsumsi pada kelompok sumber karbohidrat utama. pangan yang rendah energi. Meskipun demikian, skor PPH kelompok ini mencapai 27, nilai tertinggi dalam tabel, yang menunjukkan perannya yang penting dalam kualitas pola konsumsi pangan.

Faktor Pendorong :

Dukungan aplikasi Bapanas dalam penentuan angka konsumsi dan angka SUSENAS

Nilai target Skor PPH yang memenuhi target disebabkan peningkatan konsumsi masyarakat dalam pemenuhan gizi.

Faktor Penghambat :

Terlambatnya Data Susenas yang dikeluarkan oleh BPS sehingga Perhitungan PPH untuk Kota Makassar juga mengalami keterlambatan analisis

Tindak Lanjut :

Koordinasi lintas stakeholder dalam memonitoring dan meningkatkan pola pangan harapan di Kota Makassar

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja kedua indikator program mencapai 100,73%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program secara umum telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat didukung oleh total pagu anggaran sebesar Rp4.813.275.152, dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.557.443.721 atau 94,69% dari total pagu anggaran yang dialokasikan.

Tabel II.36
Analisis Kinerja Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
Tingkat Ketersediaan Energi berdasarkan AKG	2.825 kkal/kapita	2.905 kkal/kapita	**102,83**	1.893.501.472	1.727.638.748	91,24
Tingkat Konsumsi Energi berdasarkan AKG	2.042 kkal/kapita	2.014 kkal/kapita	**98,63**	2.919.773.680	2.829.804.973	96,92

Rata-rata Capaian Indikator			**100,73**	**4.813.275.152**	**4.557.443.721**	**94,69**

Sumber : LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025

- Capaian >100% → Sangat Berhasil
- 90–100% → Berhasil

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja indikator program sebesar 100,73%, tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang relatif optimal dengan pemanfaatan anggaran yang proporsional.

Perhitungan Efisiensi

Rata-rata Capaian Kinerja

$$\frac{102{,}83 + 98{,}63}{2} = 100{,}73\%$$

Penyerapan Anggaran

$$(4.557.443.721 \div 4.813.275.152) \times 100$$

= 94,69%

Rasio Efisiensi

$$Rasio\ Efisiensi = \frac{Capaian\ Kinerja}{Penyerapan\ AnggaranRasio}$$

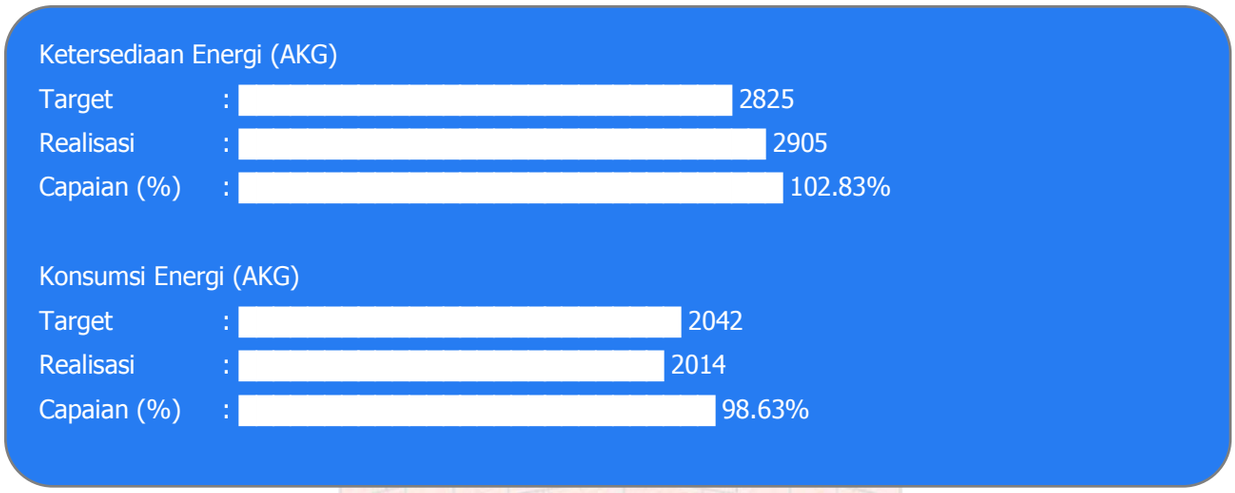
$$= 100{,}73 \div 94{,}69$$

$$= 1{,}06$$

Uraian	Nilai
Rata-rata Capaian Kinerja	100,73 %
Penyerapan Anggaran	94,69 %
Rasio Efisiensi	1,06
Kategori Efisiensi	Efisien

Nilai rasio efisiensi 1,06 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Grafik II.5
Grafik Kinerja Program



Analisis Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan pangan masyarakat serta peningkatan kualitas konsumsi pangan. Keberhasilan dalam menjaga tingkat ketersediaan energi pangan di atas target menunjukkan bahwa sistem penyediaan pangan daerah relatif stabil dan mampu memenuhi kebutuhan energi masyarakat.

Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pola konsumsi pangan yang lebih beragam dan bergizi sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dilaksanakan dalam rangka meningkatkan produksi sektor perikanan budidaya melalui penguatan sarana dan prasarana budidaya, peningkatan kapasitas pembudidaya ikan, serta penerapan teknologi budidaya yang lebih produktif. Kinerja program diukur melalui indikator jumlah produksi perikanan budidaya.

Pada tahun pelaporan, target produksi perikanan budidaya ditetapkan sebesar 1.559 ton, sedangkan realisasi produksi yang dicapai sebesar 1.559,08 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,005%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu memenuhi bahkan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa kegiatan pengembangan budidaya ikan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut juga mencerminkan bahwa dukungan program, antara lain melalui pembinaan pembudidaya, peningkatan kualitas sarana produksi budidaya, serta penguatan

manajemen usaha budidaya, memberikan kontribusi terhadap stabilitas produksi perikanan budidaya di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.472.573.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.384.515.122 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,02%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 100,005% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,02%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,06. Nilai rasio efisiensi yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.37
Analisis Kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	1.559 Ton	1.559,08 Ton	100,01	1.472.573.900	1.384.515.122	94,02	1,06	Sangat Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Tahun 2025

Kategori Capaian Kinerja

Persentase Capaian	Kategori
>100%	Sangat Berhasil
90–100%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
<75%	Kurang Berhasil

Karena capaian 100,01%, indikator ini dapat dikategorikan Sangat Berhasil.

Perhitungan

Capaian kinerja

= 100,01%

Penyerapan anggaran

= 94,02%

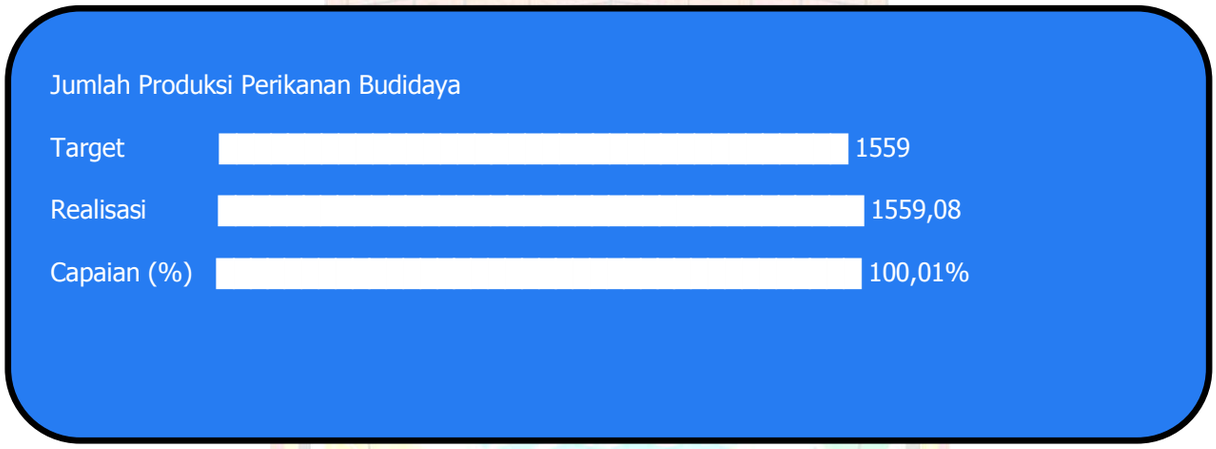
Rasio efisiensi:

$100{,}01 \div 94{,}02 = 1{,}06$

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,06 menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,02%, program mampu menghasilkan capaian kinerja 100,01%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program terlaksana sesuai dengan rencana kerja serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya di daerah.

Grafik II.6
Grafik Kinerja Program



Faktor Pendukung : Penerapan Teknogi Budidaya Tepat Guna oleh kelomppok seperti sistem bioflok, terutama untuk ikan air tawar untuk meningkatkan efisiensi lahan, Tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang budidaya perikanan

Faktor Penghambat : Perubahan cuaca ekstrem mempengaruhi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan, antara lain menurunnya nafsu makan dan meningkatnya risiko kematian, Akses pembudidaya terhadap sarana produksi, teknologi budidaya yang efisien, dan permodalan usaha masih terbatas.

Tindak lanjut : Peningkatan kapasitas pembudidaya ikan melalui Pemberian pelatihan/ pendampingan teknis berkelanjutan kepada pembudidaya. serta penguatan kelembagaan dan administrasi kelompok, Peningkatan akses pembudidaya terhadap sarana produksi budidaya, teknologi yang efisien, dan dukungan usaha guna mendorong peningkatan produktivitas.

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program Penanganan Kerawanan Pangan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanganan wilayah yang

berpotensi mengalami kerawanan pangan. Kinerja program ini diukur melalui indikator Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, yang merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah nilai indikator menunjukkan kondisi ketahanan pangan daerah yang semakin baik.

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 1,30%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat wilayah yang teridentifikasi sebagai daerah rentan rawan pangan selama periode pelaporan. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja program mencapai 100%, yang mengindikasikan bahwa target penurunan daerah rentan rawan pangan telah tercapai secara optimal.

Keberhasilan ini menunjukkan bahwa berbagai upaya intervensi yang dilaksanakan melalui program penanganan kerawanan pangan telah berjalan efektif. Intervensi tersebut antara lain melalui penguatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi, pemantauan kondisi ketahanan pangan wilayah, optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas ketersediaan dan distribusi pangan masyarakat.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaannya, Program Penanganan Kerawanan Pangan didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp454.339.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp348.853.545 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 76,78%.

Tabel II.38
Analisis Kinerja Program Penanganan Kerawanan Pangan

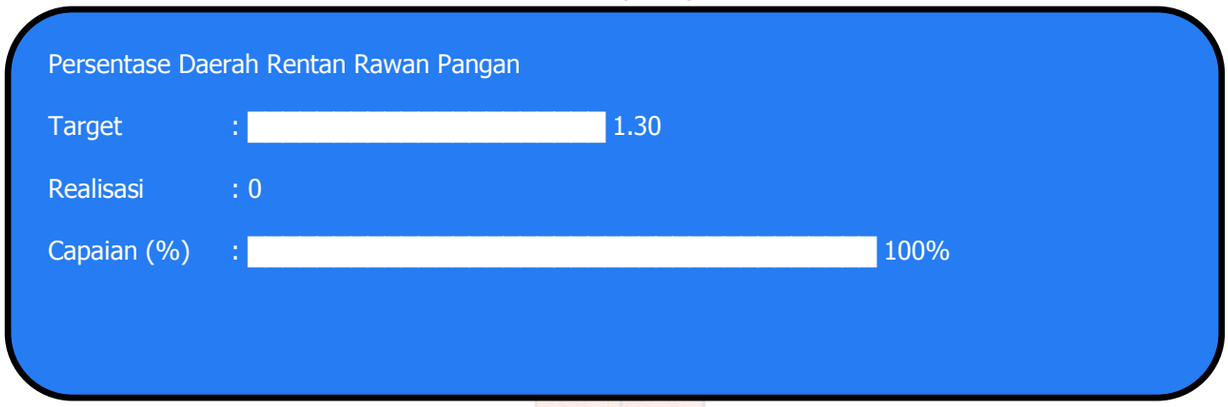
Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)
Persentase daerah rentan rawan pangan	%	1,30	0	**100**	454.339.000	348.853.545	**76,78**

Sumber : LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar Tahun 2025

Indikator ini merupakan indikator negatif, dimana semakin rendah nilai indikator semakin baik. Realisasi sebesar 0% menunjukkan bahwa pada tahun pelaporan tidak terdapat wilayah yang masuk kategori daerah rentan rawan pangan, sehingga target kinerja dapat dikatakan tercapai secara optimal.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%, kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang optimal tanpa menggunakan seluruh alokasi anggaran yang tersedia.

Grafik II.7
Grafik Kinerja Program



Perhitungan rasio efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 76,78

= 1,30

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,30 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan Program Penanganan Kerawanan Pangan dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, karena mampu mencapai target penurunan daerah rentan rawan pangan secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif terkendali.

Analisis Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah

Keberhasilan menurunkan persentase daerah rentan rawan pangan hingga **0%** memberikan kontribusi penting terhadap upaya peningkatan ketahanan pangan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap ketersediaan pangan relatif terjaga serta risiko kerentanan pangan dapat diminimalkan.

Capaian ini juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat stabilitas sosial ekonomi, khususnya melalui peningkatan ketahanan pangan sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Faktor Pendorong :

Dukungan dan kerjasama dari masyarakat, pemerintah setempat dan stakeholder terkait yang membantu dan mempermudah dalam pengambilan data. Tim penginput dan pengolah data telah terampil.

Faktor Penghambat :

Keterlambatan data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis dikarenakan data tersebut diolah terlebih dahulu oleh pihak skpd terkait, sehingga mengakibatkan pengolahan data juga terhambat.

Tindak Lanjut :

a. Membangun kerjasama yang baik dengan SKPD penyedia data dan melakukan komitmen penyediaan data secara on time;
b. Sosialisasi program dan kegiatan secara menyeluruh terkait peningkatan ketahanan pangan di tingkat kelurahan;
c. Sebagai bahan rekomendasi dan pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam penanganan kerawanan pangan pada level kelurahan;
d. Pelatihan teknis bagi aparat pengolah data melalui bimtek penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan yang dilakukan setiap tahun.

5. Sasaran "Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar"

Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar yang dimuat dalam misi pertama dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatkan Daya Saing Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja memiliki indikator Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah.

Tabel II.39
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 1		Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah dan Penciptaan Lapangan Kerja				
Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah	-50,26	8,75	5,5	62,86%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan DPMPTSP Kota Makassar

Pada Tahun 2024, baseline indikator ini tercatat sebesar -50,26% yang menunjukkan adanya kontraksi atau penurunan nilai investasi secara cukup tajam. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa iklim investasi pada tahun dasar masih menghadapi tantangan, baik dari faktor eksternal maupun internal daerah.

Memasuki Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 8,75% sebagai upaya pemulihan dan peningkatan investasi daerah terealisasi sebesar 5,5% yang berarti telah terjadi perubahan positif dari kondisi negatif (baseline) menjadi pertumbuhan positif. Hal ini mencerminkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong investasi mulai menunjukkan hasil, meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja = \frac{5{,}5}{8{,}75} x100\% = 62{,}86\%$$

Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 menunjukkan lonjakan kinerja yang sangat signifikan dari kontraksi sebesar -50,26% menjadi pertumbuhan positif 5,5%. Namun demikian, tingkat capaian kinerja sebesar 62,86% mengindikasikan bahwa pemulihan investasi masih belum optimal dan memerlukan penguatan lebih lanjut.

Adapun Program pendukungnya antara lain: Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal dan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Meningkatnya realisasi investasi melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Realisasi Total terhadap target investasi.

Tabel II.40
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Realisasi Total terhadap target investasi	Rp3.824.931.439.043	Rp3.000.000.000.000	Rp5,293,855,435,471	176,46%	Rp528,136,300	Rp479,828,023	91%

Sumber : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan realisasi investasi di daerah. Program ini diarahkan untuk mendorong masuknya investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan promosi peluang investasi, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah realisasi total terhadap target investasi dengan satuan nilai investasi. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar Rp3.824.931.439.043,- dengan target investasi yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- Hingga akhir periode pelaporan, realisasi investasi tercatat sebesar Rp5.293.855.435.471,- sehingga tingkat capaian kinerja indikator mencapai 176,46% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp528.136.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp479.828.023 atau 91% dari

pagu anggaran yang tersedia. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan secara optimal.

Secara umum, capaian kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana realisasi investasi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan telah memberikan hasil yang positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal sebagai berikut:

a. Tersedianya Tim pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan promosi penanaman modal;

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pengembangan iklim penanaman modal sebagai berikut:

a. Adanya perubahan pagu anggaran dan perubahan rincian objek belanja;

b. Belum disusunnya regulasi/kebijakan tentang urusan penanaman modal yang menjadi kewenangan Kab/Kota;

Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan :

a. Melakukan koordinasi dengan bidang perencanaan dan pelaporan terkait penyusunan refocusing anggaran;

b. Melakukan koordinasi dengan bag.hukum dan Komisi A DPRD Kota Makassar untuk penyusunan draft kajian kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

Program Pelayanan Penanaman Modal

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin Sesuai Ketentuan.

Tabel II.41
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pelayanan Penanaman Modal

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh izin Sesuai Ketentuan.	80%	90%	100%	111,11%	Rp1,424,015,400	Rp1,117,108,451	78%

Sumber : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2025

Program Pelayanan Penanaman Modal dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan perizinan yang transparan, cepat, dan akuntabel guna mendukung peningkatan kegiatan investasi di daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 80 persen, dengan target yang ditetapkan sebesar 90 persen. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 100 persen, sehingga tingkat capaian kinerja indikator mencapai 111,11 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.424.015.400. Sampai dengan akhir tahun anggaran, realisasi belanja tercatat sebesar Rp1.117.108.451 atau 78 persen dari total pagu anggaran yang tersedia. Realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan.

Faktor-faktor pendukung pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:

a. Tersedianya tenaga pendamping layanan OSS

b. Tersedianya Tim Satgas LONTARA

c. Tersedianya loket layanan informasi dan penanganan pengaduan bagi masyarakat

Faktor-faktor penghambat pelaksanaan program pelayanan penanaman modal sebagai berikut:

a. Adanya perubahan pagu anggaran dan perubahan rincian objek belanja;

b. Belum updatenya agenda tim teknis

c. Belum memenuhinya kapasitas sarana dan prasarana di DPMPTSP Kota Makassar untuk menempatkan Tim Teknis

Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan:

a. Berkoordinasi dengan Bapenda Kota Makassar dan Direktorat Jenderal Pajak terkait konfirmasi wajib pajak bagi setiap pelaku usaha Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) TA. 2025

b. Menyusun penerimaan reward The Best Investment dan Duta Usaha sebagai bentuk pemberian fasilitas/insentif bagi pelaku usaha yang telah berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah dan perekonomian daerah Melakukan revisi terhadap

kebijakan daerah tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat melalui Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; dan Efektivitas Kerja Sama Daerah.

Tabel II.42
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	Rp49,375,075,480	Rp42,688,625,630	86,45%
Efektivitas Kerja Sama Daerah	100%	100%	100%	100%			

Sumber Data: Matriks IKU Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun 2025

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel, serta meningkatkan sinergi kerja sama daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat kerja sama daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Indikator kinerja pertama dalam program ini adalah **kinerja penyelenggaraan pemerintahan** dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 100% dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pencapaian indikator tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp49.375.075.480 dengan realisasi anggaran sebesar Rp42.688.625.630 atau 86,45% dari pagu anggaran yang tersedia.

Faktor Pendukung :

a. Perencanaan Kegiatan Yang Jelas dan Terukur

b. Koordinasi Internal yang baik antar bidang berjalan cukup baik dalam proses verifikasi dan pelaporan kegiatan

c. Ketersediaan sumber daya aparatur yang kompeten

Faktor Penghambat :

a. Adanya pergantian versi e katalog dari versi 5

b. Adanya peralihan PA Ke KPA

c. Penyesuaian Kebijakan dan dinamika regulasi

TindakLanjut :

a. Melakukan penyesuaian dan pemutakhiran pemahaman terhadap system pengadaan khsusunya penerapan katalog versi terbaru

b. Memperkuat koordinasi internal dan lintas unit kerja dalam menindaklanjuti peralihan kewenangan

c. Melakukan penyesuaian kegiatan terhadap kebijakan dan regulasi terbaru agar pelaporan tetap sesuai aturan

Indikator kinerja berikutnya adalah efektivitas kerja sama daerah dengan satuan persentase (%). Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 100 persen dengan target yang ditetapkan sebesar 100%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator tercapai sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja indikator juga mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pelaksanaan indikator tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp49.375.075.480,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp42.688.625.630,- atau 86,45% dari pagu anggaran yang tersedia.

Faktor Pendukung :

Kegiatan ini adalah koordinasi yang efektif dengan para pihak terkait, utamanya dalam hal penyusunan naskah kerja sama daerah. Bagian Kerja Sama Setda Kota Makassar juga menggunakan aplikasi Makassar Collaboration (Macora) sebagai media untuk mempermudah pengusulan rencana kerja sama oleh para mitra yang ingin mengajukan penawaran kerja sama daerah. Selain itu, pada pelaksanaan sub-kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri, dukungan yang diberikan oleh tenaga ahli kerja sama luar negeri juga menjadi faktor pendukung atas berjalannya secara optimal kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Faktor Penghambat :

Kegiatan ini adalah dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian tertentu dalam bidang hukum dan penyusunan perjanjian kerja sama belum optimal.

Tindak Lanjut :

Diperlukan adalah diperlukan dukungan peningkatan kapasitas bagi para aparatur yang melaksanakan tugas penyusunan perjanjian kerja sama daerah, baik melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan maupun melalui mekanisme rekrutmen ASN/tenaga P3K yang memiliki kompetensi yang dibutuhkan.

Pelaksanaan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menunjukkan capaian kinerja yang baik, dimana target indikator kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Ke depan, pelaksanaan program diharapkan dapat terus dioptimalkan melalui penguatan koordinasi antar perangkat daerah serta peningkatan efektivitas kerja sama daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan

6. Sasaran "Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan"

Pada Misi 2 Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, khususnya pada sasaran *Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan* dengan indikator Indeks Pendidikan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan meningkat dibandingkan baseline Tahun 2024.

Tabel II.43
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 2		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Terwujudnya SDM yang berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas dan Dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	81,96	82,03	82,05	100,02%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LkjIP Dinas Pendidikan Kota Makassar

Pada Tahun 2024, nilai baseline Indeks Pendidikan tercatat sebesar 81,96. Untuk Tahun 2025, ditetapkan target sebesar 82,03 sebagai bentuk upaya peningkatan kualitas pendidikan secara bertahap. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 82,05 yang berarti melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian 100,02% dan masuk dalam kategori "Sangat Tinggi".

Capaian kinerja sasaran tersebut di atas didukung 3 (tiga) program yaitu Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Pembinaan Perpustakaan.

Program Pengelolaan Pendidikan

Meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar dan kesetaraan melalui Program Pengelolaan Pendidikan pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun); Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun); Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan; Skor kemampuan literasi SD; Skor kemampuan literasi SMP; Skor kemampuan numerasi SD; Skor kemampuan

numerasi SMP; Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B; Iklim inklusivitas SD; Iklim inklusivitas SMP; Iklim Keamanan SD; Iklim Keamanan SMP; Iklim Kebhinekaan SD; dan Iklim Kebhinekaan SMP. Dengan Satuan "Nilai".

Tabel II.44
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan

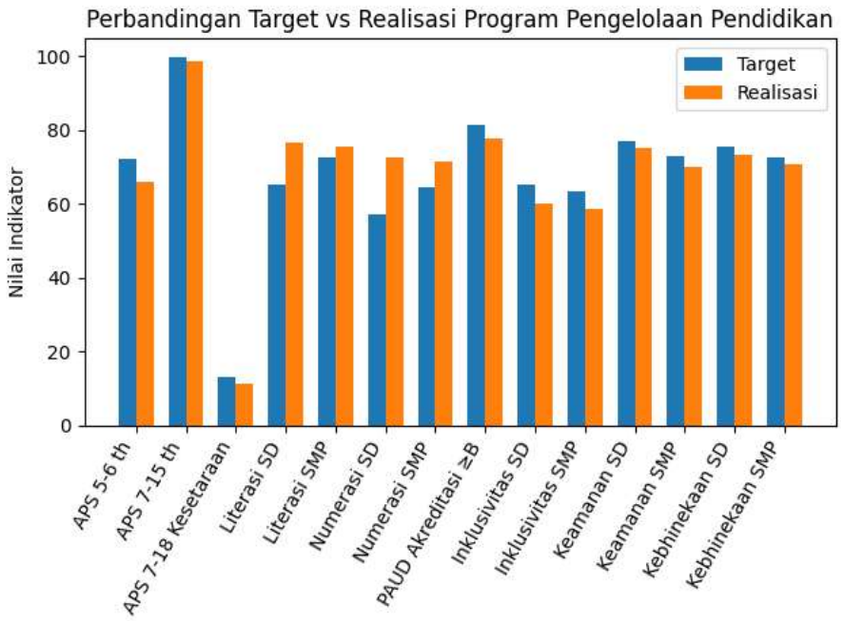
Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	65.82	72.19	65.82	91.18			
Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	98.72	99.8	98.72	98.92			
Angka partisipasi sekolah (7-18 tahun) Kesetaraan		12.98	11.45	88.21			
Skor kemampuan literasi SD	62.86	65.36	76.75	117.43			
Skor kemampuan literasi SMP	71.66	72.76	75.37	103.59			
Skor kemampuan numerasi SD	54.38	57.28	72.57	126.69			
Skor kemampuan numerasi SMP	62.85	64.35	71.6	111.27	Rp305.972.619.520	Rp267.774.556.228	87.25%
Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	77.81	81.45	77.81	95.53			
Iklim inklusivitas SD	60.15	65.15	60.14	92.31			
Iklim inklusivitas SMP	58.62	63.42	58.61	92.42			
Iklim Keamanan SD	75.23	77.03	75.23	97.66			
Iklim Keamanan SMP	70.02	73.02	70.01	95.88			
Iklim Kebhinekaan SD	73.5	75.5	73.5	97.35			
Iklim Kebhinekaan SMP	70.62	72.62	70.62	97.25			

Sumber Data: Matriks IKU Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan untuk meningkatkan akses, mutu, serta kualitas lingkungan belajar pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini. Pengukuran keberhasilan program ini dilakukan melalui beberapa indikator yang

mencerminkan akses pendidikan, kualitas pembelajaran, serta kondisi lingkungan belajar di satuan pendidikan.

Grafik II.8
Target dan Realisasi Program Pengelolaan Pendidikan



Dari aspek akses pendidikan, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5–6 tahun sebesar 65,82 dari target 72,19, atau dengan tingkat capaian 91,18. Capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan anak usia dini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam memperluas jangkauan layanan PAUD serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan prasekolah.

Sementara itu, APS usia 7–15 tahun sebagai indikator pendidikan wajib belajar menunjukkan capaian 98,72 dari target 99,80 dengan tingkat capaian 98,92. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan pada kelompok usia wajib belajar relatif sudah tinggi dan mendekati target yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat sebagian kecil anak usia sekolah yang belum sepenuhnya terjangkau layanan pendidikan formal.

Untuk indikator Angka Partisipasi Sekolah usia 7–18 tahun pada pendidikan kesetaraan, realisasi mencapai 11,45 dari target 12,98 dengan capaian 88,21. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pendidikan kesetaraan masih perlu diperkuat, khususnya melalui peningkatan sosialisasi program serta penyediaan akses layanan pendidikan nonformal bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal.

Dari aspek mutu pembelajaran, sebagian besar indikator menunjukkan capaian yang melampaui target. Skor kemampuan literasi SD mencapai 76,75 dari target 65,36 dengan tingkat capaian 117,43, sedangkan literasi SMP mencapai 75,37 dari target 72,76 atau

103,59. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan literasi peserta didik yang cukup signifikan.

Hal yang sama juga terlihat pada indikator kemampuan numerasi. Skor numerasi SD mencapai 72,57 dari target 57,28 dengan capaian 126,69, sedangkan numerasi SMP mencapai 71,60 dari target 64,35 atau 111,27. Tingginya capaian pada indikator literasi dan numerasi menunjukkan bahwa intervensi peningkatan kualitas pembelajaran telah memberikan dampak positif terhadap kompetensi dasar peserta didik.

Pada aspek kualitas layanan pendidikan, indikator proporsi satuan PAUD terakreditasi minimal B mencapai 77,81 dari target 81,45, atau dengan tingkat capaian 95,53. Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan, meskipun masih diperlukan peningkatan kualitas lembaga untuk mencapai target akreditasi yang lebih tinggi.

Dari sisi lingkungan belajar, indikator iklim inklusivitas pada jenjang SD mencapai 60,14 dari target 65,15 atau 92,31, sedangkan pada SMP mencapai 58,61 dari target 63,42 atau 92,42. Hal ini menunjukkan bahwa upaya menciptakan lingkungan belajar yang inklusif telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan kebijakan dan praktik pendidikan inklusif di satuan pendidikan.

Sementara itu, indikator iklim keamanan sekolah menunjukkan capaian yang relatif baik, yaitu 97,66 pada jenjang SD dan 95,88 pada jenjang SMP. Demikian pula dengan indikator iklim kebhinekaan, yang mencapai 97,3 pada jenjang SD dan 97,25 pada jenjang SMP, yang menggambarkan bahwa nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman telah cukup baik terimplementasi di lingkungan sekolah.

Secara umum, sebagian besar indikator kinerja Program Pengelolaan Pendidikan menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pembelajaran. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama pada aspek peningkatan partisipasi pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan, serta penguatan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan pada tahun pelaporan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp305.972.619.520, dengan realisasi anggaran sebesar Rp267.774.556.228 atau 87,52% dari total pagu anggaran.

Meskipun realisasi anggaran belum mencapai 100 , sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang mendekati bahkan melampaui target, terutama pada indikator kualitas pembelajaran seperti literasi dan numerasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya yang tersedia telah dilakukan secara cukup efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja program.

Efisiensi penggunaan anggaran tersebut antara lain didukung oleh optimalisasi pelaksanaan program peningkatan mutu pembelajaran, penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan pendidikan, serta pemanfaatan berbagai program nasional yang terintegrasi dengan kebijakan pendidikan daerah.

Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan, meskipun masih diperlukan upaya optimalisasi pada beberapa kegiatan yang berkaitan dengan perluasan akses pendidikan serta penguatan kualitas layanan pendidikan inklusif.

Faktor Pendukung :

a. Adanya senergi antar OPD dalam mensukseskan SPMB Jenjang PAUD, SD dan SMP. Penyediaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Dinas Sosial yang menjadi acuan untuk jalur afirmasi dalam SPMB serta penyediaan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
b. Dalam Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini terdapat keterlibatan Pokja Bunda PAUD Kota Makassar yang dapat mendukung terselenggaranya layanan PAUD berkualitas serta koordinasi lintas sektor untuk memajukan Pendidikan Anak Usia Dini.
c. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sekolah, seperti komite sekolah dan paguyuban orang tua

Faktor Penghambat :

a. Pengadaan seragam tidak dilaksanakan karena sesuai hasil uji laboratorium textil tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, yang seharusnya 100% polyester namun berdasarkan hasil uji laboratorium hanya mengandung 60% polyester.
b. Pembangunan ruang kelas baru SD dan SMP telah selesai perencanaannya tetapi tidak dapat dilaksanakan pembangunan fisik disebabkan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.
c. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa tidak dilaksanakan karena terdapat pengadaan PID (papan interaktif digital) dari Kemendikdasmen yang bertujuan untuk memaksimalkan pembelajaran digital, penyaluran PID dilaksanakan untuk semua SD dan SMP.

Tindak Lanjut :

a. Akan dilakukan evaluasi ulang terhadap spesifikasi dan proses pengadaan, serta perencanaan pengadaan kembali pada periode berikutnya dengan memastikan kesesuaian bahan melalui verifikasi teknis yang lebih ketat.

b. Kegiatan pembangunan ditunda dan direncanakan kembali pada periode anggaran berikutnya, dengan memperhatikan kesiapan perencanaan teknis, jadwal pelaksanaan yang lebih realistis, serta pemenuhan persyaratan administrasi sejak awal, sehingga pelaksanaan dapat berjalan optimal dan sesuai standar yang ditetapkan.

Akan dilakukan evaluasi kebutuhan sarana pembelajaran pada periode berikutnya dengan mempertimbangkan optimalisasi pemanfaatan PID yang telah tersedia.

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan melalui Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Persetase Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik; dan Proporsi Guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4.

Tabel II.45
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	N/A	100%	55,54%	55,54%	Rp11.680.000	Rp7.520.000	64,38%
Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	52,82%	77,20%	78,44%	101,61%			

Sumber Data: Matriks IKU Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025

Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, khususnya melalui peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik. Program ini diharapkan dapat memperkuat kompetensi guru sehingga mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan.

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 55,54%, sehingga

tingkat capaian kinerja berada pada 55,54%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian guru telah memiliki sertifikat pendidik, namun masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara kondisi yang dicapai dengan target yang ditetapkan.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya masih terbatasnya jumlah guru yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) serta adanya guru yang belum berhasil lulus dalam seleksi PPG. Selain itu, masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan minimal yang dipersyaratkan sebagai prasyarat untuk mengikuti proses sertifikasi pendidik.

Indikator kedua adalah Proporsi guru PAUD yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4. Pada tahun pelaporan, target yang ditetapkan sebesar 77,20%, sedangkan realisasi mencapai 78,44%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 101,61%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru PAUD telah memenuhi standar kualifikasi akademik yang dipersyaratkan, bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan capaian indikator ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran tenaga pendidik untuk meningkatkan kualifikasi akademik serta adanya kebijakan pemerintah yang memberikan kesempatan lebih luas bagi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara umum, hasil capaian kinerja Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualifikasi akademik tenaga pendidik telah berjalan dengan baik, namun peningkatan profesionalisme guru melalui sertifikasi pendidik masih memerlukan upaya yang lebih optimal.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada tahun pelaporan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp11.680.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp7.520.000 atau 64,38% dari total pagu anggaran.

Realisasi anggaran yang relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak terlaksana secara optimal, khususnya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sertifikasi pendidik yang sangat bergantung pada kebijakan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Meskipun demikian, penggunaan sumber daya yang tersedia tetap memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas tenaga pendidik, terutama dalam mendorong

peningkatan kualifikasi akademik guru PAUD yang berhasil melampaui target yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan sumber daya dalam Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan telah memberikan hasil yang cukup baik pada aspek peningkatan kualifikasi akademik guru, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya dalam mendukung percepatan sertifikasi pendidik.

Faktor Pendorong:

Terbukanya akses assesmen PPG dalam jabatan untuk menjaring guru sebagai tenaga profesional, dan Adanya pengangkatan guru PPPK.

Faktor Penghambat:

a. Masih adanya Pendidik dengan kualifikasi pendidikan di bawah S1,
b. Masih adanya Pendidik yang tidak lulus seleksi PPG.

Tindak Lanjut:

Melaksanakan kegiatan yang membimbing tenaga pendidik dalam mempersiapkan sejak dini dalam mengikuti seleksi PPG dalam jabatan.

Program Pembinaan Perpustakaan

Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Perpustakaan Kota melalui Program Pembinaan Perpustakaan diarahkan untuk meningkatkan tingkat kegemaran membaca masyarakat sebagai salah satu indikator pembangunan literasi daerah.

Tabel II.46
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pembinaan Perpustakaan

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Tingkat kegemaran membaca masyarakat	84,52	84,60	59,04	69,78%	Rp2.396.191.776	Rp2.230.746.985	93,10%

Sumber Data: Matriks IKU Dinas Perpustakaan Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target kinerja ditetapkan sebesar 84,60, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 59,04 atau 69,78% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga memerlukan penguatan strategi intervensi program literasi di masyarakat.

Apabila ditinjau dari aspek penggunaan anggaran, alokasi dana untuk pelaksanaan program ini sebesar Rp2.396.191.776 dengan realisasi sebesar Rp2.230.746.985 atau

93,10% dari pagu anggaran. Tingginya tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa secara administratif pelaksanaan kegiatan berjalan optimal. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat capaian indikator kinerja yang baru mencapai 69,78%, maka terdapat kesenjangan antara tingkat serapan anggaran dan efektivitas capaian kinerja program.

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya memberikan dampak yang optimal terhadap peningkatan kegemaran membaca masyarakat. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi antara lain masih terbatasnya intensitas kegiatan literasi berbasis masyarakat, rendahnya pemanfaatan fasilitas perpustakaan oleh kelompok usia produktif, serta masih perlunya inovasi layanan perpustakaan berbasis digital yang lebih adaptif terhadap perubahan pola akses informasi masyarakat.

Dari perspektif efisiensi program, meskipun tingkat serapan anggaran relatif tinggi, capaian indikator kinerja yang belum optimal menunjukkan bahwa efektivitas program perlu ditingkatkan melalui perbaikan desain kegiatan, penajaman sasaran penerima manfaat, serta penguatan kolaborasi dengan sekolah, komunitas literasi, dan perangkat daerah terkait. Optimalisasi strategi tersebut diharapkan dapat meningkatkan dampak program terhadap perubahan perilaku membaca masyarakat secara lebih signifikan pada periode pelaporan berikutnya.

Faktor Pendorong :

Intensitas Aktif dari Staff Bidang dan Pustakawan Dinas Perpustakaan; Motivasi serta Arahan dari Pejabat Struktural Dinas Perpustakaan; Adanya Kerjasama dengan Pihak Lain yang terkait dengan Dinas Perpustakaan; Komitmen pemerintah Kota Makassar dalam mendukung pelestarian warisan intelektual dan budaya daerah; Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan pelestarian melalui alih media (digitalisasi).

Faktor Penghambat :

Upaya peningkatan budaya baca masyarakat telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi target dikarenakan beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya pasrtisipasai masyarakat dalam aktifitas membaca, belum meratanya akses terhadap bahan bacaan yang berkualitas, serta belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan digital dan kegiatan literasi di tingkat komunitas. Serta adanya perubahan Instrumen dan metodologi terbaru terkait perhitungan TKM oleh Perpusnas RI.

Tindak Lanjut :

Memperluas jangkauan layanan perpustakaan keliling dan pojok baca, penambahan serta pemutakhiran koleksi bacaan yang sesuai kebutuhan pemustaka, peningkatan kualitas dan frekuensi kegiatan literasi di sekolah dan komunitas, optimalisasi pemanfaatan perpustakaan digital, serta penguatan kolaborasi dengan satuan pendidikan, komunitas

literasi, dan perangkat daerah terkait guna mendorong partisipasi masyarakat dalam aktivitas membaca secara berkelanjutan.

7. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat"

Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Manusia memiliki indikator Usia Harapan Hidup menunjukkan kinerja yang sangat baik dan mengalami peningkatan dibandingkan baseline Tahun 2024.

Tabel II.47
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Manusia Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 2		Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				
Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,33	75,51 Tahun	75,6 Tahun	100,12%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan BPS Kota Makassar

Pada Tahun 2024, nilai baseline UHH tercatat sebesar 75,33 tahun dan untuk Tahun 2025 ditetapkan target sebesar 75,51 tahun sebagai bentuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Realisasi yang dicapai pada Tahun 2025 sebesar 75,6 tahun, yang berarti melampaui target dengan tingkat capaian 100,12%.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{75{,}6}{75{,}51} x100\% = 100{,}12\%$$

Jika dibandingkan dengan baseline tahun 2024, capaian Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,27 tahun. Meskipun peningkatannya relatif kecil secara absolut, hal ini merupakan capaian yang signifikan dalam konteks indikator makro kesehatan, mengingat peningkatan usia harapan hidup umumnya terjadi secara bertahap dan memerlukan intervensi jangka Panjang dan mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat yang berkontribusi terhadap terwujudnya SDM yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Sasaran tersebut didukung hanya 1 program yaitu Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Maupun Upaya Kesehatan Masyakat.

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan

kesehatan ibu hamil; Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar; Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut seusai standar; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar; Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar; dan Persentase orang dengan risikoterinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

Tabel II.48
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Pendidikan

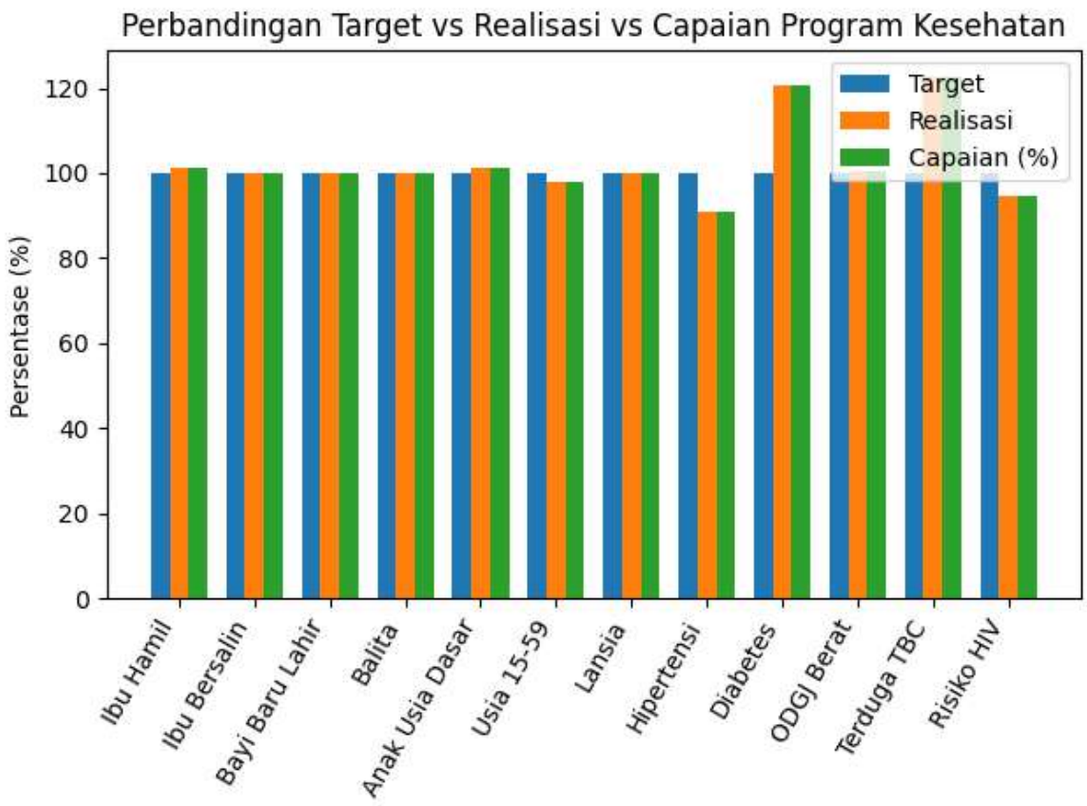
Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	101,15	101,15	Rp353.588.219.836	Rp321.779.305.200	91%
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100			
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100			
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100			
Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	101,4	101,4			
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.88	100	98,12	98,12			
Persentase warga negara usia 60 tahun keatas	93.61	100	100	100			

mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut seusai standar							
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.56	100	90,72	90,72			
Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	120,76	120,76			
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100,24	100,24			
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	122,62	122,62			
Persentase orang dengan risikoterinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	94,46	94,46			

Sumber Data: Matriks IKU Dinas Pendidikan Kota Makassar Tahun 2025

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh kelompok masyarakat sesuai standar pelayanan kesehatan. Program ini mencakup pelayanan kesehatan pada kelompok ibu dan anak, usia produktif, lanjut usia, serta pelayanan kesehatan pada penyakit menular dan tidak menular.

Grafik II.9
Target dan Realisasi Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyrakat



Secara umum, sebagian besar indikator kinerja pada program ini menunjukkan capaian yang baik hingga sangat baik, bahkan beberapa indikator berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Pada kelompok pelayanan kesehatan ibu dan anak, indikator Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil menunjukkan realisasi sebesar 101,15% dari target 100%, sehingga tingkat capaian mencapai 101,15%. Demikian pula indikator Persentase ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan, Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, serta cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar masing-masing mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa layanan kesehatan dasar bagi ibu dan anak telah berjalan secara optimal.

Pada indikator Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, realisasi mencapai 101,40% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan pada kelompok usia sekolah dasar telah dilaksanakan secara efektif melalui berbagai kegiatan pelayanan kesehatan di satuan pendidikan.

Untuk kelompok pelayanan kesehatan masyarakat usia produktif, indikator Persentase warga negara usia 15–59 tahun yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 98,12% dari target 100%. Meskipun capaian tersebut belum sepenuhnya

mencapai target, namun secara umum menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat usia produktif telah mendapatkan akses pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pada kelompok pelayanan kesehatan lanjut usia, indikator Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan bagi kelompok lanjut usia telah berjalan sesuai target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada indikator pelayanan kesehatan penyakit tidak menular, Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 90,72% dari target 100%, yang menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian penderita hipertensi yang belum terjangkau pelayanan kesehatan secara optimal. Sebaliknya, indikator Persentase penderita diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar menunjukkan capaian sebesar 120,76%, yang mengindikasikan adanya peningkatan deteksi dan pelayanan terhadap penderita diabetes melitus di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pada indikator pelayanan penyakit menular, Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar mencapai 122,62%, yang menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan penemuan kasus dan pelayanan TBC. Sementara itu, indikator Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar mencapai 94,46%, yang menunjukkan bahwa pelayanan deteksi dini HIV telah berjalan dengan baik namun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai target yang ditetapkan.

Secara keseluruhan, capaian indikator dalam program ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat telah berjalan dengan cukup efektif, khususnya pada pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan penyakit menular tertentu.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada tahun pelaporan didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp353.588.219.836, dengan realisasi anggaran sebesar Rp321.779.305.200 atau 91,00% dari total pagu anggaran.

Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya yang dialokasikan telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan kesehatan. Capaian kinerja yang sebagian besar mencapai atau bahkan melampaui target menunjukkan bahwa penggunaan anggaran pada program ini dapat dikategorikan efektif dan relatif efisien dalam mendukung pencapaian kinerja pelayanan kesehatan.

Beberapa indikator bahkan menunjukkan capaian yang melampaui target dengan realisasi anggaran yang tidak mencapai 100%, seperti pada indikator pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan anak usia sekolah, serta pelayanan penyakit menular seperti TBC. Hal ini mengindikasikan adanya optimalisasi pemanfaatan sumber daya melalui peningkatan koordinasi layanan kesehatan, pemanfaatan fasilitas kesehatan yang tersedia, serta penguatan kegiatan deteksi dini di masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, seperti pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dan deteksi dini HIV. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas program melalui penguatan kegiatan skrining kesehatan masyarakat, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan rutin, serta peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer.

Dengan mempertimbangkan capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Faktor Pendorong:

a. Optimalisasi pelayanan kesehatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, puskesmas pembantu, dan jaringan pelayanan kesehatan masyarakat sehingga meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan dasar.

b. Penguatan kegiatan promotif dan preventif melalui skrining kesehatan, deteksi dini penyakit, serta pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilakukan secara berkelanjutan.

c. Meningkatnya koordinasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat.

d. Pelaksanaan program penemuan kasus aktif (active case finding) pada penyakit menular seperti TBC yang meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Faktor Penghambat:

a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, khususnya pada penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes melitus.

b. Adanya stigma sosial terhadap penyakit tertentu seperti HIV yang menyebabkan sebagian masyarakat belum bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan secara sukarela.

c. Keterbatasan jangkauan pelayanan kesehatan pada beberapa kelompok masyarakat yang berisiko sehingga mempengaruhi capaian deteksi dini penyakit.

d. Beban kerja tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang cukup tinggi sehingga pelaksanaan skrining kesehatan belum dapat menjangkau seluruh sasaran secara optimal.

Tindak Lanjut:

a. Meningkatkan kegiatan edukasi dan promosi kesehatan kepada masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala.

b. Memperkuat pelaksanaan skrining kesehatan dan deteksi dini penyakit melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan kegiatan kesehatan berbasis masyarakat.

c. Meningkatkan peran kader kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menjangkau kelompok masyarakat yang berisiko.

d. Mengoptimalkan koordinasi lintas sektor dan integrasi program kesehatan guna meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan sesuai standar.

8. Sasaran "Meningkatnya Daya Beli Masyarakat"

Sasaran "Meningkatnya Daya Beli Masyarakat" mempunyai indikator Pengeluaran Per Kapita dengan satuan Ribu Rupiah Per Kapita Per Tahun.

Tabel II.49
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 2	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					
Terwujudnya SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi	Pengeluaran Per Kapita	18.386	19.301	18.878	97,81%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{18.878}{19.301} x100\% = 97{,}81$$

Pada Tahun 2024, nilai baseline pengeluaran per kapita tercatat sebesar 18.386. Untuk Tahun 2025, ditetapkan target sebesar 19.301 sebagai upaya meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi yang dicapai sebesar 18.878 dengan tingkat capaian 97,81%.

Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, terjadi peningkatan yang menunjukkan adanya perbaikan dalam kemampuan konsumsi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat relatif mengalami peningkatan meskipun belum optimal dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Dengan capaian kinerja 97,81% masuk dalam kategori "Sangat Tinggi". Capaian tersebut didukung oleh 3 (tiga) program anatara lain Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pemberdayaan UMKM dan Program Penempatan Tenga Kerja.

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Meningkatnya realisasi investasi melalui Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja Realisasi Total terhadap target investasi.

Tabel II.50
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Iklim Penanaman

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capai an %	Target	Realisasi	Capai an %
Realisasi Total terhadap target investasi	Rp3.824.931.4 39.043	Rp3.000.000.0 00.000	Rp5,293,855,4 35,471	176,46 %	Rp528,136 ,300	Rp479,828 ,023	91%

Sumber : LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar Tahun 2025

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dilaksanakan sebagai upaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan realisasi investasi di daerah. Program ini diarahkan untuk mendorong masuknya investasi melalui penyederhanaan pelayanan perizinan, peningkatan promosi peluang investasi, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator kinerja yang digunakan dalam program ini adalah realisasi total terhadap target investasi dengan satuan nilai investasi. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar Rp3.824.931.439.043, dengan target investasi yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi investasi tercatat sebesar Rp5.293.855.435.471, sehingga tingkat capaian kinerja indikator mencapai 176,46% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp528.136.300 dengan realisasi anggaran sebesar Rp479.828.023 atau 91% dari pagu anggaran yang tersedia. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan dalam program telah dilaksanakan secara optimal.

Secara umum, capaian kinerja Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjukkan hasil yang sangat baik, dimana realisasi investasi mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam

mendorong peningkatan investasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, promosi investasi, serta peningkatan kualitas pelayanan perizinan telah memberikan hasil yang positif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Faktor-faktor pendukung:

a. Pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sebagai Berikut:

b. Tersedianya Tim Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Pengendalian Dan Promosi Penanaman Modal;

Faktor-faktor penghambat:

a. Pelaksanaan Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Sebagai Berikut:

b. Adanya Perubahan Pagu Anggaran Dan Perubahan Rincian Objek Belanja;

c. Belum Disusunnya Regulasi/Kebijakan Tentang Urusan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Kab/Kota;

Tindak lanjut pelaksanaan kegiatan :

a. Melakukan koordinasi dengan bidang perencanaan dan pelaporan terkait penyusunan refocusing anggaran;

b. Melakukan koordinasi dengan bag.hukum dan Komisi A DPRD Kota Makassar untuk penyusunan draft kajian kebijakan pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal.

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Meningkatnya kapasitasa UMKM yang mandiri melalui Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) pada Tahun 2025 dan terdiri dari indikator kinerja persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal dan Pertumbuhan Wirausaha.

Tabel II.51
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	10,45%	15%	10,89%	72,6%	Rp3.887.493.000	Rp3.531.023.700	91%
Pertumbuhan Wirausaha	12,43%	14,5%	11,8%	81,3%			

Sumber Data: LKjIP Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar Tahun 2025

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kemandirian, serta daya saing pelaku UMKM. Program ini juga diarahkan untuk mendorong transformasi usaha mikro dari sektor informal menuju sektor formal serta meningkatkan pertumbuhan jumlah wirausaha di daerah.

Salah satu indikator kinerja program ini adalah persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 10,45%, dengan target kinerja yang ditetapkan sebesar 15%. Hingga akhir periode pelaporan, realisasi indikator mencapai 10,89%, sehingga capaian kinerja terhadap target masih belum optimal dan memerlukan upaya peningkatan melalui penguatan fasilitasi legalitas usaha, pendampingan perizinan, serta peningkatan akses pelaku usaha terhadap sistem administrasi usaha formal.

Indikator lainnya adalah pertumbuhan wirausaha yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha baru sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah. Pada tahun pelaporan, kondisi awal indikator tercatat sebesar 12,43%, dengan target sebesar 14,5%. Realisasi yang dicapai hingga akhir tahun sebesar 11,8%, sehingga capaian indikator ini juga masih berada di bawah target yang telah ditetapkan.

Dari sisi dukungan anggaran, Program Pemberdayaan UMKM didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp3.887.493.000, dengan realisasi belanja mencapai Rp3.531.023.700 atau sebesar 91% dari total pagu anggaran. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Meskipun realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik, capaian beberapa indikator kinerja masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pelaksanaan program, antara lain melalui peningkatan pendampingan usaha, fasilitasi legalitas dan perizinan usaha, pengembangan kewirausahaan, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar bagi pelaku UMKM guna mendorong peningkatan kinerja program pada periode selanjutnya.

Faktor Pendorong : Kegiatan pada program ini sudah terlaksana sesuai dengan arus kas

Faktor Penghambat : Masih terbatasnya pelaku usaha mikro yang bermitra dengan industri besar khususnya keterlibatan dalam rantai pasok

Tindak Lanjut : Mempersiapkan dokumen dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak yang terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar, sehingga dapat memperluas akses kesempatan kerja serta mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha secara lebih optimal. Kinerja program ini diukur melalui indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar.

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 61%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 64,08%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja telah berjalan efektif dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.084.221.660, dengan realisasi anggaran sebesar Rp925.538.118 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 105,05% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.52
Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61	64,08	105,05	1.084.221.660	925.538.118	85,36	1,23	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Tahun 2025

Perhitungan Efisiensi

Rasio Efisiensi = Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 105,05 ÷ 85,36

= 1,23

Interpretasi:

Rasio >1 menunjukkan kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan penggunaan anggaran, sehingga program dapat dikategorikan efisien.

Kategori Capaian Kinerja .

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 105,05%, indikator termasuk kategori Berhasil.

Faktor Penghambat:

a. Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan
c. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran

dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri mapun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya". Selain itu akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

9. Sasaran "Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi

Untuk mencapai Misi 3 yaitu Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkeadilan, maka ditetapkan Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegrasi yang mempunyai indikator Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan dan Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan.

Tabel II.53
Capaian Indikator Sasaran Tersediannya Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegarsi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 3		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkeadilan				

Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas dan Merata	Tersedianya Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	35,40	83,59	84,74	101,38
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	49,39	26,49	24,48	92,41
Capaian Rata- Rata						**96,89**

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan Matriks Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar

Pada Tahun 2025, pelaksanaan Misi 3 menunjukkan capaian yang bervariasi dalam pembangunan infrastruktur perkotaan. Indikator Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan yang ditarget, dari 83,59 berdasarkan Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar yang juga terdapat dalam dokumen RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 terealisasi 84,74 dengan capaian 101,38%.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 yang tercatat 35,40.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{84,74}{83,59} x100\% = 101,38\%$$

Sebaliknya, indikator Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan pada Tahun 2024 tercatat sebesar 49,39 namun pada Tahun 2025 tidak mencaoai target yang ditetapkan yaitu 26,49 dengan realisasi sebesar 24,48 dan capaian 92,41%. Jika dibandingkan dengan baseline, nilai indeks ini menunjukkan adanya penurunan kualitas atau cakupan layanan pada sektor keciptakaryaan seperti air minum, sanitasi dan permukiman.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{24,84}{26,49} x100\% = 92,41\%$$

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sebesar 96,89% menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini berada dalam kategori baik, dengan keberhasilan utama pada sektor kebinamargaan.

Perolehan rata- rata capaian = (101+ 92,41) : 2 = 96,895.

Adapun program yang mendukung capaian tersebut ada 8 (delapan) yaitu Program Penyelenggaraan Jalan; Program Peningkatan Pra Sarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase serta Program Penataan Bangunan Gedung.

Program Penyelenggara Jalan

Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan perkotaan melalui Program Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur jalan guna mendukung konektivitas wilayah, kelancaran mobilitas masyarakat, serta efisiensi distribusi barang dan jasa. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program ini adalah Persentase Jalan dalam Kondisi Baik.

Tabel II.54
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggara Jalan

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Jalan dalam Kondisi Baik	98%	88,74%	87,85%	99%	Rp299.332.848.445	Rp261.896.451.465	87,49%

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 98%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 87,85%. Dengan demikian tingkat capaian kinerja program mencapai 99,00% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum upaya peningkatan kualitas jaringan jalan daerah telah dilaksanakan secara optimal melalui kegiatan pemeliharaan rutin, rehabilitasi, serta peningkatan jalan pada ruas prioritas. Pendekatan prioritas penanganan pada ruas jalan yang memiliki tingkat kerusakan tinggi dan intensitas lalu lintas

Meskipun demikian, realisasi indikator masih berada sedikit di bawah target absolut yang ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami penurunan kondisi akibat faktor eksternal seperti peningkatan beban lalu lintas kendaraan berat, kondisi cuaca, serta keterbatasan cakupan penanganan infrastruktur dalam satu tahun anggaran.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan, dialokasikan anggaran sebesar Rp299.332.848.445, dengan realisasi anggaran sebesar Rp261.896.451.465 atau 87,49% dari pagu anggaran.

Apabila dibandingkan antara tingkat capaian kinerja sebesar 99,00% dengan realisasi anggaran sebesar 87,49%, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program menunjukkan tingkat efisiensi yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa capaian kinerja yang

mendekati target dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya yang relatif lebih rendah dari alokasi anggaran yang tersedia.

Efisiensi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Optimalisasi Perencanaan Kegiatan Berbasis Prioritas Kondisi Jalan,
- Pengendalian Biaya Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi,
- Peningkatan Efektivitas Pengawasan Teknis Dan Mutu Pekerjaan.

Pendekatan pemeliharaan preventif juga berkontribusi dalam menekan kebutuhan biaya rehabilitasi yang lebih besar pada masa mendatang, sehingga penggunaan anggaran menjadi lebih efisien dan berorientasi pada keberlanjutan kualitas infrastruktur jalan.

Analisis Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah

Peningkatan persentase jalan dalam kondisi baik memiliki kontribusi strategis terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam:

- Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah,
- Percepatan Distribusi Barang Dan Jasa,
- Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Layanan Publik,
- Serta Penguatan Aktivitas Ekonomi Daerah.

Dengan semakin baiknya kondisi jaringan jalan, diharapkan mobilitas masyarakat dan arus logistik dapat berlangsung lebih lancar sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih optimal.

Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Penggunaan Anggaran

Efisiensi penggunaan sumber daya dianalisis dengan membandingkan antara tingkat capaian kinerja indikator dengan realisasi penggunaan anggaran pada program yang sama.

Pada Program Penyelenggaraan Jalan, capaian indikator Persentase Jalan dalam Kondisi Baik mencapai 99,00%, sedangkan realisasi penggunaan anggaran mencapai 87,49% dari pagu yang tersedia.

Dengan demikian, rasio efisiensi program dapat digambarkan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Realisasi Anggaran

Rasio Efisiensi = 99,00 / 87,49 = 1,13

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,13 menunjukkan bahwa setiap satu persen penggunaan anggaran mampu menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi dari proporsi penggunaan sumber daya yang digunakan. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah

dilakukan secara efisien dan efektif, dimana capaian kinerja yang mendekati target dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Efisiensi ini mencerminkan bahwa perencanaan kegiatan, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan program telah dilakukan secara optimal dengan memperhatikan prioritas kebutuhan penanganan infrastruktur jalan.

Interpretasi Tingkat Capaian Kinerja

Berdasarkan pedoman evaluasi kinerja instansi pemerintah, tingkat capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tingkat Capaian	Kategori
≥ 100 %	Sangat Berhasil
90 – 99 %	Berhasil
80 – 89 %	Cukup Berhasil
< 80 %	Kurang Berhasil

Dengan capaian sebesar 99,0%, maka indikator Persentase Jalan dalam Kondisi Baik termasuk dalam kategori Berhasil.

Hal ini menunjukkan bahwa Program Penyelenggaraan Jalan secara umum telah mampu mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan kinerja daerah. Capaian tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan, rehabilitasi, serta pemeliharaan jalan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Analisis Nilai Manfaat (Value for Money)

Dilihat dari aspek value for money, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Jalan menunjukkan kinerja yang relatif baik, dimana:

- Output kinerja hampir mencapai target (99,00%)
- Penggunaan anggaran lebih rendah dari pagu (87,49%)

Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga memperhatikan prinsip efisiensi dalam penggunaan sumber daya publik.

Pendekatan pengelolaan program yang berbasis prioritas kondisi jalan, optimalisasi kegiatan pemeliharaan rutin, serta penguatan pengawasan teknis pekerjaan konstruksi

menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kinerja yang dicapai dengan biaya yang dikeluarkan.

Faktor Pendorong

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas infrastruktur dasar.
2. Prioritisasi penanganan ruas jalan strategis yang memiliki tingkat mobilitas tinggi.
3. Ketersediaan alokasi anggaran yang memadai untuk kegiatan pemeliharaan dan peningkatan jalan.
4. Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Faktor Penghambat:

1. Terdapat kegiatan tidak terlaksana karena adanya paket pekerjaan yang dinyatakan tender gagal, sehingga proses pemilihan penyedia tidak dapat dilanjutkan akibat keterbatasan waktu;
2. Perencanaan kawasan Trans-Oriented Develompent (TOD) tidak dapat terlaksana karena waktu yang terbatas. Hal ini disebabkan konsep desain perencanaan belum selesai;
3. Adanya perencanaan jembatan tidak dapat dilaksanakan akibat keterbatasan waktu pelaksanaan serta belum terselesaikannya pembebasan lahan pada lokasi rencana kegiatan;
4. Pelaksanaan penyusunan DED Penataan Pedestrian tidak dilaksanakan karena substansi perencanaan dimaksud telah terakomodir dalam paket perencanaan trotoar.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan evaluasi terhadap dokumen pemilihan dan persyaratan pengadaan, melalukan penyesuaian strategi pemilihan penyedia sesuai ketentuan yang berlaku, serta menjadwalkan ulang proses tender agar paket pekerjaan dapat segera dilaksanakan di periode berikutnya;
2. Melakukan penguatan koordinasi dengan pihak terkait dan tim perencana mengenai penyelesaian konsep desain perencanaan kawasan Transit-Oriented Development (TOD) dan memastikan kesiapan dokumen perencanaan diselesaikan lebih awal;
3. Melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah setempat dan pihak yang berkaitan dan memastikan kesiapan administrasi dan teknis kegiatan bisa berjalan sesuai ketentuan yang berlaku;

Melakukan sinkronisasi dan penegasan ruang lingkup perencanaan agar DED Penataan Pedestrian terintegrasi dan memastikan hasil perencanaan tersebut dimanfaatkan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan fisik guna menghindari duplikasi dan meningkatkan efisiensi perencanaan.

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman melalui penyediaan infrastruktur dasar perumahan yang memadai, meliputi prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Tabel II.55
Perbandingan Capaian Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2024			Kinerja Tahun 2025			Anggaran Tahun 2025		
	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	43,53 %	131,12 %	301,2 %	46,09 %	58%	125,8 %	Rp2.752.728.920,-	Rp2.187.565.967,-	79,47 %

Sumber Data: LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar Tahun 2025

Indikator kinerja program ini adalah Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU, pada tahun 2024 telah tercapai 20 perumahan, dengan target sebesar 100 perumahan, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 24 perumahan, sehingga tingkat capaian kinerja hanya mencapai 24%.

Tabel II.56
Analis Kinerja Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Kategori
Persentase perumahan yang dilengkapi PSU	20	100	24	24%	23.012.628.568	18.331.859.397	80%	Kurang Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar Tahun 2025

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum optimal dan masih terdapat gap yang signifikan terhadap target yang telah ditetapkan. Rendahnya capaian kinerja tersebut mengindikasikan adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti keterbatasan kesiapan lahan, kendala teknis

pelaksanaan fisik, proses pengadaan, serta prioritas penanganan lokasi yang memerlukan intervensi bertahap.

Dengan demikian, secara kinerja, program ini termasuk dalam kategori kurang berhasil, sehingga memerlukan langkah perbaikan pada perencanaan dan implementasi program di tahun berikutnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi penggunaan sumber daya, Program PSU didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp23.012.628.568, dengan realisasi anggaran sebesar Rp18.331.859.397 atau tingkat penyerapan sebesar 80%.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian kinerja yang hanya sebesar 24%, tingkat penyerapan anggaran tersebut belum sebanding dengan output kinerja yang dihasilkan.

Rasio efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran dihitung sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 24 ÷ 80

= 0,30

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,30 menunjukkan bahwa setiap 1% penggunaan anggaran hanya menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,30%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum efisien dalam pemanfaatan sumber daya, karena penggunaan anggaran relatif tinggi namun belum diikuti oleh capaian output yang optimal.

Analisis Kontribusi Terhadap Pembangunan Daerah

Meskipun capaian kinerja program belum optimal, Program PSU tetap memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Keberadaan PSU yang memadai berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat serta mendukung pencapaian indikator pembangunan di sektor perumahan dan kawasan permukiman.

Rendahnya capaian kinerja dari target jumlah perumahan yang menyerahkan PSU nya disebabkan banyaknya perumahan yang belum menyerahkan PSU ke Pemkot karena ada beberapa perumahan sudah tidak memiliki pengembang lagi.

Faktor Pendorong

- Keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengurusan serta penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang ke Pemerintah Kota Makassar

- Sumber daya manusia yang mumpuni serta cepat tanggap dalam penyelesaian Penyerahan PSU Perumahan

Faktor Penghambat

- Banyaknya perumahan yang sudah tidak memiliki pengembang (hilang/tidak jelas)

- Ketetapatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pengurusan serta penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang ke Pemerintah Kota Makassar

Tindak Lanjut

- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar melaksanakan Pemasangan Spanduk terhadap perumahan-perumahan yang belum menyerahkan PSU nya ke Pemerintah Kota Makassar.

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini bertujuan menurunkan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah rawan kumuh melalui intervensi perumahan, revitalisasi kawasan, dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Indikator kinerja utama adalah Persentase Pengurangan Rumah Tidak Layak Huni pada Wilayah Pencegahan Kumuh.

Pada Tahun 2024 belum tersedia data atau N/A sehingga tidak dapat disajikan perbandingannya. Pada tahun 2025 dari target yang ditetapkan sebesar 0,31 unit, realisasi program mencapai 0,27 unit, sehingga tingkat capaian kinerja adalah 87,10%. Hal ini menunjukkan bahwa program hampir memenuhi target, namun masih terdapat sedikit gap yang menuntut penguatan implementasi program di lapangan.

Kendati capaian mendekati target, evaluasi menunjukkan perlunya langkah-langkah untuk mempercepat pelaksanaan intervensi di wilayah prioritas, terutama di lokasi dengan kepadatan kumuh tinggi dan kendala teknis pada lahan yang memerlukan penanganan bertahap.

Tabel II.57
Analis Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Kategori
Persentase pengurangan rumah tidak layak huni pada wilayah	N/A	0,31 unit	0,27 unit	87,10%	961.147.200	942.857.960	98%	Belum Optimal

pencegahan kumuh								

Sumber : LKjIP Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi anggaran, program ini memperoleh pagu Rp961.147.200, dengan realisasi anggaran sebesar Rp942.857.960, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai 98%.

Untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya, digunakan rasio berikut:

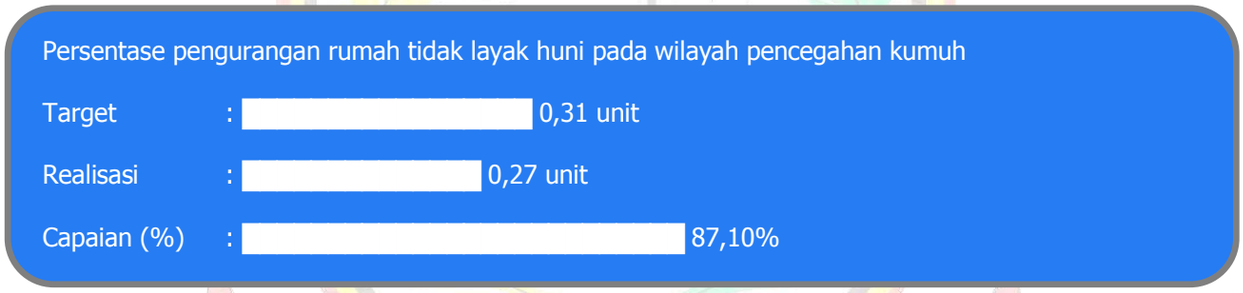
Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 87,10 ÷ 98

≈ 0,89

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,89 mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran relatif seimbang dengan output kinerja, menunjukkan efektivitas tinggi dalam pemanfaatan sumber daya program, meski masih ada ruang untuk meningkatkan hasil agar mencapai capaian 100%.

Grafik II.10
Grafik Target vs Realisasi vs Capaian (%)



Faktor Pendorong

a. Sumber daya manusia Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang cukup handal dalam hal pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni
b. Koordinasi yang baik antara staf Dinas Perumahan dengan stakeholder terkait dalam hal pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni tersebut

Faktor Penghambat

a. Minimnya anggaran yang dikelola Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam rangka pencegahan kumuh

Tindak Lanjut

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mengusulkan penambahan anggaran untuk kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni ke Tim TAPD Pemerintah Kota Makassar.

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Meningkatnya perlindungan Masyarakat dari banjir, dan genangan melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan dalam rangka meningkatkan perlindungan kawasan permukiman dari risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, abrasi pantai, erosi, dan akresi. Program ini juga bertujuan memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan lingkungan melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengendalian banjir serta pengaman pantai. Dan pengukuran berdasarkan indikator utama yaitu : Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir; serta Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Abrasi yang Terlindungi Infrastruktur Pengaman Pantai.

Tabel II.58
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir	89,15%	54,85	36,64	66,80%	Rp5.394.174.099	Rp4.552.368.763	84,39%
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	54,45%	55,64	55,64	100,00			

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

1. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Infrastruktur Pengendalian Banjir

Indikator ini mengukur tingkat perlindungan kawasan permukiman rawan banjir yang telah dilengkapi dengan infrastruktur pengendalian banjir pada wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar.

Pada tahun pelaporan, target kinerja yang ditetapkan sebesar 54,85%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 36,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 66,80% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya perlindungan kawasan permukiman terhadap risiko banjir masih menghadapi sejumlah kendala, sehingga belum mampu mencapai target kinerja yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kawasan permukiman yang belum terlindungi secara optimal oleh infrastruktur pengendalian banjir.

Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian indikator ini antara lain keterbatasan cakupan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir dalam satu tahun anggaran, tingginya dinamika perubahan kondisi hidrologi perkotaan, serta meningkatnya tekanan terhadap sistem drainase dan sungai akibat pertumbuhan kawasan permukiman.

2. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Abrasi yang Terlindungi Infrastruktur Pengaman Pantai

Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat perlindungan kawasan permukiman di sepanjang wilayah pesisir yang rawan terhadap abrasi, erosi, maupun akresi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 55,64%, dan realisasi yang dicapai juga sebesar 55,64%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pengaman pantai telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Intervensi pembangunan pengaman pantai pada kawasan prioritas mampu memberikan perlindungan terhadap kawasan permukiman pesisir yang rentan terhadap dinamika perubahan garis pantai.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dialokasikan anggaran sebesar Rp5.394.174.099, dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.552.368.763 atau 84,39% dari pagu anggaran.

Jika dibandingkan dengan capaian indikator program, terlihat bahwa:

- salah satu indikator berhasil mencapai 100%,
- sementara indikator lainnya masih berada pada tingkat capaian 66,80%.

Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan sumber daya belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan cakupan perlindungan kawasan rawan banjir. Meskipun demikian, tingkat penyerapan anggaran yang cukup baik menunjukkan bahwa kegiatan yang direncanakan sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Efektivitas program sangat dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan infrastruktur sumber daya air yang bersifat multi-tahun, membutuhkan investasi besar, serta bergantung pada kondisi teknis lapangan. Oleh karena itu, peningkatan perlindungan kawasan rawan banjir memerlukan pendekatan penanganan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel II.59
Annalisis Kinerja Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi infrastruktur pengendalian banjir	54,85	36,64	66,80	5.394.174.099	4.552.368.763	84,39	0,98	Cukup Berhasil
Rasio luas kawasan permukiman pesisir rawan abrasi yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai	55,64	55,64	100,00					

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Keterangan Perhitungan

$$\text{Rasio Efesieni} = \frac{Jumlah\ Seluruh\ Capaian}{Banyak\ Capaian} \div Penyerapan\ Anggaran$$

$$\text{Rasio Efesiensi} = \frac{166{,}80}{2} \div 84{,}39\%$$

$$\text{Rasio Efesiensi} = 83{,}4 \div 84{,}39\%$$

$$\text{Rasio Efesiensi} = 0{,}98\%$$

Interpretasi:

- >1,00 = Sangat efisien
- 0,90 – 1,00 = Efisien
- 0,70 – 0,89 = Cukup efisien
- <0,70 = Kurang efisien

Sehingga nilai 0,98 termasuk kategori efisien, namun efektivitas program masih perlu ditingkatkan agar cakupan perlindungan kawasan rawan banjir dapat meningkat secara lebih signifikan.

Faktor Penghambat:

Pelaksanaan fisik pada pembangunan Seawall belum dapat dilaksanakan disebabkan Dokumen UKL-UPL baru selesai di akhir Desember.

Tindak Lanjut:

Mempertahankan kinerja yang baik, memperkuat koordinasi lintas pihak, serta meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan agar pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Meningkatnya akses rumah tangga terhadap akses sanitasi aman melalui Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dilaksanakan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk memperluas cakupan pelayanan melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPAM jaringan perpipaan serta penyediaan akses air minum melalui sistem non-perpipaan terlindungi pada kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan.

Tabel II.60
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3,75	4,12	4,06	98,54	25.914.209.260	19.484.969.037	75,19
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM non-perpipaan terlindungi	0,8	0,19	0,31	163,16			

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

1. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 4,12%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 4,06%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,54% dari target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan akses air minum melalui jaringan perpipaan telah berjalan dengan baik dan hampir mencapai target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan bahwa sebagian besar kegiatan pembangunan dan pengembangan jaringan distribusi air minum telah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, realisasi indikator masih sedikit berada di bawah target yang direncanakan. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya keterbatasan dalam perluasan cakupan layanan jaringan perpipaan, baik yang disebabkan oleh faktor teknis pelaksanaan di lapangan maupun keterbatasan kapasitas pembangunan jaringan dalam satu tahun anggaran.

2. Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum melalui SPAM Non Jaringan Perpipaan Terlindungi

Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan akses masyarakat terhadap layanan air minum melalui sistem non-perpipaan terlindungi, khususnya pada kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan.

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 0,19%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,31%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 163,16% dari target yang ditetapkan.

Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan penyediaan akses air minum pada wilayah prioritas yang belum terjangkau jaringan perpipaan. Pendekatan penyediaan air minum melalui sistem non-perpipaan menjadi solusi yang relatif lebih cepat dan fleksibel dalam meningkatkan cakupan layanan air minum bagi masyarakat, khususnya pada kawasan yang secara teknis belum memungkinkan untuk pengembangan jaringan perpipaan dalam jangka pendek.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dialokasikan anggaran sebesar Rp25.914.209.260, dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.484.969.037 atau 75,19% dari pagu anggaran.

Apabila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja program, terlihat bahwa capaian indikator utama mendekati target bahkan melampaui target pada indikator akses

air minum non-perpipaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mampu menghasilkan capaian kinerja yang relatif tinggi dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Hal tersebut mengindikasikan bahwa penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program telah dilakukan secara relatif efisien, dimana peningkatan akses layanan air minum bagi masyarakat dapat dicapai dengan optimalisasi penggunaan anggaran yang tersedia.

Efisiensi ini juga menunjukkan bahwa strategi pelaksanaan kegiatan melalui kombinasi pendekatan pengembangan jaringan perpipaan dan penyediaan sistem non-perpipaan terlindungi dapat menjadi alternatif yang efektif dalam mempercepat peningkatan akses layanan air minum.

Tabel II.61
Analisis Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3,75	4,12	4,06	98,54	25.914.209.260	19.484.969.037	75,19	1,74	Berhasil
Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM non perpipaan terlindungi	0,8	0,19	0,31	163,16					

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Rasio Efisiensi

Efisiensi penggunaan anggaran dianalisis dengan membandingkan capaian kinerja indikator dengan tingkat penyerapan anggaran.

Keterangan Perhitungan

$$\text{Rasio Efesieni } = \frac{Jumlah\ Seluruh\ Capaian}{Banyak\ Capaian} \div Penyerapan\ Anggaran$$

$$\text{Rasio Efesiensi } = \frac{261{,}70}{2} \div 75{,}19\%$$

$$\text{Rasio Efesiensi } = 130{,}85 \div 75{,}19\%$$

$$\text{Rasio Efesiensi } = \mathbf{1{,}74}\%$$

Interpretasi rasio efisiensi:

Nilai Rasio	Interpretasi
> 1,00	Sangat Efisien
0,90 – 1,00	Efisien
0,70 – 0,89	Cukup Efisien
< 0,70	Kurang Efisien

Dengan nilai 1,74 maka pelaksanaan program menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, dimana capaian kinerja yang tinggi dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Interpretasi Capaian Kinerja

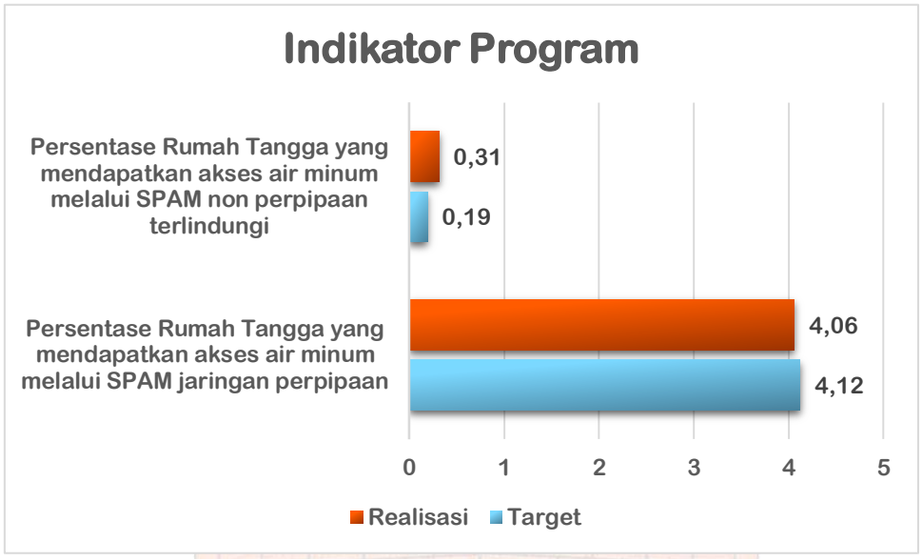
Berdasarkan tingkat capaian indikator kinerja, kategori keberhasilan program dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Tingkat Capaian	Kategori
≥ 100 %	Sangat Berhasil
90 – 99 %	Berhasil
80 – 89 %	Cukup Berhasil
< 80 %	Kurang Berhasil

Dengan nilai rata-rata capaian 130,85%, indikator Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan; serta Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM non perpipaan terlindungi termasuk dalam kategori Sangat Berhasil.

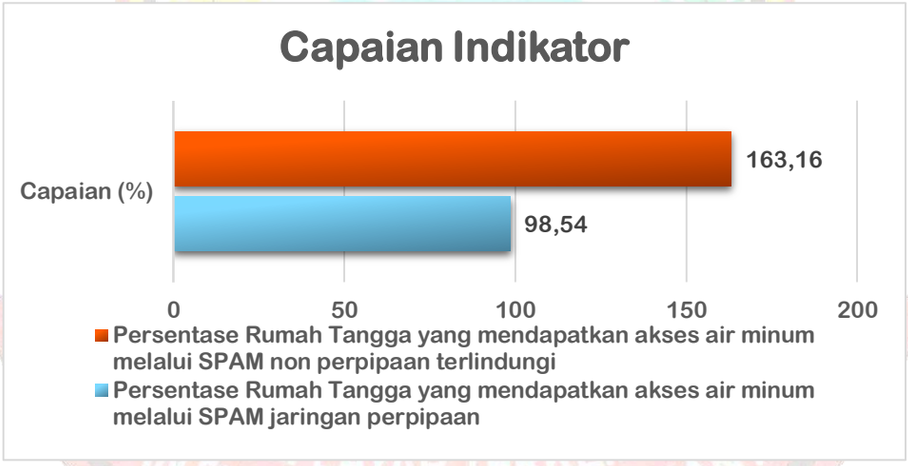
Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum secara umum telah berjalan dengan baik dan mampu meningkatkan akses layanan air minum bagi masyarakat, baik melalui pengembangan jaringan perpipaan maupun melalui penyediaan sistem non-perpipaan pada kawasan yang belum terjangkau jaringan distribusi.

Grafik II.11
Target vs Realisasi Indikator Program



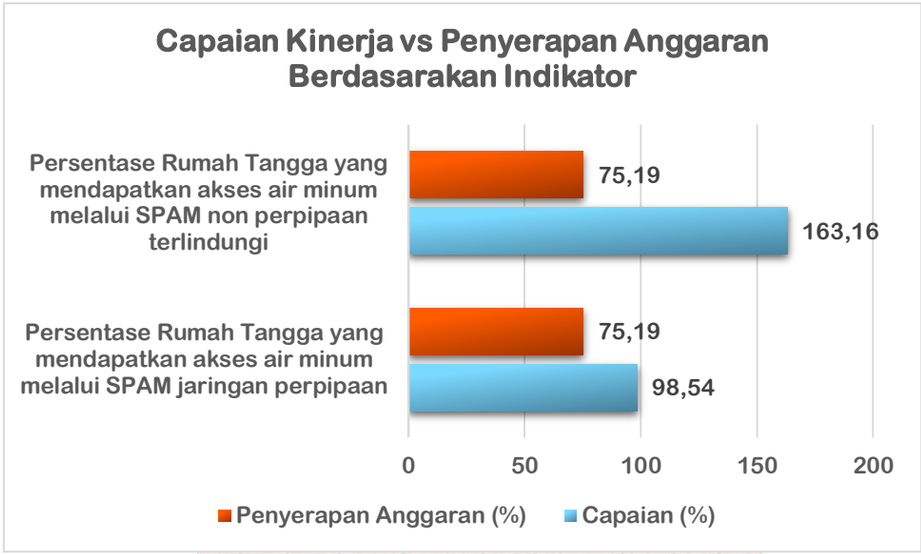
Grafik menunjukkan bahwa realisasi indikator akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan mencapai 4,06% dari target 4,12%. Sementara itu indikator akses air minum melalui SPAM non-perpipaan terlindungi melampaui target dengan realisasi 0,31% dari target 0,19%.

Grafik II.12
Persentase Capaian Kinerja Indikator



Capaian indikator akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan sebesar 98,54% termasuk kategori berhasil, sedangkan indikator akses air minum melalui SPAM non-perpipaan terlindungi mencapai 163,16% yang menunjukkan kinerja sangat berhasil karena melampaui target yang ditetapkan.

Grafik II.13
Persentase Capaian Kinerja Indikator



Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 98,54% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 75,19% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya, dimana kinerja program dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah.

Faktor Penghambat:

1. Adanya lokasi yang tidak terlaksana disebabkan perencanaan tersedia di bulan November. Hal ini disebabkan Paket pekerjaan dimaksud baru terakomodir di dalam anggaran perubahan, sehingga waktu tersedia untuk tahapan pengadaan dan pelaksanaan konstruksi menjadi sangat terbatas;
2. Adanya kendala di lapangan akibat kondisi lokasi eksisting yang tergenang air yang memungkinkan untuk relokasi titik pekerjaan. Kondisi tersebut mengakibatkan perlu melakukan penyesuaian terhadap lokasi dan metode pelaksanaan.
3. Kurangnya peminat/penyedia jasa yang mengikuti proses pemilihan pengadaan sehingga salah satu paket pekerjaan Perluasan SPAM yang tidak terlaksana.

Tindak Lanjut:

1. Memastikan penyelesaian perencanaan dilakukan lebih awal pada tahun anggaran berikutnya;
2. Mempertahankan kinerja yang baik, memperkuat koordinasi lintas pihak, serta meningkatkan pengendalian dan monitoring pelaksanaan agar kegiatan selanjutnya dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
3. Melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan persyaratan pengadaan, serta menyesuaikan strategi pemilihan penyedia agar meningkatkan minat peserta.

Program Pengelolaan & Pengembangan Air Limbah

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengelolaan air limbah domestik yang aman, baik melalui sistem setempat (SPALD-S) maupun sistem terpusat (SPALD-T). Kinerja program diukur melalui dua indikator utama, yaitu persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPALD-S akses aman dan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan SPALD-T akses aman.

Tabel II.62
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) akses aman	8,45	10,28	7,61	74,03	Rp24.907.382.359	Rp19.530.724.906	78,41
Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) akses aman	0,68	4,15	1,05	25,30			

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Secara umum, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah menunjukkan performa yang kontradiktif antara serapan anggaran dengan capaian indikator fisik di lapangan. Meskipun realisasi anggaran mencapai 78,41% (Realisasi Rp19.530.724.906 dari pagu Rp24.907.382.359), efektivitas pencapaian target pada dua indikator utama masih memerlukan evaluasi mendalam:

1. Analisis Ketimpangan Capaian (SPALD-S vs SPALD-T)

- SPALD-S (Sistem Setempat): Mencapai realisasi sebesar 7,61% dari target 10,28% (Tingkat Capaian: 74,03%). Meskipun mendekati target, terdapat gap sebesar 2,67% yang disebabkan oleh kendala teknis di lapangan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan tangki septik yang terstandar.
- SPALD-T (Sistem Terpusat): Menunjukkan deviasi yang sangat signifikan dengan capaian hanya 1,05% dari target 4,15% (Tingkat Capaian: 25,30%). Rendahnya capaian ini mengindikasikan adanya hambatan struktural yang bersifat *high-cost* dan *high-risk*, seperti kendala pembebasan lahan atau keterlambatan konstruksi jaringan perpipaan utama.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan perbandingan antara Realisasi Keuangan (78,41%) dengan Rata-rata Realisasi Kinerja Fisik (±49,67%), dapat ditarik beberapa poin analisis kritis terkait efisiensi:

1. Indikasi Inefisiensi Input-Output: Terdapat *mismatch* yang cukup tajam di mana serapan anggaran sudah mendekati 80%, namun rata-rata capaian kinerja fisik masih di bawah 50%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya finansial belum berkorelasi linier terhadap peningkatan akses layanan air limbah bagi masyarakat. Sebagian besar anggaran terserap untuk komponen pendukung atau konstruksi yang belum selesai sepenuhnya (*on-progress*), sehingga manfaatnya belum terkonversi menjadi angka "akses aman".
2. Analisis Unit Cost: Rendahnya capaian SPALD-T (25,30%) di tengah serapan anggaran program yang cukup tinggi memberikan sinyal bahwa pembangunan sistem terpusat memiliki *unit cost* yang sangat tinggi namun dengan daya ungkit (leverage) yang rendah terhadap total persentase rumah tangga terlayani dalam jangka pendek.

Faktor Penghambat:

1. Kegiatan pada Optimalisasi IPLT tidak terlaksana disebabkan terjadi kesalahan rekening (ASB untuk mengeruk lumpur tinja tidak tersedia dan yang termuat ASB untuk pengerukan drainase);
2. Kegiatan Operasi pemeliharaan SPALD tidak dilaksanakan karena direncanakan menggunakan mekanisme swakelola yang memerlukan perekrutan tenaga satgas, namun berdasarkan surat edaran dari BKN perekrutan tenaga dimaksud tidak diperbolehkan, sehingga mekanisme kegiatan tidak dapat dilanjutkan;
3. Masih kurangnya peminat untuk menyambung ke IPAL Losari;
4. Masih rendahnya masyarakat untuk mengikuti program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT).

Tindak Lanjut:

1. Melakukan pengusulan ASB terkait pelaksanaan kegiatan Optimalisasi IPLT;
2. Melakukan penyesuaian mekanisme pelaksanaan kegiatan dengan mengkaji alternatif pola pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan tata cara penyambungan ke IPAL Losari, serta melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, sehingga pemanfaatan layanan IPAL Losari dapat meningkat secara bertahap;

4. Meningkatkan sosialisasi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat terkait manfaat dan mekanisme program Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) serta memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur drainase dalam rangka mendukung pengendalian genangan dan menjaga kelancaran sistem aliran air di kawasan perkotaan. Kinerja program ini diukur melalui indikator **persentase drainase dalam kondisi baik**.

Tabel II.63
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase drainase dalam kondisi baik	69,08	57,81	91,76	158,73%	Rp84.452.923.394	Rp68.968.146.916	81,66

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 57,81 persen, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 91,76 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 158,73 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja program melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kondisi jaringan drainase yang cukup signifikan melalui kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, maupun peningkatan kapasitas saluran drainase pada berbagai titik prioritas.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program ini didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp84.452.923.394, dengan realisasi anggaran sebesar Rp68.968.146.916 atau tingkat penyerapan 81,66 persen. Perbandingan antara capaian kinerja yang mencapai 158,73 persen dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 81,66 persen menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan kinerja yang relatif tinggi dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia. Kondisi ini mengindikasikan adanya efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya, dimana hasil kinerja yang dicapai melebihi target yang ditetapkan tanpa harus menyerap seluruh anggaran yang dialokasikan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase yang dilakukan secara terarah pada titik-titik prioritas, serta adanya peningkatan koordinasi dalam pengelolaan sistem drainase perkotaan. Dengan demikian, program ini memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan fungsi sistem drainase kota serta mendukung upaya pengurangan risiko genangan di wilayah perkotaan.

Secara keseluruhan, hasil capaian kinerja menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase telah berjalan secara efektif dan sangat efisien, dimana target kinerja dapat terlampaui dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang terkendali. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam menjaga kualitas infrastruktur drainase yang telah dibangun serta meningkatkan pengendalian dan perencanaan program agar kinerja yang telah dicapai dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

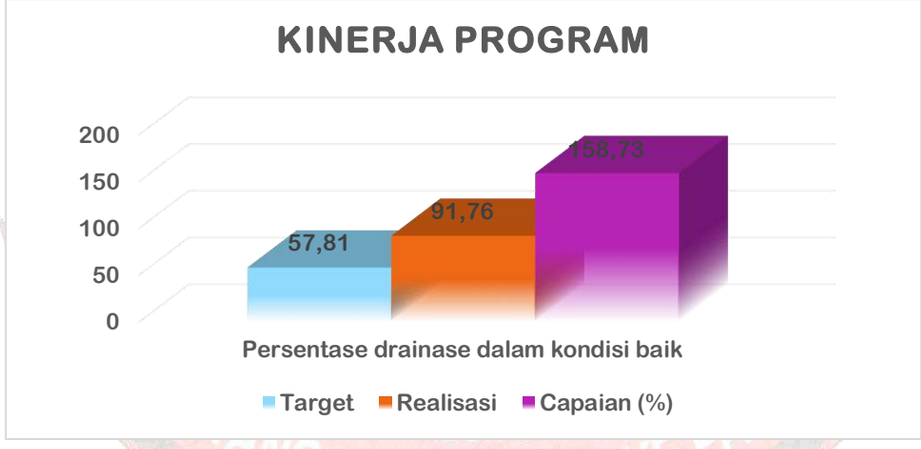
Tabel II.64
Analisis Kinerja Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase drainase dalam kondisi baik	57,81	91,76	158,73	84.452.923.394	68.968.146.916	81,66	1,94	Sangat Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Indikator persentase drainase dalam kondisi baik menunjukkan realisasi sebesar 91,76% dari target 57,81%, sehingga tingkat capaian mencapai 158,73%. Berdasarkan kategori penilaian kinerja, capaian tersebut termasuk dalam kategori Sangat Berhasil karena melampaui target yang telah ditetapkan.

Grafik II.14
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Program ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp84.452.923.394 dengan realisasi sebesar Rp68.968.146.916 atau tingkat penyerapan 81,66%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 158,73%, maka rasio efisiensi sebesar 1,94, yang menunjukkan bahwa kinerja program dapat dicapai secara efektif dan Sangat efisien, dimana capaian kinerja yang dihasilkan jauh melampaui target dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Kesimpulan Analisis Program

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase menunjukkan kinerja yang sangat baik, baik dari sisi capaian indikator maupun dari aspek efisiensi pemanfaatan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, rehabilitasi, dan peningkatan jaringan drainase telah berjalan secara optimal dalam mendukung peningkatan kualitas infrastruktur drainase perkotaan.

Faktor Penghambat:

1. Jumlah satgas yang terbatas sehingga jumlah wilayah yang diintervensi menjadi berkurang;
2. Beberapa lokasi pekerjaan pada kegiatan Rehabilitasi dan Pembangunan Drainase mengalami penambahan waktu pelaksanaan akibat kondisi cuaca.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan rekrutmen tenaga PJLP Operasional;
2. Mengoptimalkan perencanaan dan menyesuaikan jadwal pelaksanaan pekerjaan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca untuk meminimalisir keterlambatan.

Program Penataan Bangunan Gedung

Program Penataan Bangunan Gedung bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kelayakan bangunan gedung agar memenuhi standar keselamatan, fungsi, serta kenyamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja program ini diukur melalui indikator persentase bangunan gedung dalam kondisi baik.

Tabel II.65
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Bangunan Gedung kondisi baik	N/A	49,65	22,06	44,43%	Rp111.337.896.408	Rp90.322.928.821	81,13

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun 2024 belum tersedia data atau N/A sehingga tidak dapat disajikan perbandingannya. Pada tahun pelaporan, target kinerja indikator ditetapkan sebesar 49,65%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 22,06%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 44,43% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum mencapai target yang direncanakan, sehingga masih diperlukan peningkatan upaya dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan peningkatan kualitas bangunan gedung.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp111.337.896.408, dengan realisasi anggaran sebesar Rp90.322.928.821 atau tingkat penyerapan 81,13%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 44,43%, maka menunjukkan bahwa tingkat penyerapan anggaran relatif lebih tinggi dibandingkan dengan capaian indikator yang dihasilkan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan agar hasil yang dicapai dapat lebih optimal dan sebanding dengan sumber daya yang telah digunakan.

Rendahnya capaian indikator tersebut juga menunjukkan bahwa proses peningkatan kondisi bangunan gedung memerlukan tahapan pelaksanaan yang relatif kompleks, baik dari aspek perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, maupun pengawasan pekerjaan di lapangan. Selain itu, keterbatasan cakupan kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam satu tahun anggaran juga mempengaruhi tingkat peningkatan kondisi bangunan gedung secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung telah menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas infrastruktur bangunan gedung, namun capaian kinerja yang dihasilkan masih belum optimal dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan dalam perencanaan program, peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan anggaran agar pelaksanaan program dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas bangunan gedung di daerah.

Tabel II.66
Analisis Kinerja Program Penataan Bangunan Gedung

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	49,65	22,06	44,43	111.337.896.408	90.322.928.821	81,13	0,55	Kurang Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

   Capaian kinerja dihitung dari perbandingan antara realisasi dengan target indikator.
   Capaian = (Realisasi / Target) × 100
   = (22,06 / 49,65) × 100
   = 44,43%

   Kategori kinerja umumnya digunakan dalam evaluasi SAKIP:

   Persentase Capaian Kategori

>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Sehingga capaian 44,43% termasuk kategori Tidak Berhasil (beberapa pemda menuliskan Kurang Berhasil, tergantung pedoman internal).

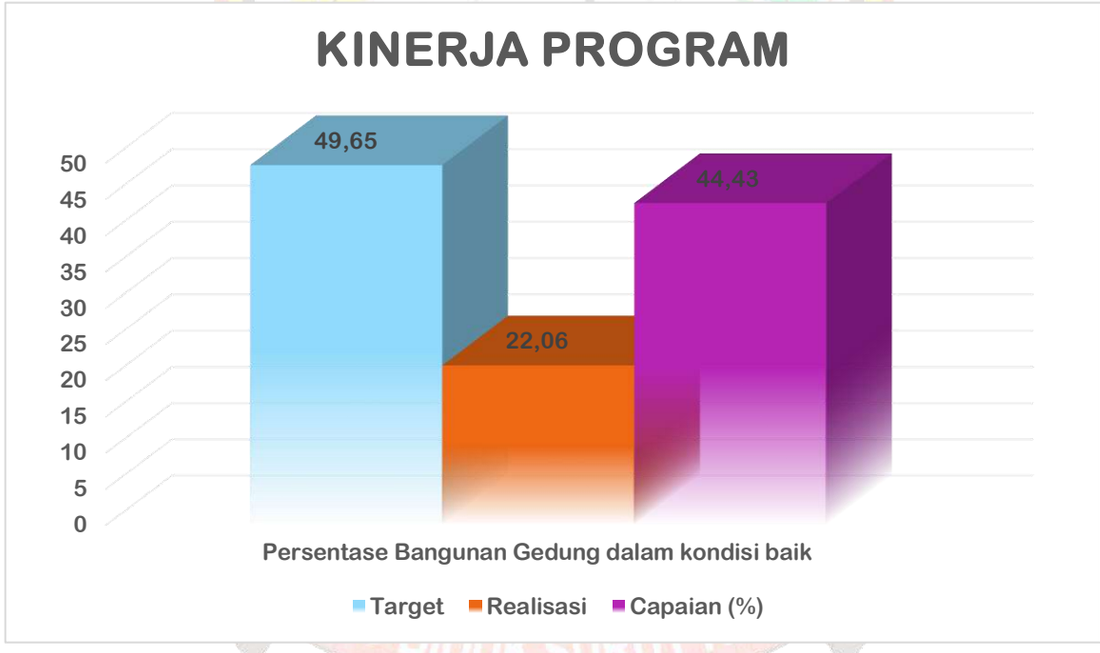
2. Rasio Efisiensi Kinerja

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran
= 44,43 / 81,13
= 0,55

Interpretasi:

- Rasio < 1 menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan belum sebanding dengan penggunaan anggaran.

Grafik II.15
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Interpretasi Grafik

Grafik menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase bangunan gedung dalam kondisi baik mencapai 22,06% dari target 49,65%, sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 44,43%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penataan Bangunan Gedung belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Faktor Penghambat:

1. Adanya item pekerjaan yang master produknya belum tersedia di E-Catalog versi 6;
2. Adanya penyesuaian perencanaan pada kantor-kantor lurah sehingga pelaksanaan fisik mengalami perubahan jadwal;
3. Beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana dikarenakan perencanaan teknis baru dapat diselesaikan pada bulan November.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan koordinasi dan klarifikasi ulang dengan pihak kelurahan pasca pergantian pejabat dan melakukan konfirmasi kembali terhadap kebutuhan rehabilitasi sesuai hasil perencanaan awal, serta menyelaraskan kesepakatan para pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan dapat dilanjutkan;
2. Melakukan percepatan penyusunan perencanaan pada tahun anggaran berikutnya dan memastikan dokumen perencanaan diselesaikan pada awal tahun anggaran.

10. Sasaran "Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang"

Sasaran "Meningkatnya Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mempunyai indikator Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Tabel II.67
Capaian Indikator Sasaran "Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 3		Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur dan Tata Ruang Kota yang Berkeadilan				
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Merata	Meningkatnya Pengendalian dan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	10%	10%	50%	500%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LkjIP Dinas Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2025

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{50}{10} x100\% = 500\%$$

Pada Tahun 2024 baseline indikator ini tercatat sebesar 10% yang menggambarkan masih terbatasnya ketersediaan dokumen RDTR sebagai acuan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan tetap sebesar 10%, dengan mempertimbangkan kapasitas penyusunan dokumen yang umumnya memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang.

Namun demikian, realisasi Tahun 2025 mencapai 50% dengan tingkat capaian 500% yang menunjukkan lonjakan kinerja yang sangat tinggi dibandingkan target maupun baseline tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan baseline 2024, terjadi peningkatan sebesar 40 poin persentase, yang mencerminkan percepatan signifikan dalam penyediaan dokumen RDTR. Oleh karena itu capaian yang sangat tinggi ini perlu dimaknai secara hati-hati serta menjadi bahan evaluasi dalam penetapan target ke depan agar lebih realistis dan terukur.

Sasaran ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan indikator Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pemanfaatan ruang melalui penanganan dan penyelesaian kasus pelanggaran tata ruang. Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Tabel II.68
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

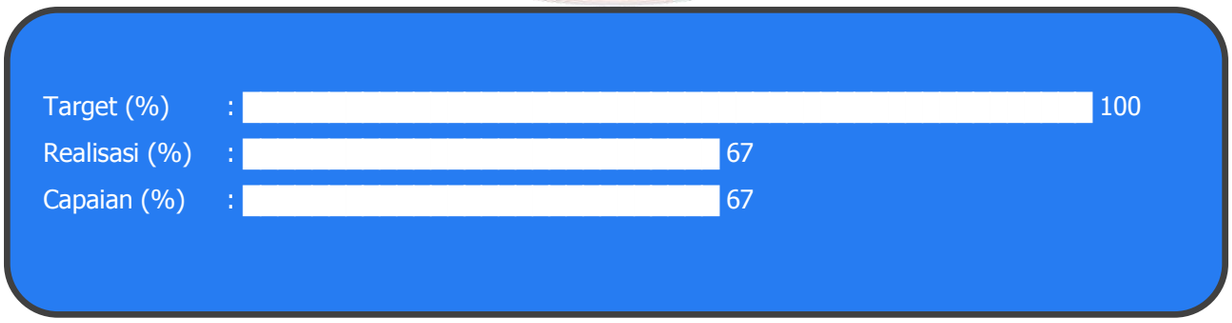
Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Bangunan Gedung kondisi baik	N/A	67	67	100%	Rp12.362.825.380	Rp10.407.311.213	84

Sumber : LKjIP Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 67%, sehingga capaian kinerja mencapai 67%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal, meskipun lebih dari setengah target telah tercapai.

Capaian ini mengindikasikan masih terdapat 33% kasus pelanggaran yang belum terselesaikan, yang berpotensi menjadi backlog dan mempengaruhi efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang di tahun berikutnya. Dengan demikian, program ini dapat dikategorikan cukup berhasil namun belum memenuhi target yang ditetapkan.

Grafik II.16
Grafik Kinerja Program Penyelenggara Penataan Ruang



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp12.362.825.380, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.407.311.213 atau tingkat penyerapan sebesar 84%.

Tabel II.69
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indikator	Baseline 2024	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Kategori
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	N/A	100	67	**67%**	12.362.825.380	10.407.311.213	**84%**	Cukup Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Penataan Ruang Kota Makassar Tahun 2025

Untuk menilai efisiensi penggunaan anggaran, dilakukan perhitungan rasio efisiensi sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 67 ÷ 84

= 0,80

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	67 %
Penyerapan Anggaran	84 %
Rasio Efisiensi	0,80
Kategori	Cukup Efisien

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,80 menunjukkan bahwa pelaksanaan program berada pada kategori cukup efisien, dimana sebagian besar penggunaan anggaran telah menghasilkan output kinerja yang relatif sebanding, meskipun belum optimal.

Faktor Penghambat:

1. Daftar data IMB cetak dari Dinas Penanaman Modal dn PTSP tidak dilengkapi dengan Keterangan Situasi Tapak (KST) sehingga menyulitkan pada saat mencari lokasi bangunan, Dokumen permohonan dan dokumen pendukung yang diajukan oleh pihak pemohon tidak lengkap sehingga proses untuk dilaksanakan Forum Penataan Ruang (FPR) tertunda untuk menunggu kelengkapan dokumen,e. Pemohon tidak melengkapi bahan persentase pada saat rapat persentase FPR sehingga peserta rapat tidak memahami permohonan dari pihak pemohon.

2. Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penataan ruang masih perlu diperkuat untuk melakukan penertiban.
3. Konflik Kepentingan dan Politik dalam Perencanaan dan pemanfaatan ruang sering kali lebih banyak didominasi oleh keputusan politik daripada kajian teknis.
4. Ketidaksesuaian antara perencanaan tata ruang dengan realisasi pemanfaatan di lapangan.
5. Kurangnya Tenaga Teknis yaitu Keterbatasan SDM teknis di tingkat daerah untuk merumuskan dan mengawasi aturan tata ruang yang kompleks.
6. Rendahnya Kesadaran Masyarakat: Pemahaman dan kepatuhan masyarakat yang masih kurang terkait aturan zonasi dan pemanfaatan ruang.
7. faktor cuaca juga terkadang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang

Faktor Pendukung :

1. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
2. Adanya peraturan zonasi, peraturan tata ruang RTRW yaitu perda Nomor 7 tahun 2024 tentang RTRW kpta Makassar
3. Mekanisme perizinan yang ketat (seperti IMB/PBG)
4. Pengawasan, pengendalian dan, penertiban serta pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran tata ruang.
5. Adanya tim terpadu yg melibatkan instansi terkait, seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kelurahan dan kecamatan serta semua OPD terkait dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaaatan ruang
6. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan mengenai pemanfaatan ruang.

Tindak lanjut:

Peningkatan/menambah SDM dalam membantu pencapaian kegiatan tersebut.

11. Sasaran "Meningkatnya Penguasaan IPTEK"

Dalam rangka pelaksanaan Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata, ditetapkan tujuan untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah dengan sasaran meningkatnya penguasaan IPTEK dan indikator sasaran Indeks Kapabilitas Inovasi.

Tabel II.70
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Penguasaan IPTEK

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 4		Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata				
Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,46	4,51	4,5	99,78%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LkjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{4{,}5}{4{,}51} x100\% = 99{,}78\%$$

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 4,51, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 4,50 sehingga tingkat capaian mencapai 99,78%.

Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, realisasi Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang mencerminkan perbaikan kapasitas inovasi daerah meskipun dalam skala yang relatif terbatas. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan ekosistem inovasi, penguasaan teknologi serta dukungan terhadap kegiatan riset dan pengembangan telah berjalan, namun masih memerlukan akselerasi agar peningkatannya lebih signifikan.

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja, capaian sebesar 99,78% termasuk dalam kategori "Sangat Tinggi" (≥ 90%). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kapabilitas inovasi daerah telah berjalan secara optimal dan efektif meskipun pada tahun- tahun sebelumnya indikator program tidak sama dengan indikator Tahun 2025.

Meskipun capaian belum melampaui target, selisih yang sangat kecil antara target dan realisasi menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik. Upaya penguatan inovasi daerah, termasuk peningkatan penguasaan IPTEK, telah memberikan hasil yang signifikan dan sesuai dengan perencanaan. Adapun Program yang mendukung capaian adalah Program Riset dan Inovasi Daerah.

Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah merupakan program baru yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Makassar dan dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penguatan ekosistem riset dan inovasi di daerah. Program ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produk inovasi daerah serta memastikan pemanfaatannya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Salah satu indikator kinerja utama dalam program ini adalah *Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan*, yang mencerminkan tingkat adopsi dan implementasi hasil inovasi dalam berbagai sektor pembangunan daerah.

Namun demikian, sehubungan dengan status program yang masih baru serta adanya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar, maka anggaran serta target, realisasi dan capaian indikator kinerja program belum dapat disajikan pada periode pelaporan ini. Hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya data yang memadai dari instansi terkait yang saat ini masih dalam proses penyesuaian kelembagaan, penguatan sistem pendataan, serta penyusunan indikator kinerja yang terukur dan terstandar.

Diharapkan ke depannya melalui konsolidasi kelembagaan dan penguatan sistem pengelolaan data kinerja, indikator *Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan* dapat diukur secara akurat dan berkelanjutan sebagai dasar dalam evaluasi efektivitas pelaksanaan program serta pengambilan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

12. Sasaran "Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan"

Pada Misi 4: Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata, khususnya pada sasaran *Meningkatnya Kuantitas dan Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan*, indikator Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan mengalami lonjakan signifikan dibandingkan baseline Tahun 2024.

Tabel II.71
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualntitas Inovasi di Seluruh Bidang Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 4		Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata				
Meningkatnya Kualitas Inovasi Inovasi Daerah	Meningkatnya Kuantitas dan Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	101 Inovasi	2%	6,93%	346,5%

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

Pada Tahun 2024, baseline indikator ini tercatat sebanyak 101 inovasi, yang mencerminkan jumlah inovasi yang telah dihasilkan pada periode sebelumnya. Untuk tahun

2025, ditetapkan target peningkatan sebesar 2% sebagai upaya mendorong pertumbuhan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada Tahun 2025 terdapat peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah sebanyak 7 Inovasi dengan total Inovasi sampai dengan tahun 2025 sebanyak 108 Inovasi, sehingga realisasi kinerja 2025 mencapai 6,93%, dengan tingkat capaian 346,5%, yang berarti melampaui target secara sangat signifikan. Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah inovasi yang jauh lebih tinggi dari yang direncanakan, baik dari sisi kuantitas maupun dinamika pengembangannya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kapabilitas inovasi daerah telah berjalan secara optimal dan efektif meskipun pada tahun-tahun sebelumnya indikator program tidak sama dengan indikator Tahun 2025.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh meningkatnya sinergi antar perangkat daerah, optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta penguatan kebijakan yang mendorong tumbuhnya inovasi di berbagai sektor pembangunan, termasuk sektor inovasi, seni, budaya dan pariwisata. Selain itu, adanya dukungan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan turut berkontribusi terhadap peningkatan capaian indikator kinerja.

Namun demikian, capaian kinerja yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap penetapan target kinerja agar lebih terukur, realistis dan menantang sehingga dapat lebih mencerminkan peningkatan kinerja yang berkelanjutan dan berkualitas di masa yang akan datang.

Program Riset dan Inovasi Daerah

Program Riset dan Inovasi Daerah merupakan program prioritas baru Pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar. Program ini diarahkan untuk memperkuat peran riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah, meningkatkan daya saing daerah serta mendorong pemanfaatan hasil inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Indikator kinerja *Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan* digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemanfaatan hasil inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah maupun pemangku kepentingan lainnya. Indikator ini diharapkan dapat menggambarkan sejauh mana inovasi yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tahap pengembangan, tetapi juga diimplementasikan secara nyata.

Namun demikian, pada tahun pelaporan ini, baseline kinerja dan anggaran, serta target, realisasi, dan capaian indikator belum dapat disajikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Program Riset dan Inovasi Daerah merupakan program baru sehingga belum memiliki data historis sebagai dasar penetapan baseline kinerja.
2. Terjadinya perubahan nomenklatur perangkat daerah dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar yang masih dalam tahap penyesuaian kelembagaan dan tata kelola.
3. Sistem pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data kinerja terkait inovasi daerah masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan.

Sehubungan dengan kondisi tersebut, pengukuran capaian kinerja terhadap indikator ini akan mulai dilakukan secara bertahap setelah tersedianya data yang valid dan terintegrasi. Pemerintah Kota Makassar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah berkomitmen untuk memperkuat sistem pendataan dan evaluasi kinerja inovasi daerah, sehingga pada periode pelaporan berikutnya indikator ini dapat disajikan secara lengkap, terukur dan akuntabel.

13. Sasaran "Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan"

Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan memilikli 1 (satu) program yaitu Program Pengembangan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui dua indikator kinerja, yaitu Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara serta Rata-rata Lama Tinggal.

Tabel II.72
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline	2025		
			2024	Target	Realisasi	Capaian
MISI 4		Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata				
Meninhgkatnya Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara	5.619.596 orang	5.626.657 orang	6.268.077 orang	111,40
		Rata- Rata Lama Tinggal	1,5 hari	1,63 hari	2,47	151,53
Rata- Rata Capaian						**131,47**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Makassar

Indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara pada Tahun 2024 tercatat sebesar 5.619.596 orang. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 5.626.657 orang, dan realisasi mencapai 6.268.077 orang dengan capaian 111,40%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak hanya meningkat dibandingkan baseline, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan ini mencerminkan

semakin pulih dan berkembangnya sektor pariwisata daerah serta meningkatnya daya tarik Kota Makassar sebagai destinasi wisata.

Selanjutnya, indikator Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan pada Tahun 2024 sebesar 1,5 hari. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 1,63 hari dengan realisasi mencapai 2,47 hari, dan capaian 151,53%. Jika dibandingkan dengan baseline, terjadi peningkatan yang sangat signifikan yang menunjukkan bahwa wisatawan tidak hanya datang dalam jumlah lebih banyak, tetapi juga tinggal lebih lama. Hal ini mengindikasikan peningkatan kualitas destinasi, layanan pariwisata serta keberagaman atraksi yang mampu menarik wisatawan untuk memperpanjang masa kunjungan.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sebesar 131,47% menunjukkan bahwa kinerja sektor pariwisata berada pada kategori sangat tinggi. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas strategi pengembangan pariwisata daerah, termasuk promosi destinasi dan penyelenggaraan event serta penguatan infrastruktur dan layanan pendukung pariwisata.

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata bertujuan untuk meningkatkan daya saing destinasi pariwisata daerah melalui pengembangan daya tarik wisata, peningkatan kualitas destinasi, serta penguatan promosi pariwisata guna mendorong pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan. Kinerja program ini diukur melalui indikator persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Tabel II.73
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	24,88	5	11,54	230,80	Rp7.169.466.121	Rp6.334.816.580	88,36

Sumber : LKjIP Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 5%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 11,54%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 230,80%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan, yang mengindikasikan bahwa upaya peningkatan daya tarik destinasi pariwisata serta kegiatan promosi yang dilakukan telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp7.169.466.121, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.334.816.580 atau tingkat penyerapan 88,36%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar

230,80%, maka menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan jauh melampaui target yang telah ditetapkan dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif terkendali. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan kinerja yang sangat efektif sekaligus efisien dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Tingginya capaian kinerja tersebut juga menunjukkan bahwa berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata, seperti pengembangan fasilitas destinasi, penyelenggaraan event pariwisata, serta peningkatan promosi dan pemasaran destinasi, mampu mendorong peningkatan minat kunjungan wisatawan secara signifikan. Selain itu, meningkatnya mobilitas masyarakat dan pemulihan aktivitas pariwisata turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan kunjungan wisatawan.

Secara keseluruhan, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, dimana capaian indikator tidak hanya memenuhi target yang ditetapkan tetapi juga melampauinya secara signifikan. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja program melalui penguatan pengelolaan destinasi, peningkatan kualitas layanan pariwisata, serta pengembangan inovasi promosi yang lebih adaptif terhadap perkembangan sektor pariwisata.

1. Capaian Kinerja

   Capaian = (Realisasi / Target) × 100
   = (11,54 / 5) × 100
   = 230,80%

   Berdasarkan kategori evaluasi kinerja SAKIP:

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Sehingga capaian 230,80% termasuk kategori Sangat Berhasil.

2. Analisis Efisiensi Kinerja

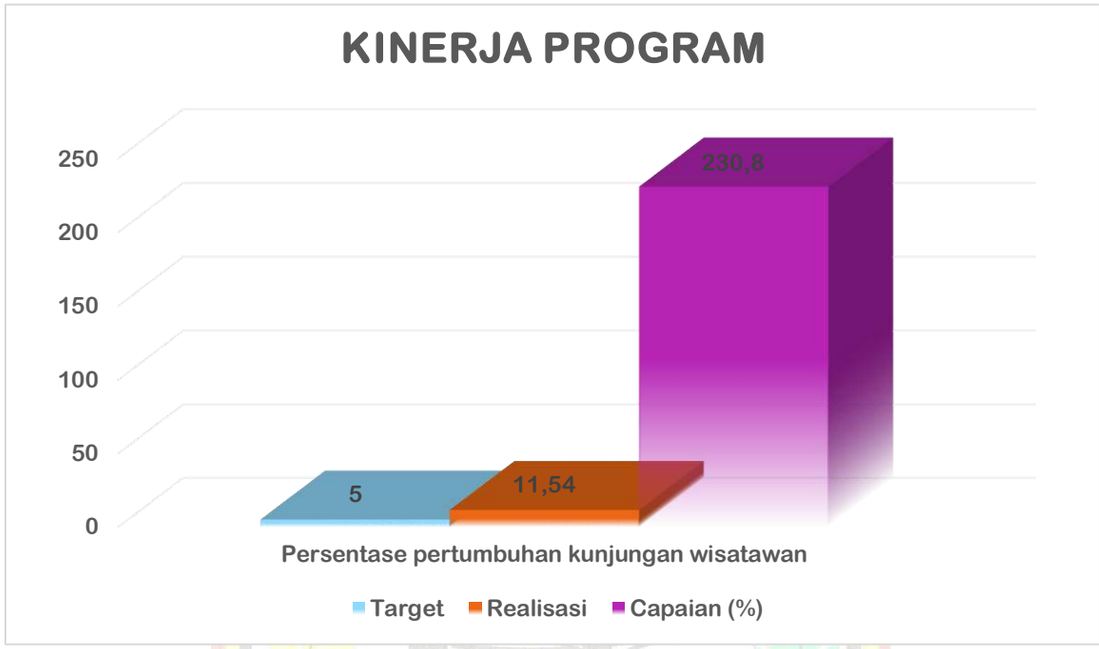
   Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran
   = 230,80 / 88,36
   = 2,61

   Interpretasi:

- Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan sangat efisien.

Ringkasan Analisis Program

Grafik II.17
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Interpretasi Grafik

Grafik menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan mencapai 11,54% dari target yang ditetapkan sebesar 5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 230,80%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata mampu melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa berbagai upaya pengembangan destinasi, peningkatan fasilitas pendukung pariwisata, serta kegiatan promosi dan pemasaran pariwisata yang dilaksanakan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Faktor Pendorong:

1. Pengembangan dan penataan destinasi wisata yang semakin baik sehingga meningkatkan kenyamanan dan daya tarik bagi wisatawan.
2. Pelaksanaan promosi dan pemasaran pariwisata melalui berbagai media, baik secara langsung maupun digital, sehingga meningkatkan minat kunjungan wisatawan.
3. Penyelenggaraan event atau festival pariwisata yang mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

4. Peningkatan fasilitas dan infrastruktur pendukung pariwisata, seperti aksesibilitas menuju destinasi wisata, sarana prasarana, dan amenitas wisata.
5. Kerja sama dengan pelaku industri pariwisata, seperti pengelola destinasi, komunitas wisata, dan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan paket wisata.

Faktor Penghambat:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana di beberapa destinasi wisata, yang dapat mempengaruhi kenyamanan wisatawan.
2. Aksesibilitas menuju beberapa lokasi wisata yang masih terbatas, terutama pada destinasi yang berada jauh dari pusat kota Makassar.
3. Keterbatasan anggaran untuk pengembangan destinasi secara menyeluruh, termasuk dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas wisata.
4. Promosi destinasi wisata yang belum menjangkau pasar yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
5. Faktor eksternal, seperti kondisi cuaca, kondisi ekonomi, atau perubahan tren wisata yang dapat mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan kualitas dan pengelolaan destinasi wisata agar lebih menarik, aman, dan nyaman bagi wisatawan.
2. Memperkuat promosi pariwisata melalui media digital dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti agen perjalanan dan komunitas wisata.
3. Mendorong penyelenggaraan event pariwisata secara berkelanjutan untuk menarik lebih banyak wisatawan.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan infrastruktur dan aksesibilitas menuju destinasi wisata.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dan pelaku usaha lokal dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata.

14. Sasaran "Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya"

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya memiliki 2 (dua) indikator yaitu Persentase Penigkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda dan Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dilestarikan. Sasaran ini juga didukung dengan 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kebudayaan dan Program Pengembangan Kesenian.

Tabel II.74
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 4		Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata				
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda (%)	33,33	13,33	13,33	100
		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan (%)	72	16,66	19,44	116,69
Capaian Ratai- Rata						**108,34**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025- 2029 dan LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Makassar

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata - rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{100\% + 116{,}69\%}{2} = 108{,}345\%$$

Indikator Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda pada Tahun 2024 tercatat sebesar 33,33%. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 13,33% terealisasi 13,33% dengan capaian 100%. Secara capaian target, indikator ini telah terpenuhi secara optimal. Namun, jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, terlihat adanya penurunan nilai persentase yang mengindikasikan bahwa laju penambahan karya budaya terdaftar pada Tahun 2025 tidak setinggi tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan objek budaya yang siap didaftarkan atau proses verifikasi yang lebih selektif.

Sementara itu, indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan pada Tahun 2024 sebesar 72%. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 16,66% dengan realisasi 19,44% dan capaian 116,69%. Secara capaian terhadap target, indikator ini menunjukkan kinerja yang melampaui target. Namun jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan dan dapat mengindikasikan adanya perubahan metode pengukuran, cakupan indikator atau penyesuaian kebijakan dalam penetapan target.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sebesar 108,34% menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini tergolong sangat baik dalam hal pencapaian target. Akan tetapi, jika ditinjau dari perbandingan dengan baseline Tahun 2024, terdapat kecenderungan penurunan nilai indicator.

Program Pengembangan kebudayaan

Pada Program Pengembangan Kebudayaan, indikator *Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan* menunjukkan capaian kinerja yang

sangat melampaui target. Dari target sebesar 100%, realisasi mencapai 142,86%, atau terdapat kelebihan capaian sebesar 42,86 poin persentase. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pengembangan kebudayaan jauh lebih tinggi dari yang direncanakan.

Capaian tersebut tidak terlepas dari meningkatnya antusiasme masyarakat, efektivitas strategi pelibatan komunitas, serta optimalnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk komunitas budaya dan lembaga lokal. Selain itu, pemanfaatan pendekatan partisipatif dan kegiatan berbasis kearifan lokal terbukti mampu mendorong partisipasi yang lebih luas.

Tabel II.75
Analisis Kinerja Program Pengembangan Kebudayaan

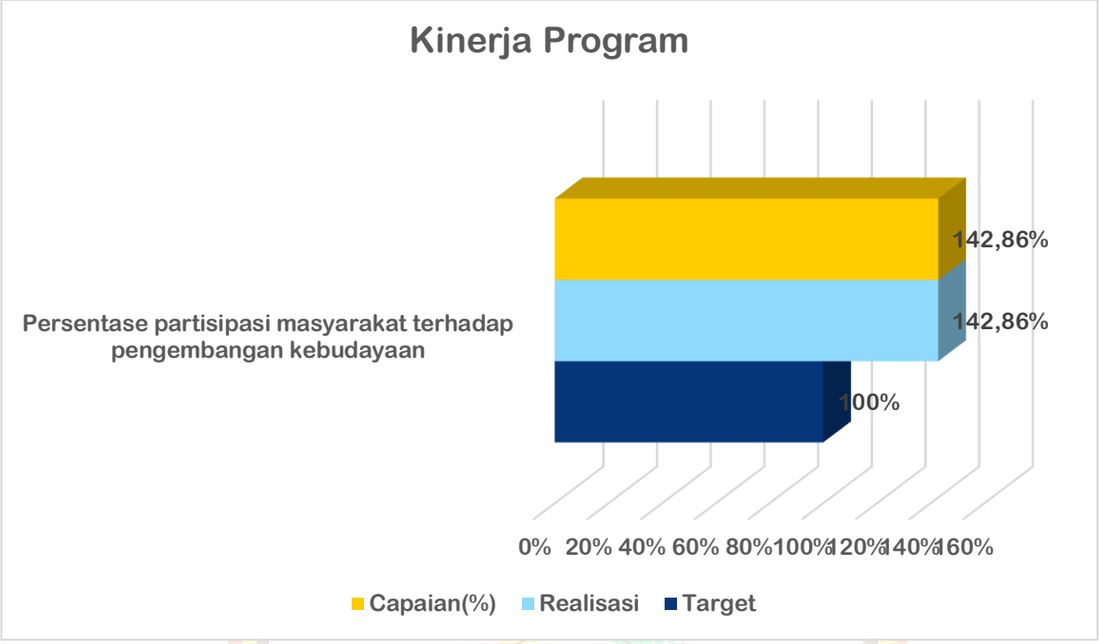
Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase partisipasi masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	100	142,86	142,86	6.236.581.800	6.029.360.951	96,68	1,48	Sangat Efektif

Sumber : LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025

Dari sisi efisiensi penggunaan sumber daya, realisasi anggaran tercatat sebesar Rp6.029.360.951 atau 96,68% dari pagu anggaran Rp6.236.581.800. Dengan tingkat serapan anggaran yang tidak mencapai 100%, namun mampu menghasilkan capaian kinerja yang jauh melampaui target, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program ini efisien dan memberikan nilai guna yang tinggi (value for money).

Efisiensi ini menunjukkan bahwa output yang dihasilkan tidak sepenuhnya bergantung pada besarnya anggaran, melainkan juga pada kualitas perencanaan program, ketepatan sasaran kegiatan, serta efektivitas pelaksanaan di lapangan. Dengan kata lain, terdapat rasio kinerja terhadap penggunaan anggaran yang sangat baik, di mana peningkatan capaian sebesar 142,86% diperoleh dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif terkendali.

Grafik II.18
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Faktor Penghambat :

1. Basis data komunitas seni, maestro, serta pelaku budaya di Kota Makassar masih memerlukan pembaruan dan pemutakhiran secara berkala, sehingga proses pembinaan dan fasilitasi terkadang belum tepat sasaran.
2. Ketersediaan ruang pertunjukan, ruang latihan, serta fasilitas penunjang kegiatan budaya masih belum memadai untuk menampung seluruh aktivitas komunitas budaya di Kota Makassar.

Faktor Pendorong :

1. Adanya kolaborasi era antara Dinas Kebudayaan dengan instansi terkait seperti balai pelestarian kebudayaan (BPK), perguruan tinggi, Dinas Pariwisata dan media local dalam melakukan kursi objek pendataan dan membangun kepercayaan komunitas kebudayaan dan tokoh Masyarakat demi kesuksesan pendataan
2. Tersediannya Narasumber dari Tenaga ahli dan praktisi yang kompeten relevan dengan kebutuhan budaya local makassar untuk mengisi materi pembinaan
3. Adanya kerjasama tim yang baik untuk pencapaian target

Tindak Lanjut :

1. Melakukan sosialisasi dan edukasi secara komprehensif terkait manfaat dan tujuan pendataan objek tradisi budaya yang dilakukan secara rutin kepada tokoh Masyarakat, pemangku adat, dan komunitas budaya
2. Perlunya secara intensif pendataan Objek terkait kekayaan budaya
3. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung Pelestarian dan Pemajaun Kebudayaan.

Program Pengembangan Kesenian tradisional

Program ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional sebagai warisan budaya yang memiliki nilai sosial, edukatif, dan ekonomi bagi masyarakat. Indikator kinerja utama program ini adalah persentase kesenian tradisional yang berhasil dilestarikan dan dikembangkan.

Tabel II.76
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Kesenian Tradisional Yang Berhasil Dilestarikan Dan Dikembangkan.	N/A	20	18	90	Rp4.228.846.200	Rp4.204.096.240	99,41

Sumber : LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025

1. Capaian Kinerja
   Capaian = (Realisasi ÷ Target) × 100
   = (18 ÷ 20) × 100
   = 90%

Berdasarkan kategori penilaian kinerja dalam evaluasi SAKIP:

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Sehingga capaian 90% termasuk kategori Berhasil.

Program berhasil mencapai 90% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar kesenian tradisional telah dilestarikan dan dikembangkan, namun masih ada ruang untuk peningkatan agar target 100% dapat tercapai.

Tabel II.77
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Kesenian tradisional

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	20	18	90	4.228.846.200	4.204.096.240	99,41	0,97	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2025

2. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Realisasi anggaran sebesar Rp 4.204.096.240 dari pagu anggaran Rp4.228..846.200 atau 99,41% dari total alokasi menunjukkan penggunaan dana yang sangat efisien. Program ini mampu memaksimalkan setiap rupiah yang dialokasikan untuk pelestarian kesenian tradisional.

3. Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 90 ÷ 99,41

= 0,9

Interpretasi:

- Rasio 0,9-1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja yang dihasilkan, sehingga pelaksanaan program ini dapat dikategorikan efisien.

Faktor Penghambat :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia pada bidang Seni budaya (Penata tari, Musik, sastra, dll
2. Kurangnya regenerasi pelaku seni
3. Belum adanya SDM di bidang kesenian yang sesuai disiplin ilmunya seperti lulusan seni musik, seni rupa, seni tari dan perfilman sehingga perlu adanya formasi untuk lulusan kesenian.

Faktor Pendukung :

1. Dukungan walikota makassar dalam pelaksanaan kegiatan
2. Eksistensi seniman dan budayawan local dalam mempertahankan kebudayaan local di beberapa kelurahan di kota Makassar.

Tindak Lanjut :

1. Perlunya Pembinaan Sumber Daya Manusia pada bidang Seni budaya khusunya pelatihan seni tari

2. Perlunya Membangun kemitraan budayawan, Seniman dalam berpartisipasi pelaksanaan kegiatan Dinas Kebudayaan.
3. Perlunya Menyiapkan Sarana dan prasarana pertunjukan seni budaya di Kota Makassar.

15. Sasaran "Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif"

Dalam rangka pencapaian misi 5 yaitu Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing sert Menegakkan Ketertiban Umum maka ditetapkan Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif yang diukur melalui dua indikator utama yaitu Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif dan Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital.

Tabel II.78
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 4		Mengembangkan Pusat Inovasi, Seni, Budaya dan Pariwisata				
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kretatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif	4.220 industri	4.515 industri	5.081 industri	112,54
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital	N/A	12,44	10,73	86,25
Capaian Rata- Rata						**99,40**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LKjIP Dinas Pariwisata Kota Makassar

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata-rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{112{,}54\% + 86{,}25\%}{2} = 99{,}40\%$$

Pada indikator Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif, target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 4.515 industri dengan realisasi mencapai 5.081 industri, sehingga diperoleh capaian sebesar 112,54%. Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah pelaku industri ekonomi kreatif mengalami pertumbuhan yang signifikan dan melampaui target yang ditetapkan dan mengindikasikan tingginya minat dan perkembangan sektor ekonomi kreatif di daerah. Dengan realisasi Baseline Tahun 2024 sebanyak 4.220 industri aktif, realisasi Tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan baseline, yaitu bertambah sebanyak 861 industri aktif. Capaian ini mengindikasikan bahwa sektor ekonomi kreatif di Kota Makassar berkembang pesat, baik dari sisi jumlah pelaku usaha maupun aktivitas ekonomi yang dihasilkan.

Sementara itu, indikator Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital tidak memiliki data baseline pada Tahun 2024 (N/A), sehingga perbandingan langsung tidak dapat dilakukan. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar

12,44% dengan realisasi sebesar 10,73% dan capaian 86,25%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adopsi digital di kalangan pelaku ekonomi kreatif masih belum optimal dan belum mencapai target yang diharapkan.

$$Persentase\ Industri\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ memanfaatkan\ platform\ digital = \frac{Jumlah\ Industri\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ memanfaatkan\ Platform\ Digital}{Jumlah\ Industri\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ Aktif} x100\%$$

$$Persentase\ Industri\ Ekonomi\ Kreatif\ yang\ memanfaatkan\ platform\ digital = \frac{545}{5.081} x100\% = 10{,}73\%$$

Secara keseluruhan, rata-rata capaian sebesar 99,40% menunjukkan bahwa kinerja pada sasaran ini berada dalam kategori baik dengan keberhasilan utama pada peningkatan jumlah industri kreatif. Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bertujuan untuk meningkatkan perlindungan serta pemanfaatan kekayaan intelektual oleh pelaku ekonomi kreatif sebagai upaya memperkuat daya saing produk kreatif daerah. Kinerja program ini diukur melalui indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual.

Tabel II.79
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	2,2	2,75	2,81	102,34	Rp11.672.291.807	Rp10.967.036.949	93,96

Sumber : LKjIP Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target indikator ditetapkan sebesar 2,75%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 2,81%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,34%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program berhasil mencapai bahkan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran dan partisipasi pelaku ekonomi kreatif dalam melakukan pendaftaran serta perlindungan kekayaan intelektual atas produk kreatif yang dihasilkan.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp11.672.291.807, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.967.036.949 atau tingkat penyerapan 93,96%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 102,34%, maka menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan tingkat pemanfaatan anggaran yang relatif optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efektif dalam menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan target yang direncanakan.

Pencapaian tersebut juga mencerminkan bahwa berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendorong pemanfaatan kekayaan intelektual, seperti sosialisasi, fasilitasi pendaftaran HKI, serta pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif, telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha kreatif yang memiliki perlindungan hukum atas produk dan karya yang dihasilkan.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual menunjukkan kinerja yang baik dan relatif efektif, dimana target indikator kinerja dapat tercapai dengan dukungan pemanfaatan anggaran yang cukup optimal. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan literasi kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif serta memperluas fasilitasi pendaftaran HKI agar pemanfaatan kekayaan intelektual dapat semakin berkembang dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha kreatif di daerah.

Tabel II.80
Analisis Kinerja Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2,75	2,81	102,34	11.672.291.807	10.967.036.949	93,96	1,09	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

   Capaian = (Realisasi ÷ Target) × 100

   = (2,81 ÷ 2,75) × 100

   = 102,34%

Berdasarkan kategori penilaian kinerja dalam evaluasi SAKIP:

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil

Persentase Capaian	Kategori
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Sehingga capaian 102,34% termasuk kategori Berhasil.

2. Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 102,34 ÷ 93,96

= 1,09

Interpretasi:

- Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan cukup efisien.

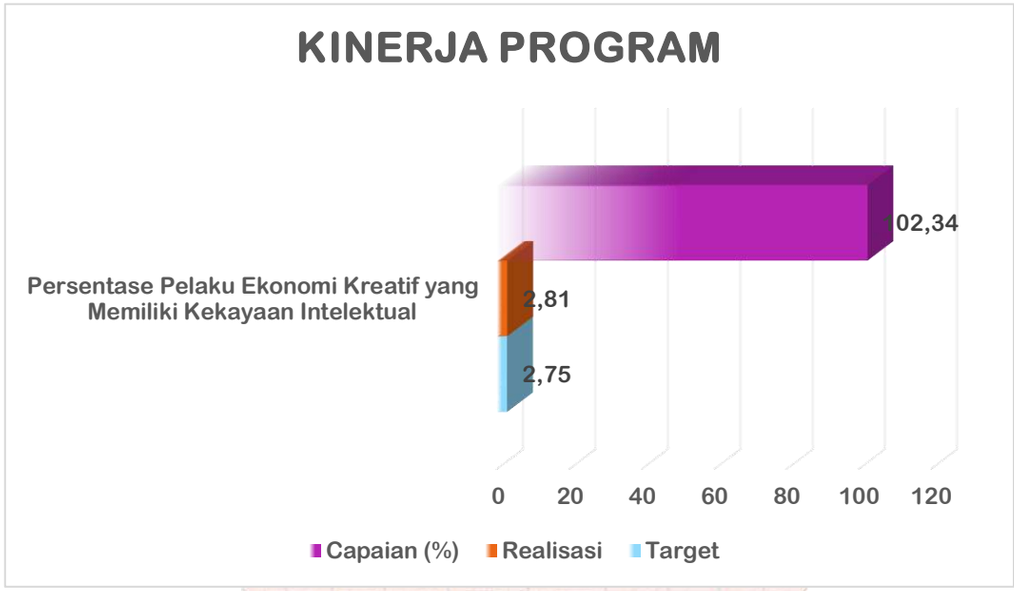
Ringkasan Analisis Program

Aspek Analisis	Hasil
Capaian Kinerja	102,34%
Penyerapan Anggaran	93,96%
Rasio Efisiensi	1,09
Kategori Kinerja	Berhasil

Kesimpulan Analisis

Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 102,34% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 93,96% menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual telah berjalan secara efektif, dimana target kinerja dapat tercapai bahkan sedikit melampaui target dengan pemanfaatan anggaran yang relatif optimal.

Grafik II.19
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Grafik menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual mencapai 2,81% dari target yang ditetapkan sebesar 2,75%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,34%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu mencapai bahkan sedikit melampaui target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, sosialisasi perlindungan HKI, serta pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah pelaku usaha kreatif yang memiliki perlindungan hukum atas produk atau karya yang dihasilkan.

Faktor Pendorong:

1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi mengenai HKI yang mendorong pelaku usaha untuk mendaftarkan hak cipta, merek, dan bentuk kekayaan intelektual lainnya.
2. Fasilitasi dan pendampingan proses pendaftaran HKI dari pemerintah daerah kepada pelaku ekonomi kreatif sehingga proses pengurusan menjadi lebih mudah.
3. Dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif, termasuk perlindungan terhadap hasil karya kreatif.
4. Meningkatnya perkembangan sektor ekonomi kreatif yang mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan legalitas produk melalui kepemilikan HKI.

Faktor Penghambat:

1. Masih terbatasnya pemahaman sebagian pelaku ekonomi kreatif mengenai manfaat HKI, sehingga belum semua pelaku usaha memiliki inisiatif untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya.

2. Proses administrasi pendaftaran HKI yang relatif panjang dan membutuhkan pemahaman teknis tertentu bagi pelaku usaha.
3. Keterbatasan sumber daya dan pendampingan teknis untuk menjangkau seluruh pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor.
4. Sebagian pelaku usaha masih fokus pada produksi dan pemasaran, sehingga aspek perlindungan kekayaan intelektual belum menjadi prioritas utama.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya HKI kepada pelaku ekonomi kreatif di berbagai subsektor.
2. Melakukan pendampingan teknis secara berkelanjutan dalam proses pengajuan dan pengurusan HKI.
3. Memperkuat kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementrian Hukum dan HAM yang menangani pendaftaran HKI dan komunitas ekonomi kreatif.
4. Mendorong integrasi program pengembangan ekonomi kreatif dengan perlindungan HKI, sehingga setiap produk kreatif yang dihasilkan memiliki legalitas dan perlindungan yang jelas.

16. Sasaran "Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah

Dalam rangka pelaksanaan Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing dan Menegakkan Ketertiban Umum; ditetapkan tujuan Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif dengan Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah.

Tabel II.81
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 5		Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing, serta Menegakkan Ketertiban Umum				
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Berintegritas dan Adaptif	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	69,69	69,75	68,94	98,84
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,01	4,02	N/A	N/A
		Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	87,00	87,48	84,2	96,25
Rata- Rata Capaian						**97,54**

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, Sekretariat Daerah Bagian Organisasi, Diskominfo dan Inspektorat Kota Makassar

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata-rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{98{,}84\% + 99{,}75\% + 96{,}25\%}{2}$$

$$= 84{,}92\%$$

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui tiga indikator kinerja. Pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah, target Tahun 2025 sebesar 69,75 dengan realisasi sebesar 68,94 sehingga tingkat capaian mencapai 98,84%. Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024 yang terealisasi 69,69, terjadi penurunan yang menunjukkan perlunya penguatan tata Kelola pemerintahan.

Selanjutnya, pada indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Tahun 2025 tidak dilakukan penilaian sehingga target pada Tahun 2025 yang memiliki target sebesar 4,02 tidak dapat disajikan realisasi dan capaian kinerjanya.

Sementara itu, pada indikator Nilai Monitoring Center of Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Tahun 2024 sebesar 87,00 kemudian pada Tahun 2025 ditargetkan sebesar 87,48 terealisasi sebesar 84,2, sehingga tingkat capaian mencapai 96,25%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan korupsi telah berjalan dengan baik dan mendekati target yang ditetapkan namun menunjukkan adanya penurunan dibandingkan baseline.

Sasaran ini didukung dengan 5 (lima) program prioritas yaitu: Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Penyelenggaraan Pengawasan; Program Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

Program Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah untuk memastikan tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, konsisten, dan terintegrasi sebagai dasar pelaksanaan pembangunan.

Tabel II.82
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Ada	Ada	Ada	100	Rp3.791.105.344	Rp3.305.963.211	87,20

Sumber : Matriks IKU BAPPEDA Kota Makassar Tahun 2025

Capaian kinerja program diukur melalui 3 indikator utama sebagai berikut:

1. Tersedianya Dokumen RPJMD (Perda)

Target: Ada

Realisasi: Ada

Capaian: 100%

Menunjukkan bahwa dokumen RPJMD telah tersedia dan ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : "Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029"

2. Tersedianya Dokumen RKPD (Perkada)

Target: Ada

Realisasi: Ada

Capaian: 100%

Menunjukkan bahwa dokumen RKPD telah tersusun dan ditetapkan sebagai pedoman tahunan pembangunan daerah, yaitu : "Peraturan Wali kota Makassar Nomor 15 tahun 2025 tentang RKPD Tahun 2026; dan Peraturan Wali kota Makassar Nomor 14 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2024 tentang RKPD Tahun 2025"

3. Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD

Target: 100%

Realisasi: 100%

Capaian: 100%

Menggambarkan bahwa program pembangunan telah sepenuhnya selaras antara dokumen jangka menengah (RPJMD) dan dokumen tahunan (RKPD), yaitu : "Terdapat konsistensi Program RPJMD dengan RKPD tahun 2025: Jumlah Program RPJMD : 246, dan Jumah Program RKPD: 246; Hal ini sesuai dengan penyajian dalam SIPD terdapat Konsistensi Program antara perencanaan dan penganggaran"

Analisis Konsolidasi Kinerja

Rata-rata capaian kinerja program:

➞ (100 + 100 + 100) ÷ 3 = 100%

Secara keseluruhan, pelaksanaan program menunjukkan kinerja sangat berhasil, baik dari sisi ketersediaan dokumen maupun konsistensi perencanaan.

Tabel II.83
Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Dokumen RPJMD ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	100%	3.791.105.344	3.305.963.211	87,20%		
Dokumen RKPD ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	100%					
Konsistensi Program RPJMD ke RKPD	100%	100%	100%					
Rata-Rata Kinerja			**100%**	**3.791.105.344**	**3.305.963.211**	**87,20%**	**1,15**	**Sangat Berhasil & Sangat Efisien**

Sumber : LKjIP BAPPEDA Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh:

- Pagu anggaran: Rp3.791.105.344
- Realisasi anggaran: Rp3.305.963.211
- Penyerapan anggaran: 87,20%

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Rata-rata Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 87,20

≈ 1,15

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,15 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana seluruh target kinerja tercapai dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Faktor Pendorong:

a) Dukungan SDM yang berkompetendalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian dan statistik dan penelitian pengembangan serta inovasi.

b) Dukungan anggaran dan sarana prasarana yang memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda.

c) Ketepatan perencanaan dan penetapan target serta sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan dan juga penyelarasan perjanjian kinerja berbasis pohon kinerja.

d) Ketersediaan data-data pendukung dan analisa dalam menetapkan sasaran pembangunan daerah serta perencanaan program dan kegiatan antara Bappeda dengan Perangkat Daerah pengampu Program

e) Optimalisasi Desk Timbal Balik yang dilaksanakan setiap Triwulan.

f) Pengembangan EMONEV sebagai aplikasi untuk pengendalian dari hulu sampai hilir.

g) Koordinasi yang lebih intensif dengan mitra perangkat daerah dalam hal perencanaan dan pengendalian.

Faktor Penghambat:

a) Belum optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah; Hal ini disebabkan karena dinamika pedoman perencanaan dan pengganggaran dari Pemerintah Pusat yang selalu berubah, sehingga proses perencanaan dan penganggaran membutuhkan kecermatan baik dari tatakala maupun substansi.

b) Belum optimalnya penyediaan data bidang urusan SKPD sebagai formula perhitungan kinerja Bappeda.

c) Belum tersedianya Basis Data web Monitoring dan Evaluasi, yang dapat memudahkan dan mempercepat proses pemenuhan data capaian kinerja pemerintahan.

Solusi yang dilakukan:

a) Mendorong kinerja SKPD pengampu program dalam mencapai target yang sudah disepakati dan melakukan desk / diskusi untuk menyamakan persepsi dalam memahami Pedoman Perencanaan Daerah

b) Pendampingan secara menyeluruh dari mulai proses awal penyusunan dokumen perencanaan hingga pelaksanaan MONEV

c) Penajaman Penajaman Pelaksanaan program dan kegiatan urusan bidang SKPD

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penguatan fungsi pengawasan serta percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan. Kinerja program ini diukur melalui indikator persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1.

Tabel II.84
Capaian Kinerja dan Anggaran Program Penyelenggara Pengawasan

Indikator Kinerja	Baseline 2024	Capaian Kinerja 2025			Capaian Anggaran 2025		
		Target	Realisasi	Capaian %	Target	Realisasi	Capaian %
Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	76,21	77,21	74,3	96,23	Rp1.454.943.900	Rp1.021.065.158	70,18

Sumber : LKjIP Inspektorat Kota Makassar Tahun 2025

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 77,21%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 74,30%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 96,23%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sebagian rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum dapat ditindaklanjuti secara optimal pada tahun berjalan.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung dengan pagu anggaran sebesar Rp1.454.943.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.021.065.158 atau tingkat penyerapan anggaran 70,18%. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 96,23%, kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar target kinerja dapat dicapai dengan tingkat penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pagu yang tersedia. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan capaian kinerja yang cukup tinggi dengan pemanfaatan sumber daya yang relatif efisien.

Capaian tersebut juga mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan, pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, serta koordinasi dengan perangkat daerah terkait telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK. Namun demikian, masih terdapat beberapa rekomendasi yang memerlukan waktu penyelesaian lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan perbaikan administrasi, penyempurnaan dokumen pertanggungjawaban, maupun penyelesaian permasalahan teknis lainnya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan menunjukkan kinerja yang cukup baik, dimana capaian indikator mendekati target yang telah ditetapkan dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif efisien. Ke depan, diperlukan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi, peningkatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan agar tingkat tindak lanjut rekomendasi BPK dapat terus meningkat dan mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel II.85
Analisis Kinerja Program Penyelenggara Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	77,21	74,30	96,23	1.454.943.900	1.021.065.158	70,18	1,37	Berhasil

Sumber : LKjIP Inspektorat Kota Makassar Tahun 2025

1. Capaian Kinerja

Capaian = (Realisasi ÷ Target) × 100

= (74,30 ÷ 77,21) × 100

= 96,23%

Kategori capaian kinerja dalam evaluasi SAKIP:

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan demikian, capaian 96,23% termasuk kategori Berhasil.

2. Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 96,23 ÷ 70,18

= 1,37

Interpretasi:

- Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

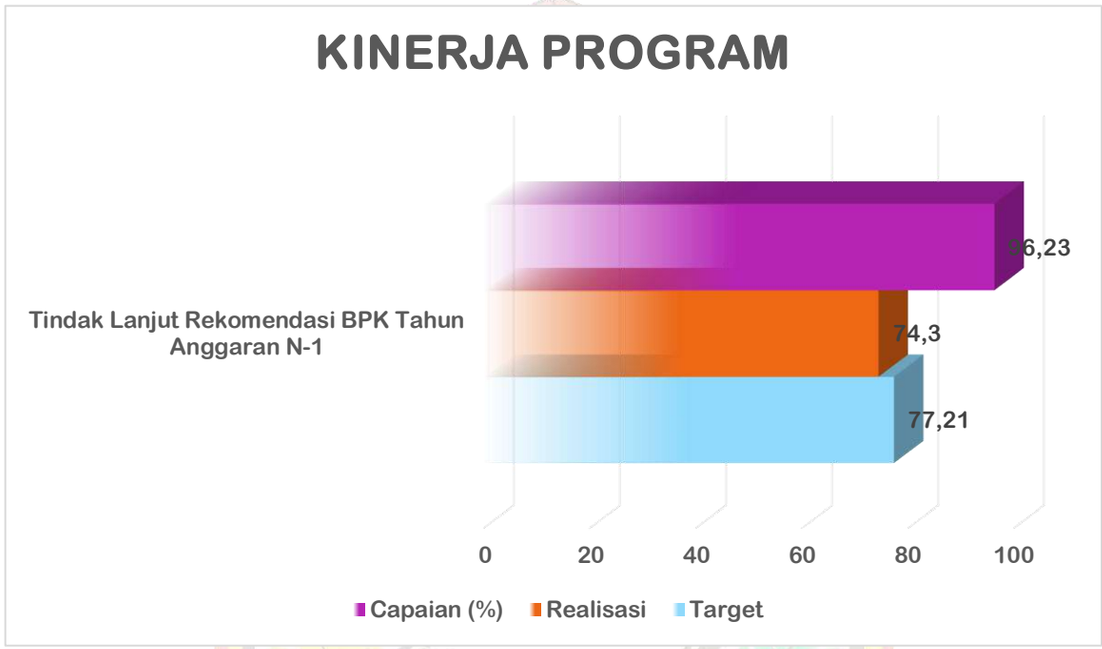
Ringkasan Analisis Program

Aspek Analisis	Hasil
Capaian Kinerja	96,23%
Penyerapan Anggaran	70,18%
Rasio Efisiensi	1,37
Kategori Kinerja	Berhasil

Kesimpulan Analisis

Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 96,23% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 70,18% menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pengawasan mampu menghasilkan kinerja yang baik dengan pemanfaatan anggaran yang relatif efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Grafik II.20
Kinerja Program (Target vs Realisasi vs Capaian)



Grafik menunjukkan bahwa realisasi indikator persentase tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 mencapai 74,30% dari target 77,21%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 96,23%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.

Faktor Pendukung:

1. Pelaksanaan kegiatan Kapabilitas APIP secara berkala;
2. Dukungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP dalam pendampingan penilaian Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kota Makassar.
3. Terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengawal penyelesaian tindak lanjut temuan;
4. Adanya aplikasi Sipakatau (Sistem Informasi Pemuktahiran Data Tindak Lanjut);
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 11 Tahun 2024, Nomor 700.1/3013/SJ, Nomor HK.01.00/SE.3/K/D3/2024 Tanggal 8 Juli 2024 tentang PenguatanAparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah;

6. Dukungan dari pihak Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Pembina APIP dalam penyediaan pedoman terkait pengukuran tingkat maturitas.

Faktor Penghambat:

1. Komitmen SKPD dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum optimal;
2. Jumlah auditor Inspektorat Daerah terbatas dibandingkan banyaknya obyek pengawasan;
3. Masih terdapat temuan lama yang sulit diselesaikan karena penanggung jawab sudah pensiun atau meninggal dunia.

Tindak Lanjut:

1. Meningkatkan pendampingan dan konsultasi pengawasan kepada SKPD lingkup Pemerintah Kota Makassar;
2. Mengoptimalkan penugasan auditor dengan sistem prioritas berdasarkan nilai materialitas dan risiko temuan;
3. Memuktahirkan data tindak lanjut secara electronik melalui aplikasi Sipakatau (Sistem Informasi Pemuktahiran Data Tindak Lanjut) dan melaporkannya kepada pimpinan daerah secara semesteran.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah. Kinerja program ini diukur melalui beberapa indikator yang mencerminkan kualitas pengelolaan belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan anggaran, serta ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan.

Pada indikator persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, target ditetapkan sebesar 29,60 persen dan realisasi yang dicapai juga sebesar 29,60 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja pegawai melalui mekanisme TKD telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pada indikator persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, target yang ditetapkan sebesar 40,58 persen, dengan realisasi sebesar 34,66 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 85 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pengalokasian anggaran untuk pembangunan infrastruktur pelayanan publik telah dilaksanakan secara signifikan, meskipun masih terdapat ruang peningkatan agar proporsi belanja infrastruktur dapat lebih optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selanjutnya, pada indikator persentase realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar, target ditetapkan sebesar 85 persen dan realisasi yang dicapai sebesar 88,40 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengoptimalkan pelaksanaan anggaran pada sektor pelayanan dasar, yang mencerminkan komitmen dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih efektif.

Pada indikator persentase penurunan SiLPA, target ditetapkan sebesar 4,30 persen, sedangkan realisasi mencapai 21,75 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 506 persen. Capaian yang jauh melampaui target ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran daerah, sehingga sisa lebih perhitungan anggaran dapat ditekan secara signifikan melalui optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sementara itu, pada indikator persentase laporan keuangan tepat waktu, target dan realisasi sama-sama mencapai 100 persen, sehingga capaian kinerja sebesar 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah telah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencerminkan meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, terutama pada indikator realisasi belanja pelayanan dasar dan penurunan SiLPA. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara relatif efektif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan proporsi belanja pada sektor infrastruktur pelayanan publik agar pemanfaatan anggaran daerah dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tabel II.86
Analisis Kinerja Program Penyelenggara Pengawasan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	29,60	29,60	100	18.899.051.631	8.590.308.749	45,45	3,94	Sangat Berhasil

Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40,58	34,66	85					
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	85	88,40	104					
Persentase Penurunan SiLPA	4,30	21,75	506					
Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	100	100					

Sumber : LKjIP BPKAD Kota Makassar Tahun 2025

1. Rata-rata Capaian Indikator

Rata-rata capaian dihitung sebagai berikut:

$$\frac{Jumlah\ Capaian\ Indikator}{Banyak\ Capaian\ Indikator}$$

$$\frac{100 + 85 + 104 + 506 + 100}{5}$$

$$= \frac{895}{5}$$

$$= 179\%$$

Rata-rata capaian indikator = 179%

2. Rasio Efisiensi Kinerja Program

Rumus analisis efisiensi:

$$Rasio\ Efesiensi = \frac{Rata - rata\ Capaian\ Kinerja}{Penyerapan\ Anggaran}$$

$$= \frac{179}{45{,}45}$$

$$= 3{,}94$$

Hasil Analisis Efisiensi Program

Komponen	Nilai
Rata-rata capaian indikator	179 %
Penyerapan anggaran	45,45 %
Rasio efisiensi program	3,94

Interpretasi

Rasio efisiensi sebesar 3,94 menunjukkan bahwa capaian kinerja Program Pengelolaan Keuangan Daerah jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program mampu menghasilkan kinerja yang sangat tinggi dengan pemanfaatan sumber daya anggaran yang relatif rendah, sehingga program dapat dikategorikan sangat efisien.

Faktor Pendukung:

1. Komitmen dan dukungan baik dari seluruh SKPD terutama pihak legislatif yang selalu mendampingi sebagai mitra stragtegis.
2. Dilakukan sosialisasi Permendagri No. 14 Tahun2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran belanja dan pendapatan Tahun Anggaran 2026 baik kepada individu maupun organisasi sehingga dalam proses penyusunannya tidak ditemukan kendala- kendala yang baerarti.
3. Asistensi dan evaluasi RKA dilakukan kepada seluruh SKPD untuk melihat kesesuaian rekening belanja pada RKA SKPD
4. Mempercepat proses penyusunan dan asistensi RKA SKPD serta sinergi dengan SKPD untuk menyelesaikan DPA-SKPD sesuai dengann hasil asistensi tin TAPD.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai instrumen dalam mendukung percepatan pengelolaan keuangan daerah.

Faktor Penghambat :

1. Proses Perencanaan dan Anggaran telah mengikuti alur mekanisme sesuai dengan peraturan-perundang undangan;
2. Dukungan dan arahan dari stakeholder yang membidangi keuangan dan perencanaan;
3. Dukungan dari Pejabat struktural, fungsional dan pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Adanya reward dan punisment bagi pengelolah keuangan dan perencanaan dalam pencapaian target dalam bentuk peningkatan nilai TPP, pelatihan dan penundaan anggaran.

Tindak Lanjut:

1. Dilakukan Sosialisasi Permendagri Nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran belanja dan pendapatan Tahun Anggaran 2025, dilakukan kepada seluruh SKPD agar secara individu dan organisasi dapat memahami tentang tata cara penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 sehingga dalam proses penyusunannya tidak ditemukan kendala kendala yang berarti
2. Asistensi dan evaluasi RKA dilakukan kepada seluruh SKPD untuk melihat kesesuaian rekening belanja yang ada pada RKA SKPD;
3. Mempercepat proses penyusunan dan asistensi RKA-SKPD serta mendorong seluruh SKPD untuk segera menyelesaikan DPA-SKPD sesuai dengan hasil asistensi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota Makassar;
4. Pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen dalam mendukung percepatan pengelolaan keuangan daerah;

Program Kepegawaian Daerah

Program Kepegawaian Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengembangan kompetensi serta penataan karir ASN yang berbasis kompetensi. Kinerja program diukur melalui dua indikator utama, yaitu Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya dan Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya.

Pada indikator Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya, target yang ditetapkan sebesar 73%, dengan realisasi sebesar 7,8%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 10,68%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi ASN belum berjalan optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan.

Sementara itu, pada indikator Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya, target sebesar 71%, dengan realisasi sebesar 20%, sehingga capaian kinerja mencapai 28,16%. Meskipun lebih baik dibanding indikator sebelumnya, capaian ini masih berada pada kategori rendah dan menunjukkan bahwa implementasi sistem pengembangan karir berbasis kompetensi belum berjalan secara maksimal.

Tabel II.87
Analisis Kinerja Program Kepegawaiaan Daerah

Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	73	7,8	10,68
Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Kompetensi	%	71	20	28,16
				19,42

Sumber : Matriks IKU BKPSDMD Kota Makassar Tahun 2025

Secara keseluruhan, rata-rata capaian kinerja program berada pada kisaran 19,42%, yang mengindikasikan bahwa Program Kepegawaian Daerah belum berhasil mencapai target kinerja yang ditetapkan dan memerlukan perhatian serius dalam perbaikan perencanaan serta pelaksanaan program.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi anggaran, Program Kepegawaian Daerah didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp3.702.780.760, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.988.645.384 atau tingkat penyerapan sebesar 80,71%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 19,42%, tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan output kinerja yang dihasilkan.

Perhitungan rasio efisiensi kinerja terhadap penggunaan anggaran adalah sebagai berikut:

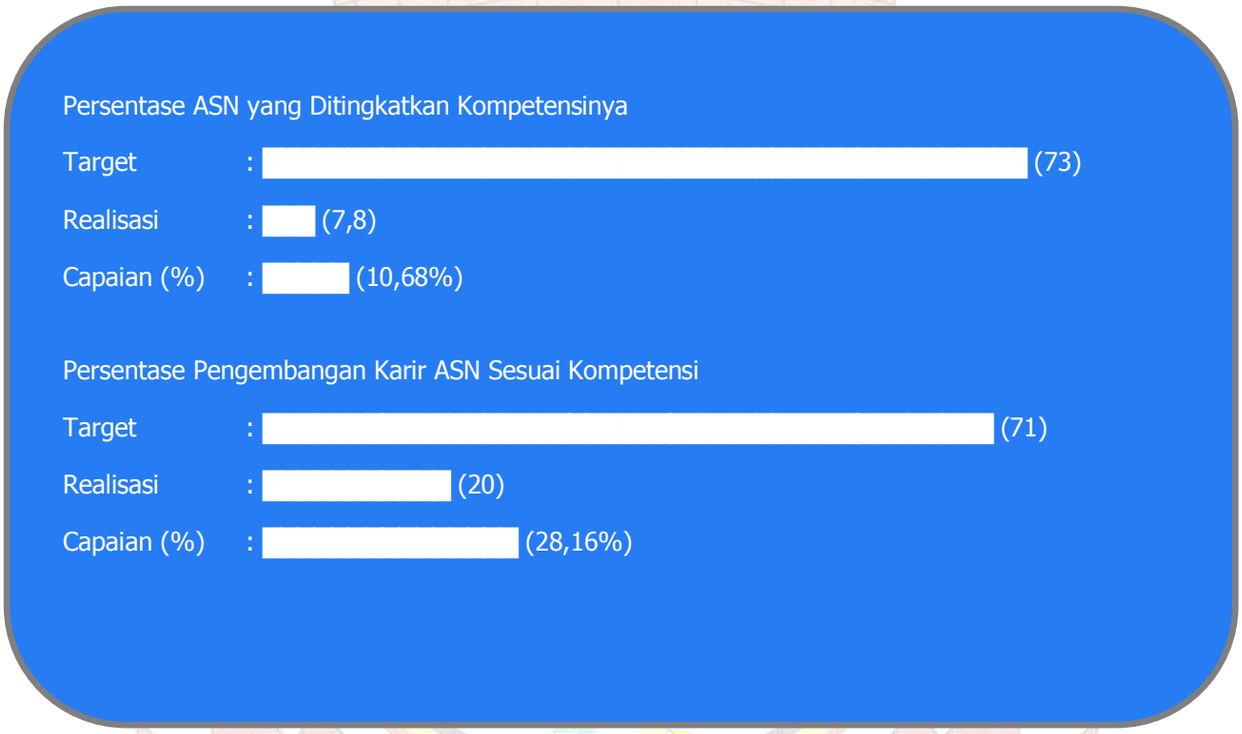
Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja / Penyerapan Anggaran

= 19,42 ÷ 80,71

= 0,24

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,24 menunjukkan bahwa setiap 1% penggunaan anggaran hanya menghasilkan capaian kinerja sebesar 0,24%. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program belum efisien dalam pemanfaatan sumber daya, karena penggunaan anggaran yang relatif tinggi tidak diikuti dengan capaian kinerja yang memadai.

Grafik II.21
Kinerja Program



Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja (%) ÷ Penyerapan Anggaran (%)

Perhitungan:

- Rata-rata capaian kinerja = 19,42%
- Penyerapan anggaran = 80,71%

➞ Rasio Efisiensi =
19,42 ÷ 80,71 = 0,24

Tabel Efisiensi

Uraian	Nilai
Pagu Anggaran	Rp 3.702.780.760
Realisasi Anggaran	Rp 2.988.645.384

Uraian	Nilai
Penyerapan Anggaran	80,71%
Rata-rata Capaian Kinerja	19,42%
Rasio Efisiensi	0,24
Kategori	Tidak Efisien

Kategori Efisiensi

Rasio	Kategori
> 1	Sangat Efisien
0,90 – 1	Efisien
0,70 – 0,89	Cukup Efisien
< 0,70	Tidak Efisien

➞ 0,24 → Tidak Efisien (sangat rendah)

Faktor Pendukung:

1. ASN yang telah mengikuti program pengembangan menunjukkan peningkatan kemampuan teknis, manajerial, maupun sosial kultural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Penempatan pegawai yang semakin selaras dengan latar belakang pendidikan, keahlian, dan hasil pemetaan kompetensi.

Faktor Penghambat :

1. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis fungsional saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan melalui satu pintu oleh BKPSDMD, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan data dan koordinasi. Kondisi ini terjadi karena masih terdapat perangkat daerah (OPD) yang menyelenggarakan atau mengikutsertakan pegawai dalam kegiatan diklat secara mandiri tanpa melaporkan secara resmi kepada BKPSDMD sebagai instansi yang memiliki fungsi pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN. Akibatnya, data keikutsertaan diklat menjadi tidak terintegrasi, tidak akurat, dan berpotensi menimbulkan perbedaan antara data riil di lapangan dengan data yang tercatat secara administratif.
2. Masih rendahnya motivasi individu ASN untuk berkembang, pegawai tidak memiliki dorongan untuk meningkatkan kompetensi dan cenderung bekerja sekedar untuk memenuhi kewajiban tanpa upaya memperdalam kemampuan teknisnya.
3. Belum optimalnya sistem pengembangan sumber daya manusia

Tindak Lanjut:

1. Melakukan penegasan kebijakan bahwa seluruh pelaksanaan dan pelaporan kegiatan diklat harus melalui satu pintu di BKPSDMD. Selain itu, perlu dibangun sistem informasi pengembangan kompetensi yang terintegrasi dan berbasis digital, sehingga setiap OPD wajib menginput dan melaporkan kegiatan diklat secara real time.
2. Melakukan pembinaan dan peningkatan motivasi pegawai salah satunya dengan pemberian penghargaan berbasis kinerja yang dapat mendorong pegawai lebih aktif meningkatkan kompetensinya.
4. Menerapkan manajemen talenta secara terintegrasi, melakukan analisis kebutuhan pelatihan (training need analysis), serta memastikan penempatan pegawai sesuai prinsip "the right man on the right place".
5. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pelatihan, sertifikasi, serta penyediaan infrastruktur pendukung kerja.
6. Memperkuat sosialisasi kebijakan, meningkatkan kompetensi adaptif pegawai, serta membangun budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap perubahan.

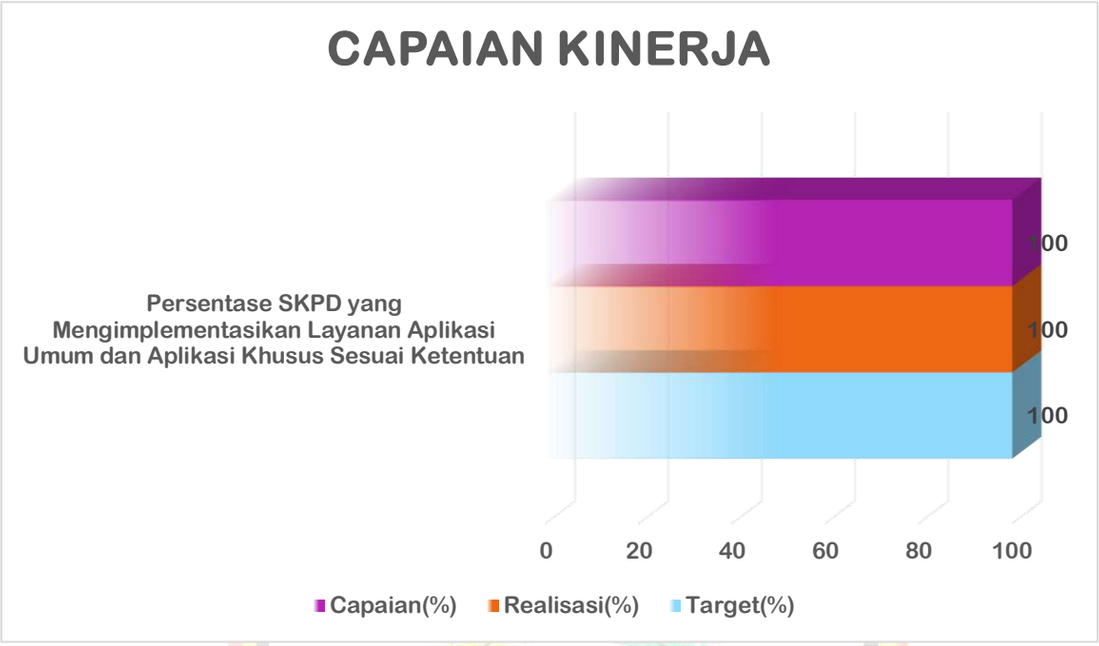
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dilaksanakan dalam rangka mendukung transformasi digital pemerintahan melalui peningkatan implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus pada seluruh perangkat daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator kinerja program ini adalah Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus Sesuai Ketentuan, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh SKPD telah mengimplementasikan layanan aplikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan, yang mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE). Dengan demikian, program ini dapat dikategorikan sangat berhasil dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Grafik II.22
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Namun demikian, capaian 100% ini juga perlu dicermati lebih lanjut dari sisi kualitas implementasi, interoperabilitas antar aplikasi, serta tingkat pemanfaatan oleh pengguna, agar tidak hanya bersifat administratif (compliance), tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kinerja layanan publik.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp43.934.101.806, dengan realisasi anggaran sebesar Rp34.588.068.976 atau tingkat penyerapan sebesar 78,73%.

Tabel II.88
Analisis Kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Aplikasi	100	100	100%	43.934.101.806	34.588.068.976	78,73%	1,27	Sangat Berhasil & Sangat Efisien

Sumber: Matriks IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar Tahun 2025

Untuk mengukur efisiensi, digunakan rasio antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 78,73

= 1,27

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,27 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga program ini dapat dikategorikan sangat efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis elektronik. Capaian 100% implementasi aplikasi menunjukkan bahwa fondasi digitalisasi pemerintahan telah terbentuk secara menyeluruh.

Program ini berkontribusi dalam:

- meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan pemerintahan
- mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan
- mendukung terwujudnya pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis teknologi informasi

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

Perhitungan:

- Capaian Kinerja = 100%
- Penyerapan Anggaran = 78,73%

➞ 100 ÷ 78,73 = 1,27

Tabel Efisiensi

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	100 %
Penyerapan Anggaran	78,73 %
Rasio Efisiensi	1,27
Kategori Efisiensi	Sangat Efisien

Faktor Penghambat:

1. Belanja internet masih ada yang belum terbayarkan karena sementara menunggu rekonsiliasi internet dengan pihak penyedia.
2. Beberapa sub kegiatan direncanakan terlaksana pada triwulan ke III dan IV sesuai dengan anggaran kas.
3. Belum ditunjuknya pihak auditor eksternal sehingga kegiatan Audit TIK Eksternal belum terlaksana.
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berbenturan dengan agenda prioritas lainnya di triwulan II.
5. Pengurangan anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya belanja modal, pada kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P).

Faktor Pendorong:

1. Infrastruktur TIK yang terorganisir dengan baik membantu menyediakan akses internet yang konsisten untuk mendukung
2. layanan publik.
3. Sumber Daya SDM dan tenaga ahli yang kompeten untuk mendukung Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Sudah Cukup Memadai
4. Ketersediaan dokumen perencanaan pengadaan KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
5. Telah dilakukan perikatan kontrak dengan Rekanan Penyedia Barang dan Jasa.
6. Ketersediaan anggaran yang memadai untuk realisasi belanja.

Tindak Lanjut:

1. Belanja internet masih ada yang belum terbayarkan karena sementara menunggu rekonsiliasi internet dengan pihak penyedia.
2. Beberapa sub kegiatan direncanakan terlaksana pada triwulan ke III dan IV sesuai dengan anggaran kas.
3. Belum ditunjuknya pihak auditor eksternal sehingga kegiatan Audit TIK Eksternal belum terlaksana.
4. Jadwal pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penerapan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) berbenturan dengan agenda prioritas lainnya di triwulan II.

Pengurangan anggaran Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, khususnya belanja modal, pada kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P).

17. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat"

Dalam rangka pelaksanaan Misi 5: Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing, serta Menegakkan Ketertiban Umum, ditetapkan sasaran meningkatnya kualitas keamanan masyarakat dengan indikator Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani dan didukung 2 (dua) program yaitu Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel II.89
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 5		Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing, serta Menegakkan Ketertiban Umum				
Meningkatnya Kualitas Inovasi Inovasi Daerah	Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani	54,03	55,03	43,90	79,77

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{43{,}90}{55{,}03} x100\% = 79{,}77\%$$

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani. Pada Tahun 2025, target ditetapkan sebesar 55,03% sementara realisasi sebesar 43,90% dengan capaian 79,77%.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja penanganan tindak kriminal belum mencapai target yang telah ditetapkan, begitu pun jika dibandingkan dengan realisasi baseline Tahun 2024 yang sebesar 54,03. Rendahnya capaian ini mengindikasikan masih terdapat berbagai kendala dalam optimalisasi penanganan kasus kriminal, baik dari aspek sumber daya, koordinasi maupun sistem penanganan yang belum sepenuhnya efektif dilakukan pihak keamatan dan Polsek setempat.

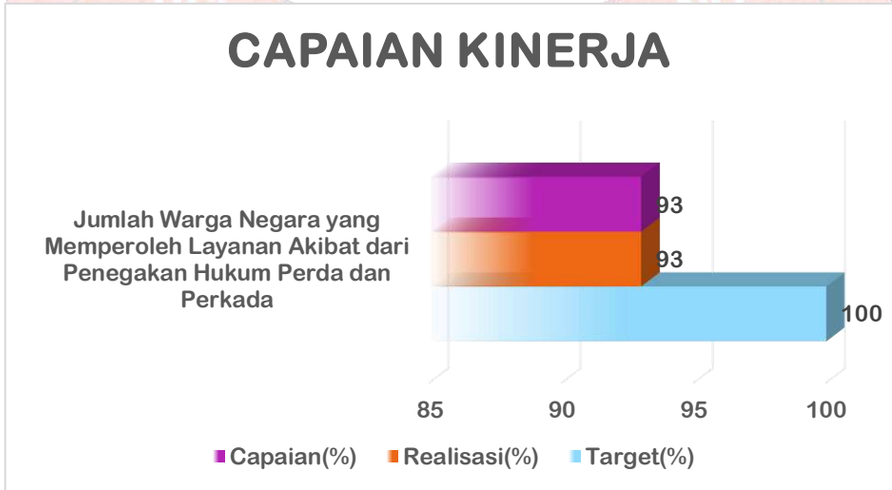
Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan dalam rangka menjamin terciptanya kondisi masyarakat yang tertib, aman dan kondusif melalui penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Indikator kinerja program ini adalah Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 93%, sehingga capaian kinerja berada pada 93%.

Secara umum, program ini dapat dikategorikan berhasil, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai target kinerja secara penuh.

Grafik II.23
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh pagu sebesar Rp28.362.085.143, dengan realisasi anggaran sebesar Rp26.652.637.945 atau tingkat penyerapan sebesar 93,97%.

Tabel II.90
Analisis Kinerja Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat Penegakan Perda/Perkada	100	93	**93%**	28.362.085.143	26.652.637.945	**93,97%**	**0,99**	**Efisien & Berhasil**

Sumber: Matriks IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar Tahun 2025

Untuk mengukur efisiensi, dilakukan perhitungan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 93 ÷ 93,97

≈ 0,99

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	93 %
Penyerapan Anggaran	93,97 %
Rasio Efisiensi	0,99
Kategori Efisiensi	Efisien

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,99 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan hampir sebanding dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga program ini dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Capaian sebesar 93% menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan ketertiban masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan program, diharapkan dapat terwujud kondisi masyarakat yang lebih tertib, patuh terhadap regulasi, serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi.

Faktor pendukung:

a) Tersedianya fasilitas kendaraan untuk mengadakan patroli wilayah untuk peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

b) Adanya patroli terpadu yang biasa dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan.

c) Giatnya Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan Sosialisasi Kewaspadaan Dini terhadap Potensi Konflik.

Faktor Penghambat:

a) Kurangnya personil yang akan bertugas untuk mengawasi wilayah jika dibagi perwilayah.

b) Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan pengawasan keamanan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan:

a) Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antara Instansi terkait dalam rangka penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan).

b) Meningkatkan fungsi anggota Satlinmas dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum, meningkatkan kualitas SDM Anggota Satlinmas, Mengadakan fasilitas bagi Anggota Satlinmas untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dan menambah anggaran dalam program perencanaan bidang pembinaan perlindungan masyarakat.

c) Melakukan Sinergitas dan kerjasama antara Instansi terkait dalam rangka pemantauan wilayah untuk mencapai Kota Makassar bebas Konflik antar warga.

d) Melakukan Patroli rutin wilayah di setiap kecamatan, Sosialisasi dan Pendekatan Persuasif Kepada PK5 yang melanggar Perda.

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki indikator kinerja Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan yang Dapat Diselesaikan. Berdasarkan data gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang diperoleh dari Kantor Kepolisian Sektor (POLSEK) Kecamatan terkait jumlah kasus gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan selama Tahun 2025.

Tabel II.91
Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan

NO.	KECAMATAN	KINERJA TAHUN 2025 (%)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Biringkanaya	90	100	111,11
2	Bontoala	90	90	100
3	Mariso	90	89,52	99,47
4	Mamajang	45	85,74	190,53
5	Makassar	90	81,83	90,92
6	Manggala	100	59,06	59,06

7	Rappocini	90	88	97,78
8	Tamalate	90	100	111,11
9	Tallo	90	90	100
10	Tamalanrea	90	90	100
11	Ujung Pandang	90	71	78,89
12	Ujung Tanah	100	100	100
13	Panakkukang	100	75	75
14	Wajo	90	81,83	90,92
15	Kepulauan Sangkarrang	90	81	90
RATA- RATA		**89**	**85,532**	**96,103**

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan nilai capaian rata- rata dari 15 kecamatan di lingkup Kota Makassar dengan target kinerja 89% yang terealisasi sebesar 85,532% sehingga dapat dihitung capaian kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata- Rata Capaian Kinerja Kecamatan} = \frac{\text{Rata- rata realisasi kinerja}}{\text{Rata- rata target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{85{,}532}{89} \times 100\%$$

$$= 96{,}103\%.$$

Tabel II.92
Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja	2024			2025		
	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Di Selesaikan	100%	68%	68	89	85,532	96,103

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja selama periode Tahun 2024–2025, capaian indikator Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan menunjukkan dinamika fluktuatif dengan kecenderungan membaik pada tahun terakhir, meskipun secara umum masih berada di bawah target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2024, kinerja mulai menunjukkan perbaikan dengan realisasi 68% dari target 100%, sehingga capaian meningkat menjadi 68%. Meskipun belum optimal, tren ini menunjukkan adanya upaya penguatan penanganan gangguan di tingkat kecamatan.

Perbaikan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2025, di mana realisasi mencapai 85,532% terhadap target 89%, dengan tingkat capaian 96,103%. Capaian ini menunjukkan

peningkatan efektivitas koordinasi dan respons penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta semakin mendekatnya kinerja terhadap target yang ditetapkan.

Tabel II.93
Tingkat Kemajuan Capaian dengan Renstra

No.	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Realisasi s.d Tahun 2025	Target Akhir Renstra	Tingkat Kemajuan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6=4/5*100**
1.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lingkup Kecamatan Yang Dapat Di Selesaikan	85,532%	100%	85,532&

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Tabel II.94
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

Program/ kegiatan	Indikator Kinerja Rata- Rata			Anggaran Rata- Rata			Tingkat Efisiensi	Ket.
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian		
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	89	85,532	96,103	8.070.816.660,-	1.002.416.723,-	12,42%	0,13	Efisien

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran efisiensi pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program telah berjalan secara efisien. Hal ini tercermin dari capaian kinerja rata-rata sebesar 96,103% dengan realisasi anggaran yang relatif rendah dibandingkan pagu yang tersedia.

Dari sisi kinerja, realisasi indikator mencapai 85,532 dari target 89, sehingga menunjukkan tingkat keberhasilan yang tinggi dalam pencapaian output program. Sementara itu, dari sisi pemanfaatan anggaran, realisasi belanja hanya sebesar Rp1.002.416.723 atau 12,42% dari total anggaran sebesar Rp8.070.816.660. Perbandingan antara capaian kinerja dan serapan anggaran menghasilkan nilai efisiensi sebesar 0,13 dengan kategori efisien. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan program dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan sumber daya keuangan yang minimal.

Faktor Pendukung:

a. Meningkatnya sinergitas antar aparat keamanan di wilayah kecamatan

b. Kerja sama yang baik antara Satpol PP, Koramil, Kapolsek serrta lembaga terkait lainnya (TRIPIKA) berkontribusi signifikan terhadap penurunan zona kerawanan keamanan.

Faktor Penghambat:

Laporan kasus membutuhkan waktu penyelesaian lebih lama karena sifatnyayang kompleks sehingga tidak semua kasus bisa diselesaikan dalam triwulan berjalan

Tindak Lanjut:

1. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dan pemantauan tindaklanut laporan gangguan Kamtibmas
2. Mengaktifkan posko kamtibmas tingkat RT/RW pada Kelurahan

18. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Toleransi dalam Masyarakat"

Salah satu Sasaran yang menunjang Tujuan Kota Makassar adalah Meningkatnya Toleransi dalam Masyarakat dengan indikator Indeks Kota Toleran, dimana indeks tersebut diterbitkan oleh SETARA Institute yang didukung oleh Kementerian Agama.

Tabel II.95
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Toleransi dalam Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 5		Mewujudkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berdaya Saing, serta Menegakkan Ketertiban Umum				
Meningkatnya Kualitas Keamana, Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Kualitas Toleransi dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran	4,363	4,688	N/A	N/A

Sumber: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan SETARA Institute

Pada Tahun 2024, nilai baseline Indeks Kota Toleran tercatat sebesar 4,363. Sedangkan pada Tahun 2025 belum ditemukan data realisasi dan capaian sehingga tidak dapat disajikan. Adapun target sebesar 4,688 merupakan salah satu bentuk upaya dari Pemerintah Kota Makassar dalam peningkatan kualitas toleransi sosial dan kerukunan antar masyarakat.

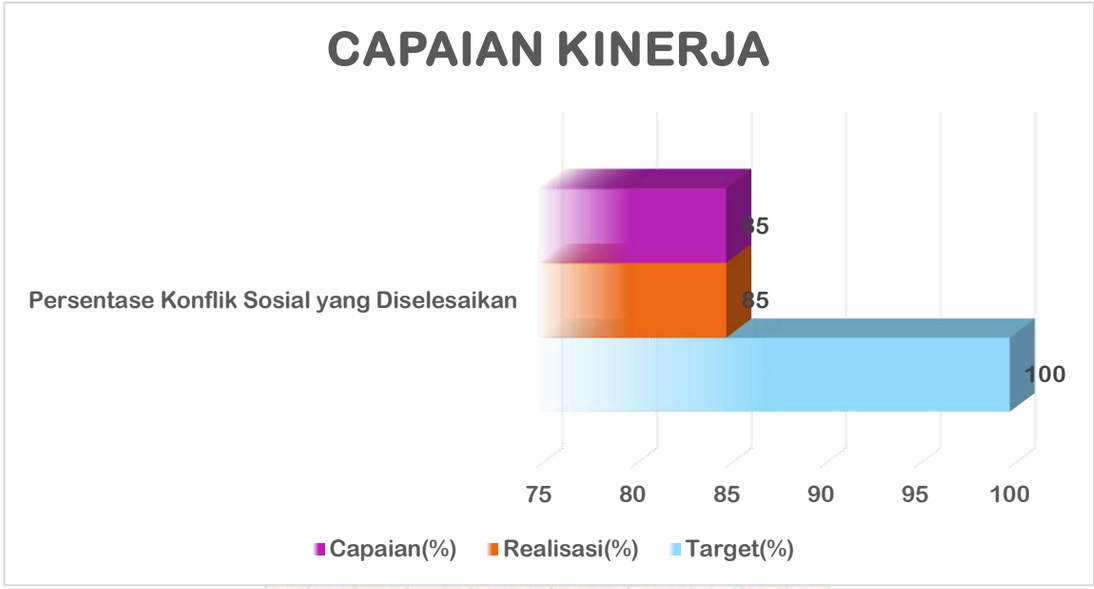
Adapun Program yang mendukung sasaran tersebut adalah Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penegakan Konflik Sosial

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga stabilitas daerah melalui peningkatan kewaspadaan nasional serta percepatan penanganan konflik sosial secara efektif dan terintegrasi. Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan.

Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 85%, sehingga capaian kinerja mencapai 85%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar konflik sosial yang terjadi telah berhasil diselesaikan, namun masih terdapat 15% konflik yang belum tertangani secara tuntas.

Grafik II.24
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Capaian ini mengindikasikan bahwa upaya penanganan konflik sosial telah berjalan cukup efektif, namun belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau seluruh kasus yang terjadi. Dengan demikian, program ini dapat dikategorikan berhasil, namun masih memerlukan penguatan untuk mencapai penyelesaian konflik secara menyeluruh.

Tabel II.96
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	85	**85%**	20.753.259.600	20.282.438.215	**97,73%**	**0,87**	**Berhasil & Cukup Efisien**

Sumber: Matriks IKU Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh pagu sebesar Rp20.753.259.600, dengan realisasi anggaran sebesar Rp20.282.438.215 atau tingkat penyerapan sebesar 97,73%.

Untuk mengukur efisiensi, dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 85 ÷ 97,73

≈ 0,87

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	85 %
Penyerapan Anggaran	97,73 %
Rasio Efisiensi	0,87
Kategori Efisiensi	Cukup Efisien

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,87 menunjukkan bahwa program berada pada kategori cukup efisien, dimana sebagian besar anggaran telah digunakan untuk menghasilkan capaian kinerja yang relatif tinggi, namun belum optimal.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas sosial sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Capaian sebesar 85% menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif dalam meredam konflik sosial, meskipun belum sepenuhnya optimal.

Stabilitas sosial yang terjaga akan mendukung:

- kelancaran aktivitas ekonomi dan investasi
- peningkatan rasa aman masyarakat

  keberlanjutan pembangunan daerah

Faktor pendukung:

a) Keberadaan sumber daya manusia yang terampil di dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar menjadi landasan penting dalam pelaksanaan kegiatan.
b) Dukungan anggaran dari APBD memberikan fondasi finansial yang diperlukan untuk pelaksanaan program- program pencegahan konflik.
c) Peran aktif tokoh masyarakat dalam memberikan arahan, musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat dalam membantu mencegah pengaruh dan provokasi terhadap isu-isu yang dapat menimbulkan konflik, menciptakan suasana kondusif di Kota Makassar.
d) Komitmen kuat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar dalam mengkoordinasikan kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat menunjukkan keseriusan dalammenjaga keamanan
e) Terjalinnya sinergitas antara pemerintah dan TNI/ POLRI dalam penangana konflik menciptakan kekuatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
f) Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan.
g) Para tokoh masyarakat senantiasa memberikan arahan, musyawarah dan pemantauan kepada masyarakat berkontribusi positif dalam mencegah pengaruh dan provokasi terhadap isu- isu konflik.
h) Penegakan sanksi dan hukum terhadap oknum yang terbukti melakukan provokasi atau tindakan yang memicu keamanan dan ketertiban di Kota Makassar.

Faktor penghambat:

a) Masih terdapat potensi munculnya aksi terorisme dan gangguan terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban umum, termasuk tindakan melawan hukum lainnya.
b) Keberadaan kejadian kekerasan yang melanggar hukum di antara kelompok masyarakat menjadi hambatan utama yang perlu diatasi.
c) Masih adanya potensi terjadi perang kelompok atau konflik horizontal sosial di masyarakat
d) Keberadaan potensi tindakan kriminalitas yang dilakukan oleh sekelompok remaja

e) Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dan risiko dari tindakan kekerasan.

Tindak Lanjut:

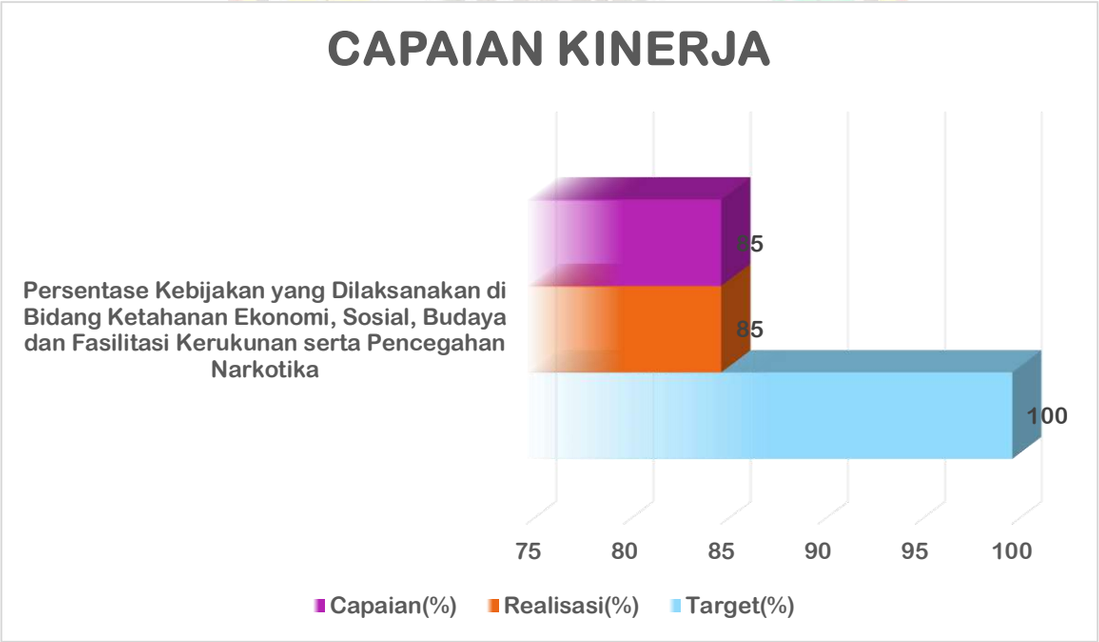
a) Meminimalisir potensi konflik dengan memberdayakan masyarakat melalui forum-forum kemitraan pemerintah dan masyarakat.
b) Melakukan sosialisasi yang lebih intens dan akurat kepada masyarakat agar mengedepankan budaya saling menghormati dan menghargai demi terjaganya kedamaian dan ketertiban di Kota Makassar.
c) Penguatan integrasi dan integritas bangsa.

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Program ini dilaksanakan untuk memperkuat ketahanan daerah melalui implementasi kebijakan di bidang ekonomi, sosial, budaya, termasuk fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika serta penguatan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan serta Pencegahan Narkotika dengan target sebesar 100%. Pada Tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 85%, sehingga capaian kinerja berada pada 85%.

Grafik II.25
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar kebijakan telah dilaksanakan, namun masih terdapat 15% kebijakan yang belum terealisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi cakupan pelaksanaan maupun efektivitas fasilitasi lintas sektor.

Dengan demikian, program ini dapat dikategorikan berhasil, namun masih memerlukan penguatan untuk memastikan seluruh kebijakan dapat diimplementasikan secara menyeluruh dan berdampak.

Tabel II.97
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Kebijakan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Narkotika & Kerukunan yang Dilaksanakan	100	85	**85%**	2.519.755.040	2.456.347.000	**97,48%**	**0,87**	**Berhasil & Cukup Efisien**

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp2.519.755.040, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.456.347.000 atau tingkat penyerapan sebesar 97,48%.

Untuk mengukur efisiensi, digunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 85 ÷ 97,48

≈ 0,87

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	85 %
Penyerapan Anggaran	97,48 %
Rasio Efisiensi	0,87
Kategori Efisiensi	Cukup Efisien

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,87 menunjukkan bahwa program berada pada kategori cukup efisien, dimana penggunaan anggaran yang hampir optimal belum sepenuhnya menghasilkan capaian kinerja yang maksimal.

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan budaya sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Capaian kinerja sebesar 85% menunjukkan bahwa program telah memberikan dampak positif, khususnya dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan.

Namun demikian, belum optimalnya capaian menunjukkan bahwa kontribusi program belum maksimal dalam menjangkau seluruh aspek ketahanan daerah, sehingga diperlukan peningkatan efektivitas implementasi agar dapat mendukung:

- stabilitas sosial dan kerukunan masyarakat
- pencegahan konflik dan penyalahgunaan narkotika
- penguatan identitas budaya dan kohesi sosial

Dengan demikian, optimalisasi program menjadi kunci untuk mewujudkan ketahanan daerah yang tangguh dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat : Adanya keterlambatan administrasi dan kurangnya koordinasi dengan instansi dan stekholder terkait

Tindak Lanjut : Melakukan Koordinasi intensif dengan instansi dan stekholder terkait.

19. Sasaran "Menurunnya Ketimpangan Gender"

Dalam rangka pelaksanaan Misi 6: Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan dan Olahraga, ditetapkan sasaran menurunnya ketimpangan gender.

Tabel II.98
Capaian Indikator Sasaran Menurunnya Ketimpangan Gender

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 6			Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan ddan Olahraga			
Menigkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,183	0,179	N/A	N/A

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak Kota Makassar

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui indikator Indeks Ketimpangan Gender. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,179 sedangkan realisasi dan capaian kinerja belum dapat disajikan.

Dalam menentukan nilai ketimpangan gender dilakukan rumus berikut:

IKG = (1+ (1- (realisasi/ target))) x 100

Perlu diperhatikan bahwa indikator ini bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik). Dengan demikian, meningkatnya nilai indeks dari target menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan gender justru belum membaik sesuai yang diharapkan, bahkan cenderung mengalami peningkatan.

Karena tidak tersedianya data realisasi dan kinerja pada indikator ini maka sajian perbandingan realisasi baseline Tahun 2024 tidak dapat dilakukan.

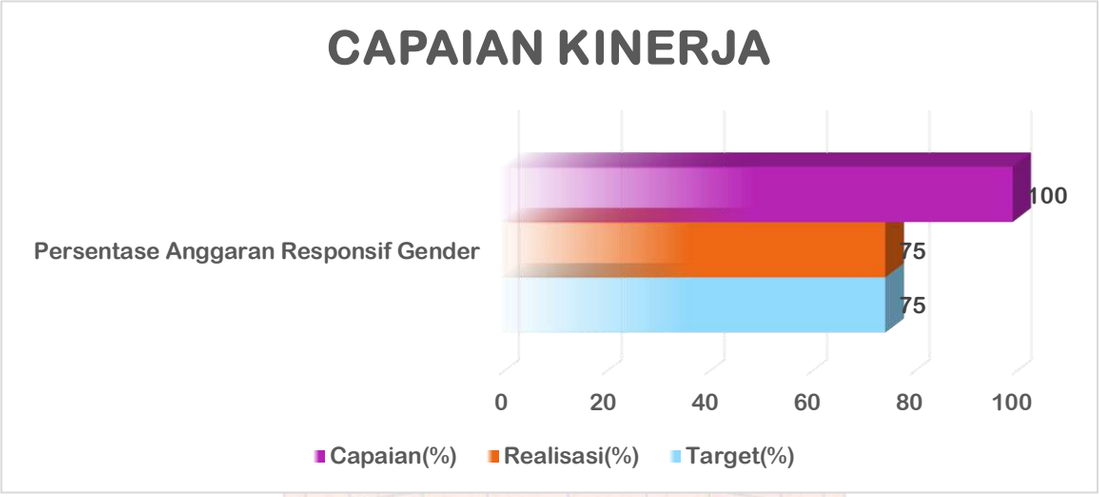
Program yang mendukung sasaran ini adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan serta Program Perlindungan Perempuan.

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini dilaksanakan dalam rangka mendorong integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah melalui peningkatan Anggaran Responsif Gender (ARG).

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG), dengan target sebesar 75%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 75%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Grafik II.26
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Capaian ini menunjukkan bahwa target integrasi perspektif gender dalam penganggaran telah terpenuhi secara optimal, yang mencerminkan meningkatnya komitmen perangkat daerah dalam menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran.

Namun demikian, capaian 100% ini perlu dianalisis lebih lanjut dari aspek kualitas implementasi, khususnya sejauh mana anggaran responsif gender tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, bukan sekadar pemenuhan administratif.

Tabel II.99
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	75	75	**100%**	1.016.633.000	954.991.320	**94%**	**1,06**	**Sangat Berhasil & Sangat Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.016.633.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp954.991.320 atau tingkat penyerapan sebesar 94%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 94

≈ 1,06

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,06 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja yang optimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program ini memberikan kontribusi strategis dalam mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender. Capaian 100% implementasi ARG menunjukkan bahwa fondasi pengarusutamaan gender dalam penganggaran telah terbentuk dengan baik.

Program ini berkontribusi dalam:

- meningkatkan kesetaraan akses terhadap sumber daya pembangunan
- mendorong pemberdayaan perempuan
- mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan

Dengan demikian, program ini menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang responsif gender dan berkelanjutan.

Faktor pendukung:

- kesadaran yang lebih baik dari masyarakat untuk melaporkan kekerasan;
- kemampuan pelayanan UPTD PPA dalam menjangkau korban dan memberikan layanan yang dibutuhkan

Faktor penghambat:

- Peningkatan jumlah kasus di beberapa wilayah kecamatan

Tindak Lanjut:

- Memperkuat program pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban;
- Upaya kolaboratif lintas sektor;
- Peningkatan kapasitas petugas;
- Peningkatan sosialisasi intensif.

Program Perlindungan Perempuan

Program Perlindungan Perempuan dilaksanakan dalam rangka menurunkan tingkat kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), melalui upaya pencegahan, penanganan, dan perlindungan korban secara komprehensif.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO, dengan target sebesar 1%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 1%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target pengendalian tingkat kekerasan terhadap perempuan berhasil dipertahankan sesuai ambang batas yang ditetapkan. Mengingat karakter indikator yang bersifat "semakin rendah semakin baik", stabilnya rasio pada angka 1% mencerminkan bahwa program telah mampu menjaga kondisi agar tidak mengalami peningkatan kasus secara signifikan.

Namun demikian, capaian ini juga mengindikasikan bahwa belum terjadi penurunan lebih lanjut dari baseline/target, sehingga upaya program masih berada pada tahap pengendalian (stagnan), belum sepenuhnya mencapai perbaikan (improvement) yang lebih progresif.

Tabel II.100
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Rasio Kekerasan terhadap Perempuan (semakin rendah semakin baik)	1	1	**100%**	2.693.114.000	2.652.507.800	**98%**	**1,02**	**Sangat Berhasil & Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp2.693.114.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.652.507.800,- atau tingkat penyerapan sebesar 98%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 98

≈ 1,02

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,02 menunjukkan bahwa program berada pada kategori efisien, dimana capaian kinerja optimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang hampir maksimal.

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman dan berkeadilan gender. Capaian kinerja sebesar 100% menunjukkan bahwa program telah mampu menjaga stabilitas tingkat kekerasan terhadap perempuan.

Namun demikian, untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan peningkatan efektivitas program agar mampu mendorong penurunan angka kekerasan secara nyata, bukan hanya mempertahankan kondisi yang ada.

Dengan demikian, program ini menjadi instrumen penting dalam:

- perlindungan kelompok rentan
- peningkatan kualitas hidup perempuan
- penguatan pembangunan sosial yang berkeadilan

Faktor Pendorong :

- Beberapa faktor yang mendukung pencapaian indikator Indeks Ketimpangan Gender antara lain meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan melalui pengalokasian Anggaran Responsif Gender (ARG) yang telah mencapai target sebesar 75%. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat daerah telah mulai mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran program pembangunan.
- Selain itu, keberhasilan Program Perlindungan Perempuan juga menjadi faktor pendorong, ditandai dengan tercapainya target rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO yang berada pada angka 1 sesuai target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan koordinasi antar instansi terkait, penguatan layanan

pengaduan dan pendampingan korban, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan.

- Optimalisasi penggunaan anggaran pada kedua program tersebut (realisasi 94% dan 98%) juga turut mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berkontribusi pada penurunan ketimpangan gender.

Faktor Penghambat :

- Adapun faktor penghambat yang masih dihadapi antara lain belum meratanya pemahaman dan kapasitas perangkat daerah dalam mengimplementasikan penganggaran responsif gender, sehingga integrasi perspektif gender dalam seluruh program pembangunan belum sepenuhnya optimal. Selain itu, masih adanya faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.
- Di sisi lain, kasus kekerasan terhadap perempuan masih dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk melaporkan kejadian yang dialami, sehingga penanganan kasus belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang sebenarnya di masyarakat.

Tindak Lanjut:

- Memperkuat program pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban;
- Upaya kolaboratif lintas sektor;
- Peningkatan kapasitas petugas;
- Peningkatan sosialisasi intensif.

20. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak"

Sasaran Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak memiliki indikator kinerja Indeks Perlindungan Anak (IPHA) dan didukung dengan Program Pemenuhan Hak Anak (PHA).

Tabel II.101
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 6		Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan ddan Olahraga				
Menigkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	67,04	69,44	N/A	N/A

Sumber : RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindangan Anak Kota Makassar

Capaian sasaran ini diukur melalui indikator Indeks Perlindungan Anak. Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 69,44 tetapi belum tersedia data realisasi dan capaian kinerja sehingga tidak dapat disajikan. Nilai indicator tersebut tidak dapat dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 karena data belum tersedia.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

Program Pemenuhan Hak Anak

Program Pemenuhan Hak Anak dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak melalui pendekatan sistemik yang mencakup aspek perlindungan, tumbuh kembang, dan partisipasi anak dalam pembangunan daerah.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), dengan baseline sebesar 61,65, target tahun 2025 sebesar 65,55, dan realisasi sebesar 61,65, sehingga capaian kinerja mencapai 94,05%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target peningkatan indeks belum tercapai, dengan deviasi sebesar 3,90 poin dari target. Selain itu, realisasi yang sama dengan baseline mengindikasikan bahwa program belum mampu mendorong peningkatan kualitas pemenuhan hak anak secara signifikan, atau masih berada pada kondisi stagnan.

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan cukup berhasil namun belum optimal, karena belum menghasilkan perubahan yang diharapkan dibandingkan kondisi awal.

Tabel II.102
Perbandingan CApaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Indeks Pemenuhan Hak Anak	65,55	61,65	**94,05%**	594.459.000	591.626.500	**99,52%**	**0,95**	**Cukup Berhasil & Tidak Efisien**

Sumber : Matriks IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh:

- Pagu anggaran: Rp594.459.000
- Realisasi anggaran: Rp591.626.500
- Penyerapan anggaran: 99,52%

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 94,05 ÷ 99,52

≈ 0,95

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,95 menunjukkan bahwa program berada pada kategori tidak efisien, dimana penggunaan anggaran relatif lebih besar dibandingkan dengan capaian kinerja.

Untuk perhitungan indeks pemenuhan hak anak di Tahun 2025 datanya pun belum rilis dari kementerian yang mana data tersebut menunggu dari penilaian Kota Layak Anak yang mana komponen utama indeks memenuhi 5 klaster yaitu : 1. Hak sipil dan kebebasan, 2. lingkungan keluarga dan pengasuhan, 3. kesehatan dasar dan kesejahteraan, 4.

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, 5. perlindungan khusus anak, untuk sementara waktu masih menggunakan data tahun 2024 yakni 61,65% yang mana capaian di tahun 2024 indeks pemenuhan hak anak adalah 100%

Faktor penghambat antara lain :

a) Kualitas Implementasi ProgramMeskipun anggaran terserap tinggi, efektivitas program bisa belum maksimal (program berjalan, tapi dampaknya belum signifikan).

b) Kurangnya Koordinasi Antar LembagaPemenuhan hak anak melibatkan banyak sektor (pendidikan, kesehatan, sosial). Koordinasi yang kurang baik dapat menghambat hasil.

c) Faktor Sosial dan Budaya yaitu masih adanya Pernikahan anak, kekerasan terhadap anak, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak anak

d) Keterbatasan SDM dan Infrastruktur Tenaga pendamping anak, fasilitas ramah anak, atau layanan perlindungan mungkin belum merata.

Faktor pendorong antara lain :

a) Komitmen Pemerintah

Adanya program khusus pemenuhan hak anak menandakan perhatian serius dari pemerintah.

b) Adanya Indikator yang Jelas (Indeks)

Indeks Pemenuhan Hak Anak membantu: mengukur kemajuan dalam hal pemenuhan hak anak, dan mengevaluasi program secara terarah

c) Dukungan Kebijakan dan Regulasi

Biasanya didukung oleh undang-undang perlindungan anak dan program nasional.

d) Peran Lembaga dan Komunitas

LSM, sekolah, dan masyarakat turut membantu dalam hal edukasi hak anak dam perlindungan anak

e) Program Sudah Berjalan Stabil

Tingginya realisasi anggaran menunjukkan program tidak mengalami hambatan besar secara administratif.

Tindak Lanjut:

a) Peningkatan efektivitas implementasi program.

b) Penguatan koordinasi lintas sektor dalam hal ini Membentuk forum koordinasi terpadu antar perangkat daerah (pendidikan, kesehatan, sosial, perlindungan anak) agar program lebih terintegrasi dan tidak berjalan secara parsial.

c) Peningkatan edukasi dan perubahan sosial budaya dalam hal ini Mengintensifkan sosialisasi terkait hak anak kepada masyarakat untuk menekan praktik pernikahan anak, kekerasan terhadap anak, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak,

d) Penguatan kapasitas SDM dan pemerataan infrastruktur dalam hal ini Menambah dan meningkatkan kompetensi tenaga pendamping anak, serta memperluas ketersediaan fasilitas ramah anak seperti ruang bermain, layanan konseling, dan pusat perlindungan anak.

e) Sinkronisasi dengan indikator Kota Layak Anak (KLA) dalam hal ini Mengintegrasikan seluruh program pemenuhan hak anak ke dalam 5 klaster KLA agar hasil penilaian lebih optimal dan berdampak langsung pada peningkatan indeks.

Program Perlindungan Khusus Anak

Program Perlindungan Khusus Anak dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya hak perlindungan anak, khususnya bagi anak korban kekerasan melalui penanganan yang cepat, terintegrasi, dan komprehensif oleh instansi terkait.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus anak korban kekerasan yang teridentifikasi telah ditangani secara penuh oleh instansi terkait, yang mencerminkan efektivitas sistem layanan perlindungan anak di daerah. Program ini dapat dikategorikan sangat berhasil dalam memastikan tidak adanya kasus yang tidak tertangani (zero unmet cases).

Namun demikian, capaian 100% ini perlu dianalisis lebih lanjut dari sisi cakupan deteksi kasus (case finding) dan kualitas penanganan, mengingat potensi adanya kasus yang belum terlaporkan (underreporting). Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tingkat penanganan, tetapi juga dari kemampuan sistem dalam menjangkau seluruh kasus yang terjadi di masyarakat.

Tabel II.103
Perbandaingan Capaian Kinerja dan Anggaran Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani	100	100	**100%**	2.258.132.192	2.162.802.145	**96%**	**1,04**	**Sangat Berhasil & Sangat Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar Tahun 2025

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp2.258.132.192,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.162.802.145,- atau tingkat penyerapan sebesar 96%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 96

≈ 1,04

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,04 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja maksimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang tidak sepenuhnya terserap.

Program ini memberikan kontribusi strategis dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Capaian 100% penanganan kasus menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak telah berjalan dengan baik.

Program ini berkontribusi dalam:

- perlindungan kelompok rentan (anak)
- peningkatan kualitas hidup anak
- penguatan pembangunan sosial yang inklusif

Dengan demikian, program ini menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan kota yang layak anak dan berkelanjutan.

Faktor Pendorong:

1. Peningkatan Indeks Perlindungan Anak dari 67,04 menjadi 69,44 didukung oleh pelaksanaan Program Pemenuhan Hak Anak yang menunjukkan peningkatan Indeks Pemenuhan Hak Anak dari 61,65 menjadi 65,55. Hal ini dipengaruhi oleh semakin kuatnya komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan layanan yang ramah anak, termasuk pemenuhan hak dasar anak di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
2. Selain itu, keberhasilan Program Perlindungan Khusus Anak yang mencapai target 100% dalam penanganan anak korban kekerasan menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara instansi terkait, lembaga perlindungan anak, serta aparat penegak hukum dalam memberikan layanan perlindungan dan rehabilitasi bagi korban.
3. Tingginya realisasi anggaran pada program perlindungan anak (di atas 95%) juga menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan perlindungan, pencegahan kekerasan terhadap anak, serta penguatan sistem layanan perlindungan anak di daerah.

Faktor Penghambat:

1. Meskipun menunjukkan peningkatan, masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi optimalisasi perlindungan anak, antara lain masih ditemukannya kasus kekerasan terhadap anak yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial, keluarga, serta rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai hak-hak anak.
2. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus dalam penanganan kasus anak serta belum meratanya ketersediaan layanan perlindungan anak di tingkat masyarakat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas perlindungan anak secara menyeluruh.

Tindak Lanjut:

1. Melakukan penguatan program pencegahan, edukasi masyarakat, peningkatan layanan pendampingan korban dan kolaborasi lintas sektor.

21. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga"

Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Keolahragaan juga didukung 2 (dua) program yaitu Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

Tabel II.104
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olah Raga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 6		Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan ddan Olahraga				
Menigkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olah Raga	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	59	67,17	113,85
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476	0,497	0,542	109,05
Capaian Rata- Rata						**111,45**

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui dua indikator kinerja, yaitu Indeks Pembangunan Pemuda dan Indeks Pembangunan Keolahragaan.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata-rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{113{,}85\% + 109{,}05\%}{2} = 111{,}45\%$$

Pada indikator Indeks Pembangunan Pemuda, nilai baseline Tahun 2024 sebesar 57,67 dan pada Tahun 2025 ditarget sebesar 59, terealisasi 67,17 dengan capaian sebesar 113,85%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pada indikator tersebut telah melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan peningkatan dari baseline.

Selanjutnya, pada indikator Indeks Pembangunan Keolahragaan, pada Tahun 2025 target sebesar 0,497 terealisasi sebesar 0,542 dengan capaian mencapai 109,05%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan di bidang keolahragaan juga melampaui target yang telah ditetapkan. Begitupun jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024 yakni 0,476, maka realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan.

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dilaksanakan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing pemuda melalui penguatan kapasitas kewirausahaan, sehingga mampu mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang produktif serta berkontribusi terhadap perekonomian daerah. Kinerja program ini diukur melalui indikator rasio wirausaha pemuda.

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 17,75%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 18,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,17%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa berbagai kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda, seperti pelatihan, pendampingan usaha, serta fasilitasi

pengembangan usaha pemuda telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausaha pemuda di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp10.764.604.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.205.297.291 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,80%. Tingkat penyerapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 104,17% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 94,80%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,10. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.105
Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Rasio Wirausaha Pemuda	17,75	18,49	104,17	10.764.604.000	10.205.297.291	94,80	1,10	Berhasil

Sumber Data: LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Tahun 2025

Dasar Perhitungan Analisis

2. Capaian Kinerja

Capaian = (Realisasi ÷ Target) × 100

= (18,49 ÷ 17,75) × 100

= 104,17%

Kategori Capaian Kinerja

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 104,17%, indikator termasuk kategori Berhasil.

Analisis Efisiensi Kinerja terhadap Anggaran

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 104,17 ÷ 94,80

= 1,10

Interpretasi:

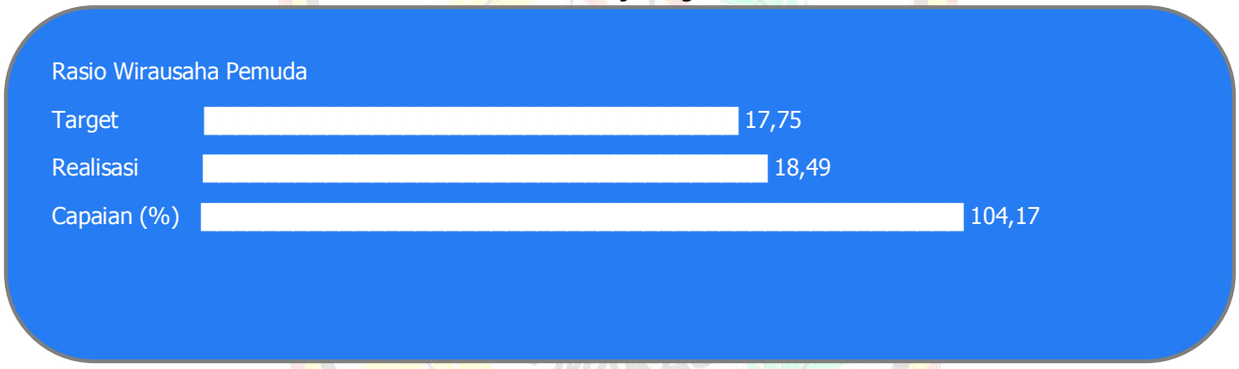
- Rasio >1 menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Ringkasan Analisis Program

Aspek Analisis	Hasil
Capaian Kinerja	104,17%
Penyerapan Anggaran	94,80%
Rasio Efisiensi	1,10
Kategori Kinerja	Berhasil

Pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan menunjukkan kinerja yang baik dengan capaian indikator yang melampaui target. Selain itu, perbandingan antara capaian kinerja dan tingkat penyerapan anggaran menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya, sehingga mampu mendukung peningkatan rasio wirausaha pemuda di daerah.

Grafik II.27
Grafik Kinerja Program



Grafik menunjukkan bahwa indikator rasio wirausaha pemuda ditargetkan sebesar 17,75%, dengan realisasi sebesar 18,49%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 104,17%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan mampu melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta fasilitasi pengembangan usaha bagi pemuda telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan jumlah wirausaha pemuda di daerah.

Faktor Penghambat : Adanya efisiensi anggaran dan penyesuian dengan visi-misi Walikota Baru

Faktor Pendorong :

1. Bonus Demografi kota Makassar.
2. Komitmen dan Inisiatif Pimpinan serta ketersedian Sumber Daya Manusia (SDM),

Tindak Lanjut: Optimalisasi terhadap anggaran yang ada dan Reorientasi Indikator Kinerja

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing olahraga daerah melalui pembinaan atlet berprestasi yang mampu menembus seleksi nasional (Pelatnas).

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai sebesar 93,87%, sehingga capaian kinerja berada pada 93,87%.

Grafik II.28
Grafik Kinerja Program



Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar atlet yang dibina berhasil memenuhi kualifikasi untuk masuk Pelatnas, namun masih terdapat gap sebesar 6,13% dari target yang belum tercapai. Hal ini mengindikasikan bahwa proses pembinaan dan peningkatan kualitas atlet belum sepenuhnya optimal dalam menghasilkan atlet berdaya saing nasional.

Tabel II.106
Analisis Kinerja Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100	93,87	**93,87%**	47.565.468.000	44.651.129.733	**93,87%**	**1,00**	**Berhasil & Impas**

Sumber Data: LKjIP Dinas Pemuda dan Olahraga Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp47.565.468.000, dengan realisasi anggaran sebesar Rp44.651.129.733 atau tingkat penyerapan sebesar 93,87%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 93,87 ÷ 93,87

= 1,00

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,00 menunjukkan bahwa program berada pada kategori impas (proporsional), dimana capaian kinerja sebanding dengan tingkat penggunaan anggaran.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam meningkatkan prestasi olahraga daerah serta memperkuat daya saing di tingkat nasional. Capaian sebesar 93,87% menunjukkan bahwa program telah mampu mendorong peningkatan kualitas atlet secara signifikan.

Namun demikian, belum optimalnya capaian menunjukkan bahwa kontribusi program terhadap peningkatan jumlah atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional masih perlu ditingkatkan.

Dengan demikian, optimalisasi program ini menjadi penting untuk:

- meningkatkan prestasi olahraga daerah
- memperkuat identitas dan kebanggaan daerah
- mendukung pembangunan sumber daya manusia di bidang olahraga

Faktor Pendorong: Keselarasan antara serapan anggaran dan capaian administratif yang menjaga keberlangsungan program pembinaan atlet.

Faktor Penghambat: Adanya kendala teknis dalam penuntasan infrastruktur pendukung serta proses adaptasi program terhadap transisi kebijakan kepemimpinan.

Tindak Lanjut: Mempercepat penyelesaian hambatan prosedural dan melakukan sinkronisasi strategi pembinaan agar sesuai dengan visi pembangunan yang baru.

22. Sasaran "Menurunnya Disparitas Pendapatan"

Untuk menyokong Tujuan Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat Sasaran maka ditetapkan sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan dengan indikator Gini Rasio yang didukung Program Perlindungan Jaminan Sosial.

Tabel II.107
Capaian Indikator Sasaran Menurunnya Disparitas Pendapatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 6		Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan ddan Olahraga				
Menigkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Tepat Sasaran	Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0,372	0,366	0,391	93,17

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan BPS Kota Makassar

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui indikator Gini Rasio. Pada Tahun 2025, target yang ditetapkan sebesar 0,366 sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 0,391 sehingga tingkat capaian tercatat sebesar 93,17%.

Meskipun secara persentase capaian terlihat tinggi, perlu diperhatikan bahwa indikator Gini Rasio bersifat negatif (semakin kecil nilainya semakin baik). Dengan demikian, realisasi yang lebih tinggi dari target menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan belum mengalami penurunan sesuai yang diharapkan, bahkan cenderung meningkat. Begitu pun jika dibandingkan dengan realisasi baseline Tahun 2024 yaitu 0,372.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta mendorong peningkatan kemandirian ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan.

Program diukur melalui dua indikator kinerja utama, yaitu:

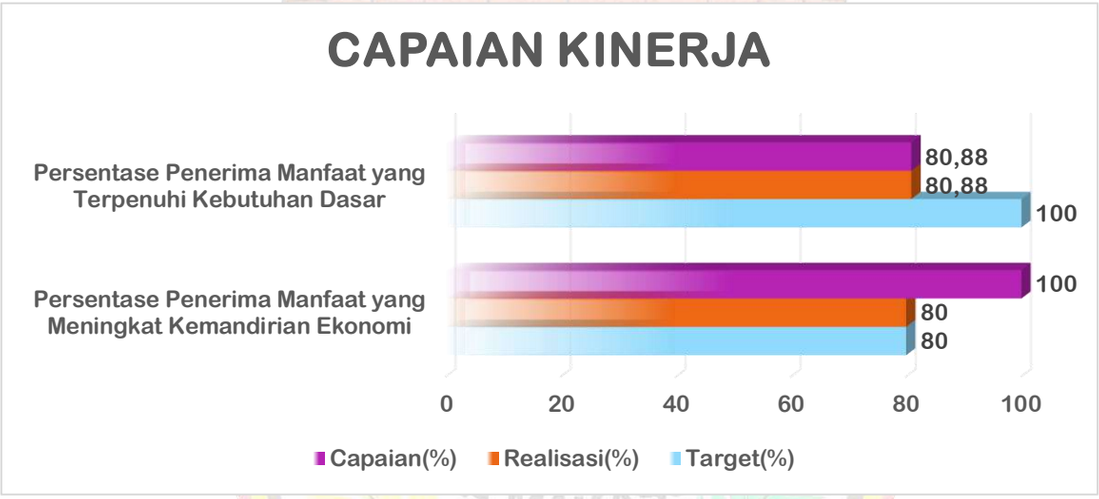
1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Target kinerja ditetapkan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 80,88%, sehingga capaian kinerja berada pada 80,88%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 19,12% penerima manfaat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, yang mengindikasikan bahwa intervensi program belum menjangkau seluruh kelompok sasaran secara optimal.

2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi

Target kinerja sebesar 80% berhasil direalisasikan sebesar 80%, sehingga capaian mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan ekonomi terhadap penerima manfaat telah berjalan efektif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi sesuai target yang ditetapkan.

Grafik II.29
Grafik Target, Realisasi dan Capaian Program



Analisis Konsolidasi Kinerja

Secara keseluruhan, terdapat disparitas capaian antar indikator, dimana:

- Indikator kebutuhan dasar (80,88%) belum optimal
- Indikator kemandirian ekonomi (100%) telah optimal

Hal ini menunjukkan bahwa program lebih berhasil pada aspek pemberdayaan (empowerment) dibandingkan aspek perlindungan dasar (basic needs). Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan fokus intervensi program.

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp3.411.069.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.807.311.976 atau tingkat penyerapan sebesar 82,30%.

Tabel II.108
Analisis Kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	80,88	80,88%	3.411.069.900	2.807.311.976	82,30%		
Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	80	80	100%					
Rata-rata Kinerja Program			**90,44%**	**3.411.069.900**	**2.807.311.976**	**82,30%**	**1,10**	**Sangat Efisien & Berhasil**

Sumber: Matriks IKU Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025

Untuk mengukur efisiensi, digunakan rata-rata capaian indikator:

- Rata-rata capaian kinerja = (80,88% + 100%) / 2 = 90,44%

Rumus:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 90,44 ÷ 82,30

≈ 1,10

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,10 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja relatif tinggi dapat dicapai dengan tingkat penyerapan anggaran yang lebih rendah.

Uraian	Nilai
Rata-rata Capaian Kinerja	90,44 %
Penyerapan Anggaran	82,30 %
Rasio Efisiensi	1,10
Kategori Efisiensi	Sangat Efisien

Faktor Pendudkung:

a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur

b. Tersedianya mekanisme perencanaan melalui musyawarah kelurahan

c. Adanya dukungan data dan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan perlindungan sosial.

Faktor Penghambat :

a. Keterbatasan validasi data penerima bantuan

b. Adanya perbedaan kewenangan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat

c. Adanya ketidaksesuaian sebagian indikator kinerja dalam Renstra sebelumnya dengan kondisi di lapangan

Tindak Lanjut:

a. Dinas Sosial akan melaksanakan penyesuaian perencanaan dan pengukuran kinerja dengan mengacu pada Renstra dan IKU terbaru Tahun 2025-2029

b. Memperkuat koordinasi dan pemutakhiran data berbasis wilayah

c. Memastikan penetapan indikator kinerja dan target kinerja yang lebih realistis, terukur dan selaras dengan kewenangan perangkat daerah.

23. Sasaran "Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas"

Sasaran Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas memiliki indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal yang didukung oleh 2 (dua) program yaitu Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Rehabilitasi Sosial.

Tabel II.109
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 6		Meningkatkan Akses Pelayanan dan Perlindungan Perempuan, Anak dan Penyandang Disabilitas serta Pembangunan Kepemudaan ddan Olahraga				
Menigkatnya Kualitas Keluarga dan Kesetaraan Gender	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	41,1	41,81	N/A	N/A

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui indikator Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal. Pada Tahun 2024 terealisasi 41,1 dan pada Tahun 2025 target yang ditetapkan sebesar 41,81% namun tidak terdapat data realisasi dan capaian kinerja sehingga tidak dapat diperbandingkan dengan baseline Tahun 2024.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

Program Penempatan Tenaga Kerja

Program Penempatan Tenaga Kerja dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar, sehingga dapat memperluas akses kesempatan kerja serta mempertemukan kebutuhan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha secara lebih optimal. Kinerja

program ini diukur melalui indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar.

Pada tahun pelaporan, target indikator kinerja ditetapkan sebesar 61%, sedangkan realisasi yang dicapai sebesar 64,08%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 105,05%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program mampu melampaui target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa layanan penempatan tenaga kerja melalui mekanisme antar kerja telah berjalan efektif dalam memfasilitasi penyerapan tenaga kerja pada berbagai sektor usaha di daerah.

Dari sisi pemanfaatan sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp1.084.221.660, dengan realisasi anggaran sebesar Rp925.538.118 atau tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%. Tingkat penyerapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan yang direncanakan dalam program ini telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan antara capaian kinerja sebesar 105,05% dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 85,36%, diperoleh rasio efisiensi sebesar 1,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat penggunaan anggaran, sehingga pelaksanaan program dapat dikategorikan **efektif** dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Tabel II.110
Analis Kinerja Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	61	64,08	105,05	1.084.221.660	925.538.118	85,36	1,23	Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar Tahun 2025

Perhitungan Efisiensi

Rasio Efisiensi = Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 105,05 ÷ 85,36

= 1,23

Interpretasi:

Rasio >1 menunjukkan kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan penggunaan anggaran, sehingga program dapat dikategorikan efisien.

Kategori Capaian Kinerja .

Persentase Capaian	Kategori
>110%	Sangat Berhasil

Persentase Capaian	Kategori
90–110%	Berhasil
75–89%	Cukup Berhasil
60–74%	Kurang Berhasil
<60%	Tidak Berhasil

Dengan capaian 105,05%, indikator termasuk kategori Berhasil.

Faktor Penghambat:

a. Dalam penempatan tenaga kerja belum dilaksanakan secara optimal karena masih kurangnya PNS penjabat fungsional pengantar kerja;
b. Koordinasi lintas sektoral yang berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja formal dan informal belum optimal dan Inovasi program perluasan lapangan kerja sektor informal masih minim sehingga angkatan kerja muda & berpendidikan kurang tertarik berusaha di sektor informal; dan
c. Masih kurangnya kesadaran dari pemberi kerja/perusahaan untuk melaporkan tenaga kerja baru. Demikian pula halnya Pencari kerja masih kurangnya kesadaran dalam melaporkan apabila telah diterima bekerja.

Faktor Pendorong:

Adapun faktor pendorong dari keberhasilan indikator tersebut, Dinas Ketenagakerjaan telah beberapa kali menggelar kegiatan kegiatan yang bertujuan meningkatkan serapan penempatan seperti job fair yang telah banyak bekerja sama dengan instansi atau perusahaan di Kota Makassar, pengembangan jejaring informasi pasar kerja, pembentukan bursa Kerja khusus (BKK) yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dan Universitas, sebagai unit pelaksana yang memberikan pelayanan dan informasi lowongan kerja, pelaksana pemasaran, penyaluran dan penempatan tenaga kerja, merupakan mitra Dinas Ketenagakerjaan. BKK merupakan wadah dalam mempertemukan alumni dengan pencari kerja, sebagai wadah dalam memberikan pelatihan tamatan sesuai dengan permintaan pasar kerja.

Beberapa upaya lain yang dilakukan melalui dorongan-dorongan (penyuluhan) untuk giat bekerja melalui bimbingan teknis memperbaiki kejiwaan, mental dan moralitas para pengangguran untuk melakukan hal yang berguna dan berdampak positif. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga melakukan pembinaan kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). Selain itu melalui peningkatkan pelatihan yang berkaitan dengan pengenalan terhadap teknologi tepat guna, pengembangan kewirausahaan, serta berbagai keterampilan pendukung lainnya sehingga tenaga kerja mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri mapun orang lain.

Pencapaian kinerja peningkatan kesempatan kerja juga ditunjang oleh terbentuknya Forum Human Resources Development (HRD) dari sejumlah perusahaan swasta yang berada di Kota Makassar.

Tindak Lanjut:

Adapun tindak lanjut yang dianggap perlu untuk dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan realisasi capaian kinerja ditahun berikutnya, akan membentuk regulasi tentang Wajib Lapor Lowongan Kerja sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1980 yang menyatakan "Setiap pengusaha atau pengurus wajib segera melaporkan secara tertulis setiap ada atau akan ada lowongan pekerjaan kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya". Selain itu akan lebih mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pelayanan penempatan tenaga kerja, serta penambahan Pejabat Fungsional Pengantar Kerja.

Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan melalui pemberian layanan rehabilitasi sosial di luar panti, meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis.

Program ini diukur melalui 4 indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. **Penyandang Disabilitas Terlantar Terlayani**

   Target 170 orang, realisasi 602 orang, capaian **354,12%** (sangat tinggi)

2. **Anak Terlantar Terlayani**

   Target 170 orang, realisasi 121 orang, capaian **71,18%** (belum tercapai)

3. **Lansia Terlantar Terlayani**

   Target 85 orang, realisasi 68 orang, capaian **80%** (cukup)

4. **Gelandangan dan Pengemis Terlayani**

   Target 85 orang, realisasi 92 orang, capaian **108,24%** (melampaui target)

Tabel II.111
Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Rehabilitasi Sosial

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	170	602	354,12%	3.901.735.008	3.076.430.630	78,85%		
Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	170	121	71,18%					
Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	85	68	80%					

Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	85	92	108,24%					
Rata-rata Kinerja Program			153,39%	3.901.735.008	3.076.430.630	78,85%	1,95	Sangat Efisien & Berhasil

Sumber : LKjIP Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Konsolidasi Kinerja

Rata-rata capaian kinerja program:

➞ (354,12 + 71,18 + 80 + 108,24) ÷ 4 = 153,39%

Secara agregat, program menunjukkan kinerja sangat tinggi (over achievement). Namun demikian, capaian ini bersifat tidak merata antar indikator, dengan perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok sasaran.

Interpretasi Kinerja

- Terjadi overachievement ekstrem pada layanan disabilitas (354,12%)
- Namun terdapat underachievement pada:
  - anak terlantar (71,18%)
  - lansia terlantar (80%)

Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program secara agregat lebih didorong oleh lonjakan capaian pada satu indikator, bukan oleh kinerja yang merata.

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan:

"sangat berhasil secara agregat, namun belum seimbang secara substantif**"**

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh:

- Pagu anggaran: Rp3.901.735.008
- Realisasi anggaran: Rp3.076.430.630
- Penyerapan anggaran: 78,85%

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Rata-rata Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 153,39 ÷ 78,85

≈ 1,95

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,95 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien.

Faktor Pendukung:

a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur serta keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penjangkauan lapangan

b. Adanya dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga layanan sosial dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial

c. Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada PMKS sesuai kebutuhan di lapangan

Faktor Penghambat:

a. Belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial sehingga menyulitkan baseline, pengukuran kinerja serta penentuan target layanan secara proporsional. Sehingga berdampak pada keterbatasan dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih akurat.

Tindak Lanjut:

a. Dinas Sosial akan mendorong penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan berbasis wilayah

b. Memperkuat koordinas lintas sektor dalam penyusunan basis data sasaran

c. Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja dengan mengacu pada Renstra dan IKU Tahun 2025-2029 agar lebih realistis, terukur dan selaras dengan kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan serta mencapai sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan sekedar menyelesaikan masalah sesaat.

24. Sasaran "Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup"

Dalam rangka pelaksanaan Misi 7: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana, ditetapkan sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan yang lestari. Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup memiliki 4 (empat) indikator yaitu Indeks Kualitas Air; Indeks Kualitas Udara; Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah.

Tabel II.112
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				Target	Realisasi	Capaian
MISI 7		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana				
Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestar	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	58,70	73,95	74,17	100,30
		Indeks Kualitas Udara	74,92	75,22	73,63	97,89

		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92	36,06	39,17	108,62
		Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01	6	1,17	19,50
Capaian Rata- Rata						**81,58**

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029 dan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Pengukuran capaian sasaran ini dilakukan melalui beberapa indikator kinerja. Pada indikator Indeks Kualitas Air, target Tahun 2025 sebesar 73,95 terealisasi sebesar 74,17 dengan capaian 100,30%. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas air telah memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024 yakni 58,70 maka dapat dikatakan bahwa realisasi Tahun 2025 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja\ = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$rata-rata\ capaian\ = \frac{Jumlah\ Keseluruhan\ Capaian}{Banyak\ Indikator} = \frac{100{,}3\% + 97{,}89\% + 108{,}62\%}{3}$$

$$= 81{,}58\%$$

Selanjutnya, pada indikator Indeks Kualitas Udara, target pada Tahun 2025 sebesar 75,22 terealisasi sebesar 73,63 dengan capaian 97,89%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas udara belum mencapai target yang ditetapkan bahkan mengalami penurunan dibandingkan baseline Tahun 2024 yakni 74,92.

Pada indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan; target sebesar 36,06 pada Tahun 2025 terealisasi sebesar 39,17 dengan capaian 108,62%. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi tutupan lahan mengalami peningkatan yang melampaui target yang direncanakan dan jauh meningkat jika dibandingkan dengan baseline Tahun 2024 yaitu sebesar 28,92.

Namun demikian, pada indikator Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, target sebesar 6 pada Tahun 2025 hanya terealisasi sebesar 1,17 capaian 19,50%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum optimal dan masih jauh dari target yang ditetapkan bahkan mengalami penurunan dari baseline Tahun 2024 yang sebesar 2,01.

Sasaran ini didukung 4 (empat) program yaitu: Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI); Program Pengelolaan Persampahan dan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup melalui penanganan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan secara terukur dan berkelanjutan.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang teridentifikasi telah ditangani secara penuh, yang mencerminkan efektivitas sistem pengendalian lingkungan hidup di daerah. Program ini dapat dikategorikan sangat berhasil dalam memastikan respons terhadap permasalahan lingkungan.

Namun demikian, capaian 100% ini perlu dianalisis lebih lanjut dari aspek kualitas penanganan dan dampak jangka panjang, khususnya apakah penanganan tersebut telah mampu mencegah terjadinya pencemaran berulang serta memperbaiki kondisi lingkungan secara berkelanjutan. Dengan demikian, indikator ini masih berorientasi pada output (penanganan kasus) dan belum sepenuhnya mencerminkan outcome (perbaikan kualitas lingkungan).

Tabel II.113
Analis Kinerja Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Penanganan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	100	**100%**	973.909.120	577.721.422	**59,32%**	**1,69**	**Sangat Berhasil & Sangat Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp973.909.120, dengan realisasi anggaran sebesar Rp577.721.422 atau tingkat penyerapan sebesar 59,32%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	100 %
Penyerapan Anggaran	59,32 %
Rasio Efisiensi	1,69
Kategori Efisiensi	Sangat Efisien

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 59,32

≈ 1,69

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,69 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja maksimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah.

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Capaian 100% menunjukkan bahwa sistem penanganan lingkungan telah berjalan dengan baik.

Namun demikian, untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah, program perlu diarahkan pada:

- peningkatan kualitas lingkungan hidup secara nyata
- pengurangan sumber pencemaran
- pembangunan berwawasan lingkungan

Dengan demikian, program ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Faktor Pendorong :

1. Kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, adopsi teknologi ramah lingkungan dan penguatan regulasi melalui KLHS
2. Pemerintah melalui kementrian lingkungan hidup terus mengembangkan formulasi indeks kualitas air (IKA) agar lebih akurat dalam menggambarkan kondisi nyata dan merespons cepat penurunan mutu air di berbagai wilayah
3. KLHS memastikan prinsip berkelanjutan terintegrasi dalam RTRW (rencana tat ruang wilayah) dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah)
4. Adanya petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penanganan, pencegahan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kota makassar.

Faktor Penghambat :

1. Masih adanya sampah plastik yang menumpuk di sempadan sungai atau hulu sungai
2. Pemahaman masyarakat dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan hidup yang terkait dengan perwilayahannya perlu ditingkatkan, agar masyarakat mampu mencermati dan mengkritisi berbagai aktifitas yang akan berdampak penting terhadap lingkungan hidup, seperti pembangunan pusat aktifitas baru (pabrik,industri, perkotaan, pusat perbelanjaan)
3. Pengawasan, penegakkan hukum dan evaluasi perijinan teknis peningkatan pengawasan dan penegakkan hukum terhadap kegiatan atau usaha yang limbahnya mengalir langsung ke badan air perlu menjadi perhatian khusus
4. Koordinasi pentahelix dan antar OPD pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah,akademisi, pelaku usaha, komunitas dan media perlu di optimalkan untuk mendukung upaya pemulihan kualitas air secara menyeluruh.

Tindak Lanjut yang Di lakukan :

1. Perbaikan sistem pengelolaan persampahan dari sumber dan terintegrasi sehingga meminimalisir pembuangan sampah ke badan air
2. Melakukan edukasi dan penaatan dan penegakkan hukum lingkungan mulai dari saat penyusunan dokumen persetujuan lingkungan hingga saat operasional
3. Pengawasan ketat terhadap Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang mengalirkan limbah ke sungai menjadi langkah penting untuk meminimalkan pencemaran

4. Sinergi antar pihak memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif dan terintegrasi dalam mengatasi tantangan pencemaran air. Dan penerapan strategi perbaikan yang dituangkan dalam KLHS menjadi salah satu pengendalian terhadap pencemaran lingkungan.

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sebagai salah satu indikator utama keseimbangan ekologi perkotaan.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik, dengan baseline sebesar 5,66%, target tahun 2025 sebesar 6,23%, dan realisasi sebesar 4,70%, sehingga capaian kinerja berada pada 75,44%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target peningkatan RTH publik belum tercapai, dengan deviasi sebesar 1,53 poin dari target. Bahkan jika dibandingkan dengan baseline, realisasi tahun berjalan justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap keberadaan RTH, baik akibat alih fungsi lahan, keterbatasan ruang, maupun belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan cukup berhasil namun belum optimal, serta belum mampu menghasilkan peningkatan signifikan terhadap luasan RTH publik sebagaimana yang ditargetkan.

Tabel II.114
Analis Kinerja Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Pengelolaan RTH Publik	6,23	4,70	**75,44%**	21.598.453.786	17.565.032.536	**81,33%**	**0,93**	**Cukup Berhasil & Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp21.598.453.786, dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.565.032.536 atau tingkat penyerapan sebesar 81,33%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 75,44 ÷ 81,33

≈ 0,93

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,93 menunjukkan bahwa program berada pada kategori efisien, namun belum optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan anggaran relatif sebanding dengan capaian kinerja, tetapi belum mampu menghasilkan output yang maksimal.

Analisis Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam:

- menjaga keseimbangan ekologi perkotaan
- meningkatkan kualitas udara dan lingkungan
- mendukung pembangunan kota berkelanjutan

Namun demikian, belum tercapainya target serta penurunan dibanding baseline menunjukkan bahwa kontribusi program terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup masih terbatas dan perlu diperkuat.

Faktor Pendorong :

1. Adanya Perwali no.71 tahun 2019 yang menjadi acuan operasional bagi instansi teknis dalam mengatur, membina dan mengawasi jalannya pengelolaan RTH di kota makassar.
2. Adanya partisipasi dari pihak swasta melalui program CSR terhadap pembangunan dan pemeliharaan lingkungan hidup terutama RTH Kota Makassar.
3. Adanya regulasi yang mengatur tentang CSR berupa Perda Kota Makassar Nomor 2 tahun 2016 tentang tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan
4. Kebijakan dan komitmen pemerintah kota dalam melakukan pengawasan dan pengendalian ruang terbuka hijau

Faktor Penghambat :

1. Adanya pelimpahan kewenangan sesuai SK Walikota Makassar dimana Dinas lingkungan hidup kota makassar hanya focus pada pengelolaan pohon dan pengelolaan taman di kelola oleh kecamatan.
2. Pemerintah kota makassar dalam hal ini Dinas lingkungan hidup masih mengelola Ruang terbuka hijau (RTH) privat karena adanya permintaan dari masyarakat sehinggga mempengaruhi kinerja /tupoksi dinas
3. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) public di kota makassar tidak seluruhnya di kelola atau menjadi tanggungjawab pemerintah kota makassar namun ada juga yang di kelola pemerintah provinsi

Tindak Lanjut yang Dilakukan :

1. Membuat perencanaan yang komprehensif terkait pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Makassar;
2. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan pihak-pihak eksternal dan stakeholder terkait pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan taman kota makassar.

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah melalui optimalisasi pengolahan di fasilitas pengolahan sampah, guna mengurangi beban timbulan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dengan baseline sebesar 2,01%, target tahun 2025 sebesar 6%, dan realisasi sebesar 1,17%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 19,5%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak tercapai secara signifikan, dengan deviasi sebesar 4,83 poin dari target. Bahkan, jika dibandingkan dengan baseline, realisasi tahun berjalan justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kapasitas dan efektivitas pengolahan sampah belum mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah.

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan rendah dan belum berhasil, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengelolaan sampah di daerah.

Tabel II.115
Analis Kinerja Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	6	1,17	**19,50%**	61.367.165.267	47.819.194.266	**77,92%**	**0,25**	**Tidak Berhasil & Tidak Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp61.367.165.267, dengan realisasi anggaran sebesar Rp47.819.194.266 atau tingkat penyerapan sebesar 77,92%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 19,5 ÷ 77,92

≈ 0,25

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,25 menunjukkan bahwa program berada pada kategori tidak efisien, dimana penggunaan anggaran yang relatif besar belum mampu menghasilkan capaian kinerja yang memadai.

Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara:

- input (anggaran besar)
- output (capaian sangat rendah)

Dengan kata lain, program belum mampu mengonversi sumber daya yang tersedia menjadi hasil yang optimal.

Faktor Pendorong :

1. Adanya peraturan perundang-undangan kementrian lingkungan hidup yang lengkap dan efektif
2. Kebijakan dan komitmen pemerintah dalam melakukan pemantauan TPS3R dan BSU
3. Terbentuknya tim terpadu antara penyuluh pendamping TPS3R dan penyuluh bank sampah antara sub koordinator edukasi,promosi monitoring dan evaluasi persampahan
4. Terbentuknya tim terpadu antara fungsional, BSP dan sub coordinator edukasi,promosi monitoring dan evaluasi persampahan terhadap pengelolaan persampahan
5. Bertambahnya BSU dan TPS3R kegiatan pemilahan sampah di kota makassar dapat terpilah sesuai dengan jenisnya
6. Adanya laporan bulanan dari penyuluh TPS3R dan penyuluh bank sampah
7. Adanya koordinasi dengan sector kecamatan mengenai kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
8. Adanya SOP UPT bank sampah yang jelas dan terarah.

Faktor Penghambat/Kendala :

1. Laju pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi sehingga mempercepat timbulan sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan yang ada
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing
3. Masih banyak pelaku usaha dan kegiatan yang belum optimal dalam melakukan pengurangan sampah
4. Masih kurangnya pemahaman pengurus dan nasabah BSU dalam pemilihan sampah
5. Masih kurang prasarana pengomposan untuk pengelolaan sampah organik di rumah tangga
6. Masih perlu edukasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat bagaimana pengurangan sampah dari sumber

Tindak Lanjut Yang Dilakukan :

1. Menyempurnakan fungsi lembaga pengelola sampah agar tidak terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi
2. Melakukan edukasi berkelanjutan berupa sosialisasi langsung ke warga
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyetorkan hasil pemilahan sampah ke bank sampah unit yang telah terbentuk di lingkungan masing-masing
4. Melakukan Koordinasi dan Meningkatkan Kinerja bank sampah di masing-masing kecamatan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pemilahan dan pemanfaatan sampah organik maupun sampah anorganik
5. Melakukan koordinasi secara aktif dengan pemerintah dan masyarakat terkait sistem pengelolaan persampahan yang telah diatur dalam undang-undang.

6. Melakukan koordinasi lebih intens dengan penyuluh TPS 3R dan penyuluh Bank Sampah untuk memaksimalkan pekerjaan di masing-masing wilayah kerjanya.

7. Melakukan sosialisasi sebagai upaya Meningkatkan peran serta dan Partisipasi masyarakat dan OPD untuk mengurangi sampah.

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini memiliki indikator kinerja program (outcome) berupa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan dengan target sebesar 91,33%. Untuk mendukung pencapaian outcome tersebut, dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat, khususnya melalui Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan, dengan indikator kinerja berupa jumlah urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan, dalam hal ini pelayanan persampahan.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat direncanakan melalui survei kepada warga pada lingkup kecamatan se-Kota Makassar dengan menggunakan instrumen kuosioner untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan persampahan. Namun demikian, pada Tahun 2025 pelaporan pengukuran indikator tersebut belum dapat dilaksanakan akibat keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Meskipun pengukuran indeks belum terlaksana, pelayanan persampahan seperti pengangkutan dan penjemputan sampah tetap dilaksanakan oleh kecamatan. Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, khususnya penanggung jawab kegiatan yang belum sepenuhnya memahami proses pelaksanaan pekerjaan secara optimal. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana belum memadai, terutama terkait kondisi armada pengangkut sampah (truck dan *tangkasa*) yang mengalami kerusakan serta membutuhkan waktu perbaikan yang relatif lama.

Tabel II.116
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

NO.	KECAMATAN	KINERJA TAHUN 2025 (%)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Biringkanaya	90	85	94,44
2	Bontoala	90	89	98,89
3	Mariso	90	86,34	95,93
4	Mamajang	91,33	87,42	93,86
5	Makassar	95	90	100
6	Manggala	95	87,90	92,53
7	Rappocini	90	85	94,44
8	Tamalate	90	87	96,67
9	Tallo	90	100	111,11
10	Tamalanrea	90	94,44	104,93
11	Ujung Pandang	90	88	97,78
12	Ujung Tanah	90	90	100

13	Panakkukang	100	75	75
14	Wajo	90	90	100
15	Kepulauan Sangkarrang	100	95,19	95,19
JUMLAH		**1.381,33**	**1.330,29**	**96,31**
RATA- RATA		**92,09**	**88,69**	

Sumber Data: LKjIP Kecamatan lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Program Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan nilai capaian rata- rata dari 15 kecamatan di lingkup Kota Makassar dengan target kinerja 92,09% yang terealisasi sebesar 88,69% sehingga dapat dihitung capaian kinerja dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rata- Rata Capaian Kinerja Kecamatan} = \frac{\text{Rata- rata realisasi kinerja}}{\text{Rata- rata target kinerja}} \times 100\%$$

$$= \frac{88{,}69}{92{,}09} \times 100\%$$

$$= 96{,}31\%$$

Untuk Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan diperoleh dengan cara pemberian kuosioner kepada masyarakat yang berkunjung ke Kantor Lurah dan Kantor Camat dengan 3 (tiga) unsur kategori penilaian sebagai berikut:

1. Sistem penjemputan sampah yang ada di wilayah;
2. Sarana dan prasaranan persampahan yang ada;
3. Sistem pelayanan persampahan yang telah diterapkan kepada masyarakat.

Tabel II.117
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	2024			2025		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Playanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kecamatan	96,67	93,73	96,96	92,09	88,69	96,31

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Kota Makassar Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025 pada 15 kecamatan, secara umum capaian berada pada kategori baik dengan rata-rata realisasi sebesar 88,69% terhadap target rata-rata 92,09%. Secara agregat, tingkat capaian kinerja mencapai 96,31%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar kecamatan telah mampu mendekati target yang ditetapkan.

Beberapa kecamatan menunjukkan kinerja sangat baik bahkan melampaui target, antara lain Kecamatan Tallo (111,11%), Tamalanrea (104,93%), serta Kecamatan Makassar, Ujung Tanah dan Wajo yang masing-masing mencapai 100%. Hal ini

mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan dukungan tata kelola yang optimal di wilayah tersebut.

Di sisi lain, masih terdapat kecamatan dengan capaian relatif rendah yang perlu mendapat perhatian, terutama Kecamatan Panakkukang (75%), Manggala (92,53%), dan Mamajang (93,86%). Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan pembinaan, peningkatan kapasitas pelaksana, serta optimalisasi dukungan sarana dan prasarana.

Tabel II.118
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	92,09	88,69	96,31	186.255.768.175,-	158.367.408.011,-	85,03%	Efisien

Sumber Data: LKjIP Kecamatan Lingkup Kota Makassar Tahun 2025

Anggaran keuangan pada tabel di atas adalah total dari 15 (lima belas) kecamatan. Begitu pun dengan indikator kinerja, merupakan nilai rata- rata dari 15 kecamatan.

Dengan capaian kinerja sebesar 96,31% dan capaian anggaran sebesar 85,03% maka pengelolaan anggaran dari 15 kecamatan untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dapat dikatakan "efisien".

Faktor Pendukung:

a. Tingginya semangat kerja para satgas dalam menjalankan tugasnya sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan lancar;

b. Tingginya animo Masyarakat dalam pengelolaan sampah, misalnya daur ulang sampah menjadi barang bernilai maupun pemilahan sampah melalui bank sampah unit yang tersebar di kelurahan.

Faktor Penghambat:

a. Kurangnya armada yang tersebar di kelurahan

b. Masih adanya warga yang belum ingin berlangganan retribusi sampah dan menyebabkan sampah berserakan di tempat pembuangan sementara

c. Kurangnya kesadaran oleh anggota satgas terhadap pentingnya pemeliharaan armada persampahan.

Tindak Lanjut:

a. Melakukan sosialisasi dan edukasi bagi Masyarakat terkait masalah persampahan dan pentingnya kebersihan lingkungan

b. Melakukan cek fisik berkala terhadap armada kebersihan

c. Mengadakan pengawasan dan evaluasi di setiap kelurahan masing- masing

25. Sasaran "Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim"

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim memiliki 2 (dua) indikator yaitu Indeks Ketahan Daerah dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tabel II.119
Capaian Indikator Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Baseline 2024	2025		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 7		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup serta Mitigasi Bencana				
Menigkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,46	0,47	0,48	102,13
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	N/A	32,46	N/A	N/A
Capaian Rata- Rata						**102,13**

Sumber Data: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, LKjIP BPBD dan LKjIP Dinas Lingkungan Hidup

Pada indikator Indeks Ketahanan Daerah, nilai baseline Tahun 2024 tercatat 0,46 dengan target Tahun 2025 sebesar 0,47 dan realisasi yang dicapai sebesar 0,48 sehingga tingkat capaian mencapai 102,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas ketahanan daerah terhadap bencana telah melampaui target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari baseline.

$$Persentase\ capaian\ indikator\ kinerja = \frac{Realisasi\ Kinerja}{Target\ Kinerja} x100\%$$

$$= \frac{0{,}48\%}{0{,}47} = 102{,}13\%$$

Selanjutnya pada indikator Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK), tidak terdapat data realisasi dan capaian Tahun 2025 meskipun memiliki target sebesar 32,46 sehingga perbandingan realisasi dengan baseline Tahun 2024 belum bisa disajikan.

Sasaran Meningkatnya Kapasitas Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim didukung 5 (lima) program yaitu: Program Penanggulangan Bencana; Program Penangan Bencana; Program Pencegahan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran; Program Pengelolaan Persampahan serta Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Program Penanggulangan Bencana

Program Penanggulangan Bencana dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam pengurangan risiko bencana melalui penyediaan informasi kebencanaan, penguatan pencegahan dan kesiapsiagaan, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban.

Capaian kinerja program diukur melalui 3 indikator utama sebagai berikut:

1. Penyediaan Informasi Rawan Bencana

Target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat sasaran telah memperoleh akses terhadap informasi rawan bencana.

2. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dengan capaian 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa kegiatan mitigasi dan kesiapsiagaan telah menjangkau seluruh sasaran yang direncanakan.

3. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Target sebesar 100%, realisasi sebesar 100%, dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh korban bencana telah memperoleh layanan penyelamatan secara optimal.

Analisis Konsolidasi Kinerja

Rata-rata capaian kinerja program:

→ (100 + 100 + 100) ÷ 3 = 100%

Secara agregat, program menunjukkan kinerja sangat berhasil (full achievement), baik dari aspek preventif (informasi dan kesiapsiagaan) maupun responsif (penyelamatan dan evakuasi).

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh:

- Pagu anggaran: Rp15.060.354.401
- Realisasi anggaran: Rp13.957.231.373
- Penyerapan anggaran: 92,67%

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Rata-rata Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 92,67

≈ 1,08

Interpretasi

Faktor pendorong keberhasilan: penyampaian informasi kepada masyarakat makin mudah melalui media cetak, online, media sosial, papan informasi, buku saku, brosur, pelatihan dan lain- lain.

Faktor penghambat: sarana dan pra sarana yang kurang memadai.

Solusi yang dilakukan: meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana; layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dan meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban terhadap bencana dengan menambah sarana dan pra sarana informasi rawan bencana.

Program Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana dilaksanakan untuk memastikan terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi warga negara korban bencana pada fase pasca

tanggap darurat, sebagai bagian dari upaya pemulihan kondisi sosial masyarakat terdampak.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial, dengan target sebesar 100%. Pada tahun 2025, realisasi yang dicapai juga sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh korban bencana yang teridentifikasi telah terlayani secara penuh, yang mencerminkan efektivitas mekanisme respons dan distribusi bantuan sosial pada fase pasca tanggap darurat. Program ini dapat dikategorikan sangat berhasil dalam menjamin perlindungan sosial bagi korban bencana.

Namun demikian, capaian 100% ini perlu dicermati lebih lanjut dari aspek kualitas layanan dan ketepatan sasaran, khususnya terkait:

- kecepatan distribusi bantuan,
- kecukupan jenis bantuan yang diberikan, serta
- keberlanjutan dukungan bagi pemulihan sosial ekonomi korban.

Dengan demikian, indikator yang digunakan masih berorientasi pada cakupan layanan (coverage) dan belum sepenuhnya menggambarkan dampak pemulihan (recovery outcome).

Tabel II.120
Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Penanggulangan Bencana

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Korban Bencana yang Mendapat Perlindungan & Jaminan Sosial	100	100	**100%**	2.457.806.100	1.794.960.928	**73,30%**	**1,36**	**Sangat Berhasil & Sangat Efisien**

Sumber: LKjIP Dinas Sosial Kota Makssar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp2.457.806.100, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.794.960.928 atau tingkat penyerapan sebesar 73,30%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 73,30

≈ 1,36

Uraian	Nilai
Capaian Kinerja	100 %
Penyerapan Anggaran	73,30 %
Rasio Efisiensi	1,36

Uraian	Nilai
Kategori Efisiensi	Sangat Efisien

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,36 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja maksimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah.

Program ini memiliki kontribusi strategis dalam:

- menjaga stabilitas sosial pascabencana
- mempercepat pemulihan masyarakat terdampak
- mengurangi risiko kerentanan sosial

Capaian 100% menunjukkan bahwa program telah mampu memberikan perlindungan dasar secara menyeluruh. Namun, untuk memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah, program perlu diarahkan pada penguatan ketahanan masyarakat terhadap bencana (resilience), bukan hanya penanganan pasca kejadian.

Terdapat 7.019 korban bencana alam sepanjang Tahun 2025, pelayanan penanganan bencana dapat terlaksana dengan baik atas dukungan Tim Taruna Siaga Bencana dan telah terbentuknya Kampung Siaga Bencana di beberapa wilayah rawan bencana; namun masih membutuhkan dukungan data dan tim penanganan benxana yang lebih responsif utamanya dalam identifikasi dan penanganan korban bencana disabilitas dan kelompok rentan lainnya agar bantuan lebih sesuai dan tepat sasaran.

Faktor Pendukung:

a. Adanya komitmen pimpinan dan aparatur serta keterlibatan Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam penjangkauan lapangan

b. Adanya dukungan koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga layanan sosial da;am pelaksanaan rehabilitasi sosial

c. Ketersediaan mekanisme penanganan pengaduan dan kedaruratan dalam menjamin keterjangkauan layanan kepada PMKS sesuai kebutuhan di lapangan

Faktor Penghambat:

a. Belum ditetapkannya populasi PMKS/PPKS yang seharusnya menjadi sasaran penerima layanan rehabilitasi sosial sehingga menyulitkan baseline, pengukuran kinerja serta penentuan target layanan secara proporsional. Sehingga berdampak pada keterbatasan dalam mengukur tingkat cakupan layanan rehabilitasi sosial secara lebih akurat.

Tindak Lanjut:

a. Dinas Sosial akan mendorong penetapan dan pemutakhiran data PMKS/PPKS secara terstruktur dan berbasis wilayah

b. Memperkuat koordinas lintas sektor dalam penyusunan basis data sasaran

c. Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja dengan mengacu pada Renstra dan IKU Tahun 2025-2029 agar lebih realistis, terukur dan selaras dengan kewenangan serta kondisi riil pelaksanaan di lapangan serta mencapai sasaran rehabilitasi sosial yaitu memulihkan fungsi sosial manusia, bukan sekedar menyelesaikan masalah sesaat.

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini dilaksanakan dalam rangka menjamin keselamatan masyarakat melalui layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran serta peningkatan kecepatan respons penanganan kejadian kebakaran.

Program diukur melalui dua indikator kinerja utama dengan hasil sebagai berikut:

Target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai
1. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh korban kebakaran yang teridentifikasi telah memperoleh layanan penyelamatan secara penuh.

2. Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (≤15 menit)

Target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian juga mencapai 100%. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh kejadian kebakaran telah ditangani sesuai standar waktu tanggap yang ditetapkan, yang menjadi indikator utama efektivitas operasional layanan pemadam kebakaran.

Tabel II.121
Analisis Capaian Kinerja Anggaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Layanan Penyelamatan & Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	100%	27.911.232.900	25.566.195.330	91,60%		
Penanganan Kebakaran sesuai Response Time (≤15 menit)	100	100	100%					
Rata-rata Kinerja Program			**100%**	**27.911.232.900**	**25.566.195.330**	**91,60%**	**1,09**	**Sangat Berhasil &**

								Sangat Efisien

Sumber: LKjIP Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Konsolidasi Kinerja

Secara agregat, kedua indikator menunjukkan capaian 100%, sehingga rata-rata capaian kinerja program adalah:

(100 + 100) ÷ 2 = 100%

Hal ini menempatkan program pada kategori sangat berhasil, dengan kinerja optimal baik dari sisi cakupan layanan maupun kecepatan respons.

Namun demikian, capaian ini masih berorientasi pada output layanan (coverage dan response time), dan belum sepenuhnya menggambarkan outcome, seperti:

- penurunan jumlah kejadian kebakaran
- pengurangan kerugian materiil
- peningkatan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp27.911.232.900, dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.566.195.330 atau tingkat penyerapan sebesar **91,60%**.

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Rata-rata Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 100 ÷ 91,60

≈ 1,09

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,09 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien, dimana capaian kinerja maksimal dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang relatif optimal.

Faktor Pendorong :

1. Dukungan Anggaran dari Pemerintah Kota Makassar
2. Alur kas yang sudah terencana dengan baik
3. Adanya regulasi dan standar pelayanan minimal (SPM) yang mengatur pelayanan Damkar.
4. Dukungan pimpinan dan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi.
5. Adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di bidang administrasi dan pelaporan.
6. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan laporan.
7. Kerja sama yang baik antar bidang dalam pengumpulan dan pengolahan data kegiatan.

Faktor Penghambat :

1. Keterbatasan Anggaran Pemerintah Kota Makassar
2. Pesatnya Pertumbuhan Pembangunan di Kota Makassar tidak sebanding dengan kesiapan Sarana Prasarana yang tersedia
3. Keterbatasan SDM administrasi yang memahami sistem pelaporan dan pengarsipan.
4. Sarana dan prasarana administrasi yang belum memadai, seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi pendukung.
5. Kurangnya koordinasi antar bidang dalam penyampaian data laporan kegiatan.
6. Keterlambatan pengumpulan data dari lapangan (data kebakaran, penyelamatan, dan kegiatan pencegahan).
7. Belum optimalnya sistem digitalisasi arsip dan pelaporan, sehingga masih banyak menggunakan sistem manual.

Tindak Lanjut :

1. Menyediakan anggaran yang cukup untuk pengadaan, pemeliharaan, dan peningkatan sarana proteksi kebakaran, serta memastikan dana digunakan secara efisien."
2. Upaya sinkronisasi dan sinergitas setiap pelaksanaan dan perencanaan Program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran kota Makassar dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar
3. Meningkatkan kapasitas SDM administrasi melalui pelatihan pengelolaan data dan pelaporan.
4. Mengembangkan sistem administrasi berbasis digital untuk mempermudah pengarsipan dan pelaporan.
5. Memperkuat koordinasi antar bidang agar data kegiatan dapat disampaikan tepat waktu.
6. Melengkapi sarana prasarana administrasi seperti komputer, jaringan internet, dan aplikasi pengelolaan data.
7. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap administrasi dan pelaporan kegiatan Damkar.

Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengelolaan sampah melalui optimalisasi pengolahan di fasilitas pengolahan sampah, guna mengurangi beban timbulan sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir.

Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, dengan baseline sebesar 2,01%, target tahun 2025 sebesar 6%, dan realisasi sebesar 1,17%, sehingga capaian kinerja hanya mencapai 19,5%.

Capaian ini menunjukkan bahwa target kinerja tidak tercapai secara signifikan, dengan deviasi sebesar 4,83 poin dari target. Bahkan, jika dibandingkan dengan baseline, realisasi tahun berjalan justru mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa kapasitas dan efektivitas pengolahan sampah belum mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah.

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan rendah dan belum berhasil, serta belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengelolaan sampah di daerah.

Tabel II.122
Analis Kinerja Program

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	6	1,17	**19,50%**	61.367.165.267	47.819.194.266	**77,92%**	**0,25**	**Tidak Berhasil & Tidak Efisien**

Sumber: Matriks IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh pagu anggaran sebesar Rp61.367.165.267, dengan realisasi anggaran sebesar Rp47.819.194.266 atau tingkat penyerapan sebesar 77,92%.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

Rasio Efisiensi = Capaian Kinerja ÷ Penyerapan Anggaran

= 19,5 ÷ 77,92

≈ 0,25

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 0,25 menunjukkan bahwa program berada pada kategori tidak efisien, dimana penggunaan anggaran yang relatif besar belum mampu menghasilkan capaian kinerja yang memadai.

Hal ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara:

- input (anggaran besar)
- output (capaian sangat rendah)

Dengan kata lain, program belum mampu mengonversi sumber daya yang tersedia menjadi hasil yang optimal.

Faktor Pendorong :

1. Adanya peraturan perundang-undangan kementrian lingkungan hidup yang lengkap dan efektif
2. Kebijakan dan komitmen pemerintah dalam melakukan pemantauan TPS3R dan BSU
3. Terbentuknya tim terpadu antara penyuluh pendamping TPS3R dan penyuluh bank sampah antara sub koordinator edukasi,promosi monitoring dan evaluasi persampahan
4. Terbentuknya tim terpadu antara fungsional, BSP dan sub coordinator edukasi,promosi monitoring dan evaluasi persampahan terhadap pengelolaan persampahan
5. Bertambahnya BSU dan TPS3R kegiatan pemilahan sampah di kota makassar dapat terpilah sesuai dengan jenisnya
6. Adanya laporan bulanan dari penyuluh TPS3R dan penyuluh bank sampah

7. Adanya koordinasi dengan sector kecamatan mengenai kondisi sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
8. Adanya SOP UPT bank sampah yang jelas dan terarah.

Faktor Penghambat/Kendala :

1. Laju pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi sehingga mempercepat timbulan sampah yang melebihi kapasitas pengelolaan yang ada
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah di rumah masing-masing
3. Masih banyak pelaku usaha dan kegiatan yang belum optimal dalam melakukan pengurangan sampah
4. Masih kurangnya pemahaman pengurus dan nasabah BSU dalam pemilihan sampah
5. Masih kurang prasarana pengomposan untuk pengelolaan sampah organik di rumah tangga
6. Masih perlu edukasi, pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat bagaimana pengurangan sampah dari sumber

Tindak Lanjut Yang Dilakukan :

1. Menyempurnakan fungsi lembaga pengelola sampah agar tidak terjadi tumpeng tindih tugas dan fungsi
2. Melakukan edukasi berkelanjutan berupa sosialisasi langsung ke warga
3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menyetorkan hasil pemilahan sampah ke bank sampah unit yang telah terbentuk di lingkungan masing-masing
4. Melakukan Koordinasi dan Meningkatkan Kinerja bank sampah di masing-masing kecamatan untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pemilahan dan pemanfaatan sampah organik maupun sampah anorganik
5. Melakukan koordinasi secara aktif dengan pemerintah dan masyarakat terkait sistem pengelolaan persampahan yang telah diatur dalam undang-undang.
6. Melakukan koordinasi lebih intens dengan penyuluh TPS 3R dan penyuluh Bank Sampah untuk memaksimalkan pekerjaan di masing-masing wilayah kerjanya.
7. Melakukan sosialisasi sebagai upaya Meningkatkan peran serta dan Partisipasi masyarakat dan OPD untuk mengurangi sampah.

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program Penyelenggaraan LLAJ dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja lalu lintas serta mendukung keselamatan dan kelancaran transportasi melalui penyediaan infrastruktur dan manajemen lalu lintas yang memadai.

Program ini diukur melalui dua indikator kinerja dengan capaian sebagai berikut:

1. Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/Kota

Target sebesar 0,47, dengan realisasi sebesar 0,47, sehingga capaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kinerja lalu lintas berada pada tingkat yang sesuai dengan target yang ditetapkan, mencerminkan stabilitas dalam pengelolaan lalu lintas.

2. Persentase Kelengkapan Jalan terhadap Kondisi Ideal

Target sebesar 60%, dengan realisasi sebesar 106%, sehingga capaian mencapai 176,67%. Capaian ini menunjukkan adanya overachievement signifikan, dimana penyediaan perlengkapan jalan melampaui target yang direncanakan.

Tabel II.123
Analis Capaian Kinerja Anggaran Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Penyerapan (%)	Rasio Efisiensi	Kategori Kinerja
Kinerja Lalu Lintas Kab/Kota	0,47	0,47	100%	103.683.405.586	89.883.443.584	86,69%		
Persentase Kelengkapan Jalan	60%	106%	176,67%					
Rata-Rata Kinerja			138,34%	103.683.405.586	89.883.443.584	86,69%	1,60	Sangat Berhasil & Sangat Efisien

Sumber: LKjIP Dinas Perhubungan Kota Makassar Tahun 2025

Analisis Konsolidasi Kinerja

Rata-rata capaian kinerja program:

➞ (100 + 176,67) ÷ 2 = 138,34%

Secara agregat, program menunjukkan kinerja sangat tinggi (overachievement).

Namun demikian, terdapat ketidakseimbangan antar indikator, dimana:

- indikator infrastruktur (kelengkapan jalan) sangat dominan
- indikator outcome utama (kinerja lalu lintas) hanya mencapai target tanpa peningkatan signifikan

Interpretasi Kinerja

- Overachievement pada kelengkapan jalan tidak berbanding lurus dengan peningkatan kinerja lalu lintas
- Hal ini mengindikasikan bahwa:

  peningkatan input (infrastruktur) belum sepenuhnya menghasilkan outcome (kinerja lalu lintas)

Dengan demikian, kinerja program dapat dikategorikan:

sangat berhasil secara agregat, namun belum optimal secara efektivitas outcome

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program ini didukung oleh:

- Pagu anggaran: Rp103.683.405.586
- Realisasi anggaran: Rp89.883.443.584
- Penyerapan anggaran: 86,69%

Perhitungan Efisiensi:

Rasio Efisiensi = Rata-rata Capaian ÷ Penyerapan Anggaran

= 138,34 ÷ 86,69

≈ 1,60

Interpretasi:

Nilai rasio efisiensi sebesar 1,60 menunjukkan bahwa program berada pada kategori sangat efisien.

Faktor Penghambat :

1. Faktor penghambat kinerja lalu lintas antara lain meningkatnya jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan, adanya parkir di badan jalan, serta aktivitas masyarakat di sekitar ruas jalan yang mengurangi kapasitas efektif jalan. Selain itu, rendahnya kedisiplinan sebagian pengguna jalan dalam mematuhi rambu dan aturan lalu lintas juga turut mempengaruhi kelancaran arus lalu lintas.
2. Faktor penghambat antara lain keterbatasan waktu pelaksanaan karena harus menyesuaikan kondisi lalu lintas, keterbatasan ruang milik jalan di beberapa lokasi, serta adanya kerusakan atau kehilangan perlengkapan jalan akibat cuaca, kecelakaan, maupun vandalisme. Selain itu, proses koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan lokasi pemasangan juga memerlukan waktu.

Faktor Pendorong :

1. Faktor pendorong kinerja lalu lintas antara lain adanya pengaturan dan manajemen lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, pemasangan rambu dan perlengkapan jalan yang memadai, serta koordinasi dengan stakeholder terkait dalam menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas juga turut mendukung terciptanya arus lalu lintas yang lebih tertib dan lancar.
2. Faktor pendorong antara lain adanya dukungan anggaran, komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, serta koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait sehingga pemasangan perlengkapan jalan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Tindak Lanjut :

1. Tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja lalu lintas adalah dengan memperkuat manajemen dan rekayasa lalu lintas pada titik-titik rawan kemacetan,

meningkatkan pengawasan serta penertiban parkir di badan jalan, dan menambah pemasangan rambu serta perlengkapan jalan. Selain itu, akan dilakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk meningkatkan ketertiban dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas guna mendukung kelancaran arus lalu lintas.

2. Tindak lanjut yang dilakukan adalah meningkatkan perencanaan kebutuhan perlengkapan jalan melalui survei lapangan secara berkala, memperkuat koordinasi dengan pihak terkait dalam penentuan lokasi pemasangan, serta meningkatkan pengawasan dan pemeliharaan perlengkapan jalan agar tetap berfungsi dengan baik.

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Tahun 2025 dibandingkan target RPJMD Tahun 2030 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.124
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN (%)
			2030	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	20,26	19,1	94,27
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,80	19,9	95,67
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	9,17	9,6	95,312
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	246.34	176.28	71,56
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,67	0,67	100
4	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	2,20	2,69	77,73
		Indeks Ketahanan Pangan	88,25	76,42	86,6
5	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	9,5	5,5	57,90
6	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan (Nilai)	82,38	82,05	99,6
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	76,27	75,6	99,12

8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun	27.097	18.878	69,67
9	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	91,99	84,74	92,19
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryawan	34,77	24,48	70,4
10	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	100	50	50
11	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,75	4,5	94,74
12	Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	76,27	6,93	9,09
13	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	5.665.491	6.268.077	110,64
		Rata-rata lama tinggal wisatawan (Hari)	1,8	2,47	137,22
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda (%)	13,33	13,33	100
		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan (%)	16,66	19,44	116,69
15	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)	6.310	5.081	80,52
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital (%)	24,31	10,73	44,14
16	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Nilai)	81,50	68,94	84,59
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Nilai)	4,1	N/A	N/A
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK (Nilai)	90	84,2	93,56
17	Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	60,01	43,90	73,15
18	Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran (Skor)	5,357	N/A	N/A

19	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender (Nilai)	0,165	N/A	N/A
20	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (Nilai)	75,44	N/A	N/A
21	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda (Nilai)	69	67,17	86,48
		Indeks Pembangunan Keolahragaan (Skor)	0,602	0,542	90,03
22	Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio (Nilai)	0,334	0,391	82,934
23	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	45,34	N/A	N/A
24	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Nilai)	74,95	74,17	98,96
		Indeks Kualitas Udara (Nilai)	76,72	73,63	95,97
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Nilai)	36,41	39,17	107,58
		Timbulan Sampah yang Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah (%)	35	1,17	3,34
25	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,48	92,31
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) (%)	44,60	N/A	N/A

Sumber: RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, LKjIP SKPD Tahun 2025, Setara Institut, BPS Kota Makassar dan BPS Prov. Sulsel

Secara umum, capaian kinerja pembangunan Kota Makassar tahun berjalan menunjukkan bahwa sebagian indikator strategis telah berada pada jalur yang tepat, namun masih terdapat sejumlah indikator dengan deviasi signifikan yang memerlukan perhatian serius dan langkah korektif yang terarah.

Pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah, kinerja sektor industri pengolahan dan perdagangan besar/eceran menunjukkan capaian yang cukup baik, masing-masing sebesar 94,27% dan 95,67%. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur ekonomi daerah bergerak menuju arah yang ditargetkan, meskipun masih diperlukan penguatan untuk mencapai target optimal RPJMD.

Pada sasaran peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 95,31%, yang relatif mendekati target. Namun demikian, indikator PDRB per kapita baru mencapai 71,56%, menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat belum optimal dan masih memerlukan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

Untuk kemandirian fiskal daerah, rasio pajak daerah terhadap PDRB telah mencapai 100%, yang menunjukkan kinerja optimal dan konsistensi dalam peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Pada sasaran stabilitas harga dan ketahanan pangan, tingkat inflasi hanya mencapai 77,73% dari target, yang menunjukkan adanya tekanan inflasi di atas target RPJMD. Sementara itu, indeks ketahanan pangan mencapai 86,6%, yang masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sistem pangan daerah.

Pada realisasi investasi daerah, capaian sebesar 57,90% menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi masih relatif rendah dibandingkan target RPJMD, sehingga diperlukan strategi peningkatan daya tarik investasi dan kemudahan berusaha.

Di bidang pendidikan dan kesehatan, capaian indikator relatif tinggi. Indeks pendidikan mencapai 99,6% dan usia harapan hidup mencapai 99,12%, yang menunjukkan kinerja sangat baik dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Namun demikian, pada daya beli masyarakat, pengeluaran per kapita baru mencapai 69,67%, mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat masih belum merata.

Pada infrastruktur, indeks layanan kebinamargaan mencapai 92,19% (cukup baik), sementara layanan keciptakaryaan masih rendah di angka 70,4%, menunjukkan ketimpangan kualitas layanan infrastruktur yang perlu diperbaiki.

Dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, ketersediaan dokumen RDTR baru mencapai 50%, yang menunjukkan perlunya percepatan penyusunan dokumen tata ruang sebagai dasar pengendalian pembangunan.

Pada aspek IPTEK dan inovasi, indeks kapabilitas inovasi mencapai 94,74% dan peningkatan inovasi pembangunan daerah menunjukkan capaian sangat tinggi. Hal ini mencerminkan adanya penguatan ekosistem inovasi, meskipun perlu dijaga konsistensinya.

Di sektor pariwisata, kinerja sangat baik dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 110,64% dan lama tinggal wisatawan mencapai 137,22%, yang menunjukkan sektor ini menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk budaya, seluruh indikator menunjukkan capaian optimal hingga melampaui target, menandakan keberhasilan dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya daerah.

Sebaliknya, pada industri ekonomi kreatif, capaian masih relatif rendah, khususnya pemanfaatan platform digital yang hanya mencapai 44,14%, mengindikasikan perlunya transformasi digital yang lebih masif.

Pada aspek tata kelola pemerintahan, nilai akuntabilitas kinerja mencapai 84,59% dan MCP KPK sebesar 93,56%, menunjukkan tata kelola yang cukup baik, meskipun masih perlu peningkatan. Beberapa indikator seperti SPBE belum tersedia datanya.

Untuk keamanan masyarakat, capaian penanganan tindak kriminal masih rendah di angka 73,15%, yang menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas aparat dan sistem keamanan.

Pada pembangunan pemuda dan olahraga, capaian berada pada kisaran 86–90%, menunjukkan kinerja cukup baik namun masih perlu penguatan.

Dalam hal ketimpangan pendapatan, gini rasio menunjukkan capaian 82,93%, yang mengindikasikan ketimpangan masih menjadi isu strategis.

Pada lingkungan hidup, sebagian besar indikator menunjukkan capaian baik bahkan melampaui target, seperti kualitas tutupan lahan (107,58%). Namun, pengelolaan sampah masih sangat rendah (3,34%), menjadi perhatian serius dalam pengelolaan lingkungan.

Terakhir, pada ketahanan bencana dan perubahan iklim, indeks ketahanan daerah mencapai 92,31%, yang menunjukkan kesiapsiagaan yang cukup baik, meskipun masih perlu ditingkatkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional.

Dengan keterbatasan publikasi data dari BPS, maka data perbandingan yang ditampilkan merupakan data yang sifatnya sangat sementara. Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau realisasi secara nasional Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.125
Perbandingan capaian kinerja dengan standar nasional atau realisasi secara nasional Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	Standar Nasional/ Realisasi Nasional
			2030	2025	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	20,26	19,1	19,07
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (%)	20,80	19,9	13,17
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangggguran Terbuka (TPT) (%)	9,17	9,6	4,85
		PDRB Per Kapita (Juta Rupiah Per Kapita/ Tahun)	246.34	176.28	57,2
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)	0,67	0,67	-
4	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi (%)	2,20	2,69	1,7
		Indeks Ketahanan Pangan	88,25	76,42	73
5	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Investasi Daerah (%)	9,5	5,5	-
6	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan	82,38	82,05	11,19
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup (Tahun)	76,27	75,6	73,4
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/ Kapita/ Tahun	27.097	18.878	14.014
9	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Pra Sarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan	91,99	84,74	-
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan	34,77	24,48	-
10	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	100	50	-
11	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi	4,75	4,5	-
12	Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah	10	6,93	-
13	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisata Domestik dan Mancanegara	5.665.491	6.268.077	15.386.646

		Rata- Rata Lama Tinggal Wisatawan	1,8	-	7,60
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar dalam Warisan Budaya Tak Benda (%)	13,33	13,33	-
		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan (%)	16,66	19,4	-
15	Meningkatnya Kuantitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (industri)	6.310	5.081	-
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif yang Memanfaatkan Platform Digital	24,31	10,73	-
16	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Pemerintahan Daerah	81,50	68,94	-
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,02	N/A	-
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK	90	84,2	-
17	Meningkatnya kualitas keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal yang Ditangani (%)	60,01	43,90	-
18	Meningkatnya Kualitas Toleransi dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran (skor)	5,357	N/A	5
19	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender	0,165	N/A	-
20	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak	75,44	N/A	-
21	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Pemuda dan Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	69	67,17	-
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,602	0,542	-
22	Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio	0,334	0,391	0,375
23	Meningkatnya Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	45,34	N/A	-
24	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	74,95	74,17	-
		Indeks Kualitas Udara	76,72	73,63	-
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	36,41	39,17	-
		Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	35	1,17	-
25	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah	0,52	0,48	-
		Penurunan Intensitas Emisi GRK Tahunan (%)	44,60	N/A	-

Sumber data: RPJMD Kota Makassar, LKjIP SKPD Kota Makassar Tahun 2025, BPS Kota Makassar, BPS RI, BAPANAS

Data standar/ realisasi nasional yang tersaji sebagian besar belum dapat ditampilkan akibat keterbatasan akses data dan kurangnya sumber daya.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator pada masing-masing sasaran strategis menunjukkan tingkat keberhasilan yang beragam apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Tahun 2030 serta standar nasional/ realisasi nasional.

Pada sasaran kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah, rasio PDRB industri pengolahan sebesar 19,1% relatif sejalan dengan capaian nasional sebesar 19,07%, menunjukkan struktur industri daerah sudah kompetitif secara nasional. Sementara itu, rasio PDRB perdagangan besar dan eceran mencapai 19,9%, jauh di atas nasional sebesar 13,17%, yang mengindikasikan bahwa sektor perdagangan menjadi keunggulan utama daerah dalam menopang perekonomian.

Pada sasaran kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 9,6% masih jauh di atas rata-rata nasional sebesar 4,85%, menunjukkan tantangan serius dalam penciptaan lapangan kerja. Namun demikian, PDRB per kapita daerah sebesar 176,28 juta rupiah jauh melampaui nasional sebesar 57,2 juta rupiah, yang menunjukkan kapasitas ekonomi daerah relatif lebih tinggi, meskipun distribusinya belum merata.

Dalam hal stabilitas harga dan ketahanan pangan, tingkat inflasi daerah sebesar 2,69% lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 1,7%, yang menunjukkan tekanan harga yang lebih besar di daerah. Namun, indeks ketahanan pangan sebesar 76,42 masih lebih baik dibandingkan nasional sebesar 73, mencerminkan kondisi ketahanan pangan yang relatif lebih baik.

Pada kualitas pendidikan dan kesehatan, indeks pendidikan daerah (82,05) jauh lebih tinggi dibandingkan angka nasional (11,19 dalam skala berbeda), serta usia harapan hidup sebesar 75,6 tahun juga lebih tinggi dari nasional sebesar 73,4 tahun. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia di daerah relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional.

Pada daya beli masyarakat, pengeluaran per kapita sebesar 18.878 ribu rupiah lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 14.014 ribu rupiah, yang menunjukkan tingkat konsumsi masyarakat yang relatif lebih baik.

Dalam sektor pariwisata, jumlah kunjungan wisatawan daerah mencapai 6.268.077, meskipun masih jauh di bawah capaian nasional sebesar 15.386.646. Namun demikian, data rata-rata lama tinggal wisatawan nasional sebesar 7,60 hari menunjukkan peluang peningkatan kualitas kunjungan wisata di daerah, khususnya dalam meningkatkan lama tinggal wisatawan.

Pada pengelolaan budaya, indikator cagar budaya yang dilindungi dan dimanfaatkan mencapai 19,4%, menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun tidak terdapat pembanding nasional secara langsung.

Untuk ketimpangan pendapatan, gini rasio daerah sebesar 0,391 lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 0,375, yang menunjukkan tingkat ketimpangan di daerah masih lebih besar dibandingkan rata-rata nasional.

Pada indikator toleransi masyarakat, indeks kota toleran nasional berada pada skor 5, sementara data daerah belum tersedia, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan langsung.

Di sisi lain, beberapa indikator strategis seperti kemandirian fiskal daerah, investasi, infrastruktur, tata ruang, inovasi, ekonomi kreatif, tata kelola pemerintahan, keamanan, perlindungan sosial, dan lingkungan hidup belum memiliki pembanding nasional atau data belum tersedia, sehingga analisis komparatif belum dapat dilakukan secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, capaian kinerja menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah memenuhi atau mendekati target jangka menengah dan berada dalam kisaran nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target dan berada di bawah standar nasional, terutama pada aspek stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, keamanan, toleransi sosial serta pengelolaan lingkungan khususnya persampahan dan kualitas udara.

2.3.4 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.

Tabel II.124
Program yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

NO.	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN PROGRAM TAHUN 2025			SKPD PENANGGUNG JAWAB
			TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Meningkatnya Kontribusi Sektor Unggulan Dalam Struktur Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan				
		Rasio PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor				
1.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	4.446.982.120,-	3.841.966.608,-	86,39	Dinas Perdagangan
1.2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	1.273.778.340,-	1.129.948.079,-	88,71	Dinas Perdagangan
1.3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	666.714.456,-	629.981.279,-	94,49	Dinas Perdagangan
1.4	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	3.373.309.180,-	2.852.448.415,-	84,56	Dinas Koperasi
2	Meningkatnya Kesempatan Kerja, dan Pendapatan Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
		PDRB Per Kapita				
2.1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tentaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	3.168.409.400,-	2.964.909.522,-	93,58	Dinas Ketenagakerjaan
2.2	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota Makassar	1.084.221.660,-	925.538.118,-	85,36	Dinas Ketenagakerjaan
2.3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari Informal ke formal	3.887.493.000,-	3.531.023.700,-	90,83	Dinas Koperasi

	Usaha Mikro (UMKM)	Pertumbuhan wira usaha				Dinas Koperasi
2.4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.150.340.980,-	1.072.420.300,-	93,23	Dinas Perikanan dan Pertanian
2.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	2.724.325.000,-	2.028.731.500,-	74,47	Dinas Pariwisata
2.6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	10.764.604.000,-	10.205.297.291,-	94,8	Dinas Pemuda dan Olah Raga
3	Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah	Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB				
3.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	30.032.500.228,-	19.255.924.397,-	64,12	BAPENDA
4	Terwujudnya Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan	Tingkat Inflasi				
		Indeks Ketahanan Pangan				
4.1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	950.456.440,-	516.189.895,-	54,31	Dinas Perdagangan
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok				Dinas Perdagangan
4.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	48.802.000,-	41.968.840,-	86	Dinas Perdagangan
4.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	5.836.946.032,-	5.453.823.903,-	93,44	Dinas Perikanan dan Pertanian
		Peningkatan produksi komoditas peternakan				Dinas Perikanan dan Pertanian/ Dinas Ketahanan Pangan

		Peningkatan produksi hortikultura				Dinas Perikanan dan Pertanian/ Dinas Ketahanan Pangan
4.4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan angka kecukupan energi (AKG)	4.813.275.152,-	4.557.443.721,-	94,68	Dinas Ketahanan Pangan
		Tingkat konsumsi energi berdasarkan angka kecukupan energi				Dinas Ketahanan Pangan
4.5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.472.573.900,-	1.384.515.122,-	94,02	Dinas Perikanan dan Pertanian
4.6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	454.339.000,-	348.853.545,-	76,78	Dinas Ketahanan Pangan
5	Meningkatnya Realisasi Investasi di Kota Makassar	Persentase Peningkatan Nilai Investasi Daerah				
5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi	528.136.300,-	479.828.023,-	91,37	DPMPTSP
5.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	1.424.015.400,-	1.117.108.451,-	78,45	DPMPTSP
5.3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	49.375.075.480,-	42.688.625.630,-	86,46	SETDA
		Efektivitas Kerjasama Daerah				SETDA
6	Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan	Indeks Pendidikan				
6.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	305.972.619.520,-	267.165.060.009,91-	87,32	Dinas Pendidikan
		Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)				Dinas Pendidikan
		Skor kemampuan literasi SD				Dinas Pendidikan
		Skor kemampuan literasi SMP				Dinas Pendidikan
		Skor kemampuan numerasi SD				Dinas Pendidikan

		Skor kemampuan numerasi SMP				Dinas Pendidikan
		Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B				Dinas Pendidikan
		Iklim inklusivitas SD				Dinas Pendidikan
		Iklim inklusivitas SMP				Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SD				Dinas Pendidikan
		Iklim Keamanan SMP				Dinas Pendidikan
		Iklim Kebhinekaan SD				Dinas Pendidikan
		Iklim Kebhinekaan SMP				Dinas Pendidikan
6.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	11.680.000,-	7.520.000,-	64,38	Dinas Pendidikan
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4				Dinas Pendidikan
6.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2.396.191.776,-	2.230.746.985,-	93,09	Dinas Perpustakaan
7	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup				
7.1	Program pemenuhan upayakesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	353.588.219.836,-	321.779.305.200,-	91	DINas Kesehatan
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan				Dinas Kesehatan
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				Dinas Kesehatan
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar				Dinas Kesehatan

		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut seusai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar				Dinas Kesehatan
		Persentase orang dengan risikoterinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				Dinas Kesehatan
8	Meningkatnya Daya Beli Masyarakat	Pengeluaran Per Kapita				
8.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi			*terdapat juga di sasaran lain	DPMPTSP

8.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal			*terdapat juga di sasaran lain	Dinas koperasi
		Pertumbuhan wirausaha				Dinas koperasi
8.3	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar			*terdapat juga di sasaran lain	Dinas Ketenagakerjaan
9	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Terintegrasi	Indeks Layanan Infrastruktur Kebinamargaan				
		Indeks Layanan Infrastruktur Keciptakaryaan				
9.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	299.332.848.445,-	261.896.451.465,-	87,5	DINAS PU
9.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	23.012.628.56,-	18.331.859.397,-	79,66	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.3	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni padawilayah pencegahan kumuh	961.147.200,-	942.857.960,-	98,10	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
9.4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	5.3943174.099,-	4.552.368.763,-	84,39	DINAS PU
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar				DINAS PU

9.5	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	25.914.209.260,-	19.484.969.037,-	75,19	DINAS PU
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi				DINAS PU
9.6	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) akses aman	24.907.382.359,-	19.530.724.906,-	78,41	DINAS PU
		Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) akses aman				DINAS PU
9.10	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	84.452.923.394,-	68.968.146.916,-	81,66	DINAS PU
9.11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	111.337.896.408,-	90.322.928.821,-	81,13	DINAS PU
10	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Persentase Ketersediaan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)				
10.1	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	12.362.825.380,-	10.407.311.213,-	84,18	Dinas PENATAAAN RUANG
11	Meningkatnya Penguasaan IPTEK	Indeks Kapabilitas Inovasi				
11.1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	0	0	0	BRIDA
12	Meningkatnya Kuantitas Inovasi Seluruh Bidang Pembangunan	Persentase Peningkatan Inovasi Pembangunan Daerah				
12.1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	0	0	0	BRIDA

13	Meningkatnya Jumlah dan Kualitas Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara				
13.1		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan				
13.2	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	7.169.466.121,-	6.334.816.560,-	88,36	Dinas Pariwisata
14	Meningkatnya Pengelolaan dan Pelestarian Budaya	Persentase Peningkatan Karya Budaya Terdaftar Dalam Warisan Budaya Takbenda				
		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan				
14.1	Program Pengembangan kebudayaan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	6.236.581.800,-	6.029.360.951,-	96,68	Dinas Kebudayaan
14.2	Program Pengembangan Kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	4.228.846.200,-	4.204.096.240,-	99,41	Dinas Kebudayaan
15	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Industri Ekonomi Kreatif	Jumlah Industri Ekonomi Kreatif Yang Aktif (Industri)				
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital				
15.1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	11.672.291.807,-	10.967.036.949,-	93,96	Dinas Pariwisata
16	Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Adaptivitas Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah				
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektroik (SPBE)				
		Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK				

16.1	Program Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	3.791.105.344,-	3.305.963.211,-	87,20	BAPPEDA
16.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	1.454.943.900,-	1.021.065.158,-	70,18	INSPEKTORAT
16.3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	18.899.051.631,-	6.974.058.749,-	78,37	BPKAD
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik				
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar				
		Persentase Penurunan Silpa				
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu				
16.4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	3.702.780.760,-	2.988.645.384,-	80,71	BKPSDMD
		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya				
16.5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan	43.934.101.806,-	34.588.068.976,-	78,73	DISKOMINFO
17	Meningkatnya Kualitas Keamanan Masyarakat	Persentase Tindak Kriminal Yang Ditangani				
17.1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota	28.362.085.143,-	26.652.637.945,-	93,97	SATPOL PP

17.2	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	8.070.816.660,-	7.159.102.477,-		Kecamatan
18	Meningkatnya Kualitas Toleransi Dalam Masyarakat	Indeks Kota Toleran				
18.1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	20.753.259.600,-	20.282.438.215,-	97,48	BADAN KESBANG
18.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	2.519.755.040,-	2.456.347.000,-	97,48	BADAN KESBANG
19	Menurunnya Ketimpangan Gender	Indeks Ketimpangan Gender				
19.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	1.016.633.000,-	954.991.320,-	98,67	DP3A
19.2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO	1.016.633.000,-	985.991.320,-	98,67	DP3A
20	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak				
20.1	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	594.459.000,-	591.626.500,-	99,52	DP3A
20.2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait di Kota Makassar	2.258.132.192,-	2.162.802.145,-	95,78	DP3A
21	Meningkatnya Kualitas Pembangunan	Indeks Pembangunan Pemuda				

	Pemuda dan Olahraga					
		Indeks Pembangunan Keolahragaan				
21.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wira Usaha				Dinas Pemuda dan Olahraga
21.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	47.656.468.000,-	44.651.129.733,-	94,80	Dinas Pemudan dan Olahraga
22	Menurunnya Disparitas Pendapatan	Gini Rasio				
22.1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	3.411.069.900,-	2.807.311.976,-	82.30	Dinas Sosial
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi				
23	Meningkatnya Perlindungan Bagi Penyandang Disabilitas	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal				
23.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Wilayah dalam Wilayah Kota Makassar				Dinas Ketenagakerjaan
23.2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	4.947.246.508,-	3.995.448.081,-	80,76	Dinas Sosial
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti				
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti				

		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti				
24	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air				
		Indeks Kualitas Udara				
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan				
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah				
24.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	973.909.120,-	577.721.422,-	59,32	Dinas Lingkungan Hidup
24.2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	21.598.453.786,-	17.565.032.536,-	81,33	Dinas Lingkungan Hidup
24.3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	61.367.165.267,-	47.819.149.266,-	77,92	Dinas Lingkungan Hidup
24.4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayaanan Publik di Kecamatan	186.255.768.175,-	164.761.839.025,-		Kecamatan
25	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Indeks Ketahanan Daerah				
		Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				
25.1	Program Penaggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	15.060.354.401,-	13.957.231.373,-	92,68	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				

		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				
25.2	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Setelah Tanggap Darurat Bencana	2.457.806.100,-	1.794.960.928,-	73,03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
25.3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	27.911.232.900,-	25.566.195.330,-	91,60	Dinas Pemadam Kebakaran
		Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response time 15 minutes)				
25.4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah				Dinas Lingkungan Hidup
25.5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	103.683.405.586,-	89.883.443.584,-	86,69	Dinas Perhubungan
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal				
JUMLAH			2.019.710.348.060,-	1.743.351.902.866,-	86,32	

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar, EMonev Sekretariat Daerah Kota Makassar, LKjIP SKPD Kota Makassar

Berdasarkan data realisasi anggaran program pembangunan Kota Makassar Tahun 2025, total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan berbagai sasaran pembangunan daerah sebesar Rp2.019.710.348.060, dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.743.351.902.866 atau mencapai 86,32% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program pembangunan daerah berjalan cukup efektif, dengan tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi pada sebagian besar program. Hal ini mengindikasikan bahwa perangkat daerah telah

melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pada sasaran meningkatnya kontribusi sektor unggulan dalam struktur ekonomi daerah, berbagai program strategis dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Dinas Koperasi, seperti Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan capaian realisasi sebesar 86,39%, Program Pengembangan Ekspor sebesar 88,71%, Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebesar 94,49%, serta Program Pengembangan UMKM sebesar 84,56%. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sektor industri, perdagangan, dan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Pada sasaran meningkatnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, berbagai program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah menunjukkan capaian yang relatif tinggi. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja mencapai 93,58%, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap sebesar 93,23%, serta Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan sebesar 94,8%. Namun demikian, Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki capaian yang relatif lebih rendah yaitu 74,47%, sehingga masih diperlukan peningkatan efektivitas pelaksanaan program guna memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Pada sasaran meningkatnya kemandirian fiskal daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah memiliki capaian realisasi sebesar 64,12%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu ditingkatkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.

Pada sasaran terwujudnya stabilitas harga dan ketahanan pangan, beberapa program menunjukkan capaian yang cukup baik, seperti Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan capaian 93,44%, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat sebesar 94,68%, serta Program Pengelolaan Perikanan Budidaya sebesar 94,02%. Namun demikian, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting memiliki capaian yang relatif rendah yaitu 54,31%, yang menunjukkan perlunya peningkatan efektivitas program dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.

Pada sektor pendidikan, Program Pengelolaan Pendidikan memiliki alokasi anggaran yang besar dengan capaian realisasi sebesar 87,32%, yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Selain itu, Program Pembinaan Perpustakaan juga menunjukkan capaian yang baik yaitu 93,09%, sedangkan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki capaian yang relatif lebih rendah yaitu 64,38%, sehingga masih diperlukan penguatan program peningkatan kompetensi tenaga pendidik.

Pada sektor kesehatan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat memiliki capaian realisasi sebesar 91%, yang menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan dengan

cukup baik guna mendukung peningkatan derajat kesehatan dan usia harapan hidup masyarakat.

Dalam upaya peningkatan infrastruktur daerah, berbagai program seperti Program Penyelenggaraan Jalan, Pengelolaan Drainase, Penataan Bangunan Gedung, serta Penyediaan Air Minum menunjukkan capaian realisasi yang cukup baik, meskipun beberapa program seperti pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah masih memerlukan percepatan pelaksanaan untuk meningkatkan cakupan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.

Pada sasaran peningkatan tata kelola pemerintahan, program-program seperti Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengembangan Kompetensi ASN, serta Pengelolaan Aplikasi Informatika menunjukkan capaian realisasi yang berkisar antara 78% hingga 87%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan akuntabilitas, transparansi, serta digitalisasi tata kelola pemerintahan daerah terus dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan responsif.

Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa terdapat beberapa program yang muncul pada lebih dari satu sasaran strategis, seperti Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pemberdayaan UMKM, serta Program Penempatan Tenaga Kerja. Program-program tersebut memiliki keterkaitan lintas sektor dan memberikan kontribusi terhadap beberapa sasaran pembangunan secara bersamaan, misalnya dalam mendukung peningkatan investasi daerah, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya integrasi dan sinergi kebijakan pembangunan daerah, di mana satu program dapat memberikan dampak terhadap berbagai aspek pembangunan. Namun demikian, dalam proses evaluasi kinerja perlu diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi penghitungan anggaran maupun capaian kinerja sehingga analisis yang dihasilkan tetap akurat dan proporsional.

Di samping itu, terdapat pula indikator kinerja dengan nilai target, realisasi, dan capaian sebesar 0, khususnya pada sasaran yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peningkatan inovasi daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah BRIDA. Kondisi ini terjadi karena indikator kinerja tersebut belum sepenuhnya termuat dalam struktur program dan kegiatan perangkat daerah akibat adanya perubahan nomenklatur organisasi BRIDA. Perubahan nomenklatur tersebut berdampak pada proses penyesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, serta sistem pengukuran kinerja perangkat daerah, sehingga pada tahun berjalan indikator tersebut belum dapat diukur dan dilaporkan secara optimal. Oleh karena itu, pada periode perencanaan berikutnya diperlukan penyesuaian dan sinkronisasi indikator kinerja dengan struktur organisasi dan program BRIDA, sehingga pelaksanaan program riset dan inovasi daerah dapat diukur secara lebih akurat dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan inovasi pembangunan daerah.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran program pembangunan daerah Tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar program telah dilaksanakan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah. Namun demikian, masih terdapat beberapa program dengan tingkat realisasi yang belum optimal serta beberapa indikator yang belum dapat diukur secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi antar perangkat

daerah, serta penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam pengukuran kinerja Pemerintah Daerah, dimana Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar dalam pencapaian target Indikator kinerja sasaran strategis telah menggunakan berbagai sumber daya baik itu dalam bentuk biaya maupun sumber-sumber daya lainnya sehingga tercapainya target kinerja dengan penggunaan sumber daya yang efisien.

Upaya efisiensi penggunaan sumber daya dalam setiap pencapaian target sasaran strategis ini telah dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah dengan melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan program seperti penggunaan jasa pihak ketiga, tenaga ahli dan pihak swasta melalui dana CSR ataupun sumbangan pihak ketiga serta adanya pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya, sehingga tercapainnya efisiensi pada setiap indikator kinerja sasaran strategis Pemerintah Kota Makassar pada Tahun 2025.

Untuk mencari tingkat efisiensi dapat digunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi = Input Target/ input Aktual >= 1

- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual lebih besar atau sama dengan 1 (satu), maka akan terjadi efisiensi.
- Jika input yang ditargetkan berbanding input aktual kurang dari 1 (satu), maka efisiensi tidak tercapai.

Berdasarkan metode tersebut diatas, Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja setiap sasaran strategis Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.127
Perbandingan Capaian Kinerja dan Analis Efisiensi Pengunaan Sumber Daya

NO	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2024	SATUAN	CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025			RATA- RATA CAPAIAN	CAPAIAN ANGGARAN TAHUN 2025 (Rp)			EFISIENSI
					TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	
1.1	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	N/A		4,8	4,69	97,70	**97,70%**	4.446.982.120,-	3.841.966.608,-	**86,39**	1,1 (Efisien)
1.2	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pertumbuhan nilai ekspor barang Kota Makassar	11,95		12,1	7,931	65,56	**65,56%**	1.273.778.340,-	1.129.948.079,-	**88,71**	0,74 (tidak efisien)
1.3	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang difasilitasi/dilaksanakan	60		70	70	100	**100%**	666.714.456,-	629.981.279,-	**94,49**	1,06 (efisien)
1.4	Program Pengembangan UMKM	Proporsi UMKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	N/A		1	0	0	**0%**	3.373.309.180,-	2.852.448.415,-	**84,56**	0 (tidak efisien)
2.1.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	20,49		21,21	22,05	103,96	**103,96%**	3.168.409.400,-	2.964.909.522,-	**93,58**	1,1 (efisien)
2.2.	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kota Makassar	60,05		61	64,08	105,05	**105,05%**	1.084.221.660,-	925.538.118,-	**85,36**	1,2 (efisien)

2.3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari Informal ke formal	10,45		15	10,89	72,6	**76,95%**	3.887.493.000,-	3.531.023.700,-	**90,83**	0,85 (tidak efisien)
		Pertumbuhan wira usaha	12,43		14,5	11,8	81,3					
2.4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	20603.90 Ton		21401 Ton	20.917,3	97,74	**97,74%**	1.150.340.980,-	1.072.420.300,-	**93,23**	1,05 (efisien)
2.5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif dan tervalidasi	N/A		10	16,42	164,2	**164,2%**	2.724.325.000,-	2.028.731.500,-	**74,47**	2,2 (efisien)
2.6	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio wirausaha pemuda	16,61		17,75	18,49	104,17	**104,17**	10.764.604.000,-	10.205.297.291,-	**94,8**	1,1 (efisien)
3.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	38,17		44,64	41,65	93,30	**93,30**	30.032.500.228,-	19.255.924.397,-	**64,12**	1,46 (efisien)
4.1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100		100	100	100	**100%**	950.456.440,-	516.189.895,-	**54,31**	1,8 (efisien)
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu barang kebutuhan pokok	100		100	100	100					

4.2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	100		100	87,34	87,34	**87,34%**	48.802.000,-	41.968.840,-	**86**	
4.3	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan	15.614 Ton		15.615 Ton	14.437	92,46	**100,28%**	5.836.946.032,-	5.453.823.903,-	**93,44**	1,07 (efisien)
		Peningkatan produksi komoditas peternakan	5.4 Ton		7 Ton	7,4	105,71					
		Peningkatan produksi hortikultura	310.1 Ton	Persen	320.10 Ton	328,68 Ton	102,68%					
4.4	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Ketersediaan Energi Berdasarkan angka kecukupan energi (AKG)	2812 kkal/kapita		2825 kkal/kapita	2.905 kkal/kapita	102,83	**100,73%**	4.813.275.152,-	4.557.443.721,-	**94,68**	1,06 (efisien)
		Tingkat konsumsi energi berdasarkan angka kecukupan energi	2041 kkal/kapita		2042 kkal/kapita	2.014 kkal/kapita	98,63					
4.5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya	1.519,58 Ton		1.559 Ton	1.559,08 Ton	100,01	**100,01%**	1.472.573.900,-	1.384.515.122,-	**94,02**	
4.6	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	1,31		1,3	0	100	**100%**	454.339.000,-	348.853.545,-	**76,78**	

5.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi Total terhadap target investasi	3.824.931.439.043		3.000.000.000.000	5.293.855.435.471	176,46	**176,46%**	528.136.300,-	479.828.023,-	**91,37**	1,9 (efisien)
5.2	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	80		90	100	111,11%	**111,11%**	1.424.015.400,-	1.117.108.451,-	**78,45**	1,4 (efisien)
5.3	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Kinerja penyelenggaraan pemerintahan	100		100	100	100	**100%**	49.375.075.480,-	42.688.625.630,-	**86,46**	1,1 (efisien)
		Efektivitas Kerjasama Daerah	100		100	100	100					
6.1	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka partisipasi sekolah (5-6 tahun)	65,82		72,19	65,82	91,18	**101,34%**	305.972.619.520,-	267.165.060.009,91-	**87,32**	1,1 (efisien)
		Angka partisipasi sekolah (7-15 tahun)	98,72		99,8	98,72	98,92					
		Skor kemampuan literasi SD	62,86		65,36	76,75	117,43					
		Skor kemampuan literasi SMP	71,66		72,76	75,37	103,59					
		Skor kemampuan numerasi SD	54,38		57,28	72,57	126,69					
		Skor kemampuan numerasi SMP	62,85		64,35	71,6	111,27					
		Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	77,81		81,45	77,81	95,53					
		Iklim inklusivitas SD	60,15		65,15	60,14	92,31					

		Iklim inklusivitas SMP	58,62		63,42	58,61	92,42					
		Iklim Keamanan SD	75,23		77,03	75,23	97,66					
		Iklim Keamanan SMP	70,02		73,02	70,01	95,88					
		Iklim Kebhinekaan SD	73,5		75,5	73,5	97,35					
		Iklim Kebhinekaan SMP	70,62		72,62	70,62	97,25					
6.2	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	N/A		100%	55,54	55,54	**78,575%**	11.680.000,-	7.520.000,-	**64,38**	1,2 (efisien)
		Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	52.82		77,2	78,44	101,61					
6.3	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	84.52		84.60	59,04	69,78	**69,78**	2.396.191.776,-	2.230.746.985,-	**93,09**	0,7 (tidak efisien)
7.1	Program pemenuhan upayakesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100		100	101,15	101,15	**102,43%**	353.588.219.836,-	321.779.305.200,-	**91**	1,1 (efisien)
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100		100	100	100					
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		100	100	100					

		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100		100	100	100					
		Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		100	100	101,4					
		Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82.88		100	98,12	98,12					
		Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut seusai standar	93.61		100	100	100					
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	83.56		100	100	90,72					
		Persentase penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100		100	120,76	120,76					
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100		100	100	100					

		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100		100	122,62	122,62					
		Persentase orang dengan risikoterinveksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100		100	94,46	94,46					
8.1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Realisasi total terhadap target investasi	3.824.931.439.043		3.000.000.000.000	5.293.855.435.471	176,46				***terdapat juga di sasaran lain**	
8.2	Program Pemberdayaan Usaha Menengah Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	10.45		15	10,89	72,6				***terdapat juga di sasaran lain**	
		Pertumbuhan wirausaha	12.43		14.5	11,8	81,3					
8.3	Program penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kota Makassar	60.05		61	64,08	105,05				***terdapat juga di sasaran lain**	
9.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan dalam kondisi baik	98		88,74	87,85	99	**99%**	299.332.848.445,-	261.896.451.465,-	**87,5%**	1,1 (efisien)
9.2	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan utilitas umum)	20		100	24	24	**24%**	23.012.628.56,-	18.331.859.397,-	**79,66%**	0,3 (efisien)

9.3	Program Perumahan dan Kawasan Kumuh	Persentase pengurangan rumah tidak layak huni padawilayah pencegahan kumuh	N/A		0,31	0,27	87,10	**87,10%**	961.147.200,-	942.857.960,-	**98,10%**	0,89 (tidak efisien)
9.4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (PSD)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kota Makassar	89,15		54,85	36,64	66,8	**83,4%**	5.3943174.099,-	4.552.368.763,-	**84,39%**	0,99 (tidak efisien)
		Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Makassar	54,45		55,64	55,64	100					
9.5	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	3,75		4,12	4,06	98,54	**130,85**	25.914.209.260,-	19.484.969.037,-	**75,19**	1,7 (efisien)
		Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi	0,08		0,19	0,31	163,16					
9.6	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem air limbah	Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) akses aman	8,45		10,28	7,61	74,03	**49,665**	24.907.382.359,-	19.530.724.906,-	**78,41**	0,6 (tidak efisien)
		Persentase rumah yang memperoleh layanan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) akses aman	0,68		40,15	1,05	25,30					
9.10	Program Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	69,08		57,81	91,76	158,73	**158,73**	84.452.923.394,-	68.968.146.916,-	**81,66**	1,9 (efisien)
9.11	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam kondisi baik	N/A		49,65	22,06	44,43%	**44,43**	111.337.896.408,-	90.322.928.821,-	**81,13**	0,5

												(tidak efisien)
10.1	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan ruang	N/A		100	67	67	**67%**	12.362.825.380,-	10.407.311.213,-	**84,18**	0,79 (efisien)
11.1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A		100	0	0	**0**	0	0	**0**	0
12.1	Program Riset dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	N/A		100	0	0	**0**	0	0	**0**	0
13.1		Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	1,51	Hari	1,63	2,47	151,53					
13.2	Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	24.88		5	11,54	230,8	**230,8%**	7.169.466.121,-	6.334.816.560,-	**88,36**	2,61 (efisien)
14.1		Persentase Cagar Budaya yang Dilindungi dan Dimanfaatkan	72	Persen	16,66	19,44	116,69					
14.2	Program Pengembangan kebudayaan	Persentase partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	10.000%		100%	142,86	142,86%	**142,86%**	6.236.581.800,-	6.029.360.951,-	**96,68**	1,48 (efisien)
14.3	Program Pengembangan Kesenian tradisional	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	N/A		20	18	90	**90%**	4.228.846.200,-	4.204.096.240,-	**99,41**	0,9 (tidak efisien)
		Persentase Industri Ekonomi Kreatif Yang Memanfaatkan Platform Digital	N/A	Persen	12,44	10,73	86,25					

15.1	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	2,2	Persen	2,75	2,81	102,34	**102,34%**	11.672.291.807,-	10.967.036.949,-	**93,96**	1,09 (efisien)
16.1	Program Perencanan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100	Persen	100	100	100	**100**	3.791.105.344,-	3.305.963.211,-	**87,20**	1,1 (efisien)
16.2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	76,21	Persen	78,21	74,3	96,23	**96,23**	1.454.943.900,-	1.021.065.158,-	**70,18**	1,37 (efisien)
16.3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan Melalui TKD	26,59	Persen	29,6	29,6	100	**179%**	18.899.051.631,-	6.974.058.749,-	**78,37**	2,28 (efisien)
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	26,99	Persen	40,58	34,66	85					
		Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	80,71	Persen	85	88,4	104					
		Persentase Penurunan Silpa	5,59	Persen	4,3	21,75	506					
		Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100	Persen	100	100	100					
16.4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	65	Persen	73	7,8	10,68	**19,42%**	3.702.780.760,-	2.988.645.384,-	**80,71**	0,2

		Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya	55	Persen	71	20	28,16					(efisien)
16.5	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase SKPD yang Mengimplementasikan Layanan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Ditetapkan Sesuai dengan Ketentuan Perundang- Undangan	N/A	Persen	100	100	100	**100%**	43.934.101.806,-	34.588.068.976,-	**78,73**	1,27 (efisien)
17.1	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Kabupaten/ Kota	100	Persen	100	93	93	**93%**	28.362.085.143,-	26.652.637.945,-	**93,97**	0,99 (tidak efisien)
17.2	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Diselesaikan	90	Persen	90	85,532	96	**96%**	8.070.816.660,-	7.159.102.477,-	**88,7%**	1,08 (efisien)
18.1	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100	Persen	85	85	85	**85%**	20.753.259.600,-	20.282.438.215,-	**97,73**	0,87 (tidak efisien)
18.2	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100	Persen	85	85	85	**85%**	2.519.755.040,-	2.456.347.000,-	**97,48**	0,87 (tidak efisien)
19.1	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	71	Persen	75	75	100	**100%**	1.016.633.000,-	954.991.320,-	**93,94**	1,06 (efisien)

19.2	Program Perlindungan Perempuan	Rasio Kekerasan terhadap Perempuan Termasuk TPPO	1,05	Persen	1	1	100	**100%**	1.016.633.000,-	985.991.320,-	**96,98**	1,03 (efisien)
20.1	Program Pemenuhan Hak Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak	61,65	Persen	65,55	61,65	94,05	**94,05%**	594.459.000,-	591.626.500,-	**99,52**	0,94 (tidak efisien)
20.2	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak Korban Kekerasan yang Ditangani Instansi Terkait di Kota Makassar	100	Persen	100	100	100	**100%**	2.258.132.192,-	2.162.802.145,-	**95,78**	1,04 (efisien)
		Indeks Pembangunan Keolahragaan	0,476		0,497	0,542	109,05					
21.1	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wira Usaha	16,61	Persen	17,75	18,49	104,17	**104,17%**	10.764.604.000,-	10.205.297.291,-	**94,80**	1,10 (efisien)
21.2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	100	Persen	100	93,87	93,87	**93,87%**	47.656.468.000,-	44.651.129.733,-	**93,87**	1 (efisien / impas)
22.1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	100	Persen	100	80,88	80,88	**90,44**	4.947.246.508,-	3.995.448.081,-	**80,76**	1,12 (efisien)
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	N/A	Persen	80	80	100					

23.1	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Mekanisme Layanan Antar Wilayah dalam Wilayah Kota Makassar	60,05	Persen	61	64,08	105,05				***Terdapat di Sasaran Lain**	
23.2	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang Disabilitas Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	Persen	170	602	354,12	**153,39%**	4.947.246.508,-	3.995.448.081,-	**80,76**	1,9 (efisien)
		Jumlah Anak Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	Persen	170	121	71,18					
		Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	100	Persen	85	68	80					
		Jumlah Warga Negara Gelandangan dan Pengemis yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial di Luar Panti	100	Persen	85	92	108,24					
		Indeks Kualitas Udara	74,92		75,22	76,63	97,89					
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan	28,92		36,06	39,17	108,62					
		Timbulan Sampah Yang Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	2,01		6	1,17	19,5					
24.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	Persen	100	100	100	**100%**	973.909.120,-	577.721.422,-	**59,32**	1,68 (efisien)

24.2	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik	5,66	Persen	6,23	4,70	75,44	**75,44%**	21.598.453.786,-	17.565.032.536,-	**81,33**	0,93 (tidak efisien)
24.3	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01	Persen	6	1,17	19,5	**19,5%**	61.367.165.267,-	47.819.149.266,-	**77,92**	0,25 (tidak efisien)
24.4	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayaanan Publik di Kecamatan	90	Persen	90	88,69	96,31	**96,31%**	186.255.768.175,-	164.761.839.025,-	**88,46**	1,05 (efisien)
25.1	Program Penaggulangan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Informasi Rawan Bencana	100	Persen	100	100	100	**100%**	15.060.354.401,-	13.957.231.373,-	**92,68**	1,08 (efisien)
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100	Persen	100	100	100					
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	Persen	100	100	100					
25.2	Program Penanganan Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Setelah Tanggap Darurat Bencana	100	Persen	100	100	100	**100%**	2.457.806.100,-	1.794.960.928,-	**73,03**	1,37 (efisien)
25.3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	Persen	100	100	100	**100%**	27.911.232.900,-	25.566.195.330,-	**91,60**	1,09 (efosoen)

		Penanganan Kejadian Kebakaran Sesuai Waktu Tanggap (Response time 15 minutes)	100	Persen	100	100	100					
25.4	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	2,01	Persen	6	1,17	19,50				***Terdapat di Sasaran Lain**	
25.5	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten/ Kota	0,48		0,47	106	176,67%	**138,34%**	103.683.405.586,-	89.883.443.584,-	**86,69**	1,59 (efisien)
		Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal	57,22	Persen	60	106	176,67%					

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Wali Kota Makassar, RPJMD Kota Makassar Tahun 2025-2029, LKjIP dan matriks SKPD Tahun 2025, BPS Kota Makassar, BPS Provinsi Sulsel, Setara Institute dan Bapanas

Analisis efisiensi program dilakukan melalui perbandingan antara tingkat capaian kinerja dengan realisasi anggaran, guna menilai optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam pencapaian output pembangunan daerah Tahun 2025.

Pada Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, capaian kinerja mencapai 97,70% dari target 4,8 dengan realisasi 4,69, sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp3.841.966.608,- atau 86,39% dari target Rp4.446.982.120,-, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 1,1 (efisien).

Pada Program Pengembangan Ekspor, capaian kinerja sebesar 65,56% dari target 12,1 dengan realisasi 7,931, serta realisasi anggaran sebesar Rp1.129.948.079,- atau 88,71% dari target Rp1.273.778.340,-, sehingga tingkat efisiensi sebesar 0,74 (tidak efisien).

Pada Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, capaian kinerja mencapai 100% dari target 70 dengan realisasi 70, serta realisasi anggaran sebesar Rp629.981.279,- atau 94,49% dari target Rp666.714.456,-, sehingga tingkat efisiensi sebesar 1,06 (efisien).

Pada Program Pengembangan UMKM (sektor industri), capaian kinerja sebesar 0% dari target 1 dengan realisasi 0, sementara realisasi anggaran sebesar Rp2.852.448.415,- atau 84,56% dari target Rp3.373.309.180,-, sehingga tingkat efisiensi sebesar 0 (tidak efisien).

Pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, capaian kinerja sebesar 103,96% dari target 21,21 dengan realisasi 22,05, serta realisasi anggaran sebesar Rp2.964.909.522,- atau 93,58% dari target Rp3.168.409.400,-, sehingga efisiensi sebesar 1,1 (efisien).

Pada Program Penempatan Tenaga Kerja, capaian kinerja sebesar 105,05% dari target 61 dengan realisasi 64,08, serta realisasi anggaran sebesar Rp925.538.118,- atau 85,36% dari target Rp1.084.221.660,-, sehingga efisiensi sebesar 1,2 (efisien).

Pada Program Pemberdayaan UMKM, capaian kinerja sebesar 76,95% dari target 15 dengan realisasi 10,89, serta realisasi anggaran sebesar Rp3.531.023.700,- atau 90,83% dari target Rp3.887.493.000,-, sehingga efisiensi sebesar 0,85 (tidak efisien).

Pada Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, capaian kinerja sebesar 97,74% dari target 21.401 ton dengan realisasi 20.917,3 ton, serta realisasi anggaran sebesar Rp1.072.420.300,- atau 93,23% dari target Rp1.150.340.980,-, sehingga efisiensi sebesar 1,05 (efisien).

Pada Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, capaian kinerja sebesar 164,2% dari target 10 dengan realisasi 16,42, serta realisasi anggaran sebesar

Rp2.028.731.500,- atau 74,47% dari target Rp2.724.325.000,-, sehingga efisiensi sebesar 2,2 (sangat efisien).

Pada Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, capaian kinerja sebesar 104,17% dari target 17,75 dengan realisasi 18,49, serta realisasi anggaran sebesar Rp10.205.297.291,- atau 94,8% dari target Rp10.764.604.000,-, sehingga efisiensi sebesar 1,1 (efisien).

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, capaian kinerja sebesar 93,30% dari target 44,64 dengan realisasi 41,65, serta realisasi anggaran sebesar Rp19.255.924.397,- atau 64,12% dari target Rp30.032.500.228,-, sehingga efisiensi sebesar 1,46 (efisien).

Pada Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, capaian kinerja sebesar 100% dari target 100, dengan realisasi anggaran sebesar Rp516.189.895,- atau 54,31% dari target Rp950.456.440,-, sehingga efisiensi sebesar 1,8 (sangat efisien).

Pada Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, capaian kinerja sebesar 100,28% dari target 15.615 ton dengan realisasi 14.437 ton, serta realisasi anggaran sebesar Rp5.453.823.903,- atau 93,44% dari target Rp5.836.946.032,-, sehingga efisiensi sebesar 1,07 (efisien).

Pada Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, capaian kinerja sebesar 100,73% dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.557.443.721,- atau 94,68% dari target Rp4.813.275.152,-, sehingga efisiensi sebesar 1,06 (efisien).

Pada Program Pengelolaan Pendidikan, capaian kinerja sebesar 101,34% (indikator APS usia 5–6 tahun), dengan realisasi anggaran sebesar Rp267.165.060.009,91,- atau 87,32% dari target Rp305.972.619.520,-, sehingga efisiensi sebesar 1,1 (efisien).

Pada Program Pembinaan Perpustakaan, capaian kinerja sebesar 69,78% dari target 84,60 dengan realisasi 59,04, serta realisasi anggaran sebesar Rp2.230.746.985,- atau 93,09% dari target Rp2.396.191.776,-, sehingga efisiensi sebesar 0,7 (tidak efisien).

Pada Program Penyelenggaraan Jalan, capaian kinerja sebesar 99% dari target 88,74 dengan realisasi 87,85, serta realisasi anggaran sebesar Rp261.896.451.465,- atau 87,5% dari target Rp299.332.848.445,-, sehingga efisiensi sebesar 1,1 (efisien).

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, capaian kinerja sebesar 49,665%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp19.530.724.906,- atau 78,41% dari target Rp24.907.382.359,-, sehingga efisiensi sebesar 0,6 (tidak efisien).

Pada Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, capaian kinerja sebesar 158,73% dari target 57,81 dengan realisasi 91,76, serta realisasi anggaran sebesar Rp68.968.146.916,- atau 81,66% dari target Rp84.452.923.394,-, sehingga efisiensi sebesar 1,9 (sangat efisien).

Pada Program Pengelolaan Persampahan, capaian kinerja sebesar 19,5% dari target 6 dengan realisasi 1,17, serta realisasi anggaran sebesar Rp47.819.149.266,- atau 77,92% dari target Rp61.367.165.267,-, sehingga efisiensi sebesar 0,25 (tidak efisien).

Pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, capaian kinerja mencapai 179%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.974.058.749,- atau 78,37% dari target Rp18.899.051.631,-, sehingga efisiensi sebesar 2,28 (sangat efisien).

Pada Program Kepegawaian Daerah, capaian kinerja sebesar 19,42%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.988.645.384,- atau 80,71% dari target Rp3.702.780.760,-, sehingga efisiensi sebesar 0,2 (tidak efisien).

Pada Program Penanggulangan Bencana, capaian kinerja sebesar 100%, dengan realisasi anggaran sebesar Rp13.957.231.373,- atau 92,68% dari target Rp15.060.354.401,-, sehingga efisiensi sebesar 1,08 (efisien).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

1. Program dengan tingkat efisiensi ≥1 (efisien) umumnya ditandai oleh capaian kinerja yang tinggi (≥100%) dengan realisasi anggaran yang relatif lebih rendah (<95%).
2. Program dengan tingkat efisiensi <1 (tidak efisien) disebabkan oleh capaian kinerja yang rendah, bahkan terdapat capaian 0%, sementara realisasi anggaran relatif tinggi.
3. Program dengan efisiensi sangat tinggi (≥1,5) antara lain:
   - Program Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2,2)
   - Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase (1,9)
   - Program Stabilisasi Harga (1,8)
   - Program Pengelolaan Keuangan Daerah (2,28)
4. Program yang memerlukan perhatian khusus karena tidak efisien antara lain:
   - Program Pengembangan UMKM (efisiensi 0)
   - Program Persampahan (efisiensi 0,25)
   - Program Kepegawaian (efisiensi 0,2)
   - Program Air Limbah (efisiensi 0,6)

Dengan demikian, secara umum pengelolaan program telah menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, namun masih diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penetapan indikator, serta pelaksanaan program pada beberapa sektor guna memastikan keselarasan antara penggunaan anggaran dan capaian kinerja.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar hukum penyelenggaraan tugas pembantuan

Penyelenggaraan tugas pembantuan didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka (11) yang menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan antara lain dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Hal ini diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 19 ayat (1) huruf c. Penugasan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Demikian juga dengan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah provinsi diselenggarakan antara lain dengan cara menugasi Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan. Penugasan oleh Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota berdasarkan asas Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud pada pasal 20 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas pembantuan pada hakikatnya merupakan keikutsertaan Daerah termasuk masyarakatnya atas penugasan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tertentu.

Penyelenggaraanya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, telah diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sementara itu, pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan disebutkan bahwa pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sedangkan tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Selain itu, pelaksanaan urusan tugas pembantuan juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Makassar tidak menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN.

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Penyelenggaraan Pembangunan Bidang Urusan Pendidikan yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi R.I Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan Pasal 5, ayat (1), dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal: Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan dasar; dan
3. Pendidikan kesetaraan.

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dari tiga jenis layanan dasar yang dilaksanakan, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan target pencapaian SPM berdasarkan Indikator Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar yang telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2030. Adapun indikator pencapaian Jenis Pelayanan Dasar tersebut yaitu:

a. Jumlah penduduk usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
b. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.
c. Jumlah penduduk usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.
d. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.
e. Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD.

Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai indikator pencapaian digambarkan pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kota Makassar Tahun 2025

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RKPD 2025	TARGET SPM 2025
1	Pendidikan Dasar	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	100%	100%
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional	Belum ada pengukuran hasil Asesmen Nasional	
2	Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	Belum ada pengukuran hasil Asesmen Nasional	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tahun 2025

4.1.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Urusan Pendidikan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut :

Tabel IV.2
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan
Kota Makassar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Pencapaian			
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	%
1	Pendidikan Dasar	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	229.508 Orang	229.508 Orang	0 Orang	100
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	Belum ada pengukuran hasil Asesmen Nasional			
2	Pendidikan Kesetaraan	1. Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.144 Orang	3.144 Orang	0 Orang	100
		2. Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional.	Belum ada pengukuran hasil Asesmen Nasional			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	34.674 Orang	34.674 Orang	0 Orang	100

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tahun 2025

4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dasar SPM Urusan Pendidikan sebesar Rp.306.051.679.520.- dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.267.041.814.473.- atau Persentase sebesar 87,25%.

Program dan kegiatan SPM Bidang Urusan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Makassar yang terkait atau yang di masukkan ke dalam Aplikasi SIM spm.bangda Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dengan situs (https://spm.bangda.kemendagri.go.id//) dengan anggaran sebesar Rp.306.051.679.520.- dengan realisasi per tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.267.041.814.473.- atau Persentase sebesar 87,25%.

4.1.5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Guru PNS dan Guru Swasta pada Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Makassar yang terlibat dalam proses Penerapan Pencapaian SPM sebanyak 14.382 orang. Perincian tenaga ASN atau Guru PNS dan Guru Swasta dapat dilihat pada tabel IV.3 berikut:

Tabel IV.3
Keadaan ASN Atau Guru PNS dan Guru Swasta
yang mendukung kegiatan Penerapan SPM pada Bidang Urusan Pendidikan
Kota Makassar Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Struktural	12
2	Fungsional Umum	302
3	Fungsional Pengelolaan Barang atau Jasa	1
4	Fungsional Pranata Komputer	3
5	Fungsional Pustakawan	6
6	Fungsional Pamong Belajar	12
7	Fungsional Penilik	16
8	Fungsional Pengawas	21
9	Fungsional Analis Sumber Daya Manusia	2
10	Fungsional Perencana	2
11	Fungsional guru (Sekolah PAUD/SD/SMP Negeri dan Swasta) Sederajat	14.005
JUMLAH		**14.382**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tahun 2025

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

A. Permasalahan : (Nihil)

B. Solusi : (Nihil)

4.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil;
2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin;
3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir;
4. Pelayanan Kesehatan Balita;
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar;
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif;
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut;
8. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi;
9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus;
10. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat;
11. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Terduga Tuberkulosis;
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*).

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100%. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM sesuai indikator pencapaian digambarkan pada tabel IV.4 berikut :

Tabel IV.4
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kota Makassar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RKPD 2025	TARGET SPM 2025
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%

7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) yang mendapatkan Pelayanan kesehatan	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.2.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.5 berikut :

Tabel IV.5
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan
Kota Makassar Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM		Indikator Pencapaian/ Output			Total Pencapaian
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	27.685	28.004	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Ampul	27.684	28.004	-	100%
	Tablet tambah darah	Tablet	4.983.120	4.983.120	-	100%
	Alat deteksi risiko ibu hamil: Tes Kehamilan	Paket	27.684	28.004	-	100%
	Alat deteksi risiko ibu hamil: Pemeriksaan HB	Paket	27.684	28.004	-	100%
	Alat deteksi risiko ibu hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	27.684	28.004	-	100%
	Alat deteksi risiko ibu hamil: Pemeriksaan	Paket	27.684	28.004	-	100%

	Glukoprotein Urin					
	Alat deteksi risiko ibu hamil: skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan sifilis dan HIV	Paket	27.684	28.004	-	100%
	Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	27.684	28.004	-	100%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	27.684	28.004	-	100%
	Media KIE	Paket	47	47	-	100%
	Gel USG	Botol	1.846	1.846	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter/Dokter spesialis kebidanan	Orang	164	164	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6)	Orang	26.362	26.362	-	100%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	25.558	25.558	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Formulir Partograf	Formulir	25.558	25.558	-	100%
	Kartu ibu (rekam medis)	Paket	25.558	25.558	-	100%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak	Buku	25.558	25.558	-	100%
	Media KIE	Paket	47	47	-	100%

	Tenaga Medis: Dokter/Dokter spesialis kebidanan dan kandungan	Orang	164	164	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	25.532	25.532	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Vaksin Hepatitis B dosisi tunggal	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vitamin K1 Injeksi	Ampul	25.532	25.532	-	100%
	Salep/tetes mata antibiotik	Orang	25.532	25.532	-	100%
	Formulir bayi baru lahir	Formulir	25.532	25.532	-	100%
	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	25.532	25.532	-	100%
	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	25.532	25.532	-	100%
	Media KIE	Paket	47	47	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter/Dokter spesialis anak	Orang	163	163	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga Kesehatan:	Orang	120	120	-	100%

	Tenaga Kefarmasian					
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	179	179	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Kader Kesehatan	Orang	5.065	5.065	-	100%
4	Pelayanan Kesehatan Balita					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	86.472	86.472	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	86.472	86.472	-	100%
	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	Formulir	86.472	86.472	-	100%
	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	Buku	86.472	86.472	-	100%
	Vitamin A Biru	Kapsul	25.532	25.532	-	100%
	Vitamin A Merah	Kapsul	60.940	60.940	-	100%
	Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vaksin imunisasi dasar: DPT-Hb-Hib	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	25.532	25.532	-	100%
	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-Hb-Hib	Vaksin	60.940	60.940	-	100%
	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak -	Vaksin	60.940	60.940	-	100%

	Rubella					
	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	60.940	60.940	-	100%
	Peralatan Anafilaktik	Paket	47	47	-	100%
	Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	248	248	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	148	148	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Perawat	Orang	441	441	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Guru PAUD	Orang	1.675	1.675	-	100%
	Kader Kesehatan	Orang	5.065	5.065	-	100%
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	197.812	200.578	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Form Pencatatan/ Buku raport kesehatanku	Buku	197.812	200.578	-	100%
	Form Pencatatan/ Buku pemantauan kesehatan	Buku	197.812	200.578	-	100%
	Kuesioner skrining kesehatan	Kuesioner	197.812	200.578	-	100%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	Formulir	197.812	200.578	-	100%
	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	Formulir	25.802	25.802	-	100%
	Tablet Tambah Darah pada remaja putri	Tablet	3.428.724	3.428.724	-	100%

	kelas 79 dan usia 12-17 tahun di luar sekolah					
	Alat Pemeriksaan Hb	Alat	47	47	-	100%
	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7	Strip	10.990	10.990	-	100%
	Media Promosi Kesehatan	Paket	47	47	-	100%
	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	Vaksin	65.937	65.937	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter/Dokter gigi	Orang	230	230	-	100%
	Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	-	100%
	Tenaga Kesehatan : Masyarakat	Orang	251	251	-	100%
	Guru	Orang	11.685	11.685	-	100%
	Kader Kesehatan/ Dokter Kecil/ Peer Conselor	Orang	5.065	5.065	-	100%
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif					98,44%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					78,50%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	971.476	953.253	18.223	98,12%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,94%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					99,70%
	Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	47	47	-	100%
	Alat dalam melakukan skrining: Alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur	Unit	47	47	-	100%

	lingkar perut, alat ukur lingkar lengan atas (LILA)					
	Alat: Tensime-ter	Unit	47	47	-	100%
	Alat: Glukome-ter	Unit	47	47	-	100%
	Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	47	47	-	100%
	Alat: tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol	Paket	47	47	-	100%
	Alat: KIT IVA Tes	Unit	47	47	-	100%
	Strip dan Reagen Pemeriksaaan Hb	Unit	971.476	953.253	18.223	98,12%
	Kit Opthalmologi Komunitas	Unit	47	47	-	100%
	Kuesioner PUMA	Dokumen	971.476	953.253	18.223	98,12%
	Alat Pelayanan KB	Unit	141	141	-	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	971.476	953.253	18.223	98,12%
	Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	27.685	27.685	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	148	148	-	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	251	251	-	100%
	Kader Kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	5.065	5.065	-	100%
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	152.427	152.427	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%

	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas dan tensimeter	Paket	47	47	-	100%
	Glukometer (alat pemeriksaan gula darah)	Paket	47	47	-	100%
	Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	47	47	-	100%
	Bahan medis habis pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	152.427	152.427	-	100%
	Instrumen skrining lansia sederhana (SKILAS), instrument aktivitas kehidupan sehari-hari (AKS/Activity Daily Living (ADL Bathel))	Paket	152.427	152.427	-	100%
	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	152.427	152.427	-	100%
	Media KIE	Paket	47	47	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	148	148	-	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	251	251	-	100%
	Kader kesehatan Terlatih dan Mempunyai Kualifikasi tertentu	Orang	5.065	5.065	-	100%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi					92,26%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					72,57%

	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	330.427	299.754	30.673	90,72%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,69%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					98,45%
	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	47	47	-	100%
	Obat Hipertensi	Paket	330.427	299.754	30.673	90,72%
	Tensimeter	Unit	47	47	-	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Dokumen	330.427	299.754	30.673	90,72%
	Media Promosi Kesehatan	Paket	47	47	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	148	148	-	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	74	74	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	179	179	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	251	251	-	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Mellitus					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	26.974	32.574	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%

	Obat Diabetes Mellitus	Paket	26.974	32.574	-	100%
	Fotometer atau Glukometer	Unit	47	47	-	100%
	BMHP gula darah dalam pemantauan kadar: Reagen Glukosa atau Strip Tes Gula Darah, kapas Alkohol, Lancet	Unit	26.974	32.574	-	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), SIMPUS (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	26.974	32.574	-	100%
	Media Promosi Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Paket	47	47	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter	Orang	156	156	-	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	470	470	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	631	631	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	168	168	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	165	165	-	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	Orang	100	100	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Teknis Medis (ATLM)	Orang	100	100	-	100%
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat					99,38%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					79,43%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	3.368	3.344	24	99,29%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,95%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					99,75%
	Buku Pedoman	Buku	50	50	-	100%

	Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru					
	Penyediaan Psikofarmaka	Paket	3.368	3.344	24	99,29%
	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/atau penyediaan melalui aplikasi	Formulir	3.368	3.344	24	99,29%
	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan	Formulir	3.368	3.344	24	99,29%
	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Media	47	47	-	100%
	Tenaga kesehatan: Dokter	Orang	148	148	-	100%
	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan Jiwa	Orang	54	54	-	100%
	Tenaga professional lainnya	Orang	10	10	-	100%
	Tenaga lain tang terlatih di bidang kesehatan jiwa	Orang	47	47	-	100%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	38.736	47.499	-	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					20%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					100%
	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	Paket	47	47	-	100%

	Reagen Zn TB	Paket	38.736	47.499	-	100%
	Masker bedah dan Masker N95	Paket	38.736	47.499	-	100%
	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi),Rak pengering	Paket	38.736	47.499	-	100%
	Katrid tes cepat molekuler	Paket	38.736	47.499	-	100%
	Formulir pencatatan dan pelaporan	Formulir	38.736	47.499	-	100%
	Pedoman/ Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	5	5	-	100%
	Tuberkulin	Vial	38.736	47.499	-	100%
	Tenaga Medis: Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	Orang	155	155	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kefarmasian	Orang	120	120	-	100%
	Tenaga Kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	251	251	-	100%
	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	79	79	-	100%
	Tenaga kesehatan: Radiografer	Orang	60	60	-	100%
	Kader Kesehatan	Orang	5.065	5.065	-	100%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*)					95,48%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)					75,80%
	Jumlah yang Harus Dilayani	Orang	42.487	40.256	2.231	94,75%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)					19,68%
	Jumlah Mutu yang Harus Dilayani Dipenuhi					98,42%

	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	Paket	47	47	-	100%
	Tes cepat HIV (RDT) pertama	Paket	42.487	40.256	2.231	94,75%
	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/ Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	42.487	40.256	2.231	94,75%
	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	Paket	42.487	40.256	2.231	94,75%
	Tenaga Medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	154	154	-	100%
	Tenaga kesehatan: Bidan	Orang	334	334	-	100%
	Tenaga kesehatan: Perawat	Orang	411	411	-	100%
	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	79	79	-	100%
	Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	251	251	-	100%
	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: pendampingan dan penjangkauan	Orang	25	25	-	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.2.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel IV.6 berikut:

Tabel IV.6
Program dan Kegiatan Pada Bidang Urusan Kesehatan
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (% Realisasi/ Anggaran)
	DINAS KESEHATAN	**645.782.273.000**	**573.190.681.346**	**88,76**
I	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**281.071.388.284**	**241.919.694.997**	**86,07**
1.	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	121.832.680	67.166.000	55,13
2.	Administrasi keuangan perangkat daerah	196.033.434.367	171.508.318.034	87,49
3.	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	108.000.000	78.000.000	72,22
4.	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	1.028.145.000	770.433.523	74,93
5.	Administrasi umum perangkat daerah	1.509.256.960	1.283.797.613	80,73
6.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	3.386.916.984	2.094.698.765	61,85
7.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1.690.684.500	1.241.758.235	73,45
8.	Peningkatan Pelayanan BLUD	77.112.117.793	64.875.522.827	84,13
II	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	**353.588.219.836**	**321.779.305.200**	**91,00**
1.	Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota	47.647.060.101	38.424.870.611	80,64
2.	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukantingkat daerah kabupaten/kota	301.816.771.595	281.356.452.657	93,22
3.	Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	1.796.296.000	1.680.855.097	93,57
4.	Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	2.328.092.140	317.126.835	13,62
III	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**1.103.741.160**	**560.543.319**	**50,79**
1.	Pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten/kota	74.257.160	66.214.878	89,17
2.	Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten/kota	172.055.000	110.306.012	64,11
3.	Pengembangan mutu dan	857.429.000	384.022.429	44,79

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (% Realisasi/ Anggaran)
	peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota			
IV	**Program Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman**	**706.344.320**	**503.736.116**	**71,32**
1.	Pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	125.309.000	81.717.550	65,21
2.	Pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga	32.022.000	5.091.888	15,90
3.	Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	296.165.000	225.277.925	76,07
4.	Penerbitan sertifikat laik hygiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum	9.300.320	6.506.000	69,95
5.	Penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan	50.040.000	41.658.300	83,25
6.	Pemeriksanaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	193.508.000	143.484.453	74,15
IV	**Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan**	**9.312.579.400**	**8.427.401.714**	**90,49**
1.	Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota	8.734.844.040	8.081.268.645	92,52
2.	Pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten/kota	127.241.760	91.652.069	72,03
3.	Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat tingkat daerah kabupaten/kota	450.493.600	254.481.000	56,49

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.2.5. Dukungan Personil

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Makassar selain didukung oleh pejabat dan staf di Dinas Kesehatan Kota Makassar, juga didukung oleh petugas di Puskesmas beserta jaringannya (Pustu, dsb) dan petugas kesehatan di RSUD Kota Makassar serta di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

Adapun keadaan ASN pada pelaksanaan SPM di Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Keadaan ASN Pelaksana SPM pada Bidang Urusan Kesehatan
Kota Makassar Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	14
3	Eselon IV	3
4	Staf PNS	203
5	Tenaga Kontrak	271
6	Medis (Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi) Dokter Spesialis : 50 Orang Dokter Umum : 148 Orang Dokter Gigi : 95 Orang Dokter Gigi Spesialis : 3 Orang	296
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan lingkungan	251
8	Tenaga Kefarmasian	120
9	Bidan	334
10	Perawat	411
11	Perawat Gigi	60
12	Tenaga Gizi (Nutrisionis)	74
13	Keteknisian Medis Ahli Laboratorium Medik : 79 Orang Teknik Biomedika : 9 Orang Keterapian Fisik : 9 Orang Keteknisian Medis : 65 Orang	162
JUMLAH		**2.200**

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan adalah hal-hal yang menjadi hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan penerapan dan pencapaian SPM, baik internal maupun eksternal. Sedangkan solusi adalah penyelesaian dan pemecahan terhadap masalah. Adapun permasalahan dan solusi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

a) Permasalahan :

1. Definisi operasional per indikator yang berbeda antara SPM Kesehatan (berdasarkan Permenkes RI Nomor 6 Tahun 2024) dan SPM Bangda Kemendagri (berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021)
2. Penentuan target capaian yang tinggi sehingga mengakibatkan tingkat capaian menjadi tidak maksimal
3. Banyaknya tenaga kesehatan di Puskesmas menjalankan tugas ganda atau mengalami rangkap jabatan
4. Masih adanya stigma di masyarakat, khususnya terkait orang dengan gangguan jiwa berat, tuberkulosis dan HIV
5. Sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM masih belum terintegrasi
6. Belum maksimalnya pelatihan untuk tenaga kesehatan berdasarkan jenis profesi

b) Solusi :

1. Melakukan sinkronisasi administrasi (formulasi pelaporan) dan prioritas defisini operasional berbasis standar teknis
2. Melakukan pendekatan berbasis data dan kolaborasi yang realistis dengan reviu dan penyesuaian target serta evaluasi sumber daya
3. Memaksimalkan tenaga kesehatan yang tersedia di Puskesmas dengan tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat
4. Memaksimalkan edukasi terhadap masyarakat
5. Peningkatan sistem pencatatan dan pelaporan terkait SPM
6. Memberikan masukan atau saran kepada Pemerintah Kota Makassar untuk memfasilitasi terlaksananya pelatihan untuk tenaga kesehatan berdasarkan jenis profesi.

4.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

Pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat dua jenis layanan dasar yang dilaksanakan, sesuai yang tertuang dalam Pemendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Layanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum yang dimaksud meliputi Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik.

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dari dua jenis layanan dasar pada urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan, Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan target Pencapaian SPM. Untuk lebih jelasnya target pencapaian SPM digambarkan pada tabel IV.8 berikut :

Tabel IV.8
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Makassar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET Pencapaian (Orang)	TARGET SPM 2025
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	7.736 Orang	100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	11.800 Orang	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

4.3.3. Realisasi

Berdasarkan data yang telah diinput pada Aplikasi E SPM Bangda Kemendagri, Realisasi pencapaian SPM urusan Pekerjaan Umum oleh Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.9 berikut :

Tabel IV.9
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Makassar Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM					100,00%
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari					100,00%
			Rekap Target (Harus Dilayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	7.736	9.072	1.336	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI:	Orang	7.736	9.072	+1.336	100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG / JASA /					100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	SDM) YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI					
	JARINGAN PERPIPAAN					100,00%
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	900	1.231	+331	100,00%
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst. (sesuai dengan Permenkes Nomor 2 Tahun 2023)	Rumah Tangga	900	1.231	+331	100,00%
	BUKAN JARINGAN PERPIPAAN					100,00%
	Kuantitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (4 galon)	Rumah Tangga	1.034	1.037	3	100,00%
	Kualitas SPAM					
	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau, dst	Rumah Tangga	1.034	1.037	3	100,00%
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik					100,00%
			Rekap Target (Harus DIlayani)	Rekap Capaian (Terlayani)	Selisih	
	PENERIMA LAYANAN DASAR S.D. KONDISI SAAT INI (REKAPITULASI) *tidak masuk dalam hitungan	Orang	11.200	11.220	20	

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80,00%
			Jumlah Yang Harus Dilayani	Jumlah Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	11.200	11.220	20	100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				(20%)	20,00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG / JASA / SDM) YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI					100,00%
	KUANTITAS SPALD					100,00%
	Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	1.100	1.100	0	100,00%
	KUALITAS SPALD					100,00%
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)					
	Ukuran kualitas penyediaan pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar individual dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa yang tersambung ke SPALD-T Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	200	205	+5	100,00%
	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) *Mutu Tidak Boleh Ditutup Semua					
	1. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Aman terhadap fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan > 25 jiwa/hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septic sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal 3 tahun sekali dan diolah di IPLT Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	1.500	1.500	0	100,00%
	2. Ukuran kualitas Pelayanan Akses Layak terhadap fasilitas buang air	Rumah Tangga	1.100	1.100	0	100,00%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
	besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan < 25 jiwa/hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar					

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

4.3.4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tabel IV.10 sebagai berikut :

Tabel IV.10
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Makassar Tahun 2025

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	25.914.209.260,00	APBD
2.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	22.282.382.359,00	APBD
		2.625.000.000,00	DAK
TOTAL		**50.821.591.619,00**	

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

4.3.5. Dukungan Personil

Jumlah personil pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri dari :

Tabel IV.11
Keadaan ASN Pelaksana SPM pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Kota Makassar Tahun 2025

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Eselon II (Kepala Dinas)	1 Orang
2.	Eselon III (Sekretaris Dinas dan Kepala Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Kontruksi)	2 Orang
3.	Eselon IV (Kepala UPT PAL, KTU UPT PAL, PLT Kasubag Perencanaan dan Pelaporan)	3 Orang
4.	Staf PNS (Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bidang Sanitasi, Air Bersih dan Jasa Konstruksi dan UPT PAL)	95 Orang
JUMLAH		**101 Orang**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

1. Pengumpulan Data
   - Proses pengumpulan data dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan pada jumlah rumah yang terlayani, namun kendala yang seringkali dihadapi tim survey Dinas PU pada saat melaksanakan pendataan di lapangan, adanya beberapa kepala keluarga/pemilik rumah tidak berada di tempat, sehingga kesulitan untuk mendapatkan Jumlah dan Identitas lengkap.
   - Pada lokasi yang menjadi target pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih dan Sanitasi terkadang tidak terdapat lokasi Fasum untuk membangun Sarana dan Prasarana.

   Solusi
   - Melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah setempat (RT/RW).
   - Mencari lahan fasum/fasos yang baru atau lahan pribadi warga yang siap dihibahkan.

2. Perencanaan dan Penganggaran
   - Adanya penyesuaian program prioritas dalam mendukung Visi Misi Kepala Daerah dengan anggaran yang tersedia.
   - Penganggaran Perencanaan pada tahun yang bersamaan dengan pelaksanaan fisik akan membutuhkan waktu yang lebih lama.

   Solusi
   - Menganggarkan kembali pada tahun berikutnya.
   - Menganggarkan Perencanaan pada tahun sebelumnya, sehingga pelaksanaan fisik dapat berjalan lebih cepat.

4.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

Terdapat dua jenis layanan dasar bidang urusan perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu :

1. Bidang Perumahan yang mempunyai tugas Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota,

2. Bidang Perumahan yang mempunyai tugas Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan dasar yang dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 yang dituangkan dalam RPJMD 2025-2029 dengan target SPM Tahun 2025 sebagaimana yang digambarkan pada tabel IV.12 dibawah ini.

Tabel IV.12
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kota Makassar

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RKPD 2025	Target SPM (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yg mem peroleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penye diaan rumah yg layak huni bagi masyarakat yg terkena relokasi program peme rintah Daerah	Jumlah Warga Ne gara yg terkena relokasi akibat program Pemerin tah Daerah yg memperoleh fasili tasi penyediaan rumah yg layak huni.	100	100

Sumber : Dinas Perumahan Kota Makassar, Tahun 2025

4.4.3. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.13 berikut :

Tabel IV.13
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kota Makassar Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM		**TUNTAS PARIPURNA**			**100 %**	
1.	**Penyedia dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/Kota**					**100 %**	
	Bencana Meliputi : a) Letusan gunung berapi; b) Gempa bumi; c) Tanah longsor; d) Gelombang pasang; e) Banjir bandang; dan/atau f) Bencana lainnya.						
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%				100%	100 %	
			Jumlah Mutu Yang	Jumlah Mutu Yang	Mutu Yang Belum		

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
			Harus Dilayani/ Dipenuhi	Terlayani / Terpenuhi	Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		1.500	1.847	0	100 %	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100 %)			100 %	
	1.PENDAHULUAN					100 %	
	Form 4.a.4 identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten / kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	0	100 %	
	Form 4.a.5 identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	0	100%	
	Form 4.a.6 pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	0	100%	
	Form 4.a.10 identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		100	100	0	100%	
	Form 4.a.11 identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota		100	100	0	100%	
	Form 4.a.12 identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)		100	100	0	100%	
	Form 4.a.13 pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	0	100%	
	PERHITUNGAN					100%	
	Form 4.b.3 penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	9	100%	
	Form 4.b.4 penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota		100	100	0	100%	
	Form 4.b.7 penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program		100	100	0	100%	

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota :						
	Form 4.b.8 penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	0	100%	
	PERENCANAAN					100%	
	Form 4.c.2 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota :		100	100	0	100%	
	Form 4.c.4 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog. Kabupaten/kota :		100	100	0	100%	
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100	100	0	100%	
	Relokasi Program Pemerintah Meliputi : a) Pengurangan kawasan kumuh 10-15 Ha; b) Penyesuaian perumahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah; c) Pengurangan perumahan yang berada pada kawasan bukan fungsi permukiman; d) Pengurangan perumahan yang berada di daerah/tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya; dan/atau e) Pengurangan perumahan yang berada di daerah rawan bencana)						
	Tidak Terjadi (Dokumen Teknis Perencanaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman) di Verifkasi oleh Sekber Pusat(contoh : dokumen RP3KP, dsb.)Tidak Masuk Kedalam Perhitungan						
	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (100%)				(100%)	100 %	
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuh	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi		
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		1500	1.847	0	100 %	
	1 . Format Tahapan		Nilai Maksimum Pada TW 4 (100 %)			100 %	
	1.PENDATAAN					100 %	
	Form 4.a.4 identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	0	100 %	
	Form 4.a.4 identifikasi lahan potensial sebagai relokasi perumahan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni beagi korban bencana		100	100	0	100 %	
	Form 4.a.6 pengumpulan data rumah yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi		100	100	0	100 %	

No	Indikator Kinerja Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			TOTAL PENCAPAIAN	AKSI
	rumah yang layak huni bagi korban bencana						
	Form 4.a.10 identifikasi perumahan di lokasi yang menimbulkan bahaya penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		100	100	0	100%	
	Form 4.a.11 identifikasi perumahan di atas lahan bukan fungsi permukiman di kabupaten/kota		100	100	0	100%	
	Form 4.a.12 identifikasi perumahan di kawasan kumuh kabupaten/kota (<10 ha)		100	100	0	100%	
	Form 4.a.13 pengumpulan data rumah yang terkena relokasi program pemerintah kab./kota		100	100	0	100%	
	2.PERHITUNGAN					100%	
	Form 4.b.3 penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana		100	100	0	100%	
	Form 4.b.4 penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi terkena bencana kabupaten/kota :		100	100	0	100%	
	Form 4.b.7 penghitungan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota :		100	100	0	100%	
	Form 4.b.8 penghitungan kebutuhan biaya layanan pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten/kota		100	100	0	100 %	
	3.PERENCANAAN		100	100	0	100 %	
	Form 4.c.2 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena bencana kabupaten/kota		100	100	0	100 %	
	Form 4.c.4 rencana pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prog.ram kab./kota		100	100	0	100 %	

Sumber : Dinas Perumahan Kota Makassar, Tahun 2025

4.4.4. Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berkaitan dengan jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan Rakyat pada Anggaran Pokok 2025 adalah sebesar **Rp.1.986.327.000,-**, dimana anggaran untuk kegiatan yang secara keseluruhan dapat dipergunakan untuk realisasi penerapan dan pencapaian SPM untuk kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/kota, khusus sub kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana hanya sebesar **Rp.17.286.000.** Secara fakta dilapangan untuk progress kinerja kegiatan Rehabilitasi rumah bagi korban bencana tidak terlaksana disebabkan karena tidak terdapat anggaran untuk pelaksanaan kegiatan fisik tersebut tapi tetap di lakukan pendataan dan verifikasi serta survey terhadap rumah yang terkena bencana dan berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Bidang Perumahan sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut. Adapun rincian tersebut dapat dilihat pada tabel IV.14 sebagai berikut :

Tabel IV.14
Alokasi Anggaran Penyerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Pengembangan Perumahan			
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Prog ram Kabupaten/ Kota	1.986.327.000,-	1.957.922.654,-	99%
1.1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	17.286.000,-	17.231.500,-	100%
1.2	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.969.041.000,-	1.940.691.154,-	99%

Sumber : Dinas Perumahan Kota Makassar, Tahun 2025

4.4.5. Dukungan Personil

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebanyak 109 orang sebagaimana terinci pada tabel IV.15 berikut :

Tabel IV.15
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Eselon pada
Bidang Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar Tahun 2025

No	Jabatan	Struktural (Orang)				Staf (Orang)	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional		
1	Kepala Dinas	1					1
2	Sekretariat (Sekdis)		1			1	2
3	Subag. Umum & Kepeg.			1		12	13
4	Subag. Perencanaan			1		6	7

No	Jabatan	Struktural (Orang)				Staf (Orang)	Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional		
5	Subag. Keuangan			1		6	7
6	Bidang Perumahan		1		2	13	16
7	Bidang Kawasan Permukiman		1		1	20	22
8	Bidang PKP Kumuh		1		1	15	17
9	Bidang PSU		1		3	11	15
10	UPTD Rumah Susun				2	7	9
Total		1	5	3	9	91	109

Sumber : Dinas Perumahan Kota Makassar, Tahun 2025

4.4.6. Permasalahan

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPM adalah sebagai berikut:

PENGUMPULAN DATA

Permasalahan

- Pendataan terkait korban bencana terlambat
- Data terkait korban bencana tidak valid
- Data terkait korban bencana dari kelurahan terlambat

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Permasalahan

- Di karenakan pendataan yang terlambat, sehingga penghitungan kebutuhan material juga jadi terlambat sehingga Surat Keputusan terkait penetapan masyarakat korban bencana juga terlambat.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Permasalahan

- Karena penghitungan yang terlambat sehingga perencanaan dan penganggaran juga jadi terlambat.
- Masih kurangnya dukungan pendanaan dari APBD/APBN untuk membiayai penerapan dan pencapaian SPM terkait Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana

PELAKSANAAN

Permasalahan

- Akibat keterlambatan dalam hal pendataan sehingga penghitungan kebutuhan dan perencanaan juga terlambat, alhasil pelaksanaan otomatis juga terlambat.

4.4.7. Solusi dan Tindak Lanjut

PENGUMPULAN DATA

Solusi

- Percepatan Pendataan Korban Bencana segera dilaksanakan.
- Data terkait korban bencana segera di tindaklanjuti

Tindak Lanjut

- Respon cepat bila ada bencana yang terjadi
- Memverifikasi data korban bencana hasil pendataan agar tidak terjadi kesalahan data sehingga dianggap tidak valid

PENGHITUNGAN KEBUTUHAN

Solusi

- Karena pendataan segera dilakukan sehingga penghitungan kebutuhan juga cepat di ketahui dan tidak lagi terlambat.

Tindak Lanjut

- Akan segera dilakukan perhitungan kebutuhan material bagi korban bencana.

PERENCANAAN DAN PENGANGGURAN

Solusi

- Perencanaan dan penganggaran segera dilakukan
- Mengajukan bantuan pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN untuk pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM terkait Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Serta tentang Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut

- Pemerintah kota perlu memberi dukungan pendanaan untuk korban bencana dalam rangka Pencapaian SPM

PELAKSANAAN

Solusi

- Segera melaksanakan pemberian/penyerahan bantuan material bagi korban bencana apabila penganggaran telah tersedia

Tindak Lanjut

- Selalu tanggap dalam hal persiapan pelaksanaan penyerahan bantuan bagi korban bencana yang telah terjadi

4.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Terdapat satu jenis layanan dasar bidang urusan ketertiban umum yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel IV.16 berikut ini.:

Tabel IV.16
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketertiban Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET RKPD	TARGET SPM
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada Kabupaten/Kota	100%	100%

Sumber : Satpol PP, Kota Makassar, Tahun 2025

Indikator pelayanan SPM Satpol PP adalah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kota Makassar dengan target 100%. Berdasarkan pendataan di lapangan oleh personil Satpol PP Kota Makassar bahwa jumlah warga negara yang berada di radius 0 - 50 meter dari lokasi penegakan perda dan perkada Kota Makassar sebanyak 336 orang.

4.5.3. Alokasi Anggaran

Anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Polisi Pamongpraja yang berkaitan dengan jenis pelayanan dasar Urusan Bidang Trantibumlinmas pada Anggaran Program Tahun 2025 adalah sebesar Rp.28.362.085.143 dan Anggaran SPM sebesar RP.2.504.968.080.

Penganggaran SPM tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dianggarkan sebesar **Rp.1.555.848.040.**
- Sub Kegiatan Penyediaan layanan dasar dalam rangka dampak penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dianggarkan pada DPA Pokok

2025 Rp. 21.380.000, namun pada anggaran pergeseran 1 diefisiensi menjadi **Rp.18.725.000**,

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketentraman dan Ketertiban Umum di anggarkan sebesar Rp 3.982.011.040, adapun anggaran Sosialisasi Kapasitas dan Kapabilitas Satuan Perlindungan Masyarakat yang mendukung SPM Satpol PP sebesar **Rp.39.791.040,-**
- Sub Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum pada anggaran Perubahan 2025 di anggarkan sebesar **Rp.890.604.000**.

4.5.4. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan standar pelayanan minimal urusan bidang ketertiban umum yaitu :

Tabel IV.17
Jumlah Dukungan Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Makassar
Tahun 2025

No.	Personil	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1.	**SATPOL PP KOTA MAKASSAR**	**720**	**569**	**151**
1.1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	39	35	4
-	Eselon 2b	1	1	0
-	Eselon 3a	1	1	0
-	Eselon 3b	4	4	0
-	Eselon 4a	8	6	2
-	Staf Pelaksana	25	23	2
1.2	PPPK	108	81	27
1.3	PPPK PARUH WAKTU	553	439	114
1.4	PJLP	20	14	6
Total		**720**	**569**	**151**

Sumber : Satpol PP, Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.5. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM urusan Trantibumlinmas bidang Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum dapat dilihat pada tabel IV.18 berikut :

Tabel IV.18
Realisasi SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum
Triwulan IV Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN	KETERANGAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM						99,28%	

1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)					99,28%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	336	336	0	100%	Jumlah warga negara yang berada di radius kurang 50 meter dari lokasi penegakan perda
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					19,28%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani /Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani /Terpenuhi	96,43%	
	1 Pemenuhan standar sarana prasarana Satpol PP yang digunakan sebagai penunjang proses penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan oleh Satpol PP	unit	1002	1002	0	100%	Jumlah kendaraan operasional, roda 2, roda 4 dan dalmas
	2 Pemenuhan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas sesuai Permendagri 16 Tahun 2023	dokumen	1	1	0	100%	SOP ketertiban umum dibuat dalam 1 dokumen yang didalamnya terdiri dari beberapa SOP kegiatan
	3 Pemenuhan standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda/perkada serta penyelenggaraan Tibumtranmas atau ASN yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***	orang	420	360	0	85,71%	Peningkatan kapasitas SDM, Pelatihan Korps Musik, dan Satlinmas
	4 Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum	dokumen	1	1	1	100%	Belum ada warga negara yang terkena

	pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal						dampak kerugian materil maupun cidera
	5 Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	orang	0	0	0	-	Tidak ada warga yang mengalami kerugian materil
	6 Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan	orang	0	0	0	-	Tidak ada warga yang mengalami cidera baik cidera ringan, sedang atau berat.

Sumber : Satpol PP, Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

a) Pengumpulan Data

Kendala :

1. Tidak semua warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda memberikan data-data lengkap seperti NIK dan Nomor KK. alasannya karena data pribadi.

Permasalahan :

1. Tidak ada pengaduan layanan ganti rugi materil maupun pengaduan layanan pengobatan akibat penegakan Perda dan Perkada sehingga untuk isian capaian mutu pada indikator tersebut tidak ada.

Solusi :

1. Melakukan identifikasi data baik dengan verifikasi dan validasi ke lokasi pelanggaran gangguan ketertiban umum atau konfirmasi kepada masyarakat;

b) Penghitungan Kebutuhan

Kendala :

1. Belum adanya data awal yang valid sehingga sulit melakukan penghitungan kebutuhan khusunya data pengaduan ganti rugi materil dan layanan pengobatan.

Permasalahan :

1. Warga negara yang berada di radius 0-50 meter dari lokasi penegakan perda terkadang tidak memberikan data-data lengkap seperti NIK dan Nomor KK. alasannya karena data pribadi.

Solusi :

1. Melakukan perkiraan anggaran ganti rugi materil dan layanan pengobatan atas dampak akibat penegakan perda dan perkada.

c) Perencanaan dan Penganggaran

Kendala :

1. Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena belum ada warga negara yang mengalami kerugian materil atas dampak penegakan perda.

Permasalahan :

1. Perencanaan dan penganggaran hanya berpedoman pada asumsi jumlah ganti rugi materil yang akan datang.

Solusi :

1. Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk diajukan pada saat perencanaan dan penganggaran.

d) Pelaksanaan

Kendala :

Tidak ada serapan anggaran pada kegiatan penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan perda dan perkada karena tidak ada warga negara yang mengalami kerugian materil maupun cidera akibat dari penegakan perda dan perkada.

Tidak ada warga negara yang melakukan pengaduan kerugian materil dan cedera fisik akibat penegakan perda dan perkada.

Solusi :

Melaksanakan Patroli rutin wilayah dalam hal mengantisipasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Bidang Urusan Ketrentaman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standarpelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar Laporan Penyusunan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh daerah. Adapun SPM dibidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Antara Lain :

- Sub Urusan Kebakaran Jenis pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, mencangkup layanan :

a. Layanan Respon cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran;
b. Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan pengendalian Kebakaran;
c. Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi;
d. Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan kebakaran;
e. Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dari Jenis Layanan Dasar Urusan Trantitbumlinmas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang di Laksanakan, Pemerintah Kota Makassar telah Menetapkan Target SPM yang Mengacu pada Dokumen RKPD Tahun 2025. Untuk Lebih Jelasnya Target Pencapaian SPM sesuai RKPD di Gambarkan Pada Tabel IV.19 berikut:

Tabel IV.19
Target Pencapaian SPM Triwulan IV
Urusan Dinas Pemadam Kebakaran & Penyelamatan Kota Makassar Tahun 2025

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RKPD (%)	Target SPM 2025 (%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Persentase Warga Negara memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100%	100%

No	Jenis Pelanyanan	Target Pencapaian Jiwa	Target RKPD (%)	Target SPM 2025 (%)
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	4000	100%	100%

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.3. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran yang di gunakan untuk membiayai Program dan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Sebagai Berikut :

Tabel IV.20
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar

No	Program	Anggaran	Sumber Dana
1	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	27.911.232.900	APBD

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	PERSENTASE	**27.911.232.900**
	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		**27.539.110.300**
	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	7.472.000
	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18.279.456.800
	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	1.224.380.000
	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0
	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0
	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	996.094.000
	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	0
	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangann Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0
	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Laporan	0
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen	0
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Dokumen	0
	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen	0
	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Dokumen	0
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	7.031.707.500
	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	0
	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0

NO	KEGIATAN /SUB KEGIATAN	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		**8.080.000**
	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	0
	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	8.080.000
	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		**273.691.600**
	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	273.691.600
	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0
	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		**90.351.000**
	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	14.611.000
	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	18.384.000
	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	19.270.000
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	38.086.000

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.4. Dukungan Personil

Jumlah aparatur sipil negara (ASN) pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyalamatan sebanyak 160 orang dan Tenaga Non Organik (Non ASN) sebanyak 357. Jadi jumlah Personil sebanyak 517 Personil yang terdiri dari:

Tabel IV.21
Komposisi ASN dan Non ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan
Kota Makassar Tahun 2025

NO	GOLONGAN	S3		S2		SI/D4		D3		SLTA		SLTP		SD		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	GOLONGAN IV			8		2										10
2	GOLONGAN III			1	1	9	1	2		15	7					36
3	GOLONGAN II								1	36	2	5				44
4	GOLONGAN I									5				2		2
5	GOLONGAN IX					2										2
						2										2

6	GOLONGAN VII															
7	GOLONGAN V									61	3					64
8	TENAGA KONTRAK				1	68	12	2	1	248	12	13				357
	JUMLAH															**517**

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.5. Realisasi

Hasil Caiapan adalah Realisasi target yang dapat di capai atau direalisasikan oleh pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel IV.22
Pelayanan Realisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Makassar Tahun 2025

1.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				(80%)	80%
			Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4000	4000	0	100%
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN (100%)				(20%)	20.00%
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani/Terpenuhi	100%
	1. Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi	Layanan	258	258	0	100%
	2. Pemenuhan Standar Operasional Prosedur penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	2	2	0	100%
	3. Pemenuhan sarana prasarana pemadam kebakaran	Unit	191	191	0	100%
	4. Pemenuhan standar peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia	Unit	67	67	0	100%
	5. Pemenuhan pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran	Layanan	32	32	0	100%
	6. Pemenuhan pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran	Layanan	1711	1711	0	100%

Sumber : Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Perencanaan

- Permasalahan

1. Sosialisasi tentang penerapan SPM yang masih kurang, sehingga Peyusunan Rencana Kerja selanjutnya tidak mengacu pada Pencapaian SPM
2. Keterbatasan lahan Pemerintah Kota Makassar, Untuk membangun Pos Pembantu/Sektor dalam cakupan Wilayah WMK, guna tercapainya Quick Respon Time (QRT).

- Solusi

1. Mempelajari Peraturan Pemerintan No.2 Tahun 2018, tentang StandarPelayanan Minimal, PERMENDAGRI No.100 Tahun 2018.
2. Bekerjasama dengan Instansi lainnya Untuk pengadaan Lahan pembangunan Pos Pembantu.

Koordinasi

Permasalahan

1. Belum adanya Peraturan Daerah Tentang Penanggulangan Kebakaran
2. Kurangnya Koordinasi dengan pihak terkait dalam penanggulangan Kebakaran

Solusi

1. Membuat Ranperda Tentang Pencegahan Kebakaran

Pendanaan

- Permasalahan

1. Kurangnya alokasi anggaran yang dialoksikan untuk program pencegahan (sosialisasi, penyuluhan)
2. Kurangnya alokasi anggaran untuk meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan bidangnya
3. Keterbatasan anggaran dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada masyarakat pulau di wilayah Kota Makassar

- Solusi

1. Memproritaskan Anggaran untuk Program dan kegiatan yang Terkait denganBidang SPM dalam penyusunan Rencana Kerja pada Tahun selanjutnya.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal terdapat 3 (tiga) jenis pelayanan dasar terkait bidang Penanggulangan Bencana, yaitu :

1. pelayanan informasi rawan bencana;
2. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
3. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Pelayanan dasar tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kota Makassar.

4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel IV.23 berikut ini :

Tabel IV.23
Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM BPBD Kota Makassar

NO	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target RKPD Tahun 2025	Target SPM (%)
1	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100
2	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100
3	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100

Sumber : BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Penanggulanan Bencana Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp.15.060.354.401,-dengan realisasi sebesar Rp.13.957.231.373,-, atau 92.68%.

4.5.4. Dukungan Personil

Jumlah personil yang melaksanakan penerapan SPM bidang Kebencanaan sebanyak 180 Orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.24
Keadaan ASN BPBD
Kota Makassar Tahun 2025

NO	Jabatan	JUMLAH
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	3
4	Jabatan Pelaksana PNS	15
5	Jabatan Fungsional PNS	5
6	Jabatan Fungsional PPPK	19
7	Jabatan Pelaksana PPPK	48
9	PPPK Paruh Waktu	60
10	PJLP	26
JUMLAH		**180**

Sumber : BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.5. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar dapat dilihat pada tabel IV.25 berikut :

Tabel IV.25
Realisasi Pencapaian SPM BPBD
Kota Makassar Tahun 2025

KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN						
NO	**INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM**		**INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT**			**TOTAL PENCAPAIAN**
1	2		3			4
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN					**100%**
1.	**Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)**					**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)					80.00%
			Jumlah Total yang Harus dilayani	Jumlah Total yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	

	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	**Orang**	**451.191**	**451.191**	**0**	**100.00%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		(20%)			20.00%
	B.Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/Terpenuhi	100%
	1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)					**100%**
	Ada : Sudah dibuat (Masa berlaku s.d. 2030)					
	a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100%
	b.Tersedianya Dokumen KRB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada dalam bentuk Kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100%
	Ada : Sudah dibuat Tahun 2024					
	a.Tersedianya Dokumen KRB yang telah dilegalkan minimal perkada dengan lampiran dalam bentuk kajian dan album peta	dokumen	1	1	0	100%
	b.Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	0	100%
	c.Tersedianya Berita Acara Asistensi yang ditandatangani BNPB (minmal 3)	dokumen	3	3	0	100%
	d.Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusunan KRB (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	2	2	0	100%
	e.Tersedianyan Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan	Orang	23	23	0	100%
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi Rawan Bencana					**100%**
	1. Sosialisasi Melalui Tatap Muka dengan Penduduk di Daerah Rawan Bencana					**100%**
	a.Tersedianya bahan paparan					100%

	dan/Alat Sosialisasi untuk pertemuan tatap muka (leaflet, booklet,pamphlet, dll sesuai dengan jumlah peserta)	Mutu ditutup				
	b. Terlaksananya sosialisasi tatap muka	desa	4	4	0	0%
	c. Tersedianya Narasumber/Fasilitator (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	0%
	d. Tersedianya Penyelenggara Sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	23	23	0	0%
	2. Sosialisasi Melalui Media Sosial dan Wahana Multimedia					**100%**
	a. Tersedianya Media social dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	media	5	5	0	100%
	b. Tersedianya materi media social dan wahana multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	buah	5	5	0	100%
	c. Tersedianya Perangkat keras dan perangkat lunak (sesuai dengan kebutuhan)	unit	5	5	0	100%
	d. Tersedianya perancang materi sosialisasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggara sosialisasi media social dan multimedia (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100%
	3. Penyediaan dan Pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik					**100%**
	a. Tersedianya Rambu Evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	buah	200	200	0	100%
	b. Tersedianya papan informasi public (sesuai dengan kebutuhan)	buah	10	10	0	100%
	c. Tersedianya Tim teknis (sesuai dengan kebutuhan)	orang	23	23	0	100%
	d. Tersedianya Tenaga Surveyor (sesuai dengan kebutuhan)	orang	10	10	0	100%
	e. Tersedianya Tenaga pendukung lainnya (sesuai dengan kebutuhan)	orang	95	95	0	100%
2.	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)					**80.00%**

			Jumlah Total yang Harus dilayani	**Jumlah Total yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI	**Orang**	**179.685**	**179.685**	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20%**
			Jumlah Mutu yang Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani/Terpenuhi	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani /Terpenuhi	
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa / SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi					**100%**
	1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana					**100%**
	Ada : Sudah dibuat (Masa berlaku s.d. 2020)					
	a.Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100%
	b.Tersedianya Dokumen RPB yang siap untuk dilegalkan sebagai lampiran perkada	dokumen	1	1	0	100%
	Ada : Sudah dibuat Tahun 2024					
	a. Tersedianya Dokumen RPB yang telah dilegalkan dalam bentuk perkada	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2)	dokumen	2	2	0	100%
	c. Tersedianya Berita Acara Asistensi BNPB (minmal 2)	dokumen	2	2	0	100%
	d. Tersedianya Tenaga ahli/personil penyusun RPB (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%
	e. Tersedianya Penyelenggaraan Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan	orang	23	23	0	100%
	2. Pembuatan Rencana Kontjensi (REKON)					**100%**
	a. Tersedianya Dokumen Rencan Kontijensi (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Berita Acara Diskusi Publik (minimal 2 setia penyusunan RENKON)	dokumen	2	2	0	100%

	c. Tersedianya Personil penyusun Renkon (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%
	d. Tersedianya Penyelenggara Diskusi Publik (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100%
	3. Pelatihan, Pencengahan dan Mitigasi					**100%**
	Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Aparatur					**100%**
	a. Tersedianya perlengkapan sapras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	6	6	0	100%
	b. Tersedianya materi Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	3	3	0	100%
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	buah	45	45	0	100%
	d. Tersedianya assessment sertifikat profesi bidang penanggulangan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	paket	45	45	0	100%
	e. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan kebutuhan)	orang	5	5	0	100%
	f. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	23	23	0	100%
	1 Pelatihan Penanggulangan Bencana bagi Warga Negara					**100%**
	a. Tersedianya perlengkapan sapras pelatihan (sesuai dengan kebutuhan	paket	1	1	0	100%
	b. Tersedianya materi Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	c. Tersedianya Sertifikat pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	**Mutu di tutup**				**100%**
	d. Tersedianya Instruktur dan Narasumber (sesuai dengan Kebutuhan)	orang	2	2	0	**100%**
	e. Tersedianya Penyelenggara Pelatihan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	23	23	0	**100%**
	4. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana					**100%**
	1. Simulasi Dalam Ruangan (Table-Top Exercise)					**100%**
	a.Tersedianya Dokumen Latihan table top exercise (sesuai	dokumen	1	1	0	**100%**

	dengan kebutuhan)					
	b. Tersedianya Sapras dan peralatan pendukung simulasi dalam ruangan/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	c. Tersedianya Penyelenggara simulasi dalam ruang/table top exercise (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	23	23	0	**100%**
	2. Gladi Lapang					**100%**
	a. Tersedianya Dokumen latihan Gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	**100%**
	b. Tersedianya sapras dan peralatan pendukung gladi lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	c. Tersedianya Penyelenggara gladi lapang (sesuai dengan kebutuhan)	orang	50	50	0	**100%**
	5. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana					**100%**
	1. Koordinasi Teknis Pemantapan Kesiapsiagaan terhadap Bencana					**100%**
	a. Tersedianya Layanan Pusdalops BPBD 24/7 (minimal jumlah hari dalam setahun	hari	365	365	0	**100%**
	b. Tersedianya Rapat Koordinasi teknis pemantapan kesiapsiagaan bencana (sesuai dengan kebutuhan)	pertemuan	10	10	0	**100%**
	c. Tersedianya Manajer Pusdalops (minimal 1)	Orang	1	1	0	**100%**
	d. Tersedianya Koordinator Tim Teknis Pusdalopds (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	3	3	0	**100%**
	e. Tersedianya Tim Teknis Pusdalpops (sesuai dengan kebutuhan)	Orang	9	9	0	**100%**
	2. Penyediaan Sarana Prasarana Operasional dan Kesiapsiagaan Bencana					**100%**
	a. Tersedianya Sapras TIK Pusdalops (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	**100%**
	b. Tersedianya Sapras					

	Komando dan monitoring utama (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	**100%**
	c. Tersedianya Sapras rapat pimpinan (sesuai dengan kebutuhan)	unit	1	1	0	**100%**
	d. Tersedianya Sapras istirahat petugas jaga Pusdalopds (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	**100%**
	3. Penyediaan Layanan Pesan singkat secara Broadcast					**100%**
	a.Tersedianya Peralatan teknologi informasi dan komunikasi untuk layanan pesan singkat secara broadcast (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	b.Tersedianya operasional teknologi informasi komunikasi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	4. Penyediaan Sarana Prasarana berupa Alat Komunikasi dan Sistem Peringatan Dini Kebencanaan berbasis Masyarakat					**100%**
	a. Tersedianya peralatan penyebaran perintah evakuasi kepada masyarakat (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	b. Tersedianya alat komunikasi darurat bencana komunitas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	6 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana					**100%**
	a. Tersedianya Peralatan keselamtan petugas (sesuai dengan kebutuhan)	paket	140	140	0	**100%**
	b. Tersedianya Peralatan keselamatan keluarga (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	**100%**
	c. Tersedianya peralatan keselamatan individu/pribadi (sesuai dengan kebutuhan)	paket	140	140	0	**100%**
	d. Tersedianya Peralatan korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	unit	300	300	0	**100%**
3.	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**					**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMAAN LAYANAN DASAR (80%)					**80%**
			Jumlah	**Jumlah**	**Yang**	

			Total yang Harus dilayani	Total yang Terlayani	Belum Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI		**6942**	**6942**	**0**	**100%**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					**20.00%**
	B. Jumlah Mutu (Barang / Jasa/ SDM) Yang Harus Dilayani/Dipenuhi		Jumlah Mutu yang Harus Dilayani/ Dipenuhi	Jumlah Mutu yang Terlayani	Jumlah Mutu yang Belum Terlayani/Terpenuhi	100%
	Kejadian Bencana					
	1 . Respon Cepat Darurat bencana					**100%**
	a. Tersusunnya laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Tim Kaji Cepat atau TRC yang diaktifkan (sesuai dengan kebutuhan kejadiaan bencana)	orang	4	4	0	100%
	arian, Pertolongan dan Evakuasi Korban bencana					**100%**
	a.Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100%
	b.Tersedianya Sarana dan Prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100%
	c.Tersedianya Sarana dan Prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100%
	d.Tersedianya data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	e.Tersusunya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan	orang	147	147	0	100%

	kebutuhan)					
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100%
	Status Tanggap Darurat					
	1 . Respon Cepat Darurat bencana					**100%**
	a. Tersusunnya laporan kaji cepat (sesuai dengan kebutuhan kejadian bencana)	dokumen	1	1	0	100%
	b. Tersusunnya SK Penetapan status darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan kejaian bencana)	dokumen	1	1	0	100%
	2. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					**100%**
	a. Tersedianya Peralatan dan fasilitas posko penanganan Darurat Bencana/PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Paket	6	6	0	100%
	b. Tersedianya Dokumen Rencana Operasi (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	c. Tersusunnya Notulensi Rapat Evaluasi Harian (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	d. Tersusunnya laporan penanganan darurat bencana (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	e. Tersusunnya SK pengorganisasian Pos Komando PDB (sesuai dengan kebutuhan)	Dokumen	1	1	0	100%
	3. **Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana**					**100%**
	a. Tersedianya Peralatan komunikasi darurat lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	paket	1	1	0	100%
	b. Tersedianya Sarana dan Prasarana pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	6	6	0	100%

	c. Tersedianya Sarana dan Prasarana pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	unit	3	3	0	100%
	d. Tersedianya data operasi pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	e. Tersusunya Laporan operasi pertolongan, penyelamatan, evakuasi korban (sesuai dengan kebutuhan)	dokumen	1	1	0	100%
	f. Tersedianya Petugas pos lapangan (sesuai dengan kebutuhan)	orang	147	147	0	100%
	g. Tersedianya Operator sarana dan prasarana pertolongan dan evakuasi pembuatan jalur pertolongan dan evakuasi (sesuai dengan kebutuhan)	orang	2	2	0	100%
	h. Tersedianya Petugas pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (sesuai dengan kebutuhan)	orang	20	20	0	100%

Sumber : BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

4.5.6. Permasalahan dan Solusi

1. Permasalahan :

- Masih terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas sesuai kebutuhan
- Pemulihan ekonomi masyarakat rentan yang berada di kawasan rawan bencana
- Belum optimalnya pemanfaatan ruang terbuka hijau pada wilayah rawan bencana
- Belum optimalnya upaya pengurangan resiko bencana
- Studi kajian mitigasi bencana pesisir dan pulau-pulau masih perlu ditingkatkan
- Belum adanya data infrastruktur yang layak pakai
- Kurangnya sarana dan prasarana bencana pada lorong/wilayah padat penduduk
- Database data penduduk by name by address yang berada di daerah rawan bencana belum ada.

2. Solusi :

Menetapkan langkah-langkah strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen rencana strategis tahun 2025-2029 yaitu :

- Meningkatkan dukungan administrasi kegiatan yang berkualitas
- Menyusun rencana program dan anggaran yang berkualitas dan terkoordinasi
- Melakukan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana yang inovatif dan berkualitas
- Meningkatkan kapasitas SDM sesuai kebutuhan organisasi
- Meningkatkan sinergitas dan efektivitas kerjasama nasional dan internasional yang mampu mendukung keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

4.6. BIDANG URUSAN SOSIAL

4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar

Terdapat lima jenis layanan dasar bidang urusan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Makassar sesuai yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti, Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana tingkat kota.

4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Dalam penerapan dan pencapaian SPM Pemerintah Daerah mengacu kepada penerapan dan pencapaian SPM berdasarkan Permendagri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal telah menetapkan indikator sebagaimana pada tabel IV.26 berikut ini :

Tabel IV.26
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Makassar Tahun 2025

NO	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target RKPD Tahun 2025 (%)	Target SPM (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100	100

3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis diluar panti	Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/kota	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, Tahun 2025

4.6.3. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 yaitu sebesar Rp. 5.937.955.108,- dengan realisasi sebesar Rp. 4.540.117.558,- atau 76,45%.:

4.6.4. Dukungan Personil

Jumlah personil yang terlibat dalam penerapan bidang urusan sosial yaitu :

Tabel IV.27
Jumlah Dukungan Personil Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Makassar Tahun 2025

NO.	PERSONIL	JUMLAH	Laki-Laki	Perempuan
1.	**DINAS SOSIAL KOTA MAKASSAR**	**135 Orang**	**62 Orang**	**73 Orang**
1.1	**Aparatur Sipil Negara (ASN)**	**96 Orang**	**46 Orang**	**50 Orang**
-	Pembina Tk. I (IV/b)	2 Orang	1 Orang	1 Orang
-	Pembina (IV/a)	9 Orang	4 Orang	5 Orang
-	Penata Tk. I (III/d)	13 Orang	8 Orang	5 Orang
-	Penata (III/c)	6 Orang	1 Orang	5 Orang
-	Penata Muda Tk. I (III/b)	3 Orang	1 Orang	2 Orang
-	Penata Muda (III/a)	15 Orang	6 Orang	9 Orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	2 Orang	2 Orang	-
-	PPPK	46 Orang	23 Orang	23 Orang
1.2	**Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN)**	**39 Orang**		
-	Tenaga Kontrak	39 Orang	16 Orang	23 Orang
TOTAL		**135 Orang**		

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, Tahun 2025

4.6.5. Realisasi

Realisasi pencapaian SPM bidang urusan sosial dapat dilihat pada tabel IV.30 berikut :

Tabel IV.28
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial
Kota Makassar Tahun 2025

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM				100,00%
1	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti**				88,48%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**JumlahTotal Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	600	656	+56	**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**8,48**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**42,38**
	1 . Layanan data dan pengaduan	600	656	**263.00**	**56,17**
	2 . Penyediaan permakanan	45	58	**2.00**	**95,56**
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	45	58	**596.00**	**0,67**
	4 . Penyediaan sandang	58	58	**54.00**	**6,90**
	5 . Penyediaan alat bantu	15	15	**15.00**	**0,00**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	20	58	**12.00**	**40,00**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	20	20	**16.00**	**20,00**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	20	20	**10.00**	**50,00**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	20	20	**9.00**	**55,00**
	10 Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	20	**12.00**	**40,00**
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	**1.00**	**50,00**
	12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	**10.00**	**50,00**
	13 Layanan rujukan	30	30	**4.00**	**86,67**
2	**Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti**				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*100*	*100*	**0**	**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	100,00%
	1 . Layanan data dan pengaduan	100	106	**+6**	**100,00**
	2 . Penyediaan permakanan	100	106	**+6**	**100,00**
	3 . Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	100	106	**+6**	**100,00**
	4 . Penyediaan sandang	100	106	**+6**	**100,00**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	92	106	**+6**	**100,00**
	6 . Pemberian bimbingan fisik,	92	106	**+6**	**100,00**

	mental, spiritual dan sosial				
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	80	80	**0**	**100,00**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	48	48	**0**	**100,00**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	48	48	**0**	**100,00**
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	2	2	**0**	**100,00**
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100	106	**+6**	**100,00**
	12 Layanan rujukan	5	5	**0**	**100,00**
3	**Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti**				100,00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*35*	*35*	**0**	**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00**
	1 . Layanan data dan pengaduan	*35*	*35*	0	**100,00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	35	35	**0**	**100,00**
	3 . Penyediaan permakanan	*35*	*35*	0	**100,00**
	4 . Penyediaan sandang	35	35	**0**	**100,00**
	5 . Penyediaan alat bantu	10	10	**0**	**100,00**
	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	35	35	**0**	**100,00**
	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	35	35	**0**	**100,00**
	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	15	15	**0**	**100,00**
	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	13	13	**0**	**100,00**
	10 Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	10	10	**0**	**100,00**
	11 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	15	15	**0**	**100,00**
	12 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	15	23	**0**	**100,00**
	13 Layanan rujukan	10	10	**0**	**100,00**
4	**Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti**				**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*80*	*80*	**0**	**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00**

		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	**100,00**
	1 . Layanan data dan pengaduan	80	80	**0**	**100,00**
	2 . Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	80	80	**0**	**100,00**
	3 . Penyediaan permakanan	80	80	**0**	**100,00**
	4 . Penyediaan sandang	80	80	**0**	**100,00**
	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	80	80	**0**	**100,00**
	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	80	80	**0**	**100,00**
	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	80	80	**0**	**100,00**
	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	36	36	**0**	**100,00**
	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	20	20	**0**	**100,00**
	10 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	80	80	**0**	**100,00**
	11 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	61	61	**0**	**100,00**
	12 Layanan rujukan	1	7	**+6**	**100,00**
5	**Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota**				100,00%
	Terjadi/Tidak	Ya Terjadi Bencana			
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	**Jumlah Total Yang Harus Dilayani**	**Jumlah Total Yang Terlayani**	**Yang Belum Terlayani**	**80,00**
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	*5801*	*7019*	**+1.218**	**100,00**
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				**20,00**
		Jumlah yang harus dilayani	**Jumlah yang terlayani**	**Jumlah yang belum terlayani**	
	1 . Penyediaan permakanan	5801	7019	**+1218**	**100,00**
	2 . Penyediaan sandang	5801	7019	**+1218**	**100,00**
	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	5166	5166	**0**	**100,00**
	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	1031	1434	**+403**	**100,00**
	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	300	300	**0**	**100,00**

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, Tahun 2025

4.6.6. Permasalahan dan Solusi

a. Pengumpulan Data

Kendala :

1. Belum dilakukan pemutakhiran data pada data terpadu kesejahteraan social;
2. Data dan pengaduan yang masuk terkadang tidak lengkap dan sulit untuk dilengkapi.

Permasalahan :

1. Proses pengumpulan data masih berdasarkan hasil layanan kedaruratan;

2. Proses pengumpulan data untuk rehabilitasi sosial dasar belum terstruktur sehingga belum menghasilkan data yang siap untuk diintervensi.

Solusi :

Melakukan identifikasi data baik melalui DTKS maupun verifikasi dan validasi ke masyarakat.

b. Penghitungan Kebutuhan

Kendala :

1. Belum adanya data awal yang valid sehingga sulit melakukan penghitungan kebutuhan.

Permasalahan :

1. Akibat pengumpulan data yang belum andal, maka perhitungan kebutuhan juga belum menghasilkan nilai yang sesuai dengan kebutuhan dari PPKS/PMKS.

Solusi :

1. Melakukan pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan;

c. Perencanaan dan Penganggaran

Kendala :

1. Sulit menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan karena data yang memerlukan rehabilitasi sosial dasar belum ada.

Permasalahan :

1. Akibat perhitungan kebutuhan yang belum menghasilkan nilai yang sesuai kebutuhan maka ketika proses perencanaan dan penganggaran dinas sosial sulit untuk berargumentasi agar mendapatkan anggaran yang memadai.

Solusi :

Melakukan analisa kebutuhan dan jumlah orang yang membutuhkan untuk diajukan pada saat perencanaan dan penganggaran.

d. Pelaksanaan

Kendala : Pembagian tupoksi kerja yang belum dibuat secara spesifik sehingga pelaksanaan belum berjalan dengan efektif.

Permasalahan : Pelaksanaan penelusuran keluarga dapat dilaksanakan namun biasanya tumpang tindih dengan reunifikasi keluarga karena lebih seringnya penelusuran keluarga dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi saja.

Solusi : Membentuk tim kerja yang dituangkan dalam SK bersama dengan instrumen pelaksanaan kegiatannya.

4.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

4.7.1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pendidikan terdiri atas 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 26 (dua puluh enam) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.267.041.814.473,-** atau **87,25%** dari alokasi anggran sebesar **Rp.306.051.679.520,-** sebagaimana pada tabel IV.29 berikut :

Tabel IV.29
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Urusan Pendidikan
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
I	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**306.051.679.520**	**267.041.814.473**	**87,25**
1)	*PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)*	6.125.404.000	4.441.134.443	72,50
1.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan PAUD.	285.738.000	280.372.785	98,12
2.	Kordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.	202.915.000	189.852.946	93,56
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru.	113.474.600	0.00	0,00
4.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.	5.282.142.000	3.773.064.060	71,43
5.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD.	241.134.400	197.844.652	82,05
2)	*PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD)*	33.273.681.700	13.504.224.735	62,64
1.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	566.793.000	484.006.200	85,39
2.	Kordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.	179.169.000	155.042.047	86,53
3.	Pembangunan Ruang Kelas Baru.	8.692.355.800	241.254.400	2,78
4.	Rahabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah.	5.700.842.000	4.380.842.693	76,85
5.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.	3.122.688.600	0.00	0,00
6.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	7.516.107.500	7.369.787.275	98,05
7.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.	759.790.000	716.866.620	94,35
8.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Perserta Didik	6.623.655.800	54.453.500	0,82
9.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	112.280.000	101.972.000	90,82
3)	*PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)*	22.627.160.880	13.099.590.826	57,89
1.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.325.342.740	3.627.248.678	83,86
2.	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	616.355.000	561.308.961	91,07
3.	Koordinasi Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.	174.515.000	160.333.000	91,87
4.	Pembangunan Ruang Kelas Baru.	3.496.411.640	93.557.390	2,68
5.	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.325.342.740	3.627.248.678	83,86

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
6.	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik.	1.950.858.000	1.677.129.000	85,97
7.	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6.311.153.500	6.201.243.915	98,26
8.	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	684.990.000	649.323.480	94,79
9.	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Perserta Didik.	4.956.455.000	26.042.634	0,53
10.	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah.	111.080.000	103.403.768	93,09
4)	*PENDIDIKAN KESETARAAN PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN*	11.680.000	7.520.000	64,38
1.	Perhitungan dan Pemetaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.	5.840.000	3.760.000	64,38
2.	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan.	5.840.000	3.760.000	64,38
JUMLAH		**306.051.679.520**	**267.041.814.473**	**87,25**

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Makassar, Tahun 2025

4.7.2. BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan terdiri atas 2 (dua) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 18 (delapan belas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.57.534.558.694,-** atau **88,12%** dari alokasi anggran sebesar **Rp.65.292.640.303,-** sebagaimana pada tabel IV.30 berikut :

Tabel IV.30
Program dan Indakator Kinerja pada Dinas Kesehatan
Kota Makassar Tahun 2025

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1)	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	3.720.591.015	2.496.877.860	67,11
2.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	18.674.000	5.145.000	27,55
3.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	148.601.000	146.670.000	98,70
4.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan balita	97.504.000	78.540.000	80,55
5.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	1.620.239.460	1.305.688.764	80,59
6.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	89.248.000	72.180.500	80,55
7.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	21.900.000	21.900.000	100
8.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	8.095.000	7.994.500	98,76
9.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	7.899.000	7.681.000	97,24
10.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	457.597.600	347.931.428	76,03
11.	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	961.464.600	764.428.855	79,51
12.	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	280.990.000	138.941.452	49,45

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA				
1)	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**			
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
13.	Sub kegiatan pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	4.936.124.554	4.607.789.764	93,35
14.	Sub kegiatan pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	32.467.397.312	30.146.046.845	92,85
Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
15.	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	10.226.350.773	8.336.071.036	81,52
16.	Sub kegiatan operasional pelayanan puskesmas	9.200.479.989	8.556.343.249	93,00
2)	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan**			
Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				
17.	Sub kegiatan pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia kesehatan	172.055.000	110.306.012	64,11
Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
18.	Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota	857.429.000	384.022.429	44,79
JUMLAH		**65.292.640.303**	**57.534.558.694**	**88,12**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Makassar, Tahun 2025

4.7.3. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Pekerjaan Umum terdiri atas 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.39.015.693.943,00,-** atau **76,77%** dari alokasi anggran sebesar **Rp.50.821.591.619,00,-** sebagaimana pada tabel IV.31 berikut :

Tabel IV.31
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum
Kota Makassar Tahun 2025

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
I	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**25.914.209.260,00**	**19.484.969.037,00**	**75,19**
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.914.209.260,00	19.484.969.037,00	75,19
1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	128.899.000,00	68.586.300,00	53,21
1.2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	139.733.200,00	48.418.000,00	34,65
1.3	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	2.407.044.600,00	1.409.740.610,00	58,57
1.4	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	18.128.702.200,00	15.050.262.405,00	83,02
1.5	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.439.400.260,00	1.049.291.540,00	72,90
1.6	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	3.670.430.000,00	1.858.670.182,00	50,64
II	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**24.907.382.359,00**	**19.530.724.906,00**	**78,41**
2.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air	24.907.382.359,00	19.530.724.906,00	78,41

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE (%)
	Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.1	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	443.619.000,00	-	0,00
2.2	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	54.625.000,00	52.845.000,00	96,74
2.3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	7.401.604.399,00	6.008.628.788,00	81,18
2.4	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	37.323.600,00	36.004.000,00	96,46
2.5	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	72.330.000,00	58.327.500,00	80,64
2.6	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	1.729.850.900,00	1.163.641.685,00	67,27
2.7	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	110.789.600,00	92.638.600,00	83,62
2.8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.196.511.060,00	-	0,00
2.9	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	13.140.961.000,00	11.702.447.643,00	89,05
2.10	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	50.052.800,00	41.833.690,00	83,58
2.11	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	669.715.000,00	374.358.000,00	55,90
JUMLAH		**50.821.591.619,00**	**39.015.693.943,00**	**76,77**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar, Tahun 2025

4.7.4. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Perumahan Rakyat terdiri atas 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.957.922.654,-** atau **99%** dari alokasi anggran sebesar **Rp.1.986.327.000,-** sebagaimana pada tabel IV.32 berikut :

Tabel IV.32
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
I	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.986.327.000**	**1.957.922.654**	**99**
1)	*Pembangunan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota*	1.986.327.000	1.957.922.654	99
1.	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	17.286.000	17.231.500	100
2.	Pembangunan Rumah Khusus Beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.969.041.000	1.940.691.154	99
JUMLAH		**1.986.327.000**	**1.957.922.654**	**99**

Sumber : Dinas Perumahan Kota Makassar, Tahun 2025

4.7.5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Satuan Polisi Pamong Praja

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Satuan Pol.PP terdiri atas 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.1.898.583.485,-** atau **75,79%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.2.504.923.080,-** sebagaimana pada tabel IV.33 berikut :

Tabel IV.33
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sat.Pol.PP
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	%
I	**Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum**	**2.504.923.080**	**1.898.583.485**	**75,79**
1)	*Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*	2.504.923.080	1.898.583.485	75,79
1.	Peningkatan kapasitas SDM Satuan polisi pamong praja dan Satlinmas	1.555.848.040	1.023.427.425	65,77
2.	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah	18.680.000	9.960.250	53,32
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketentraman dan Ketertiban Umum	39.791.040	38.682.040	97,21
4.	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	890.604.000	826.513.770	92,80
JUMLAH		**2.504.923.080**	**1.898.583.485**	**75,79**

Sumber : Sat.Pol.PP Kota Makassar, Tahun 2025

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri atas 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.25.566.195.330,-** atau **91,60%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.27.911.232.900,-** sebagaimana pada tabel IV.34 berikut :

Tabel IV.34
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**27.911.232.900**	**25.566.195.330**	**91,60**
1	*Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*27.539.110.300*	*25.266.296.910*	*91,75*
	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.472.000	3.278.000	43,87

	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.279.456.800	16.638.121.334	91,02
	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	1.224.380.000	740.512.480	60,48
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	996.094.000	992.621.949	99,65
	Pengadaan Sarana dan Prasarana pencegahan,penanggulangan,kebakaran dan alat pelindung diri	7.031.707.500	6.891.763.147	98,01
2	*Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran*	*8.080.000*	*4.875.000*	*60,33*
	Penilaian Sarana Proteksi Kebakaran	8.080.000	4.875.000	60,33
3	*Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	*273,691,600*	*234.053.920*	*85,52*
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	273.691.600	234.053.920	85,52
4	*Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia*	*90.351.000*	*60.969.500*	*67,48*
	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	14.611.000	12.864.000	88,04
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	18.384.000	313.000	1,70
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	38.086.000	28.804.500	75,63
	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	19.270.000	18.988.000	98,54
JUMLAH		**27.911.232.900**	**25.566.195.330**	**91,60**

Sumber : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, Tahun 2025

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri atas 1 (satu) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.13.957.231.373,-** atau **92,62%** dari alokasi anggran sebesar **Rp.15.060.354.401,-** sebagaimana pada tabel IV.35 berikut :

Tabel IV.35
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada BPBD
Kota Makassar Tahun 2025

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	**15.060.354.401**	**13.957.231.373**	**92,62**
I	***Pelayanan Informasi Rawan Bencana***	***224.446.000***	***222.972.000***	***99,34***
1.	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100

No	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	24.446.000	22.972.000	93,97
II	***Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana***	***5.986.133.800***	***5.745.777.300***	***95,98***
1	Pengelolaan Resiko bencana kab/Kota	20.351.000	12.867.500	62,23
2	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap bencana Kab/Kota	583.200.000	576.090.000	98,78
3	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	249.561.000	239.928.000	96,14
4	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan kesiapsiaagaan bencana	59.395.000	48.575.000	81,78
5	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	1.333.692.800	1.329.939.500	99,72
6	Penyusunan Rencana Kontigensi Kabupaten/Kota	200.000.000	200.000.000	100
7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	3.375.633.000	3.188.323.300	94,45
8	Penyusunan Rencana Penanggulangan bencana Kab/Kota	55.851.000	50.000.000	89,52
9	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	108.450.000	100.045.000	92,26
III	***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***4.807.527.750***	***4.377.662.509***	***91,06***
1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Priorotas	17.175.000	11.857.500	69,04
2	Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	625.423.000	571.091.000	91,31
3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.553.809.250	1.518.158.799	97,70
4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.047.967.500	972.583.210	92,81
5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1.563.153.000	1.303.972.000	83,43
IV	***Penataan Sistem Dasar Penanggulan Bencana***	***4.042.246.851***	***3.610.819.564***	***89,33***
1	Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	4.042.246.851	3.610.819.564	89,33
JUMLAH		**15.060.354.401**	**13.957.231.373**	**92,62**

Sumber : BPBD Kota Makassar, Tahun 2025

4.7.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Sosial terdiri atas 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub Kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar **Rp.4.540.117.558,-** atau **76,45%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.5.937.955.108,-** sebagaimana pada tabel IV.36 berikut :

Tabel IV.36
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Sosial
Kota Makassar Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	**Program Rehabilitasi Sosial**	**3.901.699.008**	**3.076.430.630**	**78.84**
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	*3.901.699.008*	*3.076.430.630*	*78,84*
	Penyediaan Permakanan	376.202.226	376.202.226	100
	Penyediaan Sandang	93.760.000	75.823.545	80,86
	Penyediaan Alat Bantu	80.629.000	76.442.900	94,80
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	72.656.000	58.511.640	80,53
	Pemberian Bimbingan Fisik. Mental. Spiritual. dan Sosial	958.505.908	867.627.059	90,51
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	341.246.000	295.949.000	86,72
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan. Akta Kelahiran. Surat Nikah. dan Kartu Identitas Anak	2.718.000	2.629.640	96,74
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3.718.000	3.629.000	97,60
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	145.039.450	130.498.090	89,97
	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.395.460.650	1.184.987.250	84,91
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	2.318.000	2.229.000	96,16
	Pemberian Layanan Rujukan	406.000.000	1.900.000	0,46
2	**Program Penanganan Bencana**	**2.036.256.100**	**1.463.686.928**	**71,88**
	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*2.036.256.100*	*1.463.686.928*	*71,88*
	Penyediaan Makanan	1.454.577.600	1.002.670.446	68,93
	Penyediaan Sandang	173.181.600	139.279.072	80,42
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	114.647.600	95.707.800	83,47
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	259.596.800	212.800.400	81,97
	Pelayanan Dukungan Psikososial	34.252.500	13.218.500	38,59
JUMLAH		**5.937.955.108**	**4.540.117.558**	**76,45**

Sumber : Dinas Sosial Kota Makassar, Tahun 2025

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai rangkaian pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di seluruh aspek kehidupan masyarakat kota makassar selama kurun waktu tahun 2025 secara umum sudah dapat berjalan dengan lancar dan penuh harapan. Berdasarkan indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk penunjang urusan pemerintahan. Adapun kesimpulan dan saran dari Laporan Penyelenggraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kesimpulan :

Pelaksanaan indikator kinerja kunci hasil dan indikator kinerja kunci untuk fungsi penunjang urusan pemerintahan di Kota Makassar secara keseluruhan berjalan dengan baik, yang mana setiap Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara urusan wajib, urusan pilihan dan trantibumlinmas mampu menyelenggarakan kegiatan dan prioritas di tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah dengan baik.

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik di Kota Makassar dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan yang mampu mengakomodir semua kegiatan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.

Saran :

Pemerintah Pusat perlu melakukan fasilitas, supervisi dan monitoring dalam penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan di daerah sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal di tiap Organisasi Perangat Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan di Kota Makassar.

Peningkatan Sumber Daya Manusia di tiap Organisasi Perangkat Daerah lebih ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan sehingga mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan mampu menjawab setiap permasalahan di tiap-tiap satuan kerja penyelenggara urusan wajib dan urusan pilihan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Makassar Tahun 2025 ini kami sampaikan dan kami menyadari masih adanya beberapa kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu tanggapan, saran, maupun kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Akhirnya, dengan berserah diri kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa teriring do'a semoga kita semua selalu diberikan Hidayah dan Taufiq-Nya serta kekuatan dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan di Kota Makassar menuju Makassar Unggul, Inklusif, Aman dan Berelanjutan yang kita cintai bersama Amin Ya Rabbal Alamin.